

CARA PANDANG

Inspirasi Terkini!

Edisi Januari 2022

IMPLEMENTASI
HUKUM DAN HAM

BALIKHO POLITIK DAN
POPULARITAS

VARIAN BARU
VIRUS COVID-19



**BUNGA RAMPAI 2021:
MELIHAT INDONESIA DARI BERBAGAI PERSPEKTIF**

Mudahnya berinvestasi Reksa Dana melalui BNI Mobile Banking



#yaREKSADANAaja

BNI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Mulai kelola keuangan Anda dengan kemudahan investasi Reksa Dana melalui BNI Mobile Banking.
#yaREKSADANAaja



Segera unduh BNI Mobile Banking di Google Play dan App Store.

Step by Step Top Up Reksadana :

1. Buka aplikasi mobile banking.
2. Pilih BNI Mobile.
3. Input UserID dan MPIN anda.
4. Pilih menu Produk & Jasa lainnya.
5. Pilih menu Reksadana.
6. Baca Surat Pernyataan Nasabah.
7. Centang pada "saya setuju dengan syarat dan ketentuan diatas", dan klik lanjut.
8. Lakukan Top Up pembelian pada produk Reksadana yang diinginkan, dan klik lanjut.
9. Masukkan nominal yang ingin anda tambahkan, password transaksi anda, dan klik lanjut.
10. Anda akan mendapatkan notif "Transaksi sedang diproses".

Step by Step Cek Saldo Investasi:

1. Buka aplikasi Mobile Banking.
2. Pilih BNI Mobile.
3. Input UserID dan MPIN anda.
4. Pilih menu Rekeningku.
5. Masuk menu Investasi.
6. Anda akan mendapatkan halaman produk reksadana yang telah anda miliki.

Bagi Anda yang belum memiliki Reksa Dana, kunjungi Kantor Cabang BNI terdekat untuk melakukan pembelian.

Info lebih lanjut mengenai Reksa Dana klik <https://reksadana.ojk.go.id> atau <https://reksadanacommunity.com/video/> atau hubungi BNI Call 1500046.

1500046
BNI Call

Top Up Reksa Dana as simple as you swap the screen! #yaREKSADANAaja

DAFTAR ISI

POLITIK KEBANGSAAN

Implementasi Hukum dan HAM 4

Pejabat Negara Menjadi Rayap Di Negerinya Sendiri 6

Oligarki dan Sumbatan Suara Itu 8

Non-Litigasi Jalan Terbaik Penyelesaian Sengketa 9

Mendidik Anak Di Tengah Arus Modernisasi 11

Pilkada 2020, Antara Politik Dinasti Dan Kotak Kosong 13

Stop Diskriminasi 15

Merawat HMI, Indonesia Maju 16

Ayo Bersama Melawan Hoaks! 18

Pers, Kemanusiaan dan Kebebasan 20

Presiden Jokowi Dalam Kebencian Vs Penegakan Aturan 21

Menyemai Islam Transformatif 23

Tanda Keberhasilan Puasa Ramadan 25

Mahfud MD dan Ikatan Cinta 28

Kurban Tahun Ini, Ketaatan Manusia Benar-Benar Diuji 30

Pak Jokowi, Please, Jangan Bikin Kegaduhan Baru 32

Menjaga Aset Bangsa Paling Berharga 35

Gonta-Ganti Istilah Kebijakan 38

Baliho Politik dan Popularitas 40

Menjadi Bangsa yang Diperhitungkan 42

Setengah Hati Berantas Korupsi 44

Jangan Alergi Kritik 46

Selamat Datang Partai Rakyat 48

Yusril Ajukan Judicial Review, Elit Partai Demokrat Ketar-Ketir 49

Reshuffle Yang Sia-Sia 52

Ham Dan Keadilan 56

Menimbang Presidential Threshold 20% 58

Profesi Advokat 60

PENDIDIKAN

Pendidikan Karakter Solusi Dari Permasalahan Bangsa 62

Peduli Pendidikan Penyandang Disabilitas 63

Urgensi Pendidikan Islam dalam Pembentukan Akhlak Generasi Milenial 64

Pendidikan Islam Sebagai Tujuan Hidup 66

Merdeka Belajar di Tengah Pandemi 68

Meneguhkan Merdeka Belajar, Menuju Pendidikan Berkualitas 70

Humanisme Pendidikan dan Pendidik 72

PTM dan Semangat Bangkit dari Pandemi 73

Jalan Terjal Anies-Ganjar 76

Prestasi Mas Menteri 78

Tantangan Mas Menteri 80

Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Pendukung Kemandirian Siswa Tingkat Dasar 82

Sense Of Belonging Sebagai Kultur Sekolah; Sebuah Refleksi Hari Guru Nasional 84

Anies, Anak Guru yang Mengubah Guru 87

Guru, Sang Penentu Masa Depan 90

Bergerak dengan Hati Menuju Pendidikan Berkemajuan 92

Hari Guru; Bergerak Dan Berjuang Bersama 93

Selamat Hari Disabilitas Internasional 95

BERSAMA HADAPI COVID-19

Varian Baru Virus Covid-19 97

Inovasi Bisnis di Tengah Pandemi 99

Mengawal Program Vaksinasi Tanpa Korupsi 100

Merdeka Belajar Di Tengah Pandemi 102

Tantangan Kurikulum Kampus Merdeka Di Era Industri 4.0 104

Pendidikan Karakter di Masa Pandemi Covid-19 106

Polemik Vaksin Produksi Ala Indonesia 108

Suka-Duka Belajar Secara "Online" Saat Pandemi 110

Sesat Pikir Penerapan PPKM 113

PPKM Darurat Bukan Penjara Kota 115

"Beyond Help": Pandemi Covid-19 Di Tanah Air 117

Meniti Perpanjangan PPKM Level 4 119

Selamat Tinggal Zona Merah 121

Tetap Waspada Covid-19 Saat Pelonggaran PPKM 124

Produktif Selama PTM Tebatas 126

Omicron Datang, Jangan Cemas Tapi Selalu Waspada 128



Majalah Cara Pandang

Dewan Pembina: Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed, Faozan Amar

Pemimpin Perusahaan: Zulfikar Rachman **Penanggung Jawab:** Michael Malik, Mahmud Marhaba **Pemimpin Redaksi:** Nafik Muthohirin **Redaktur Pelaksana:** Amir Fiqi, Zainal Arifin **Redaktur:** Robby Firmansyah, Habibi Khasim, Ridwan **Desain Grafis:** Hengki, Soki Rahman Wardi, Taqi khana **IT:** Zulfikar Iskandar **Fotografer:** Robby Firmansyah, Jirga **Reporter:** Ika, Amir, Edi, Afi, Marshal, Malik, Ridwan, Zildan Syauqi **Sirkulasi:** Syifa Chairul Hidayat

Alamat Redaksi

Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87 Kota Bekasi 17147 Telp (021) 82760392 dan (021) 21383521
email: redaksi@carapandang.com

Majalah Cara Pandang menerima kiriman artikel opini dan rubrik-rubrik lainnya, tak terkecuali rubrik bahasa. Panjang tulisan mencapai 1.000-1.200 kata, spasi satu, times new roman, disertai pas foto terbaru, nama lembaga/institusi, alamat email, kontak person dan nomor rekening. Artikel dapat dikirim melalui alamat redaksi



IMPLEMENTASI HUKUM DAN HAM

Surya Agustina*

Hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol. Hukum juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk menegakkan dan mencari keadilan.

Maka itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum sehingga bisa di artikan hukum merupakan ketentuan atau

peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya.

Hukum mempunyai tujuan yang sifatnya universal seperti ketertiban, perdamaian, ketentraman, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, maka setiap perkara bisa diselesaikan melalui proses pengadilan

dengan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain bertujuan untuk mencegah, hukum juga bertujuan untuk menjaga agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri.

Secara garis besar hukum memiliki tujuan antara lain mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat; menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang, menjadi sarana dalam mewujudkan keadilan sosial secara lahir dan batin, memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat dan sebagai fungsi kritis.

Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu diingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi dan bahkan suatu Negara. Kasus tersebut akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum secara peradilan manusia.

Deklarasi atau perjanjian “Universal Declaration of Human Rights” telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU no 39 tahun 1999 tentang HAM. Semangat Undang-undang ini adalah untuk meninggikan harkat, martabat bangsa dengan harapan jauh dari pelanggaran. Karena sesungguhnya HAM tidak diperjual-belikan, dan tidak dapat membatasi orang lain di luar koridor hukum yang berlaku.

Sesuai pasal 1 UU 39/99 tentang HAM; menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Implementasi hukum dan Hak Asasi Manusia melalui media massa di Indonesia, banyak sekali terjadi kasus

pelanggaran HAM, padahal Indonesia adalah negara hukum dan telah mempunyai peraturan sendiri, yang berkenaan dengan HAM.

HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya bahwa HAM adalah menjadi jaminan filsafat yang kuat dari filsafat bangsa. Beberapa instrument HAM yang ada di Indonesia antara lain yaitu : Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan instrumentnya yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. HAM dapat meliputi hak-hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama dan kebebasan bergerak. Hak-hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.

Namun seperti kita ketahui bersama, pelaksanaannya masih jauh dari apa yang diharapkan oleh semua rakyat Indonesia, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di negeri kita ini baik atas nama negara atau institusi tertentu. Namun apakah disengaja ataupun tidak, negara (dalam hal ini yaitu Komnas HAM) sepertinya sangat lamban untuk mengungkap dan mengupas secara detail banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi baik itu kasus yang disorot media ataupun tidak terlalu disorot.

Maka dari itu, pemerintah harus dengan sigap memberantas kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Selain memberantas, pemerintah juga bisa memberikan pengertian tentang pelanggaran HAM yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun.

Sejatinya manusia memiliki hak yang harus saling menghormati antar manusia dengan yang lain. Dengan begitu Indonesia akan lebih damai karena tidak adanya lagi kasus pelanggaran HAM. [**]

*) Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Malang



PEJABAT NEGARA MENJADI RAYAP DI NEGERINYA SENDIRI

Mahmuddin Muslim*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pejabat negara secara struktural ialah jabatan yang terdapat di struktur organisasi (komunitas) formal sehingga tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pejabat atau pegawai bersangkutan sudah diatur.

Sedangkan menurut C.F. Strong ia mengartikan pemerintahan dalam artian luas, yang diartikan sebagai organisasi negara yang utuh dengan segala alat kelengkapan negara yang memiliki fungsi legislative, eksekutif dan yudikatif. Kemudian menurut Bagir Manan, jabatan adalah lingkungan kerja tetap yang

bersifat abstrak dengan fungsi tertentu, yang secara keseluruhan mencerminkan kerja organisasi.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bagir Manan mengenai definisi dari pejabat negara, hal tersebut juga dipertegas dalam Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang ASN, terkhusus dalam pasal 6 UU ASN menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara terdiri dari dua jenis, yakni pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pada saat ini kita telah mengetahui bahwa sekarang banyak sekali kasus-kasus korupsi yang dilakukan

oleh pejabat yang merugikan negara. Terutama pada tahun 2020 ini, menurut ICW sebagaimana yang dikutip Kompas terdapat 169 kasus korupsi yang disidik penegak hukum, 139 diantaranya merupakan kasus korupsi baru. Kemudian 23 pengembangan kasus dan 23 lainnya adalah operasi tangkap tangan. Total tersangka yang di tangkap sebanyak 372 orang, yang menyebabkan kerugian Negara sebesar 18,1 triliun.

Adapun kebijakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan pada tahun 2020 yang merugikan para masyarakat, yang lebih kita kenal dengan kebijakan Omnibus Law. Dalam hal tersebut, membuat hati kecil dalam diri kita bertanya-tanya? tentang apa yang mendasari mereka untuk melakukan hal yang merugikan orang lain bahkan merugikan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya.

Atas dasar ekonomi, keinginan memperkaya dirinya atau demi kepentingan kelompoknya kita mungkin tidak tahu, bahkan tidak tahu sama sekali. Mereka rela menjadi “maling” di negrinya sendiri, yang tidak memiliki rasa kemanusiaan sama sekali. Bahkan mereka hanya memberikan sebuah iming-iming yang sekedar manis dibibir tapi pahit direalitasnya. Demi apa? Mungkin demi mendapatkan kedudukan yang dinginkannya, atau demi tujuan tertentu untuk dirinya sendiri.

Hilangnya hati nurani

Pada dasarnya, setiap manusia pasti memiliki hati nurani dalam dirinya yang selalu cenderung kepada kebenaran. Artinya bahwa setiap manusia dalam melakukan tindakannya selalu diiringi dengan sifat fitrahnya yang selalu mengarah kepada kebenaran, sehingga apabila perbuatan tersebut jauh dari kata benar maka manusia tidak akan melakukan tindakan tersebut.

Tapi nyatanya, nurani di zaman sekarang ini perlahan mulai dikesampingkan eksistensinya oleh oknum pejabat negara, dengan tujuan menyelesaikan masalah perut diri sendiri atau kepentingan kelompok. Oleh karena itu, Korupsi adalah bentuk tindakan dari sebuah jawaban demi memenuhi kepentingan mereka. Padahal dalam melakukan tindakan tersebut, mereka sadar bahwa barang itu bukanlah hak milik mereka.

Hal demikian semakin menegaskan seakan nurani itu hanyalah sebuah poster jalanan, sekedar menarik simpati biar menyakikan agar rencananya dapat berjalan sesuai keinginannya.

Dasar negara Indonesia yakni Pancasila yang di

dalamnya memiliki substansi yang menyatakan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” hanya sebuah kata tanpa bukti yang jelas dan konkrit, apabila kita lihat kondisi saat ini dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin tertindas, maka kalimat yang terdapat pada sila kelima Pancasila tidaklah salah apabila diubah banyak kalangan masyarakat menjadi “keadilan sosial hanya untuk orang kaya”.

Di saat ini Keadilan bagi masyarakat nampak tidak ada lagi, mungkin kata “keadilan” itu ada dan diakui keberadaannya hanya untuk segelintir orang, yakni orang-orang kaya yang memiliki sumber daya untuk memainkan keadilan demi keuntungan individu atau kelompoknya. Membuat kebijakan tetapi seolah-olah kebijakan tersebut bertujuan untuk kepentingan mereka pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat.

Sungguh sulit untuk memahami keinginan dan tindakan yang mereka lakukan saat ini bagi masyarakat tertindas seperti kita, ingin ku tangisi namun tak pantas. Apa yang mereka lakukan, kita cuman bisa mengikuti, suara yang mewakili rakyatnya kini tak lagi dihiraukan. Hanya sekedar didengarkan namun tidak ada lagi bukti untuk menindak lanjuti.

Ingin rasanya penulis menyalahkan, tetapi tidak tahu menyalahkan kepada siapa? Sedangkan kita hanya kaum tertindas yang tidak memiliki sumber daya untuk menegakan keadilan, jangankan untuk menegakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengisi perut pun belum tentu terjamin untuk setiap harinya.

Sebagaimana penjelasan yang dipaparkan oleh penulis di atas, itulah yang penulis maksud dengan pejabat seperti rayap di negerinya sendiri yang selalu mengambil keuntungan sendiri (korupsi) dari jabatan yang telah diamanahkan. Sejauh mata memandang, penulis berasumsi bahwa hal tersebut didasarkan karena pejabat negara telah menganggap hal korupsi adalah suatu hal yang biasa, sehingga menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaan yang membuat kita telah terbiasa pula hingga menjalar kepada generasi selanjutnya.

Hanya satu pesan yang bisa penulis sampaikan sebagai wakil bagi orang tertindas, tumbangkan kebiasaan buruk, junjung kebenaran maka tegaklah keadilan. Seperti sebuah pepatah yang mengatakan bahwa, “kebiasaan itu belum tentu benar namun kebenaran harusnya dibiasakan”. [**]

*) PP Baitul Muslimin Indonesia



OLIGARKI DAN SUMBATAN SUARA ITU

Mungkinkah demokrasi secara langsung tetap dilakukan di masa kini? Hal yang pernah terjadi di Yunani pada masa dahulu tersebut, untuk kemudian seiring perkembangan zaman, dimodifikasi dengan adanya perwakilan.

Perwakilan dapat muncul di eksekutif, legislatif, dan semangat yudikatif pun menghadirkan rasa keadilan untuk rakyat. Namun, timbul pertanyaan bagaimanakah kiranya jika para wakil rakyat tersebut berada pada resonansi yang berbeda dengan rakyat?

Oligarki di antaranya. Bagaimana kekuasaan berada di segelintir orang. Oligarki ini pun dapat bak parasit yang menumpang di kendaraan besar bernama demokrasi. Demokrasi yang sekadar prosedural, namun tidak secara substansi.

Sumbatan suara pun dapat terjadi, bagaimana kualitas produk dari para wakil rakyat tersebut yang lebih condong menguntungkan oligarkinya. Kebijakan publik menjadi bancakan untuk keuntungan para oligarki. Politik rente, ekonomi rente, merupakan sederet imbas dari bercokol dan digdayanya oligarki.

Lalu media sosial diharapkan juga sebagai suara orisinal, suara dari rakyat 4.0. Namun, celakanya para oligarki pun dengan sumber daya yang dimiliki

dapat memanipulasi, mengemas pesan. Mereka yang menentang oligarki pun dapat dikategorikan sebagai pengganggu pembangunanisme. Doxing, “kill the messenger” dengan ragam serangan personal yang menyerang pribadi pun dapat terjadi.

Celakanya lagi apa yang terjadi di konteks dunia, negara, pun dapat merembes ke lingkup yang lebih mikro. Bagaimana oligarki dalam berbagai skala terjadi. Maka cita-cita demokrasi, demokrasi secara substansial pun mendapatkan resistensi berlapis.

Oligarki dan sumbatan suara, dapat memicu pembangkangan dan penolakan. Demonstrasi di jalanan di antaranya. Dalam struktur ilmu sosial, dapat dilihat sebagai upaya menyuarakan kepentingan yang mungkin tidak terwakili oleh para wakil rakyat.

Penolakan pun dapat muncul dengan kesinisan dan keengganan menanggapi serius pesan-pesan dari para oligarki. Penolakan ini dapat terlihat senyap, namun memiliki daya ledak yang siap membuncah. Manakala berbagai variabel bertemu, dan menjadi eksplosi kekesalan, kekecewaan terhadap oligarki. Kita sudah pernah mengalami atau membaca hal tersebut dalam tarikh sejarah.

NON-LITIGASI JALAN TERBAIK PENYELESAIAN SENGKETA

Lutfi Muktar*

Sengketa merupakan hal yang lumrah terjadi di masyarakat. Sebab hal yang tidak bisa dipungkiri sebagai makhluk sosial akan terjadi gesekan baik berupa interaksi, sikap dan lengahnya tanggung jawab. Sehingga akan lahir problem sosial berupa cekcok, sengketa hak milik dan problem-problem lainnya.

Seiring dengan adanya problem tersebut, banyak cara dan jalan dalam penyelesaiannya. Tergantung bagaimana problem itu terjadi dan kapasitas sengketa itu sendiri. Ibarat penyakit, tidak ada yang tidak memiliki obat atau cara penyembuhan. Tinggal bagaimana sikap dan tanggung jawab manusia dalam mencari jalan keluar sebuah permasalahan atau sengketa.

Diantara banyaknya penyelesaian sengketa adalah melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Kedua cara tersebut jelas memiliki perbedaan baik dalam eksekusi maupun sangsinya. Sehubungan dengan hal ini litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau jalur hukum yang berlaku. Sedangkan non-litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi atau di luar jalur pengadilan merupakan suatu hal yang diakui di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan " Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan" .

Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan " Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,

mediasi, atau penilaian para ahli."

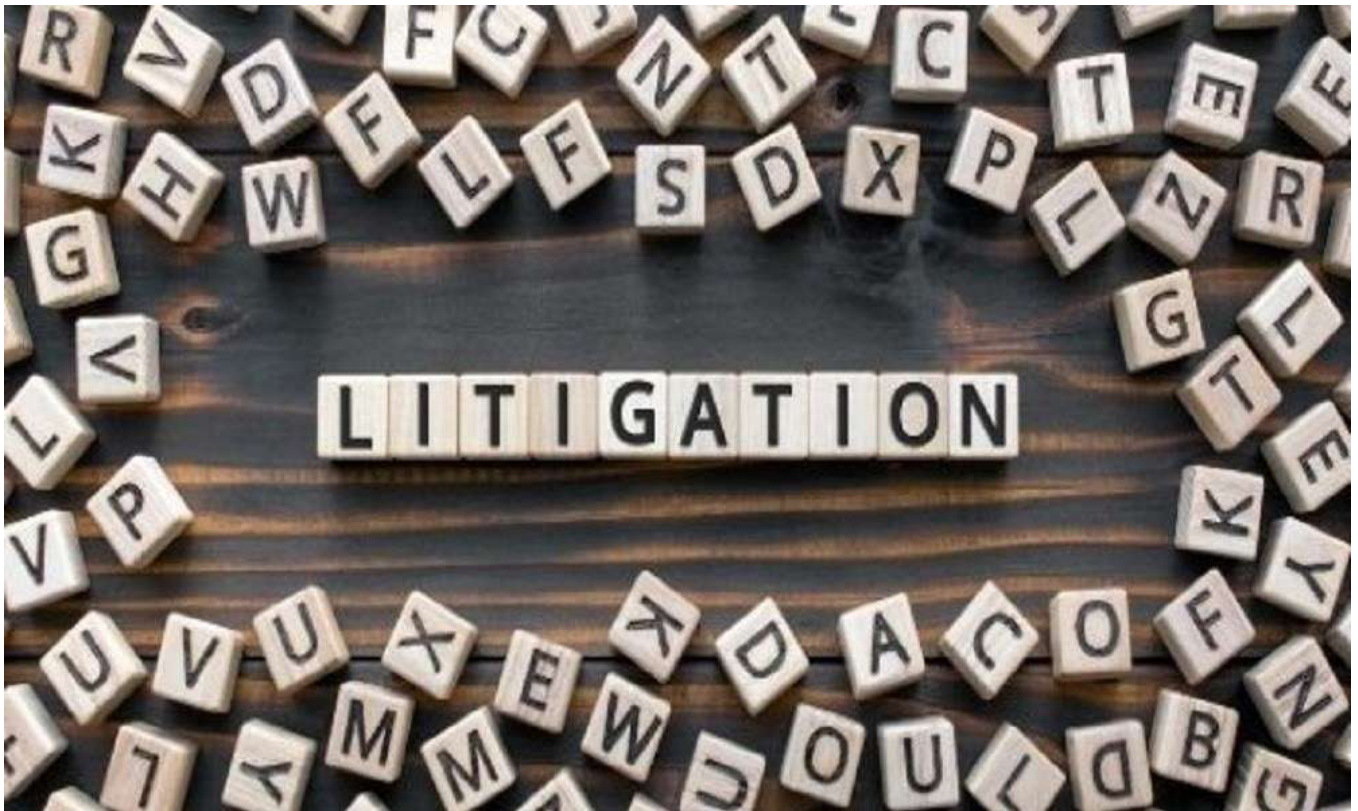
Dalam hal ini jelas bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan perbuatan yang legal dan diakui. Sehingga bukan merupakan perbuatan tercela apalagi hina. Teori ini juga dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Ibarat kata yang pas untuk dituangkan dalam konteks ini "Jika ada yang mudah mengapa harus mencari yang sulit?"

Dampak yang akan dihasilkan dengan cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) tertatanya kondisi sosial yang tetap harmonis, baik dan terjaga. Sehingga hasil dari jalur ini adalah win-win solution tidak ada pihak yang dikalahkan melainkan semua pihak menang dan hasil keputusannya jelas dan tidak merugikan pihak manapun.

Terjaganya tatanan sosial pascabersengketa, juga merupakan sebuah hasil yang dilahirkan oleh para pihak yang menempuh jalur non-litigasi dalam penyelesaian sengketa. Sebab jalur ini mengajarkan para pihak agar menjadi orang yang tidak mudah mencari celah orang lain, melainkan mendidik agar mencari celah diri sendiri dan introspeksi akan segala tingkah diri.

Selain itu juga memudahkan para pihak dalam prosesnya. Sebab walaupun dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau ditempuh dengan jalur hukum di pengadilan. Pengadilan sejauh ini belum bisa merealisasikan asas dan jargonnya yaitu proses cepat dan biaya ringan. Dalam praktiknya jauh dari hal tersebut.

Contoh konkret saja, kasus yang sedang viral saat ini. Yaitu video syur yang diduga dilakukan oleh salah satu artis nasional. Sejatinnya kasus itu tidak akan terbelit-belit jika ada upaya non-litigasi. Misal, yang bersangkutan memberikan pernyataan sesuai fakta dan menemui si pelapor untuk diselesaikan. Sebab akan bisa diketahui motif pelapor dalam kasus tersebut. Sehingga tidak beruntun panjang dan nama terkait tetap exis di



dunia entertainmen tanah air.

Selanjutnya dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi tidak memerlukan adanya advokat atau pengacara sebagai garda terdepan dalam pihak tertentu. Melainkan hanya butuh satu orang sebagai orang ketiga atau sebagai penengah yang disebut dengan mediator. Dimana tugas mediator adalah adil dan konsisten menengahi kasus tersebut.

Hal inilah yang kemudian menjadi dasar utama dalam proses penyelesaian sengketa dengan cara yang ma'ruf dan baik, juga tidak membutuhkan proses yang berbelit-belit serta mengajarkan para pihak menjadi diri yang dewasa dan mengambil hikmah dari setiap masalah yang dihadapinya tanpa mengedepankan ego sebagai kontrol dari masalah tersebut.

Penting sekali dijadikan sebuah pembelajaran baru dalam hidup. Bahwa terkadang kesalahan yang kita buat kepada orang lain kita lemparkan begitu saja seakan orang lain yang salah. Merasa diri hendak menang dan disanjung, "saya dilawan, kalahkan jadinya" pernyataan itu banyak tersaji dan keluar dari seseorang yang tidak memiliki nilai rendah hati.

Sebesar apapun masalah yang dihadapi hendaknya diselesaikan dengan kepala dingin dan tidak tersulut emosi yang lebih. Sehingga hasil dari putusan akhir adalah tetap terjaganya sosial yang tidak bisa manusia hilangkan sebagai makhluk yang saling membutuhkan dan saling erat dalam kehidupan sehari-hari.

Terakhir, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau menempuh jalur hukum di pengadilan juga diperlukan. Bukan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Melainkan tetap mencari benang merah dan kebenaran yang diharapkan. Sehingga jika hal itu yang dijadikan dasar utama, hasil akhir yang diperoleh adalah pendewasaan para pihak.

Semoga kita semua termasuk sebagai orang-orang yang memiliki sifat dewasa dalam menyelesaikan masalah. Dan sesuai serta sejalan dengan aqidah yang diyakini sebagai hujah sehingga cara yang diberikan dalam penyelesaian sengketa tersebut senada dengan agama dan memiliki nilai yang kuat untuk dijadikan sebuah pembelajaran dari masalah tersebut. [**]

*) Penulis merupakan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam FAI UMM dan Aktivis IMM Tamaddun FAI UMM

MENDIDIK ANAK DI TENGAH ARUS MODERNISASI

Muhammad Reynaldhi Wicaksono*

Kejahatan asusila telah banyak meresahkan warga, khususnya kaum hawa yang rentan mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Banyak kasus tindak kejahatan asusila telah terjadi disekitar kita, baik yang kita ketahui, maupun yang tidak ketahui. Motif yang berbeda-beda di setiap kasus tindak asusila, membuat rumit penyelesaian penyakit masyarakat ini. Masalah keluarga, masalah ekonomi, dan masalah lainnya, bisa menjadi faktor kejahatan asusila yang terjadi dalam masyarakat.

Kasus demi kasus terjadi secara berurutan, korban demi korban berjatuh, namun, keadilan tidak bisa ditegakkan secara terbuka, sehingga para korban merasa terintimidasi untuk membela diri mereka sendiri. Para korban yang merasa tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menyuarkan keadilan, membuat sebagian dari mereka mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidup.

Tingginya tingkat kejahatan asusila, membuat kita harus selalu waspada, dimana saja kita berada dan kapan saja, karena tindak kejahatan tidak mengenal tempat dan waktu, ketika ada kesempatan untuk melakukan, maka kejahatan akan leluasa terjadi.

Memahami tindakan asusila

Kejahatan asusila tidak hanya memandang satu gender saja sekarang, namun, juga bisa terjadi kepada pria atau wanita. Seperti kasus pemerkosaan, fetish, penyodoman, pedofil, dan sejenisnya, membuat kita harus semakin berhati-hati dan selalu waspada, baik dengan orang yang telah kita kenal maupun belum kita

kenal sebelumnya. Karena kita tidak bisa memahami kepribadian seseorang secara mendalam dan apa yang orang lain pikirkan atau rasakan pada dirinya sendiri. Banyak kasus asusila terjadi dengan orang terdekat, tanpa kita sadari bahwa yang terdekat bisa menjadi serigala bertopeng, yang siap menerkam kapan saja kita lengah.

Kejahatan asusila telah mempengaruhi banyak kalangan, dari orang tua hingga anak di bawah umur. Mereka yang menjadi pelaku kejahatan asusila, kebanyakan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, pergaulan bebas, serta lemahnya pengawasan dari orang-orang terdekat mereka.

Kejahatan asusila yang meluas tanpa pandang bulu, seharusnya menjadi perhatian khusus masyarakat agar bisa lebih memperhatikan keamanan satu sama lain. Kesadaran tentang sex education dalam masyarakat, seharusnya bisa lebih ditingkatkan lagi, agar masyarakat bisa memahami tentang bahaya kejahatan asusila sejak dini. Para pelaku kejahatan asusila hendaknya diberikan sanksi dengan cara rehabilitasi, karna kejahatan asusila ada kaitannya dengan kesehatan mental. Sehingga, mereka dapat diberikan arahan agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

Arahan demi arahan harus diberikan kepada para pelaku kejahatan asusila, perlahan namun pasti dengan metode yang tepat. Sehingga, para pelaku dapat secara perlahan mengubah kebiasaan mereka, agar mampu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kejahatan asusila memang membuat resah masyarakat, walaupun demikian, ternyata masih banyak yang belum memahami



pentingnya sosialisasi mengenai beragamnya tindakan-tindakan asusila yang sering terjadi di masyarakat.

Hati-hati menggunakan gadget

Hadirnya gadget di kalangan anak muda, membuat dampak yang sangat besar, meski tak hanya dampak positif yang kita rasakan, namun, tak sedikit pula dampak buruk yang lahir dari tindakan-tindakan para remaja. Benda kecil yang mampu mengakses apa aja membuat remaja cenderung kecanduan dan semakin menggali rasa penasaran mereka dalam penggunaan gadget, tanpa pengawasan ketat dari orang tua.

Seringkali kita mendengar alasan, jika gadget adalah sumber pengetahuan, sebab memang apa saja disana mudah dicari, sehingga, banyak orang tua yang merasa tenang jika anaknya di rumah disuguhkan dengan fasilitas gadget seperti itu. Namun, sadarkah kita, ternyata hal sia-sia yang kita realisasikan dalam kehidupan tentang pengetahuan seringkali gagal, atau tidak berjalan lancar dikarenakan kita belum mampu menempatkan metode yang baik dan benar untuk masa sekarang, masa dimana serba teknologi, dan pengaruh ada dimana-mana. Tak jarang, kita temui anak-anak yang belum bisa menempatkan perbuatannya dengan baik, keluar dari norma agama dan negara. Bisa jadi, kecerobohan kita sebagai pendidik dan orang tua dalam memberikan arahan kepada anak atau pelajar mengenai pemanfaatan kemajuan teknologi.

Sudah berapa banyak kasus pelecehan seksual yang dilakukan anak di bawah umur, dan kasus-kasus melanggar norma lainnya yang memakan korban anak

sekolah, bahkan kebanyakan dari mereka melakukan tindakan seperti itu sebab dari kebiasaan buruk mereka yang timbul dari lingkungan pertemanan dan keluarga yang begitu acuh mengenai hidup mereka.

Memang, arus modernisasi tak hanya berkutik seputar teknologi saja, namun, dalam kehidupan, banyak sekali pengaruh-pengaruh baru mengenai cara berteman, lingkungan pertemanan juga sangat mempengaruhi anak dalam cara bertindak dalam sehari-hari. Berawal dari tontonan dari media sosial, kemudian, dipraktikkan di kehidupan nyata, pengaruh dalam bentuk ini lumayan sulit untuk di hilangkan, sebab sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam lingkungan pertemanan remaja. Hal-hal yang baru saja di jelaskan, menandakan bahwasanya tidak cukup hanya bergantung kepada para lembaga sekolah saja.

Peran orang tua mengenai kesadaran mereka terhadap berkembangnya jaman, sudah seharusnya memberikan inovasi baru untuk mendidik anak-anaknya sebaik mungkin, agar ilmu-ilmu yang mereka peroleh di bangku sekolah mampu direalisasikan dengan baik dalam lingkup bermasyarakat. Banyak dari kita yang selalu mengandalkan para guru di sekolah, sedangkan, kita lupa, bahwasanya pengaruh buruk saat ini hadir dari berbagai sumber yang tidak hanya dalam lingkup sekolah, alangkah lebih baiknya, jika kita sebagai orang tua, memiliki metode lain sebagai pendamping untuk mendidik anak. [**]

*) Penulis merupakan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

PILKADA 2020, ANTARA POLITIK DINASTI DAN KOTAK KOSONG

Drs Pudjo Rahayu Risan, MSi*

Selamat datang 270 negarawan hasil Pilkada 2020, terdiri dari sembilan gubernur, 224 bupati dan 37 wali kota, masing-masing beserta para wakil. Negara membutuhkan anda semua putra terbaik bangsa yang dipilih atau dihindaki oleh rakyat lewat pemilihan langsung serentak, 9 Desember 2020. Jangan sia-siakan perjuangan yang berat dan keras serta mengeluarkan banyak dana merebut suara dari pemilihnya.

270 negarawan betul-betul ditunggu oleh masyarakat di daerahnya masing-masing untuk segera menangani, mengelola dan melindungi rakyatnya dari situasi yang kurang baik akibat pandemi Covid-19. Problematik yang kompleks, seperti aspek ekonomi, kesehatan, dan daya beli masyarakat yang menurun. Lupakanlah percik-percik demokrasi, disana-sini muncul konflik karena beda pilihan, pascapilkada semua bersatu untuk membangun negeri.

Politik dinasti

Memang Pilkada 2020 sangat menarik perhatian publik, diawali dengan istilah politik dinasti. Apakah salah politik dinasti? Kalau salah secara regulasi jelas tidak, karena tidak ada pasal yang melarang seseorang maju pada Pilkada sekalipun anak dari petahana. Anak dan menantu presiden, atau anak seorang menteri.

Pada konteks pro dan kontra politik dinasti, pemaknaan demokrasi menimbulkan dua pemahaman yang saling bertentangan, yaitu politik dinasti dinilai tidak bertentangan dengan demokrasi. Namun begitu, pada sisi lain kerap diasumsikan melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi.

Pertanyaannya, apakah politik dinasti mengebiri demokrasi? Apakah menggerus demokrasi? Sebagaimana kita pahami, politik dinasti sudah menggejala sejak lama. Hal ini akan semakin jelas pada era kerajaan yang memang kekuasaan diturunkan

turun temurun sebagaimana tradisi lama kerajaan di Indonesia.

Fenomena pemilihan kepala desa secara langsung, politik dinasti juga menjadi hal yang lumrah. Walau dipilih secara langsung, peranan ke-dinasti-an tetap berjalan, walaupun dengan proses demokrasi. Bahkan memasuki era reformasi yang mengubah memperoleh kekuasaan dengan demokrasi, pemilihan langsung, praktik politik dinasti benar-benar tidak bisa dihindari.

Menjawab pertanyaan apakah politik dinasti mengebiri demokrasi? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya mengebiri demokrasi karena praktik-praktik politik dinasti cenderung memengaruhi proses yang mestinya demokratis, menjadi tidak demokratis karena campur tangan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, kekuatan, pengaruh dan infrastruktur politik. Bungkusnya demokrasi tetapi isinya, tidak demokratis.

Dulu, jaman kerajaan menentukan pemimpin berdasarkan pewarisan ditunjuk langsung, sekarang mencari kepala daerah lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elite kekuasaan lewat institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Patrimonialistik dibungkus dengan jalur prosedural.

Ada pandangan politik dinasti jelas bertentangan dengan budaya demokrasi yang sedang berproses di Indonesia dan akan melemahkan demokrasi. Kenapa? Karena politik dinasti cenderung mengabaikan kompetensi dan rekam jejak. Ada kecenderungan rekam jejak atau jam terbang di dunia politik tidak menjadi halangan sepanjang menginduk dari ketokohan atau kepopuleran atau karena memiliki kekuasaan.

Maka ada ungkapan, menang tidak membanggakan, biasa-biasa saja, wajar, lumrah. Tapi kalau kalah mengganggu reputasi orang tuanya. Sinyalemen inilah yang menjadi spekulasi publik bahwa ada campur tangan kekuasaan. Baik langsung maupun tidak langsung.

Kotak kosong

Selain politik dinasti, fenomena calon tunggal juga menarik perhatian publik. Posisi calon tunggal berdasar regulasi harus berhadapan dengan kotak kosong. Walaupun jumlah kotak kosong hanya 25 dari 270, tetap menarik perhatian. Pilkada 2020 banyak calon kepala daerah khususnya petahana lawan kotak kosong.

Ada beberapa poin kerugian dengan diperbolehkan calon tunggal melawan kotak kosong. Poin pertama, lawan kotak kosong sangat merugikan untuk pendidikan politik bagi rakyat. Pertimbangannya rakyat hanya disuguhi satu paslon, dan tidak memberikan alternatif pilihan politik lain di masyarakat.

Poin kedua, pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong membuat kekuatan legitimasi calon yang menang tidak begitu kuat karena dengan sendirinya bisa membentuk koalisi besar (oversize), maka tidak ada lagi partai oposisi di daerah. Koalisi yang sangat besar dan bisa mengakibatkan nantinya tidak ada lagi komposisi partai oposisi di DPRD sebagai penyeimbang sekaligus fungsi kontrol. Itu karena semua partai bergabung menjadi satu dan menyokong petahana atau calon tunggal.

Poin ketiga, menggambarkan mekanisme kaderisasi partai politik tidak berjalan, karena ternyata tidak berani mengajukan calon, baik sendiri maupun gabungan partai politik. Kalkulasi politik ternyata lebih menguntungkan merapat kesatu kekuatan, biasanya dimiliki oleh petahana.

Tata kelola pemerintahan

270 pemenang Pilkada 2020 tugas negara dan pemerintahan sudah menunggu. Baik bagi yang akan memimpin untuk kedua kalinya maupun pendatang baru sebagai kepala daerah, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tidak bisa ditawarkan lagi.

Hal ini selaras dengan pendapat Ryaas Rasyid, mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi-fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Kepala daerah terpilih harus melayani, memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun.

Paling tidak ada tujuh bidang pelayanan.

Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan. Kedua, memelihara ketertiban

dan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.

Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan ke sektor kegiatan produktif dan semacamnya. Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, memelihara orang-orang cacat, jompo dan akan terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan. Menjaga dan mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah dan hutan. Pemerintah juga berkewajiban mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang mengutamakan keseimbangan antara eksploitasi dan reservasi.

Good governance

Kepala Daerah harus benar-benar merujuk tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut parameter Komisi Sosial dan Ekonomi Asia-Pasifik PBB, ciri utama tata kelola pemerintahan yang baik meliputi azas, yaitu partisipasi aktif, orientasi pada konsensus (consensus oriented), tanggung jawab/amanah, transparan, peka/tanggap, efektif dan efisien, adil dan inklusif, dan bekerja menurut aturan hukum.

Kesempatan bagi mereka yang dikategorikan menggunakan politik dinasti dan terpilih karena melawan kotak kosong untuk membuktikan bahwa mereka berkualitas dan amanah.

*) Penulis adalah pengamat kebijakan publik, fungsionaris Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Semarang, pengajar tidak tetap STIE Semarang dan STIE BPD Jawa Tengah. (Tulisan ini pernah terbit di situs Antara dengan judul "Selamat Datang Negarawan Hasil Pilkada 2020").

STOP DISKRIMINASI

Nurma Rosyiana Wardhani*

Diskriminasi merupakan sikap membedakan terhadap seseorang atau kelompok yang dilakukan secara sengaja. Perbedaan tersebut didasarkan karena suku, ras, agama, antar golongan, jenis kelamin, kepercayaan, kondisi fisik, aliran politik. Biasanya diskriminasi ini cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok yang minoritas.

Di Indonesia sendiri masih banyak orang yang memiliki sikap diskriminasi bahkan di sekolah pun banyak murid yang melakukan diskriminasi kepada temannya. Perbedaan warna kulit dan juga status sosial biasanya sering terjadi di sekolah. Mereka akan cenderung menjauhi teman yang berkulit gelap dan juga mereka akan menjauhi teman yang kurang berkecukupan.

Selain itu juga diskriminasi juga terjadi pada anak yang disabilitas dan juga pada siswa yang berbeda agama. Pada anak disabilitas mereka cenderung menyendiri karena biasanya hanya sedikit siswa yang mau berteman dengan anak penyandang disabilitas. Pada sekolah negeri mayoritas muridnya adalah beragama muslim dan yang beragama non muslim hanya minoritas mereka akan cenderung berkelompok sendiri.

Sangat miris jika sikap diskriminasi sudah terjadi di lingkungan sekolah karena sejatinya sekolah tempat untuk menuntut ilmu dan juga tempat untuk membentuk karakter siswa. Sudah seharusnya sejak di sekolah guru harus menekankan bahwa diskriminasi sangat dilarang dan juga membiasakan murid untuk tidak membedakan teman.

Selain di sekolah, diskriminasi juga banyak terjadi di masyarakat. Kepedulian masyarakat terhadap orang yang penyandang disabilitas di Indonesia masih sangat rendah. Mereka menganggap bahwa orang penyandang disabilitas adalah kelompok yang berbeda. Padahal orang penyandang disabilitas sebetulnya sama dengan kita hanya saja kita harus lebih peduli dengan kebutuhan mereka seperti membantu penyandang cacat pada kaki

atau tunanetra yang akan menyebrang jalan.

Diskriminasi pada orang yang berkulit gelap sering terjadi tidak hanya di sekolah namun di lingkungan masyarakat juga. Orang yang berkulit putih akan enggan bahkan tidak mau dekat dengan orang yang berkulit gelap. Bahkan dulu sempat terjadi rasisme di Surabaya dengan sebutan monyet. Padahal orang yang berkulit putih dan gelap itu sama saja dan sama-sama memiliki hak.

Banyak di Indonesia yang melakukan diskriminasi, yang tak kunjung berakhir hingga sekarang. Bahkan ada yang melakukan diskriminasi dengan kekerasan. Fenomena kekerasan beragama salah satunya, berbagai macam aksi kekerasan mereka lakukan terhadap kelompok tertentu dengan mengatasnamakan agama.

Pasti kita tidak akan pernah lupa konflik di Maluku pada tahun 1999 yang disebabkan karena ketidakstabilan politik dan ekonomi di Indonesia. Karena permasalahan politik tersebut menyangkut agama, dan perseteruan terjadi antara umat Islam dan Kristen. Pada konflik Maluku tersebut menelan banyak korban yakni 8000-9000 orang yang meninggal.

Sudah sangat banyak diskriminasi di Indonesia dan banyak juga korban korban yang meninggal akibat diskriminasi. Pemerintah harus jeli dalam menangani kasus diskriminasi ini jangan sampai orang-orang yang mendiskriminasi dibiarkan. Kepolisian harus menindak tegas dengan memberi sanksi yang berat bagi pelaku agar diskriminasi di Indonesia tidak ada lagi.

Sebagai rakyat Indonesia yang memiliki banyak keberagaman suku, budaya, ras yang seharusnya kita bersama-sama dengan hidup tentram tanpa adanya diskriminasi dan juga saling menghargai perbedaan. Seperti pada Pancasila yakni sila ke-2 kita diajarkan agar tidak diskriminatif terhadap orang lain atas dasar apapun karena sejatinya manusia itu diciptakan sama derajatnya di mata Tuhan. [**]

*) Penulis merupakan Mahasiswa Fakultas: Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

MERAWAT HMI, INDONESIA MAJU

R. Wijaya Dg Mappasomba*



Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) didirikan pada 5 Februari 1947 silam oleh Lafran Pane dan kawan-kawannya. Saat itu, Indonesia baru merdeka (1945) dan masih mempertahankan kemerdekaan dari gangguan negara Belanda dan sekutunya. Semangat Lafran Pane untuk mendirikan HMI demi menguatkan ajaran Islam pada mahasiswa dan menjaga kedaulatan Indonesia.

Saat ini, HMI memasuki usia yang ke-74, yang telah banyak berbuat demi Islam dan Indonesia. Sejarah awal berdirinya hingga kini, sebuah fakta bahwa HMI bisa melawati tiap era Presiden Indonesia dengan segala dinamikanya. Mulai dari Soekarno dengan Orde Lama nya, Soeharto dengan Orde Baru nya, BJ Habibie zaman reformasi, KH. Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan saat ini Joko Widodo.

Independensi HMI membuatnya dapat bertahan

karena mampu menjaga keislaman dan jiwa nasionalisme tetap terpatri dalam sanubari kader dan alumni HMI. Bukan tanpa sebab, Jenderal Besar TNI Soedirman pernah berpidato: HMI bukan saja Himpunan Mahasiswa Islam, tetapi HMI juga Harapan Masyarakat Indonesia.

Merawat HMI

Perkaderan dan perjuangan HMI sebagai bentuk keberlangsungan organisasi yang dilahirkan di Yogyakarta itu. Perkaderan berfungsi untuk memperkenalkan HMI, mengajarkan Islam, membentuk kader agar menjadi khalifah fil ardh (pemimpin di dunia), dan setiap kader ditempah untuk memiliki keyakinan demi mencapai tujuannya.

Bukan saja itu, perjuangan HMI diberbagai bidang tercatat dalam membantu Indonesia pada saat awal

kemerdekaan, membantu negara dalam menggalang dana demi korban bencana, memperjuangkan Islam, dan memperjuangkan hak-hak rakyat ke pemerintah. Perjuangan itu sebagai bentuk komitmen HMI dalam menganalisa setiap persoalan dan diaktualisasikan dalam bentuk gerakan.

Setiap langkah HMI tentunya memiliki warna yang berbeda dari zaman ke zaman. Lantaran tantangan dan kondisi yang sering membenturkan HMI pada pilihan independensinya. Sejarah telah membuktikan pada zaman Soekarno, HMI didesak untuk dibubarkan oleh PKI, namun PKI yang ditumpaskan oleh negara hingga menjadi organisasi terlarang. Belum lagi zaman Soeharto, yang saat ikut campur dalam urusan ideologi HMI. Namun semua itu, HMI mampu melewati meskipun dibawah tekanan dari berbagai pihak.

Di usia yang ke-74, HMI seyogyanya mampu lebih merapikan lagi organisasinya, memperkuat kaderisasi, mempertajam analisa, dan memperjuangkan hak-hak konstitusional rakyat Indonesia. Demikian itu merupakan bentuk merawat HMI demi melahirkan insan-insan yang memiliki integritas dalam mempersiapkan kader-kader yang unggul.

Indonesia Maju

Di era modern dan keterbukaan publik, Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di dunia Internasional. Salah satunya sebagai bukti konkrit, ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, pihaknya mampu membuat pelayanan cepat dan terbuka di setiap instansi. Dan itu pun diimplementasikan lagi dalam pemerintahan Jokowi saat ini selaku Presiden.

Kemajuan Indonesia, bukan saja andil dari pemerintah belaka. Namun ada civil society di dalamnya yang turut membantu pemerintah dalam mensukseskan

kinerjanya. Sebut saja ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Dewan Dakwah, dan lain sebagainya. Khusus untuk ormas kemahasiswaan ada HMI, PMII, IMM, GMNI, PMKRI, GMKI, dan lain sebagainya.

Di dalam pemerintahan Jokowi periode pertama, ada Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden yang nota bene alumni HMI dan lain sebagainya. Kemudian, di periode kedua, Presiden Jokowi juga tetap mempercayakan lagi alumni HMI untuk berkiprah di pemerintahan, ada Mahfud MD, Zainuddin Amali, Bahlil Lahadalia, dan lain sebagainya. Dan juga ada Bambang Soesatyo selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Hal itu membuktikan bahwa alumni HMI memiliki integritas dan komitmen kebangsaan demi terwujudnya Indonesia maju.

Meskipun alumni HMI sudah banyak dipercayakan oleh Presiden Jokowi untuk memajukan Indonesia, bukan berarti HMI sebagai organisasi independen tinggal diam. HMI tetap pada koridornya dalam melakukan langkah-langkah perjuangannya agar Indonesia sejahtera.

Untuk itu, HMI memiliki tanggung jawab dalam memajukan Indonesia seperti halnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia di awal sejarah berdirinya HMI. Bahkan tantangan Indonesia begitu kompleks, sehingga HMI sebagai agent of change dibutuhkan pemikiran dan gerakannya.

Pemikiran HMI sebagai kader umat dan bangsa, tentunya memiliki peran sentral dan strategis yang bisa ditawarkan ke pemerintah. Dan sikap kritis konstruktif HMI terhadap pemerintah dalam berbagai bidang sebagai langkah nyata dalam membantu negara.

Kemudian, gerakan HMI yang berkemajuan juga diperlukan dalam setiap dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah. Dan akhirnya, semoga HMI semakin jaya dan Indonesia maju.[*]

*) Penulis merupakan eks Sekretaris Umum HMI Cabang Jakarta

AYO BERSAMA MELAWAN HOAKS!

Amir Fiqi*

Jika dunia saat ini sedang sakit menghadapi pandemi COVID-19, hal yang sama terjadi juga di dunia maya yang sebenarnya juga tidak jauh dari kata “baik-baik saja.”

Saat raga terpenjara untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, para jiwa yang haus informasi dan komunikasi yang sejatinya dilakukan secara fisik, kini beralih ke virtual.

Platform digital seakan kedatangan tamu yang bermigrasi dari negeri analog. Pembicaraan publik kini lebih besar dilakukan di ruang digital, yang mengantarkan pada persoalan lain, yaitu hoaks.

Selain perang tak kasat mata secara fisik dengan virus corona, “gejatan senjata” secara virtual juga terpaksa dilakukan dengan hoaks.

Hal ini disadari betul oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mulai mendeteksi hoaks corona pada akhir Januari. Berdasarkan pantauan kementerian, sebaran hoaks terkait virus corona cenderung meningkat.

Kementerian Kominfo pada saat itu mengatakan menindaklanjuti temuan tersebut dengan memblokir konten-konten hoaks dan disinformasi yang berkaitan dengan corona.

Bahkan, Kementerian yang dipimpin oleh Johnny G Plate itu dengan tegas mengatakan menyatakan mereka akan menindak tegas orang-orang yang menyebarkan hoaks yang berkaitan dengan virus corona melalui kerja sama dengan kepolisian.

Upaya perang hoaks

Setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia, informasi seputar pandemi menjadi berlimpah ruah. Bak dua sisi mata uang, informasi tersebut bisa menjadi “makanan” yang menyehatkan, namun juga bisa menjadi racun berdampak buruk pada psikologis maupun perilaku masyarakat.

Melimpahnya pemberitaan seputar pandemi yang memunculkan kecemasan, frustrasi, bahkan berdampak pada “panic buying,” serta efek sosial yang tidak sekadar khawatir tapi justru malah berperilaku yang tidak

sejalan karena kecenderungan disinformasi.

Sementara itu dari 23 Januari hingga 3 Februari 2020, Kementerian Kominfo mencatat terdapat 54 hoaks mengenai virus corona yang beredar di media sosial maupun aplikasi pesan instan.

Setahun berselang, Kominfo tak henti berjuang. Terlebih, hoaks mengenai vaksin COVID-19 seakan menyerang. Dari pantauan di ruang digital, hingga 31 Januari 2021 Kominfo telah menemukan 1.396 isu hoaks COVID-19 dan 92 isu hoaks terkait vaksin COVID-19.

Isu hoaks vaksin tersebar dalam 2.209 konten di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube, “di mana 1.926 konten sudah diblokir. Sisanya dalam proses,” ujar Menteri Johnny dalam rapat bersama Komisi I DPR pada awal pekan ini, Senin (1/2).

Jauh sebelum corona melanda, Kementerian Kominfo sebenarnya telah memiliki senjata pendeteksi hoaks bernama Automatic Identification System (AIS).

AIS adalah mesin crawling konten negatif di internet yang diluncurkan sejak tahun 2018. Mesin AIS menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk secara cepat menentukan konten negatif.

Sebagai sistem pemantauan proaktif untuk penanganan konten internet bermuatan negatif, Mesin AIS bekerja dengan cara mengais (crawling) dan mengklasifikasi (jutaan) tautan yang terdeteksi mengandung konten negatif.

Tak hanya sistem, Kominfo juga memiliki tim AIS yang bekerja selama 24 jam dan terbagi atas tiga shift per harinya. Tugas pokok dari tim AIS ini mulai dari penerimaan dan pengelolaan laporan di platform Aduan Konten dari masyarakat dan instansi, analisa isu populer dan analisa tagar.

Hasil pemantauan akan ditindaklanjuti dengan penanganan berupa pemblokiran akses dan penonaktifan konten internet negatif, serta diteruskan ke instansi terkait.

Memahami betul bahwa serangan hoaks berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat, Menteri Kominfo Johnny G Plate, pada awal April telah mengambil langkah untuk menggandeng platform digital global, yaitu Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube, untuk

menindak hoaks.

Di Indonesia, YouTube meluncurkan panel informasi cek fakta yang bertujuan memberikan konteks yang mendampingi konten di platform. Tak main-main, Google juga mengumumkan hibah 800.000 dolar AS atau sekitar Rp11,7 miliar di Indonesia.

Hibah, yang dieksekusi oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), lembaga nirlaba MAARIF Institute, bersama agensi perubahan sosial Love Frenkie lewat program Tular Nalar, itu mendukung beragam program literasi media dan juga pelatihan digital dalam upaya memberantas hoaks dan misinformasi masyarakat Indonesia.

Kominfo juga telah gencar melakukan literasi digital kepada masyarakat bersama gerakan Siberkreasi. Tak berhenti di situ, Kementerian menggandeng Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) untuk terus berjuang melawan hoaks COVID-19.

“Kominfo bersama KPCPEN melakukan upaya penanganan hulu hilir mulai dari literasi kepada masyarakat terkait COVID-19 dan vaksin, pemberian klarifikasi terhadap hoaks, pembuatan kanal resmi dan terpercaya, dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk Polri untuk hukum dan penanganan hoaks,” ujar Menteri Johnny.

Langkah raksasa teknologi

Bukan hanya di Indonesia, hoaks seputar corona pun juga menyerang secara global.

Pada April, laporan dari organisasi nirlaba Avaaz mencatat 100 misinformasi terkait virus corona di Facebook yang dibagikan lebih dari 1,7 juta kali dan dilihat sekitar 117 juta kali.

Melihat data tersebut raksasa media sosial milik Mark Zuckerberg itu tak tinggal diam. Facebook telah mengambil sejumlah langkah untuk mencoba membendung misinformasi pada platformnya.

Pada 16 April, Facebook menambahkan label peringatan pada postingan tentang misinformasi ketika seseorang menyukai, berkomentar atau beraksi terhadap unggahan tersebut.

Berlanjut pada Mei, Facebook telah melakukan cek fakta dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI) juga dibantu dengan manusia untuk menegakkan kebijakan komunitasnya.

Platform berbagi foto dan video milik Facebook,

Instagram, juga melakukan beberapa langkah untuk mengurangi penyebaran hoaks yang berkaitan dengan virus corona dan COVID-19.

Instagram menghapus hoaks dan misinformasi tentang virus corona agar ketika pengguna mengetuk tanda pagar yang terkait wabah tersebut mendapatkan informasi dari sumber resmi seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) maupun otoritas kesehatan setempat.

Platform ini juga memblokir tagar yang digunakan untuk menyebarkan hoaks dan misinformasi soal corona. Selain itu Instagram bekerja sama dengan pengecek fakta pihak ketiga untuk memverifikasi informasi dan memberi label pada informasi tersebut.

Hal serupa juga dilakukan Twitter, yang menghadirkan label dan peringatan untuk cuitan-cuitan yang mengandung misinformasi atau fakta yang diperdebatkan kebenarannya soal COVID-19.

Label tersebut akan muncul di bagian bawah tulisan, berisi tautan ke laman berisi fakta yang dikurasi tim Twitter atau laman dari sumber-sumber terpercaya.

Untuk menjauhkan pengguna dari informasi palsu, Youtube telah melarang konten yang bertentangan dengan temuan WHO. Platform milik Google itu juga memperkuat kemunculan konten resmi di seluruh dunia.

Sementara, Google sendiri menampilkan halaman hasil pencarian yang dikuratori oleh WHO, berisi tips aman dan berita terkini, berupa box alert yang memiliki tujuan untuk membuat informasi darurat lebih mudah diakses pengguna saat terjadi situasi krisis.

WHO juga bergabung bersama TikTok untuk perang misinformasi virus corona dengan meluncurkan akun untuk memberikan informasi yang akurat kepada pengguna online.

Satu elemen yang harus ikut dalam perang terhadap hoaks ini adalah masyarakat. Upaya-upaya tersebut tidak akan berarti jika masyarakat sendiri tidak tergerak untuk bersama melawan musuh tak kasat mata bernama hoaks.

Agar terhindar dari informasi yang salah tentang COVID-19 di internet, bersikap skeptis terhadap judul informasi menjadi dasar yang penting. Selanjutnya, perhatikan URL dan isi halaman beritanya, periksa sumber informasinya, lihat berita atau informasi lainnya, dan tentunya dapatkan informasi dari otoritas resmi. Ayo bersama melawan hoaks! (ANT)

PERS, KEMANUSIAAN DAN KEBEBASAN



Muhammad Husen Db.*

Memperingati hari Pers Nasional, kita dibawa ke sebuah perenungan yang sangat indah. Penuh kemurnian, kejujuran dan rasa percaya diri. Kita sering mendengar kalimat “Pers bisa membesarkan dan mengecilkan seseorang”. Kalimat ini menegaskan bahwa kekuatan Pers sebagai pilar demokrasi telah terlegitimasi oleh publik. Dengan sendirinya Pers termetamorfosis menjadi sebuah kekuatan yang sangat dahsyat.

Kekuatan Pers ada pada goresan pena dan jebretan lensa kamera. Dengan kekuatan goresan itu kemudian mampu menguak berbagai informasi untuk menegaskan sebuah tujuan. Apapun tujuannya tentu harapannya menjadi kalimat informatif dalam kebenaran dan keberpihakan terhadap kebaikan.

Jebretan lensa kamera menegaskan sebuah cerita, menyimpan makna. Makna itu kemudian menyiarkan ke seluruh penjuru atas sebuah peristiwa. Peristiwa tentang fakta dan data.

Tidak terhitung lagi kekuatan Pers bisa mengangkat peristiwa manusia tak berdaya terlantar menjadi orang berwibawa dan parlente. Juga tidak terhitung lagi Pers meluluhlantakan tahta pemimpin dari kursi empuk lalu terjunkir balik menjadi manusia hina dan terkucilkan. Betapapun terhormatnya dan terkucilkannya, Pers harus tetap menjadi suluh bagi kebaikan dalam bingkai Independensi.

Refleksi Pers yang terus diperkuat adalah kecerdasan dalam memberikan informasi dan kemandirian dalam bersikap. Independen harus diletakkan diatas segala kepentingan. Kemurnian berita dalam fakta dan data tidak boleh bercampur aduk dengan pengaruh pihak lain. Pihak yang memanfaatkan keadaan yang meruntuhkan positioning Pers dalam mengabdikan untuk bangsa.

Menyadari pergeseran ruang kerja bagi insan Pers, di tengah gelombang perubahan dengan digitalisasi, Pers harus bisa masuk dalam gelombang itu. Gelombang dalam dimensi cepat dan hampir mengenyampingkan kebenaran dan akurasi. Keterlibatan Pers zaman ini harus tetap menjadi penguat konten dalam laju gerakan penyebaran informasi. Sekencang apapun perubahan ini berjalan, tetap ada nilai fakta dan data. Karena sungguh kekuatan Pers ada di wilayah itu.

Kemanusiaan dan kebebasan menjadi kata kunci dalam gerak langkah Pers kedepan. Bebas menyampaikan fakta dan data, tetapi saat yang bersamaan ada hak hidup manusia yang juga harus dijaga dan dilindungi.

Memperingati hari Pers nasional tahun ini, kita menitipkan harapan kepada seluruh insan Pers untuk tetap tegar dan tegas dan membesarkan bangsa ini. Tegar dan kuat mengikuti gelombang perubahan dan saat yang bersamaan tegas dalam Independensi. “Untuk seluruh Insan Pers penulis berharap untuk membawa bangsa Indonesia ke Maqom yang paling tinggi. Selamat Hari Pers Nasional. [*]

*) Penulis merupakan Direktur Polikrasi (Politik dan Demokrasi) dan Tokoh Muda dari Flores Timur



PRESIDEN JOKOWI DALAM KEBENCIAN VS PENEGAKAN ATURAN

Keith Payne, pakar psikologi dan neuroscience dari University of North Carolina, AS, menulis dalam bukunya berjudul *The Broken Ladder* pada 2017 bahwa ketimpangan akan berpengaruh pada bagaimana seseorang berpikir, menjalani hidup, hingga responsnya dalam menghadapi ancaman kematian.

Buku ini mencerminkan apa yang terjadi di Indonesia saat ini ketika anggapan ketimpangan telah mempengaruhi cara orang berpikir saat merespons suatu persoalan.

Dalam konteks sebuah kebijakan misalnya, penerapan protokol kesehatan pun dilihat dengan kaca mata yang berbeda dari berbagai macam sudut pandang.

Ini pun berlaku pada rumus yang dirancang oleh Payne bahwa ketimpangan menyebabkan perpecahan sosial dan keberpihakan politik.

Payne membuat studi dalam surveinya dan menemukan bahwa responden yang berkontribusi besar atas sesuatu atau orang yang melihat diri mereka sebagai yang berkinerja tinggi cenderung menginginkan orang yang berkinerja rendah dikecualikan dari pengambilan keputusan atau bahkan benar-benar dicabut haknya.

Sebaliknya, responden yang melihat diri mereka sebagai yang berkinerja rendah ingin setiap orang memiliki suara yang sama, bahkan untuk mereka yang tidak sependapat.

Konsep ini menjadi demikian relevan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia dalam kasus Presiden Joko Widodo dilaporkan telah melanggar aturan mengenai kerumunan saat kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu.

Beberapa berpendapat dan mengaitkan peristiwa ini dengan kerumunan yang pernah terjadi dalam kasus Rizieq Shihab.

Memang penerapan protokol kesehatan saat ini menjadi hukum tertinggi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam kondisi yang sangat ideal siapa pun pelanggarnya akan menanggung sanksi.

Namun apakah kedua kasus tersebut layak diperbandingkan dalam satu konteks?

Kebencian vs penegakan aturan

Upaya pelaporan Presiden Jokowi atas pelanggaran kerumunan kemudian memancing diskusi yang mendalam terkait motif yang melatarbelakanginya.

Apakah pelaporan dimaksud lantaran ada kebencian terhadap Jokowi secara pribadi atau untuk alasan yang lebih luas seperti penegakan aturan?

Di luar semua itu, banyak masyarakat NTT membuat pembelaan bahwa mereka terlampaui antusias menyambut kedatangan Presiden sehingga mereka siap dipersalahkan atas apa yang terjadi.

Beberapa di antaranya seperti Koordinator Relawan Jokowi-Makruf Amin Negeriku Indonesia Jaya C Suhadi misalnya sangat menyesalkan pelaporan Presiden Joko Widodo ke Mabes Polri, berkaitan dengan masalah kunjungan kerjanya ke di NTT untuk meresmikan waduk.

Menurut Suhadi, kejadian itu berbeda jauh dengan kejadian di tempat-tempat lain yang pernah ada tapi terjadi masalah, ia menegaskan bahwa kasus yang terjadi jelas berbeda dan tidak bisa dipukul rata.

Presiden datang ke NTT untuk melakukan peninjauan waduk namun masyarakat secara spontan datang agar bisa melihat pemimpinnya dari dekat.

Ia menilai tidak ada unsur apapun yang terindikasi melawan hukum karena tidak ada ajakan untuk berkerumun atau undangan kepada masyarakat agar hadir di satu tempat tanpa protokol kesehatan.

Suhadi menilai apa yang terjadi di NTT lebih merupakan spontanitas dan tidak ada unsur perencanaan yang mengarah pada terciptanya kerumunan.

Ia pun meminta agar semua pihak kembali melihat persoalan dari perspektif yang obyektif, sehat, realistis dan berkeadilan, jangan semua orang berkerumun dijadikan persoalan.

“Bagaimana orang yang berkerumun di pasar yang terjadi setiap hari, tidak bisa disalahkan karena melakukan kegiatan ekonomi,” ungkapnya.

Suhadi meminta agar semua pihak menyikapi keberadaan Presiden sebagai kepala negara dan kehadirannya bukan semata-mata untuk mengundang masyarakat berkerumun. Menurut dia Presiden hadir dalam rangka meresmikan bendungan, sama sekali bukan untuk kampanye politik.

Ketidaksukaan kepada seseorang secara pribadi memang kerap kali membuat seseorang ingin mencari celah kesalahan dengan lebih mudah.

Presiden Mengingatkan

Di tengah pandemi, menjadi sosok yang selalu berada dalam “spot light” seperti Presiden Jokowi tentu akan

sulit.

Keberadaannya cenderung akan mengundang perhatian orang untuk mendekat, dan Presiden Jokowi menyadari benar akan hal itu.

Sebagaimana disampaikan Deputy Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Negara Bey Triadi Machmudin yang menegaskan Presiden selalu mengingatkan dalam berbagai kesempatan agar kebijakan diterapkan dengan ketat termasuk protokol kesehatan.

Pun demikian ketika kunjungan kerjanya di Maumere. Setibanya di Maumere, ketika itu Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napun Gete.

Saat dalam perjalanan, ternyata masyarakat sudah menunggu rangkaian mobil kepresidenan di pinggir jalan, saat rangkaian melambat masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti.

Spontanitas dan antusiasme masyarakat Maumere saat menyambut kedatangan Presiden Jokowi menjadi tidak terelakkan. Tetapi Bey mengatakan Presiden ketika itu menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker.

Presiden menjadi bagian dari kampanye besar dalam melakukan protokol kesehatan. Kecenderungan masyarakat untuk mengimitasi pemimpinnya disadari benar oleh Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, ia terlihat selalu dan senantiasa menggunakan masker dengan cara yang benar dalam setiap kesempatan dan interaksi dengan masyarakat.

Bahkan sistem kerjanya pun berubah dengan lebih banyak melakukan kerja secara daring, memberikan pidato kunci dalam lebih banyak pertemuan secara daring, hingga rapat-rapat penting secara virtual conference.

Presiden sadar benar bahwa protokol kesehatan harus dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Untuk itu seorang pemimpin harus memberikan teladan yang baik.

Dalam kasus ini, ada persamaan sekaligus perbedaan mendasar dengan sejumlah kasus yang terjadi sebelumnya. Faktanya sama bahwa seorang pemimpin akan cenderung menyedot perhatian.

Namun yang berbeda adalah bagaimana seorang pemimpin memiliki kesadaran untuk menerapkan penegakan hukum alih-alih mengajak untuk melanggar aturan. (ANT)

MENYEMAI ISLAM TRANSFORMATIF



Nafik Muthohirin*

Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan karamah. Seluruh amal kebaikan yang dikerjakan di bulan ini niscaya dilipatgandakan pahalanya. Tak heran, jika umat Islam mulai berlomba meningkatkan ibadahnya. Namun, hal yang demikian menjadi sebatas ritual tahunan karena usai Ramadan hilang, amalan kebaikan itu tidak dikerjakan secara berlanjut.

Islam sebagai sebuah agama menjadi ironi bila difahami sebatas identitas simbolik. Pemeluknya pun akan terjebak pada pemaknaan yang sempit karena keberagamaan hanya diartikan penghambaan antara manusia dengan Tuhan-Nya saja. Begitu pun dengan

puasa, ibadah ini tidak hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Lebih dari itu, puasa harus bisa dimaknai secara lebih luas sebagai misi transformasi sosial.

Berubahnya fenomena keagamaan selalu diiringi dengan perubahan fenomena sosial pula. Tidak terkecuali pada bulan suci seperti sekarang, seluruh aktivitas sosial dibingkai apik dengan segala format keagamaan. Begitu pula dengan peran media, seolah turut memarakkannya. Nampak tayangan televisi menyuguhkan berbagai acara hiburan yang dibalut dengan nilai keagamaan mulai sahur, berbuka, bahkan sampai sahur kembali. Acara televisi diformat begitu rupa dengan aneka ceramah, sinetron agama, bahkan

iklan pun dibungkus dengan nilai-nilai ketuhanan.

Ironisnya, meningkatnya fenomena keagamaan tersebut tidak diiringi dengan menurunnya intensitas pemberitaan media akan maraknya kedzaliman sosial, misalnya pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan berbagai aksi kekerasan lainnya. Berbagai kedzaliman sosial ini begitu mewarnai kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga mengakibatkan mereka memilih menjauh dari hiruk-pikuk keduniaan.

Islam Transformatif

Dalam pemahaman yang lebih menyeluruh, puasa harus mampu diartikan sebagai spirit profetik, yang berakar pada misi ideologisnya yakni cita-cita untuk menegakkan *amr ma'ruf nahi munkar*. Cita-cita tersebut memuat nilai humanisasi, emansipasi, liberasi, dan transendensi yang akan selalu memotivasi gerakan transformasi sosial (Kuntowijoyo: 1991).

Kuntowijoyo menerjemahkan semangat Islam profetik ke dalam tiga hal; moderasi, liberasi, dan transendensi. Moderasi adalah menempatkan agama sebagai pilar kehidupan, menjadi pedoman hidup manusia untuk melakukan kerja-kerja sosial. Serta islam menjadi ruh setiap manusia untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Pada titik inilah keberadaan agama tidak lagi hanya sebatas seperangkat identitas simbolik melainkan menjadi pencerah bagi misi kedamaian alam semesta.

Sedangkan liberasi adalah memposisikan agama sebagai pembawa misi pembebasan terhadap berbagai kedzaliman sosial. Islam yang selama ini dipahami sebagai rahmatan lil-alamin mempunyai tanggungjawab sosial guna melepas belenggu ketertindasan, ketidakadilan, dan berbagai diskriminasi sosial lainnya.

Pada masa Nabi Muhammad Saw, kekuatan agama mampu mendobrak tatanan kekuasaan yang tiranik-despotik, subordinasi terhadap hak-hak perempuan, dan berbagai perilaku amoral lainnya. Sementara, semangat transendensi adalah relasi manusia dengan Tuhan-Nya, menempatkan keberadaan Allah Swt sebagai pengatur dan pencipta segalanya, yang kemudian ditransformasikan kepada makhluk ciptaan-Nya, yaitu manusia supaya menjaga dan menjadi khalifah di bumi.

Sejujurnya, semangat Islam transformatif telah

banyak diulas oleh para pemikir kajian keagamaan. Namun, upaya untuk membumikan konsep tersebut dalam ruang lingkup kehidupan sampai saat ini belum banyak terrealisasi.

Pada posisi inilah kiranya perlu mencermati ulang makna puasa tersebut. Apakah puasa yang kita jalani selama sebulan akan menghadirkan semangat transformatif yang menginisiasi hilangnya ketimpangan antara yang miskin dan yang kaya atautkah malah hanya akan mendapatkan rasa lapar dan dahaga sebagaimana yang diperingatkan oleh Rasulullah Saw “Sekian banyak orang menjalankan puasa, akan tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga”.

Momentum puasa bisa dijadikan sebagai kesempatan tepat untuk menunaikan tanggungjawab sosial. Sebab, agama tanpa tanggungjawab sosial akan menjadi gersang dan juga hanya akan menjadi sebatas penghambaan saja. Nilai-nilai dari amal puasa seseorang terasa belum sempurna jika ditunaikan hanya dengan menguatkan hubungan transendensi antara makhluk dengan Tuhan-Nya saja. Akan tetapi harus mengaitkan juga nilai-nilai moderasi dan humanisasi supaya visi keberagamaan dapat dikerjakan secara sempurna pula.

Berawal dari momentum puasa ini kiranya dapat membuka rasa kesadaran manusia akan tujuan utama manusia sebagai makhluk sosial, yakni memiliki jiwa kepedulian terhadap realitas sekitar. Masihkah ada di sekeliling kita kaum *mustad'afin* yang belum merasakan indahnya puasa atau masihkah tuli para pemimpin kita untuk memperjuangkan hak-hak kaum miskin.

Sebab, menurut Kuntowijoyo salah satu kepentingan terbesar Islam sebagai sebuah ideologi sosial adalah bagaimana mengubah masyarakat sesuai dengan cita-cita dan visinya mengenai transformasi sosial. Maka dengan momentum puasa kali ini kiranya dapat membibitkan semangat beragama yang progresif menuju peradaban yang utama. Karena islam hadir tidak sebatas seperangkat agama melainkan peradaban yang sempurna (Islam is not only religion, it is a complete civilization).

*) Dosen FAI-UMM; Direktur Program RBC Institute A. Malik Fadjar

TANDA KEBERHASILAN PUASA RAMADAN

Prof.Dr.H. Masri Mansoer, MA*

Kita merayakan Idul Fitri sebagai hari kemenangan karena kita telah berhasil menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan berbagai amalan-amalan shaleh yang dilakukan, yang pahalanya dijanjikan oleh Allah berlipat ganda, apalagi kalau kita ditakdirkan memperoleh malam kemuliaan Lailatul Qadar, yang pahalanya lebih baik dari amalan ibadah seribu bulan atau sekitar 83 tahun lebih.

Bulan Ramadan sebagai tamu agung yang penuh berkah, rahmah dan maghfirah itu, tinggal hitungan hari akan meninggalkan kita. Kita tidak tahu entah kita bisa lagi bertemu dengannya tahun depan atau tidak, tidak ada yang tahu. Tetapi yang pasti kita akan berpisah dengannya tahun ini. Mudah-mudahan kita telah berhasil memuliakan dan mengisinya dengan ibadah puasa dan berbagai amalan-amalan shaleh terutama di masa Covid -19 ini, kita memohon kepada Allah SWT semoga wabah pandemic Covid-19 ini cepat berlalu dan kita diberi umur panjang dan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadhan pada tahun mendatang.

Puasa yang kita jalankan adalah sebuah ibadah yang dilakukan dengan menahan haus-lapar, panca indra, pikiran dan hawa nafsu dengan ikhlas-penuh kesadaran untuk mengharap ridha Allah agar kita terlahir menjadi Insan yang bertakwa dan fitri. Itulah sebabnya amalan ibadah puasa memiliki makna yang sangat luas, baik secara individual maupun sosial.

Tujuan puasa bukan hanya untuk menjadikan manusia sehat secara lahir-batin, agar dapat bekerja dan berkembang biak, melainkan untuk menjadi insan muttaqin sebagaimana diharapkan dari hasil berpuasa dalam surat al-Baqarah 183 “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu



bertakwa”.

Insan muttaqin yaitu manusia yang dekat dengan Allah dan mampu memproteksi diri dari segala bentuk nafsu kebinatangan yang menganggap perut, syahwat sebagai Tuhan dan agama. Kemampuan mengendalikan syahwat ini akan melahirkan personal yang mampu memiliki sifat-sifat mulia seperti jujur, amanah, adil, syukur, punya pengendalian diri, pemaaf, punya kepekaan sosial, suka berbagi dan gemar berbuat kebaikan.

Kata Taqwa dalam surat Al-Baqarah ayat 183, sebagai tujuan puasa لعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ adalah fi'il mudhari' yang berarti melalui ibadah puasa kita berproses menjadi insan taqwa. Dalam bahasa Arab, kata لعَلَّ (la'alla) disebut sebagai ungkapan Tarajji, artinya suatu harapan yang dapat diwujudkan (dicapai) dalam kenyataan/realitas keseharian. Bukan Tamanni yang berarti angan-angan atau khayal. Dengan demikian melalui ibadah puasa dapat dicapai/diraih derajat taqwa dan itu sesuatu yang dapat kita wujudkan dalam perilaku nyata keseharian kita.

Kata taqwa itu biasanya diartikan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah dengan cinta untuk mengharap ridha-Nya.

Mari kita cermati pesan ayat 133-135 Ali Imran sebagai gambaran sifat-sifat orang yang muttaqin dalam dimensi psikologis dan sosial sebagai tanda/indicator

keberhasilan puasa kita.

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui” (Ali Imran: 133-135).

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa tanda kualitas orang yang taqwa itu adalah: 1) segera mendekatkan diri kepada Allah dan menuju jalan surga-Nya; 2) selalu berinfak dan bershadaqah dalam keadaan susah atau lapang; 3) mengendalikan emosi/marah; 4) pemaaf; 5) suka berbuat kebaikan; 6) dan senantiasa ingat kepada Allah, istighfar dan bertaubat atas segala dosa-kesalahan mereka.

Kualitas-kualitas ini adalah bersifat psikologis dan sosiologis dari orang yang bertaqwa-sebagai tujuan puasa. Karena memang semua tujuan ibadah dalam Islam selain mendekatkan diri kepada Allah adalah untuk membentuk dan meningkatkan kualitas sosial terutama solidaritas (kesetiakawanan) sosial. Yaitu perasaan sama sebagai umat Tuhan yang harus diikuti dengan saling bantu-membantu, tolong-menolong, kerjsama dan harga-menghargai tanpa disekat dan dibelenggu oleh masalah agama, suku, golongan, organisasi dan status sosial lainnya.

Kondisi masyarakat, khususnya di lingkungan kita akibat dampak pandemic Covid-19 ini sangat memprihatinkan banyak orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya-makan-minum, membiayai Kesehatan dan Pendidikan, untuk itu mari kita wujudkan solidaritas (kesetiakawanan) social dengan mengeluarkan ZIS, saling bantu-membantu, tolong-menolong dan kerjsama. Karena orang yang taqwa itu akan mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya. Rasulullah bersabda “Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai diri engkau sendiri.”

Dalam hadist lain Nabi Muhammad SAW bersabda “Kamu tidaklah disebut beriman sehingga mencintai saudaranya sepaerti apa mencintai dirinya.”

Sungguh sangat disayangkan sudah setiap tahun kita melaksanakan puasa, tetapi cerminan dari hasil puasa masih jauh dari harapan. Puasa yang telah bertahun-tahun kita lakukan seperti ini belum terlalu membekas dalam diri kita, itu pasti ada yang salah dalam kita berpuasa. Niat dan rasa cinta dalam melaksanakan ibadah puasa menjadi kunci utama. Itulah sebabnya perlu kita evaluasi apakah keikhlasan dan puasa dengan rasa cinta telah terhunjam dalam hati sanubari kita atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan formalitas saja.

Karenanya mulai hari ini, kita perlu terus menerus melakukan upaya-upaya dan penyesuaian-penyesuaian agar tujuan puasa itu dapat direalisasikan pasca Idul Fitri nanti untuk menghadapi atau merespon tantangan-tantangan baru dalam kehidupan keberagamaan, social ekonomi dan politik akibat pandemic Covid-19 ini.

Ada tiga jenis tantangan kehidupan keberagamaan kita ke depan: 1) tantangan yang bersifat personal/individu; 2) tantangan kehidupan keluarga; dan 3) tantangan dalam masyarakat dan bangsa Indonesia.

Tantangan pertama: kehidupan keberagamaan perseorangan, ialah gaya hidup materialistik, hedonistik dan individualistik yang semakin fenomenal di tengah masyarakat kita. Arti dan manfaat tindakan kita selalu dinilai dan diukur dengan uang, materi, kenikmatan dan menjadikan materi sebagai tujuan hidup. Bahkan tidak jarang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi, harta dan jabatan. Gejala ini sejalan dengan sekularisme yang ujungnya mendorong manusia secara pelan dan pasti melupakan adanya kehidupan akhirat dan bahkan melupakan kehadiran Sang Maha Pencipta dalam hidupnya. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita lebih mencintai Allah dan amal shaleh daripada dunia (pekerjaan dan harta) kita...? Buktinya korupsi, manipulasi dan kesewenang-wenangan terjadi di setiap lini, masjid yang banyak kita bangun megah-megah kosong ketika shalat berjamaah lima waktu dan sepi dari kegiatan kajian agama, untuk itu mari sekarang kita kendalikan nafsu hubbudunia kita dan kita ramaikan masjid dengan shalat berjamaah dan pengajian. Sebagaimana Firman Allah: “Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah

dari kepada yang lain, “(al-Baqarah: 165).

Tantangan kedua dalam kehidupan keberagamaan keluarga kita. Di era kemajuan teknologi digital, informasi dan kebebasan berekspresi. Berbagai alat-alat komunikasi yang ada, seperti TV dan Hp telah membanjiri rumah dan anak kita dengan berbagai informasi, gambar dan adegan. Sebagian informasi itu ada yang baik/positif dan diperlukan bagi kemajuan kehidupan kita, seperti informasi tentang kemajuan ipteks, informasi Kesehatan, Pendidikan, pengetahuan agama dan informasi kemajuan dunia lain.

Selain itu banyak pula informasi tidak baik/negative yang tidak kita perlukan sebagai muslim, seperti informasi tentang pornografi, pornoaksi, radikalisme, informasi kekerasan, perilaku menyimpang, penipuan, perdukunan, adudomba, hoax dan lain-lain. Kehadiran informasi-informasi seperti ini telah berdampak negative terhadap pikiran, perkataan dan tingkahlaku anak-anak kita, karena mencampuradukkan nilai-nilai yang tidak mengedukasi dan tidak bermoral dengan nilai-nilai agama. Apabila keluarga kita kurang mampu melakukan penyaringan dan seleksi, maka anak-anak kita akan dapat terpengaruh oleh nilai-nilai yang tidak baik itu. Kita semua wajib membentengi mereka dengan ajaran agama dan menjaga keluarga dan keturunan kita dari kehancuran dunia-akhirat, seperti firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari kehancuran (api neraka) yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu,” (at-Tahrim: 6)

Adapun tantangan ketiga kehidupan masyarakat-bangsa kita, dua yang utama diantaranya ialah di bidang ekonomi dan pendidikan. Di bidang ekonomi, sampai tahun ini kita masih akan mengalami ketidakpastian ekonomi akibat wabah Covid-19. Negara masih akan devisit, pengangguran bertambah dan angka kemiskinan menaik dan persaingan hebat terjadi dimana-mana.

Untuk itu, maka kita dipanggil untuk menerapkan nilai berhemat, nilai kesetiakawanan sosial, berbagi dan tolong menolong seperti yang telah kita latihkan selama bulan puasa Ramadhan. Kita harus lebih sering lagi berbagi, kita harus lebih dermawan dan suka menolong ke depannya. Bagi mereka yang memiliki modal, hendaklah segera menginvestasikannya di sektor ekonomi riil untuk ikut menumbuhkan lapangan kerja. Bagi mereka yang bergerak di bidang sosial, agar segera memperkuat system kesejahteraan

social, termasuk melalui simpul-simpul dan lembaga keagamaan agar sumberdaya atau kekayaan tidak hanya bergulir di kalangan segelintir orang kaya saja. Mari kita kumpulkan ZIS kita secara disiplin, rutin dan jujur agar dapat memperbaiki keadaan pendidikan dan ekonomi masyarakat sekitar kita yang kurang beruntung. Agar kekayaan itu tidak beredar di kalangan mereka yang kaya saja.

Idul fitri adalah tanda puncak dari sebuah kesuksesan dalam berpuasa. Dalam fase ini manusia diistilahkan kembali ke fitrah. Yaitu kembali pada kesucian dan kebersihan baik fisik maupun mental. Gemblengan saat puasa diharapkan menjadikannya bersih lahir-batin sehingga predikat muttaqin itu benar-benar diperolehnya. Orang yang berhasil dari masa penggemblengan itu akan memiliki hati yang tulus, berpikiran jernih, dan memiliki sifat kedewasaan, kedamaian dan kemanusiaan yang lebih baik dari sebelumnya.

Idul fitri menjadi puncak dari sebuah ibadah puasa yang sudah dilakukan selama sebulan sehingga nampak di dalam pribadinya yaitu pribadi yang lebih peka terhadap persoalan sesamanya. Ia akan lebih dermawan karena itu ia akan lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri. Orang yang beriman harus lebih banyak berkorban daripada mencari kemegahan diri pribadinya dengan mengorban yang lain.

Kita berharap semoga puasa tahun ini menjadikan kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kita mampu melakukan transformasi personal yang akan membuahkan transformasi sosial, karena perubahan pribadi yang lebih baik akan menjadikan dasar perubahan yang lebih baik pula dalam masyarakat kita. Amal ibadah puasa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ikhlas, cinta dan istiqamah pasti akan membekas dalam diri kita. Sehingga kita akan menjadi orang yang benar-benar bertaqwa, yaitu orang yang tidak ingin menang dan baik sendiri di dalam hidup ini tetapi ingin selalu bermanfaat bagi orang lain.

Semoga puasa kita kali ini adalah tonggak perubahan bagi diri kita dan masyarakat kita untuk mencapai masyarakat utama baldatun tayyibatun warobun ghofur. Amin. [*]

*) Guru Besar Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta

MAHFUD MD DAN IKATAN CINTA

Amir Fiqi*

Menjadi pejabat pemerintah harus memiliki empati yang tinggi kepada rakyat. Empati tersebut diwujudkan tidak hanya dengan kata-kata atau janji, tapi harus dengan aksi-aksi nyata untuk meringankan beban yang sedang dipikul oleh rakyat.

Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang sudah mendera bangsa Indonesia lebih dari satu tahun ini, beban yang dipikul oleh rakyat sangatlah berat. Tidak hanya beban soal kesehatan, tapi juga beban-beban yang lain turut membuat masyarakat hidup dalam kebingungan dan ketakutan.

Misalnya, ketakutan akan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebab selama pandemi Covid-19 sektor ekonomi sangat terdampak, banyak perusahaan yang gulung tikar sehingga menambah jumlah angka pengangguran di negeri ini. Sulitnya masyarakat dalam mencari nafkah karena sejumlah kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas masyarakat, seperti kebijakan yang saat ini sedang dijalani yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. Dengan kebijakan ini omset pedagang menurun drastis.

Selain ekonomi, sektor pendidikan juga terkena dampaknya dari pandemi Covid-19 ini. Rakyat mengalami kebingungan. Belajar tatap muka di sekolah yang diganti menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui online atau daring juga menimbulkan masalah baru. Tidak hanya tidak kemampuan orang tua untuk membeli kuota internet, tapi juga sulitnya jaringan internet di pelosok-pelosok daerah membuat kegiatan belajar tidak berjalan maksimal.

Tentunya masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat selama pandemi Covid-19. Maka itu, dibutuhkan empati pejabat pemerintah di negeri ini sehingga mereka benar-bener bekerja untuk meringankan beban masyarakat. Di situasi seperti saat ini tidak ada kata santai bagi para pejabat. Yang dibutuhkan kerja cepat dan kerja cerdas. Sehingga masalah wabah di negeri ini segera terlihat tanda-tanda

akan berakhir.

Minus empati

Sebagai pejabat pemerintah pasti tidak akan lepas dari perhatian masyarakat. Maka itu, bersikap dan bertuturlah yang bijak sehingga masyarakat merasa teduh. Apalagi di kondisi yang berat seperti saat ini, empati para pejabat negara sangat dirindukan oleh rakyat.

Penulis sedikit mengkritik gaya komunikasi Menko Polhukam Mahfud MD yang terlihat kurang peka di tengah pandemi Covid-19 dan kebijakan PPKM Darurat. Melalui akun twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Kamis (15/7) malam dia menulis, “PPKM memberi kesempatan kepada sy nonton serial sinetron Ikatan Cinta. Asik juga sih, meski agak muter-muter. Tp pemahaman hukum penulis cerita kurang pas. Sarah yg mengaku dan meminta dihukum krn membunuh Roy langsung ditahan. Padahal penegakan dlm hukum pidana itu bkn bukti yg kuat”.

Sebenarnya jika membaca pesan dalam tulisan tersebut tidak ada yang salah, tapi jika penulisnya adalah pejabat pemerintah, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19, terlihat kurang peka. Menurut hemat penulis apa yang disampaikan oleh Mahfud MD ini menambah krisis komunikasi dari para pembantu Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengancam memindahkan anak buahnya ke Papua. Pernyataan tersebut dinilai bernuansa rasialis terhadap masyarakat Papua.

Begitu juga pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang memimpin PPKM Darurat. Luhut mengklaim pandemi terkendali, meski lonjakan kasus setiap harinya memecahkan rekor baru. Selain itu, masyarakat dibuat gempar dengan kebijakan vaksin gotong royong bagi individu yang berbayar.

Seharusnya di tengah situasi pandemi Covid-19 ini pejabat pemerintah memperkuat lagi rasa empati kepada rakyat, dengan memperbaiki gaya komunikasinya. Komunikasi yang dibangun adalah memberikan

semangat dan motivasi. Serta membuat kebijakan-kebijakan yang bisa meringankan beban rakyat dalam menghadapi pandemi ini.

Komunikasi yang 'buruk'

Jika kembali ke belakang di awal pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, Mahfud MD adalah salah satu pejabat pemerintah yang memiliki komunikasi 'buruk' dalam menyikapi wabah ini. Dia pernah menyampaikan pernyataan bahwa virus corona seperti seorang istri.

Mahfud menceritakan meme tentang virus corona yang dirinya peroleh dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Meme tersebut menganalogikan virus corona selayaknya istri.

"Judulnya itu dalam bahasa Inggris. Corona is like your wife. Corona itu seperti istrimu, ketika kamu mau mengawini, kamu berpikir kamu bisa menaklukkan dia, tetapi sesudah menjadi istrimu, kamu tidak bisa menaklukkan istrimu," kata Mahfud menceritakan isi meme tersebut dalam sambutannya di acara halalbihalal IKA UNS yang disiarkan di kanal YouTube Universitas Negeri Sebelas Maret, Selasa (26/5/2020).

"Sesudah itu. Than you learn to live with it (kamu belajar untuk hidup bersamanya). Ya sudah, sudah begitu," kata Mahfud.

Mahfud menilai, analogi itu mirip dengan penanganan virus corona. Mulanya banyak orang yang ingin diterapkan pembatasan sosial hingga karantina wilayah untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kemudian, masyarakat dipaksa beradaptasi dan hidup berdampingan bersama virus corona dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Menurut dia, hal itu terjadi lantaran masyarakat menyadari bahwa pembatasan sosial dan karantina wilayah yang dilakukan secara terus-menerus dapat memberhentikan roda perekonomian yang semestinya tetap harus berputar. (Kompas.com).

Mahfud MD juga pernah menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait tata kata pengumuman PSBB. Menurutnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok disebabkan karena Anies mengumumkan PSBB kembali tahap awal. Apa yang disampaikan Mantan

Ketua MK ini menimbulkan pertanyaan public bahwa antara pemerintah pusat dan daerah kurang harmonis.

Bangkit bersama

Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi masalah yang sulit. Pandemi ini akan berakhir dan bangsa Indonesia akan menjadi pemenang jika semua pihak bergerak dan bangkit bersama melawan virus corona.

Bangkit bersama ini akan terwujud jika pejabat pemerintah memiliki empati yang kuat terhadap rakyatnya. Empati tersebut akan terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat. Bukan hanya sekadar kata atau janji-janji manis.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini pemerintah tidak sendiri. Rakyat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan juga berusaha sekuat tenaga meringankan beban rakyat.

Sebut saja Muhammadiyah berhasil menggalang dana sekitar Rp130 miliar untuk mendukung program-program pencegahan Covid-19. Dan saat ini Muhammadiyah juga berjuang sekuat tenaga membantu pemerintah dalam program vaksinasi Covid-19.

Bantuan dari Muhammadiyah ini untuk mempercepat target pemerintah menciptakan kekebalan kumunal di tahun 2021.

Tidak hanya Muhammadiyah, organisasi atau lembaga yang lain juga bergerak mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang angkanya terus meroket. Apa yang mereka lakukan adalah atas nama kemanusiaan agar bangsa ini segera melawati pandemi Covid-19.

Ayo bangkit bersama lawan pandemi ini!. Dengan bergerak bersama, maka wabah ini akan segera terkendali. Dan kita bisa lagi hidup normal seperti biasa. Bebas berkumpul dan bebas bersilaturahmi dengan sanak saudara.

Dan bagi para pejabat pemerintah, bangunlah komunikasi yang baik dan menunjukkan rasa empati kepada rakyat. Komunikasi yang baik inilah akan menciptakan imunitas bagi rakyat. Karena para pejabatnya juga memiliki perasaan yang sama dengan rakyat.

*) Penulis merupakan wartawan dan pemerhati sosial

KURBAN TAHUN INI, KETAATAN MANUSIA BENAR-BENAR DIUJI

Citra Kusuma Dewi*

Saat Nabi Ibrahim tertidur dalam suatu malam yang sunyi, ia bermimpi menyembelih dan mengurbankan putra kesayangannya. Anak yang selama ini ia dambakan dan dalam kesehariannya terus tumbuh cinta dan kasih sayang.

Nabi Ibrahim pun bangun dan begitu bingung menyikapi mimpinya. Ia mencoba merenungi dan memohon kepada Allah SWT untuk diberikan petunjuk. Ia kembali mendapati mimpi yang sama dan barulah meyakini bahwa itu semua merupakan perintah dari-Nya.

Nabi Ibrahim lantas menyampaikan mimpi tersebut kepada anaknya, Ismail. Mendengar pernyataan ayahnya itu, Ismail --kelak diangkat sebagai nabi-- dengan rasa cinta kasih dan tenang menjawab agar melakukan apa yang diperintahkan Allah Swt.

قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Artinya, “Dia (Ismail) menjawab, ‘Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar,’” (Surat As-Saffat ayat 102).

Sebagai ayah yang diperintahkan harus mengurbankan anaknya, tentu Nabi Ibrahim sedih, harus menyembelih seseorang yang selama ini ia nantikan. Tapi Ismail kembali menegaskan bahwa semuanya harus ikhlas demi memenuhi perintah-Nya.

Dengan ketaatan dan kesabaran bak samudera yang dimiliki keduanya, Allah kemudian tidak menghendaki penyembelihan itu terjadi dan mengganti kurbannya dengan seekor hewan.

Dari titik itulah kemudian kurban menjadi tradisi masyarakat Islam hingga saat ini yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijah. Sekaligus menegaskan, ketika keimanan dan keyakinan sudah melekat dalam jiwa, ia mampu mengalahkan segala kemauan yang bersifat rasionalitas. Allah Swt. akan memberi ganjaran yang

lebih bagi umat yang bertakwa kepada-Nya.

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ

Artinya, “Lalu Kami panggil dia, ‘Wahai Ibrahim! Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu.’ Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim (pujian) di kalangan orang-orang yang datang kemudian,” (Surat As-Saffat ayat 104-108).

Kurban, simbolik kemanusiaan

Sejumlah kebudayaan kuno melakukan persembahan dengan melakukan pengorbanan manusia. Persembahan itu diyakini untuk meminta sesuatu, termasuk agar membuat dewa-dewa senang.

Sejarah ini tercatat seperti yang dilakukan oleh suku Aztec dan suku Maya di Amerika Selatan. Mereka mengorbankan manusia baik dari anggota sukunya sendiri maupun budak sebagai sesembahan bagi dewa-dewa. Begitu pula dengan sejumlah suku lainnya yang melakukan hal serupa.

Islam sebenarnya hadir untuk menghapus segala praktik yang jauh dari rasa kemanusiaan itu. Lewat kuasa Allah SWT. yang mengganti Ismail dengan hewan kurban, menjadi penegas bahwa Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“Kita harus mengangkat suatu poin penting, ada sebuah transformasi teologis yang sangat dahsyat. Sebelumnya, setiap tahun manusia harus dikorbankan, dan kini digantikan oleh hewan (kurban). Dari human sacrifice to animal sacrifice,” ujar Imam Besar Masjid Istiqlal Nasseruddin Umar.

Kurban adalah momentum untuk menumbuhkan

jiwa kemanusiaan dan sifat utama dengan berderma. Kurban juga untuk membangun peradaban yang luhur.

Kurban juga bermakna pengorbanan pada sesuatu yang dicintai yakni harta yang dimiliki seseorang. Dengan berkorban, artinya seorang Muslim memberikan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban, lalu menyembelihnya, dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan.

“Kalau Idul Fitri itu kewajiban untuk memberikan karbohidrat, Idul adha adalah bentuk kontribusi dalam bentuk protein hewani. Di dalam simbolismenya gini, kelengkapan menu makanan kita ini ada aspek proteinnya dan ada aspek karbohidratnya. Pesannya adalah keutuhan umat, bagaimana menciptakan suatu umat yang berkualitas harus kaya protein,” kata Nassaruddin.

Kurban dan pandemi

Idul Adha kali ini menjadi kedua kalinya yang mesti dilalui dalam masa pandemi COVID-19. Segala aktivitas masyarakat mesti dibatasi untuk menekan angka penularan COVID-19, begitu pula dengan tata cara peribadatan, khususnya Shalat Id dan kurban.

Pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Agama telah menerbitkan sejumlah panduan agar merayakan Idul Adha dan kurban dengan aman dan nyaman. Pemerintah tak melarang umat Islam untuk menjalankan ibadah Shalat Idul Adha maupun kurban, namun pelaksanaannya mesti diatur yang semata-mata demi melindungi semua orang.

Adanya pembatasan aktivitas ini, beragam cara dilakukan agar masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih, masih bisa berkorban. Salah satunya melalui kurban Online.

Kurban online memudahkan masyarakat dalam menjalankan ibadah. Namun jangan membayangkan kurban online layaknya berbelanja di situs jual beli: hewan kurban diantar ke rumah. Masyarakat hanya cukup membayarkan hewan kurbannya dan pihak penyedia jasa akan mengurus seluruh prosesi.

“Pengkurban bisa cek hewan kurbannya disembelih di mana, dibagikan di mana. Itu lebih bermanfaat daripada hewan kurbannya disembelih di rumah-rumah mereka apalagi di masa pandemi ini,” ujar Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad.

Dalam kaitannya dengan pandemi, sejumlah organisasi masyarakat menekankan agar ibadah kurban

didedikasikan untuk menjawab permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat.

Ada dua dimensi dalam pelaksanaan kurban yakni dimensi ketundukan dan ketaatan kepada Sang Pencipta dan dimensi menyebarkan kemaslahatan bagi banyak orang. Di masa pandemi ini, seluruh umat harus saling berpegangan tangan, berbagi kepada mereka yang membutuhkan.

“Pelaksanaan untuk tujuan kemanusiaan, maka harus dipastikan menjawab masalah kontemporer untuk mengoptimalkan kemaslahatan dalam aktivitas ibadah kurban ini,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh.

Dalam menjawab pesan rahmatan lil alamin, dua Ormas Islam yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bahkan mengajak masyarakat mendonasikan atau menyedekahkan dana kurbannya untuk membantu warga terdampak pandemi.

Ajakan itu dipertegas dalam surat edaran PBNU 4162/C.I.34/07/2021 dan SE Muhammadiyah Nomor 05/EDR/I.0/E/2021. Dua Ormas Islam terbesar di Indonesia ini menganggap bahwa menolong umat yang tengah kesusahan mestilah diprioritaskan.

Menurut NU dan Muhammadiyah, pandemi COVID-19 telah menimbulkan berbagai masalah sosial ekonomi dan meningkatnya jumlah kaum dhuafa. Pekerja pabrik, karyawan swasta, dan para pencari nafkah harian harus turun status menjadi orang miskin baru gara-gara COVID-19.

Mereka tidak saja kehilangan pekerjaan, tapi juga penyangga ekonomi keluarga. Tidak sedikit juga yang menjadi korban PHK dan terperangkap dalam jeratan utang yang kronis. Bantuan dari pemerintah dan lembaga swasta belum cukup mampu menopang dapur mereka untuk tetap berasap.

Kerelaan dan kesediaan untuk berkorban berupa sedekah bagi mereka yang membutuhkan adalah terapi ampuh untuk menata benang kusut persoalan hidup karena datangnya pandemi COVID-19 ini.

Kendati demikian, NU dan Muhammadiyah berada dalam satu nafas yang sama, tak melarang jika ada masyarakat yang akan tetap berkorban dan menyambut baik jika melakukan keduanya: kurban dan sedekah.

Karena bagi NU dan Muhammadiyah bahwa kemanusiaan harus dijunjung tinggi dan pesan rahmatan lil alamin harus menjadi pijakan bagi seluruh umat Islam.

PAK JOKOWI, PLEASE, JANGAN BIKIN KEGADUHAN BARU

Ilham Bintang*

Entah “pesan” apa yang mau disampaikan Presiden Jokowi dengan mengubah Statuta Universitas Indonesia. Tepatnya, “legacy” seperti apa yang hendak diwariskan Pak Jokowi yang tiga tahun lagi akan meninggalkan jabatan Presiden RI pada tahun 2024.

Simaklah ribuan komentar dan meme yang mendominasi ruang publik dua hari ini, merespons Peraturan Pemerintah No 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia. Statuta itu baru saja ditandatangani Jokowi sebagai Presiden RI.

Bulan lalu, Statuta UI sudah menjadi persoalan besar. Sudah jadi sorotan publik. Menimbulkan kegaduhan. Ikut menambahi geger meme “Jokowi, The King Of Lip Service” yang disulut Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM-UI).

Peristiwa itu menyingkap, ternyata sudah sekian lama Rektor UI, Prof Ari Kuncoro melanggar Statuta UI karena mengangkangi sekaligus jabatan sebagai Komisaris di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Padahal, Pasal 35 C PP No 68/ 2013 Tentang Statuta UI, melarang Rektor dan Wakil Rektor UI merangkap sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara / Daerah, dan Swasta. BRI adalah bank BUMN. Berselang sebulan terbit PP No 75/2021 yang mengubah Pasal 35 C menjadi menjadi “rektor, wakil rektor, sekretaris universitas dan kepala badan universitas dilarang merangkap sebagai direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta”.

Dengan mengubah kata “komisaris” pada PP lama menjadi “direksi” pada PP yang baru, selamatlah posisi Ari Kuncoro sebagai Rektor UI sekaligus Komisaris BRI yang bergaji Rp. 1,2 M/ bulan. Ini tak beda dengan orang yang karena telat bangun Salat Subuh, aturan waktu salat itu pun diubah. Begitu sindir salah satu meme.

Namun, rasanya tak adil jika masyarakat hanya mengutuki habis Sang Rektor sendiri. Apalagi, Ari Kuncoro sih, yaa sudahlah. Tampaknya, memang tidak amanah sejak awal. Yang soal besar, yang bikin kita menganga, adalah Presiden Jokowi. Yang menandatangani PP No 75/2021 itu.

Kita tentu saja menyesalkan mengapa di tengah keterpurukan bangsa akibat pandemi Presiden malah melahirkan kebijakan kontra produktif. Menciptakan kegaduhan baru di tengah musibah bangsa akibat pandemi Covid-19 yang menelan korban lebih 70 ribu rakyat merengas nyawa.

Dengan mengubah Statuta UI sebenarnya sekaligus pengakuan bahwa Rektor UI dan semua yang terlibat urusan itu telah melanggar aturan. Dengan mengubah itu, hanya untuk menolong Ari Kuncoro, Presiden mengacak-acak aturannya sendiri. Ini jelas presiden buruk untuk bangsa. Padahal, mentaati segala peraturan perundang-undangan adalah bagian dari sumpah jabatan Presiden ketika dilantik. Sebagai bangsa dan warganegara yang baik kita telah mengingatkan dugaan pelanggaran Rektor UI tersebut. Bulan Juni lalu, saya ikut memberi pandangan melalui tulisan di media berjudul Geger Meme “Jokowi, The King Of Lip Service” Menyeret Juga Ari Kuncoro dan Erick Tohir. Izin mengutip kembali tulisan itu, seutuhnya.

Jokowi, The King Of Lip Service”, menyeret juga nama Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro, SE, MA, PhD.

Praktis sejak kasus meme BEM-UI merebak, Pria kelahiran Jakarta 28 Januari 1962 itu hingga sekarang menjadi sasaran kritik masyarakat luas. Ari dituduh melanggar Peraturan Pemerintah No 68/ 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia. Pasal 35 C PP itu memang melarang Rektor dan Wakil Rektor UI merangkap sebagai

pejabat pada Badan Usaha Milik Negara / Daerah, dan Swasta.

Ari Kuncoro menjadi Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia sejak 18 Februari 2020. Hanya beberapa bulan setelah terpilih sebagai Rektor UI pada tanggal 25 September 2019. Ombudsman Republik Indonesia tegas mengatakan, suami Lana Soelistianingsih (55), Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, melanggar statuta UI.

Anggota Komisi VI DPR - RI Andre Rosiade dari Partai Gerindra bahkan meminta Ari Kuncoro mundur dari jabatan Wakil Komisaris Utama Bank BRI yang memberinya gaji Rp.1,2 Miliar/ bulan. “ Ari Kuncoro harus mengundurkan diri dari Komisaris BRI, “ kata Andre.

Namun, sampai hari ini Ari Kuncoro belum sekalipun memberikan tanggapan atas reaksi publik terkait pasal pelanggaran statuta UI.

Kedekatan Ari Kuncoro dengan Jokowi yang diduga menimbulkan conflict of interest dalam mengemban amanah sebagai rektor UI, memang sulit dibantah. Ada jejak digital yang kuat menunjuk itu. Bukan hanya Ari Kuncoro, melainkan istrinya , Lana Soelistianingsih pun memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Sekurangnya, sejak tahun 2014, ketika masih bekerja sebagai Kepala Ekonom Samuel Aset Manajemen, Lana sudah menjadi die hard Jokowi.

Pernyataannya sempat menarik perhatian media ketika mengatakan jika Jokowi memenangkan pemilu Presiden 2014 maka nilai tukar (kurs) rupiah akan menguat tajam. Kurs rupiah saat itu bertengger di level 11.792 per dolar AS.

“Gendang” Lana ini masih bisa ditemukan di laman Tempo 24 Februari 2014. Judulnya, “ Jokowi Jadi Presiden, Rupiah Tembus 10 Ribu”. Menurut Lana jika Jokowi diajukan sebagai calon Presiden RI oleh PDI-P, sesuai hasil survey, maka partai berlambang banteng itu pun akan memperoleh 20 % suara legislatif.

“ Banyak investor yang menginginkan kestabilan perekonomian. Itu hanya bisa dicapai dengan kestabilan politik. Jika Jokowi dicalonkan dan PDIP meraih suara



20 % suara legislatif, diperkirakan pemilihan presiden hanya akan terjadi satu putaran dan ini menyebabkan akan banyak terjadi arus modal masuk dan rupiah akan menguat,” kata ekonom UI itu.

Jokowi akhirnya memang memenangkan Pilpres 2014. Sukses itu mengantarkan Lana menempati posisinya sekarang : Kepala Lembaga Penjaminan Simpanan.

Adapun Ari Kuncoro, melenggang ke kursi jabatan komisaris Bank BNI. Berikutnya mengikuti proses mulus menduduki kursi Rektor UI. Menyingkirkan 6 kandidat rektor pada waktu pemilihan oleh Majelis Wali Amanah (MWA- UI). Enam kandidat yang tersingkir : Prof. Dr Abdul Harris, dr Agustin Kusumayati M. Sc PhD, DR Ir Arisetyanto Nugroho MM IPU CMA, MSS, Prof Bambang Wibawarta SS MA, Prof DR dr Budi Weko MPH SpOG (K) dan Prof Hikmahanto Juwana, SH, LL M, PhD.

Lawan kuatnya saat pemilihan adalah Prof Budi Weko, dengan mudah ditumbangkan dengan isu dan fitnah pernah membantu aksi 212. Padahal, teman-teman seprofesinya yang meminta agar dia membantu memantau kalau terjadi gangguan kesehatan dalam

acara bermassa besar semacam itu.

Demikian juga dengan nasib calon bagus lainnya, Prof Bambang Wibawarta yang difitnah dekat dengan HTI.

Setelah pemilihan, kandidat Rektor Prof Abdul Harris diangkat menjadi Warek 1 menggantikan Prof Rosari Saleh (Oca) yang dipecat Ari Kuncoro. Kasus pemecatan Prof Rosari masih bergulir di PTUN.

Bukan hanya Ari Kuncoro, Menteri BUMN Erick Tohir pun terseret dalam pusaran gelombang protes publik sejak geger meme “Jokowi, King Of Lip Service”. Yang disorot dalam kepemimpinan Erick ialah pengabaian aspek etika moral dan akhlak dalam pemilihan komisaris di BUMN.

Menyorot soal dugaan konflik kepentingan itu, laman Kompas, Rabu (30/6/21) menunjukkan ada delapan pejabat Teras UI dari dalam lingkaran Istana. Termasuk di dalamnya Erick Tohir sendiri yang masih tercatat sebagai anggota Wali Amanah Mahasiswa UI. Erick diangkat sebagai anggota MAW- UI (wakil dari masyarakat) 26 Maret 2019. Sebelum Erick menjadi menteri, namun sudah menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Pemenangan Jokowi - Ma'ruf.

Tujuh lainnya, Ari Kuncoro, Saleh Husin (Ketua MWA-UI), Sri Mulyani, Jonathan Tahir, putra Dato Sri Tahir, Wiku Adi Sasmito (anggota MWA) yang merupakan Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Nama lain Bambang Brodjonegoro dan Darmin Nasution (Anggota MWA- UI, yang dua-duanya mantan anggota Kabinet Kerja).

Sorotan publik soal akhlak tertuju pada sosok Kemal Arsyad Komisaris Independen Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia).

Dua minggu lalu produser film “Penari” dan “Garuda Di Dadaku” ini diamuk netizen di media sosial. Publik mengecam kata-kata kotor yang dilontarkan Kemal kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. Pada perombakan direksi dan komisaris Askrindo Kamis, 1 Juli kemarin, Kemal Arsyad tetap dipertahankan Erick menjadi Komisaris Independen Askrindo.

Padahal, masih segar dalam ingatan, tiga minggu lalu, Erick berbusa-busa berbicara soal akhlak sebagai “core value” BMUN. Faktor akhlak disebutkan sangat berperan untuk membawa BUMN mencapai reputasi Dunia.

“BUMN tidak kekurangan orang pintar dan hebat. Tapi tidak cukup kapabilitas saja, tidak bisa. Yang penting akhlak. Dengan akhlak bisa mulai level terendah di BMUN dan pengambil keputusan akan mendorong

kemajuan BUMN” ucap Erick ketika menghadiri dan memberi sambutan pada peluncuran buku “Akhlak Untuk Negeri” secara virtual, Rabu (6/6/21).

Jika pernyataan Erick soal akhlak itu dihadapkan pada kasus Kemal Arsyad, tak salah jika ada pengamat menjuluki Erick sebagai “raja kecil” praktek “lip service”. Dalam catatan masyarakat, yang terkait urusan akhlak ini bukan hanya Kemal, tapi ada banyak di BUMN. Satu contoh kelancangan Komisaris Independen PT Pelni, Kristya Budiarto, memecah persatuan bangsa.

Kristya ini pernah bikin kegaduhan, menuduh pengajian Pelni mengembangkan paham radikalisme. Karenanya ia meminta pengajian Pelni pada bulan April, dibubarkan. Minta pejabat Pelni yang mengurus acara pengajian itu dipecat. Tapi, Kang Dede, panggilan akrab komisaris itu, salah info. Belakangan ia pun meminta maaf kepada pengurus MUI KH Cholil Nafis yang hari itu menjadi pengisi acara kajian agama Pelni yang mau dibubarkan Kang Dede.

Kembali ke soal gonjang ganjing di kampus UI. Seorang pejabat MWA -UI, mengakui pasal 35 C PP Statuta UI memang abu-abu. Tidak tegas melarang Rektor UI merangkap komisaris BUMN. Oh, yah?

Pasal 35 C Statuta UI hanya melarang menjadi “pejabat” sehingga tidak bisa Ari Kuncoro serta merta dianggap telah melanggar. Sayang, pejabat MWA yang dihubungi kemarin tidak bersedia disebut namanya.

Definisinya untuk kata “pejabat” di BUMN menarik disimak. Pejabat BUMN, dalam statuta UI, kata tokoh kita itu, bukan orang yang terlibat operasional dan tanggung jawab sehari-hari. Tegasnya, posisinya sebagai Wakil Komisaris Utama di Bank BRI tidak sampai mengganggu dan menyita perhatian Ari Kuncoro sebagai Rektor UI.

Mungkin kawan yang menjadi sumber ini lupa. Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris BRI pernah ikut menandatangani persetujuan dokumen evaluasi kinerja PT BRI sebelum yang bersangkutan sendiri lulus fit & proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pertanyaan, apakah memang seperti itu tata kelola umumnya BUMN kita

- para komisarisnya bergaji besar tapi dilepaskan dari tanggung jawab kerja -- sementara reputasinya mau dipacu Erick menjadi BMUN kelas dunia?

Salah satu kelebihan Pak Jokowi, yang kita catat, adalah menyegerakan ralat jika keliru. Sila Pak. [*]

*) Penulis merupakan salah satu deklarator Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)

MENJAGA ASET BANGSA PALING BERHARGA

Amir Fiqi,*

Anak-anak Indonesia merupakan aset bangsa yang paling berharga, merekalah kelak sebagai penentu masa depan bangsa. Mencetak generasi unggul menjadi tugas penting bagi pemerintah.

Berdasarkan data UNICEF tahun 2020, Indonesia merupakan negara dengan populasi anak terbesar keempat di dunia. Sepertiga dari populasi Indonesia adalah anak-anak dengan total 80 juta jiwa.

Sebagian mereka tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta — kemiskinan urban dan polusi adalah tantangan yang mereka hadapi. Sementara itu, bagi anak di perdesaan terpencil, akses kepada layanan dasar menjadi kenyataan sehari-hari.

Data BPS pada tahun 2018 menjelesakan lebih dari separuh anak Indonesia tersebar di 5 provinsi, yakni di Jawa Barat (18.6%), Jawa Timur (12,8%), Jawa Tengah (12,0%), Sumatera Utara (6.2%), dan Banten (4%). Dan selebihnya sebanyak 46,0% tersebar di provinsi lain.

Besarnya populasi anak-anak di Indonesia patut kita syukuri bersama. Jika diolah dengan baik dan benar, maka mereka akan menjadi potensi yang sangat luar biasa.

Apa yang dimiliki Indonesia jarang sekali dimiliki oleh bangsa-bangsa lain yang didominasi oleh populasi dan tenaga kerja yang sudah menua. Sedangkan Indonesia dua pertiga dari populasi berada dalam rentang usia produktif (15–64 tahun).

Besarnya populasi anak Indonesia atau yang disebut dengan bonus demografi ini akan menjadi menjadi mesin pembangunan yang luar biasa. Maka itu, mulai dari saat ini pemerintah harus membekali generasi muda dengan berinvestasi di berbagai bidang yakni kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan. Jika ini tidak dipersiapkan, maka jangan harap bonus demografi tersebut menjadi berkah, tapi justru sebaliknya menjadi bencana, sebab Indonesia di masa depan tidak diisi oleh generasi muda yang siap bersaing di tatanan perekonomian global.

Kerja keras pemerintah

Tentunya investasi tersebut sedang dijalankan oleh pemerintah. Seperti komitmen Presiden Jokowi untuk mensejahterakan anak-anak Indonesia.

Komitmen tersebut tergambar Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024 yang memprioritaskan pada investasi untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM), termasuk melindungi anak-anak Indonesia.

Dan komitmen itu tidak diragukan, pasalnya pemerintah memiliki serangkaian program bantuan sosial untuk mendukung anak dan keluarga mereka yang dirancang dengan berbagai pendekatan, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga termiskin—dengan syarat mereka harus mengakses layanan kesehatan dan pendidikan



tertentu.

Program Beras Sejahtera (Rastra) memberikan subsidi beras setiap bulan kepada rumah tangga yang berhak menerima. Kemudian Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memberikan kartu tabungan kepada rumah tangga penerima manfaat untuk membeli barang kebutuhan pokok (beras, gula, telur) di toko penyalur bantuan.

Selanjutnya adalah Program Indonesia Pintar (PIP) menyediakan bantuan pendidikan tunai kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin dan rentan.

Selain itu, pemerintah juga memiliki Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang menyediakan bantuan tunai bersyarat (untuk pemenuhan kebutuhan dasar) dan memberikan intervensi sosial (untuk meningkatkan kapasitas keluarga dan ketahanan anak) kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus (anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak berhadapan

dengan hukum, dan anak yang terlantar). Dan program bantuan lain yang menargetkan kelompok penerima tertentu, seperti etnis minoritas atau penyandang disabilitas berat.

Semua rangkaian program bantuan tersebut bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Sebab kemiskinan menjadi problem besar dalam mencetak generasi masa depan bangsa yang unggul dan cerdas.

Fokus atasi stunting

Selain itu, pemerintahan Jokowi sedang fokus untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Masalah stunting ini dapat mengancam masa depan bangsa Indonesia. Sebab anak stunting tidak hanya terganggu pertumbuhan fisiknya, tapi juga mengalami gangguan pada pertumbuhan otaknya. Efek dari masalah ini adalah sumber daya manusia menjadi tidak produktif, sehingga berdampak pada terganggunya kemajuan negara.

Berdasarkan publikasi terbaru WHO (2018) berjudul ‘Reducing Stunting in Children’ menyebutkan secara global pada 2016, sebanyak 22,9% atau 154,8 juta anak-anak Balita stunting. Di Asia, terdapat sebanyak 87 juta Balita stunting pada 2016, 59 juta di Afrika, serta 6 juta di Amerika Latin dan Karibia, Afrika Barat (31,4%), Afrika Tengah (32.5%), Afrika Timur (36.7%), Asia Selatan (34.1%).

Badan Kesehatan Dunia (WHO) membatasi masalah stunting di setiap negara, provinsi, dan kabupaten sebesar 20%, sementara Indonesia baru mencapai 29,6%. Berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) pada 2017, prevalensi Balita stunting di Indonesia dari 34 provinsi hanya ada 2 provinsi yang berada di bawah batasan WHO tersebut, yakni Yogyakarta (19,8%) dan Bali (19,1%). Provinsi lainnya memiliki kasus dominan tinggi dan sangat tinggi sekitar 30% hingga 40%. (kemkes.go.id).

Upaya pemerintah dalam hal ini Kemenkes RI telah melakukan intervensi gizi spesifik meliputi suplementasi gizi makro dan mikro (pemberian tablet tambah darah, Vitamin A, taburia), pemberian ASI Eksklusif dan MP-ASI, fortifikasi, kampanye gizi seimbang, pelaksanaan kelas ibu hamil, pemberian obat Cacing, penanganan kekurangan gizi, dan JKN.

Selain itu, Intervensi dari kementerian lain pun diperlukan, seperti di antaranya ketahanan pangan dibutuhkan peran Kementerian Pertanian, pembangunan sanitasi dan air bersih dibutuhkan peran Kementerian PUPR, serta pembangunan desa dari Kementerian Desa PDTT.

Mencerdaskan anak bangsa

Upaya untuk mencetak generasi unggul juga dilakukan secara serius oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Pada tahun anggaran 2021 Kemendikbud Ristek menyiapkan 7 program prioritas yaitu 1)Pembiayaan pendidikan, 2)Digitalisasi sekolah, 3)Sekolah penggerak

dan guru penggerak, 4)Peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum, 5) Revitalisasi pendidikan vokasi, 6) Program kampus merdeka, dan 7) Pemajuan budaya dan bahasa. (Kompas.com)

Sebut saja misalnya pada Program Pembiayaan Pendidikan, Kemendikbud Ristek telah mengalokasikan Rp27,26 triliun untuk pembiayaan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar Sekolah, tunjangan profesi guru, KIP Kuliah dan pembinaan Sekolah Indonesia Luar Negeri. PIP/KIP Sekolah akan menasar 17,9 juta siswa dengan anggaran Rp9,6 miliar.

Sementara KIP Kuliah akan menasar 1 juta mahasiswa dengan anggaran Rp10 miliar. Lalu, Rp7 miliar akan dialokasikan untuk tunjangan profesi guru yang menasar 363.000 guru.

Sedangkan pada Program Kampus Merdeka, Kemendikbud Ristek juga mengalokasikan dana sebesar Rp 4,42 triliun yang digunakan untuk membantu transformasi perguruan tinggi menjadi universitas yang lebih otonom dan akuntabel.

Mendikbud Ristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan, universitas diberikan kemerdekaan untuk menentukan takdir mereka sendiri-sendiri, untuk bisa menentukan spesialisasi mereka sendiri-sendiri. Termasuk meningkatkan SDM pendidikan tinggi dan membantu perguruan tinggi mendapatkan akreditasi tingkat internasional dan berkompetisi di panggung dunia.

Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mempersiapkan generasi unggul di masa depan patut diapresiasi. Namun, kerja keras pemerintah ini tidak bisa berjalan sendiri. Peran-peran masyarakat sipil, dunia usaha dan semua elemen bangsa yang lain sangat dibutuhkan untuk menjaga aset bangsa yang berharga itu.

Selamat Hari Anak Nasional, Anak Terlindungi, Indonesia Maju

*) Wartawan dan Pemerhati Sosial

GONTA-GANTI ISTILAH KEBIJAKAN

Amir Fiqi*

Sudah satu tahun lebih pandemi Covid-19 melanda bangsa Indonesia. Sejak awal pandemi Covid-19 pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan dengan berbagai istilah. Setidaknya pemerintah sudah 6 kali gonta-ganti istilah kebijakan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, yakni mulai PSBB, PPKM Jawa-Bali, PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan PPKM Level 4 yang berlaku hingga 2 Agustus 2021.

Sudah 6 kali gonta-ganti istilah, tapi usaha memutus mata rantai penyebaran Covid-19 terlihat tak kunjung menunjukkan hasil yang optimal. Malah jumlah angka kasus positif Covid-19 terus bertambah. Saking tingginya Indonesia mendapat julukan baru sebagai episentrum baru Covid-19 di Asia. Bukan tanpa alasan status itu disematkan sebab, rekor kasus harian di Indonesia beberapa hari terakhir menjadi yang tertinggi di dunia, melampaui India.

Tidak hanya gonta-ganti istilah, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga kadang membingungkan dan aneh dipahami masyarakat. Misalnya, aturan baru pada perpanjangan PPKM Level 4 yakni memberikan izin bagi pedagang kaki lima (PKL) dan warung Tegal (Warteg) melayani pembeli makan di tempat dengan batas waktu makan maksimal 20 menit. Anehnya kebijakan tersebut langsung menuai kritikan dari masyarakat. Bahkan aturan tersebut menjadi bahan lelucon.

Hal ini seharusnya menjadi bahan renungan pemerintah. Dengan rentetan aturan yang aneh justru akan merugikan pemerintah sendiri. Sebab kebijakan-kebijakan yang aneh itu bisa menggerus

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 di tanah air. Maka itu pemerintah harus segera menjelaskan kepada publik apa korelasinya antara waktu makan maksimal 20 menit dengan memutus penyebaran/penularan virus corona.

Anggap enteng Covid-19

Tidak hanya soal kebijakan yang aneh, sejak awal virus Corona masuk ke Indonesia terekam dengan jelas para pejabat di negeri ini menganggap enteng persoalan virus Corona. Sebutnya saja, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang pada saat itu terkesan menolak peringatan-peringatan yang disampaikan lembaga dunia dan penelitian-penelitian berbagai universitas dunia bahwa virus Corona bisa saja menyerang Indonesia. Malah dengan entengnya dia mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu panik menghadapi penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Contoh lain, Menko Polhukam Mahfud MD sejumlah pernyataannya menyikapi masuknya virus Corona sebagai bahan candaan. Mantan Ketua MK itu mengatakan bahwa Covid-19 tidak mungkin bisa masuk ke Indonesia, sebab untuk masuk ke Indonesia harus melalui izin yang berbelit-belit. Respon yang sama juga disampaikan oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Ia mengatakan bahwa orang Indonesia akan sulit terpapar Covid-19 sebab masyarakat Indonesia gemar meminum jamu tradisional. "Apakah mungkin karena kita sering minum jamu atau mungkin karena kita sudah kebal dari dulu karena sudah sering kena batuk pilek jadi begitu ada virus dikit saja virusnya mental." (detik.com)

Alhasil, dengan menganggap enteng krisis Covid-19 ini sehingga pemerintah terlihat “gagap” saat menghadapi gelombang penularan Covid-19 yang semakin mengganas. Yang muncul malah masalah-masalah baru yang muncul misalnya kelangkaan ketersediaan oksigen, rumah sakit yang tidak memadai, dan langkanya obat-obatan.

Kebijakan yang usang

Saat ini pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021. Perpanjangan PPKM menjadi Level 3 dan 4 yang ditindaklanjuti melalui instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) bisa dianggap sebagai strategi usang. Sebab, sejak awal pandemi ini melanda pemerintah terlihat hanya gonta-ganti istilah kebijakan saja dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19.

Gonta-ganti istilah kebijakan yang dibuat pemerintah justru hanya ingin memperlihatkan bahwa seolah-olah pemerintah giat bekerja dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di tanah air.

Seharusnya pemerintah tidak perlu mengeluarkan banyak istilah, cukup pemerintah melakukan langkah yang berani dalam memerangi virus corona. Misalnya dengan mengeluarkan kebijakan dengan melakukan karantina total untuk wilayah yang berstatus gawat.

Jika sejak awal virus corona masuk ke Indonesia pemerintah berani mengambil langkah yang berani dengan mengkarantina total wilayah DKI Jakarta dan daerah sekitarnya bisa jadi virus corona tidak bergerak bebas masuk ke wilayah-wilayah lain di tanah air. Dan



jika dihitung anggarannya untuk karantina total wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya bisa jadi lebih sedikit dibanding anggaran yang saat ini pemerintah gelontor selama pandemi Covid-19.

Anggaran yang sudah keluar sangat banyak tapi upaya memutus mata rantai penyebaran tidak maksimal. Angka kasus positif terus meroket. Dan angka kematian harian pasien Covid-19 hari demi hari jumlahnya meningkat. Bahkan angka kematian harian pasien Covid-19 di Indonesia menempati peringkat pertama berdasarkan data Worldometers pada Rabu (28/7) yakni sebanyak 2.069 orang dan disusul Brasil dengan angka kematian harian sebanyak 1.320 kematian.

Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia pemerintah harus berani membatasi mobilitas warganya. Dan kebijakan yang dibuat untuk membatasi mobilitas benar-benar diterapkan bukan hanya sekadar di jalankan, apalagi dengan membuat kebijakan yang aneh dan membingungkan. Jika masih bekerja seperti saat ini maka jumlah angka kasus di Indonesia tidak akan kunjung melandai. Sementara itu, program vaksinasi yang diharapkan menjadi tameng Covid-19 juga menghadapi kendala, sebab stok vaksin yang tersedia juga terbatas. Sehingga untuk menciptakan kekebalan komunal juga lama terwujud.

Sebagai anak bangsa pasti akan terus memanjatkan doa kepada Tuhan YME agar wabah ini segera diangkat dari bumi Indonesia. Tapi tidak hanya sekadar doa, kerja keras juga harus dilakukan oleh pemerintah, dan semua elemen bangsa untuk bersama-sama melawan virus corona.

*) Wartawan dan Pemerhati Sosial

BALIHU POLITIK DAN POPULARITAS

Amir Fiqi*

Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 masih lama. Namun panggung politik nasional sudah mulai menghangat di tengah bangsa ini sedang berjuang keras melawan pandemi Covid-19. Di tengah kondisi bangsa yang serba sulit, sejumlah lembaga survei pun turut menghangatkan panggung politik nasional, dengan tak henti-hentinya mendongong-dongongkan sejumlah nama yang dianggap potensial untuk bertarung pada Pilpres 2024 mendatang.

Misalnya survei terbaru yang dikeluarkan oleh Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic). Dalam hasil survei tersebut menempatkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai Capres terkuat dengan tingkat elektabilitas sebesar 17,5 persen. Disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 17 persen. Dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan 8,1 persen.

Selanjutnya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menempati urutan keempat dengan 7 persen, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno dengan 6,8 persen. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berada di posisi enam dengan 6,4 persen.

Hasil survei yang dilakukan Indostrategic tidak jauh beda dengan hasil lembaga-lembaga survei yang lain. Hanya nama-nama tersebut yang selalu muncul dan dianggap sebagai calon potensial untuk bertarung pada Pilpres 2024 nanti.

Tentunya hasil survei tersebut tidak menggembirakan bagi partai politik yang memiliki “hasrat” untuk mencalonkan sosok tertentu. Maka itu, upaya untuk meningkatkan popularitas pun sejak dini harus dilakukan. Sebab jika tidak, maka untuk meningkatkan elektabilitas akan sangat sulit. Sebab, waktu tiga tahun yang tersisa menuju kontestasi Pilpres terbilang sangat

singkat.

Dongkrak Popularitas Puan

Langkah tersebut terlihat sedang dimainkan oleh PDI Perjuangan yang berupaya terus meningkatkan popularitas Ketua DPR RI Puan Maharani dengan cara menebar baliho politik di sejumlah daerah di Indonesia.

Melalui kalimat “Kepak Sayap Kebhinnekaan” meski tidak secara langsung PDI Perjuangan sedang berupaya memperkenalkan Puan kepada masyarakat sebagai calon pemimpin Indonesia untuk menggantikan Presiden Joko Widodo. Padahal jika melihat hasil survei PDI Perjuangan seharusnya tidak perlu lelah untuk memunculkan sosok baru karena sudah memiliki kader yang potensial untuk bertarung di Pilpres 2024 yaitu Ganjar Pranowo.

Langkah yang sama juga sedang dilakukan oleh Partai Golkar. Baliho politik dengan kalimat “Airlangga Hartarto- Kerja Untuk Indonesia” sebagai upaya untuk mendongkrak popularitas Ketua Umumnya.

Meskipun menuai kritik dan cibiran dari masyarakat karena menebar baliho politik di saat masyarakat sedang berjuang menghadapi kesulitan di tengah serangan wabah Covid-19, tapi langkah tersebut terbilang efektif untuk mendongkrak popularitas. Ramainya percakapan soal baliho Puan Maharni di pemberitaan dan media sosial ternyata efektif untuk mengerek popularitas Ketua DPR RI tersebut. Hal itu terlihat dari hasil analisis Drone Emprit, sistem monitoring percakapan di platform online berdasarkan big data.

Berdasarkan hasil monitoring Drone Emprit pada 7 Juli 2021-7 Agustus 2021, dari sejumlah tokoh politik yang memasang baliho, hanya Puan yang popularitas atau share of voices di berita daring dan Twitter bertengger di urutan empat besar. Eksposur masing-masing tokoh di berita daring dan Twitter mulai dari

yang teratas yakni Anies Baswedan (43% berita daring-50% Twitter), Ganjar Pranowo (25% - 27%), Ridwan Kamil (19% - 12%) dan Puan Maharani (13% - 12%). Bahkan, menurut pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, lewat akun Twitturnya, @ismailfahmi, Senin (9/8) tren popularitas Puan dalam sebulan terakhir hampir mengejar tren Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Fahmi menjelaskan, popularitas merupakan gabungan percakapan yang bernada positif, negatif, dan netral tanpa memandang apapun sentimennya. Dari popularitas, lanjut Fahmi, diharapkan favorabilitasnya (sentimen positif-negatif) naik, lalu dikapitalisasi menjadi elektabilitas.

Mengejar Elektabilitas

Langkah PDI Perjuangan dengan menebar baliho Puan Maharani di sejumlah daerah di Tanah Air menurut hemat penulis sebagai strategi untuk meningkatkan keterkenalan atau popularitas Ketua DPR RI itu. Sebab untuk mengejar elektabilitas proses yang harus dilalui adalah terus meningkatkan popularitas.

Maka itu, meski pemasangan baliho politik tersebut menuai kritik dan cibiran dari masyarakat langkah tersebut sengaja dilakukan dengan segala risikonya. Sebab PDI Perjuangan pasti menyadari bahwa sosok Puan belum terlalu populer meski saat ini dia menjabat posisi strategis di negeri ini yakni sebagai Ketua DPR RI. Kepopulerannya masih jauh tertinggal dari teman separtainya, yakni Ganjar Pranowo.

Saat ini yang sedang dibangun Puan Maharani adalah bagaimana terus meningkatkan popularitasnya. Jika popularitas tersebut sudah terbangun, langkah selanjutnya adalah mengerek elektabilitas dengan melakukan kerja-kerja politik yang lebih nyata. Sebab untuk bisa meraih elektabilitas yang tinggi diperlukan kerja politik yang nyata, sehingga akan terbangun



dukungan dari masyarakat.

Dengan menjabat sebagai Ketua DPR RI peluang Puan untuk terus mendorong elektabilitasnya sangat terbuka lebar. Maka yang harus dilakukan adalah membangun kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat.

Situasi pandemi Covid-19 ini adalah momentum yang tepat bagi Puan Maharani untuk semakin dekat dengan rakyat, yakni dengan berdiri paling depan memberikan solusi atasi kesulitan rakyat. Bukan hanya menebar baliho politik yang tidak memberikan manfaat bagi rakyat, malah hanya terlihat memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan kekuasaan semata.

Jika situasi ini dimanfaatkan sebaik mungkin dengan dibuktikan dengan kerja nyata memberikan solusi dari permasalahan bangsa maka untuk mengerek elektabilitas bisa mungkin terjadi. Sebab mayoritas pemilih pada 2024 nanti adalah anak-anak muda yang rasional. Mereka termasuk pemilih yang cerdas dan kritis, tidak gampang hanya dipengaruhi pesan kosong baliho.

Pemilih rasional mampu memilih dan memilah informasi terkait rekam jejak calon presiden dan wakil presiden. Mereka membutuhkan pemimpin yang kerja nyata. Karena itu, cara paling efektif menarik simpati pemilih di masa pandemi ialah turun ke lapangan. Ketimbang uang dihaburkan untuk memasang baliho.

Akhirnya, pemimpin sejati bukan lahir dari kata-kata kosong baliho politik. Pemimpin sejati adalah berdiri di tengah untuk memberikan solusi dan menjadi penuntun dari segala permasalahan yang sedang dihadapi oleh rakyatnya.

*) Wartawan dan Pemerhati Sosial

MENJADI BANGSA YANG DIPERHITUNGKAN

Amir Fiqi*

Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Republik Indonesia telah merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76. Kemerdekaan merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri bersama.

Menjadi bangsa yang merdeka menjadi cita-cita para pahlawan kusuma bangsa. Mereka telah berjuang setulus hati, tidak hanya harta, nyawa pun mereka ikhlas korbankan untuk menghantarkan Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dari cengkraman penjajah.

Kata Merdeka bukan hanya sekadar kata biasa, tapi memiliki makna yang sangat luar biasa jika direnungkan secara mendalam. Ini akan menjadi kekuatan yang sangat besar untuk mengubah kondisi bangsa.

Merdeka berasal dari bahasa Kawi/Sanskerta yakni maharddhika. Secara etimologis memiliki arti rahib/biku atau sakral, bijak atau terpelajar. Dalam bahasa Jawa Kuno (Kawi), kata merdeka sering dinisbahkan kepada para pendita atau biku Buddha. Mengingat status para biku yang begitu tinggi dalam sistem stratifikasi sosial umat Buddha, kata merdeka mengandung arti 'seseorang/sesuatu yang memiliki kedudukan yang terhormat dan mulia'.

Dilihat dari sudut ini, mengutip cendekiawan Indonesia, Yudi Latif pekik merdeka para pejuang merefleksikan cita-cita emansipatoris untuk membebaskan diri dari pelbagai bentuk ketidakadilan, dalam distribusi kepemilikan, kesempatan, dan kehormatan. Orang-orang dari segala kelas dan kelompok sosial berbagai

impian untuk diperlakukan setara sebagai warga terhormat.

Daya saing masih lemah

Dalam pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia dijelaskan tujuan bangsa Indonesia yakni "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Setelah bangsa ini sudah berumur 76 tahun, apakah semua tujuan tersebut sudah sepenuhnya terpenuhi? Jawabannya bisa kita rasakan sendiri. Memang belum sepenuhnya terpenuhi, tapi sebagai warga negara yang baik harus memberikan apresiasi atas kerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini.

Pada tulisan ini, penulis lebih menekankan pada tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab kata merdeka sendiri memiliki arti bijak dan terpelajar. Untuk mencapai itu maka kuncinya pada pendidikan.

Meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi keniscayaan untuk benar-benar menjadi bangsa merdeka. Pendidikan yang berkualitas lah yang mampu mencetak generasi-generasi yang cerdas, berilmu dan berakhlak, yang kelak akan mengubah wajah Indonesia menjadi bangsa yang terhormat dan diperhitungkan dipersaingan global.

Menjadi pertanyaan penting, mengapa hingga saat ini

Indonesia belum menjadi bangsa yang diperhitungkan. Tidak usah bicara pada tataran global itu sangat terlalu jauh, di kawasan Asia Tenggara saja dalam bidang pendidikan Indonesia masih tertinggal dengan negara tetangga, Malaysia dan Singapura.

Berdasarkan Education Index yang dikeluarkan oleh Human Development Reports, pada tahun 2017, Indonesia ada di posisi ketujuh di ASEAN dengan skor 0,622. Posisi Indonesia masih kalah dibanding Thailand dan Filipina yang sama-sama memiliki skor 0,661.

Sedangkan untuk posisi pertama ditempati Singapura dengan skor 0,832. Malaysia menempati peringkat kedua dengan skor 0,719. Kemudian disusul oleh Brunei Darussalam dengan skor 0,704.

Kualitas pendidikan yang masih tertinggal ini menjadi penyebab Indonesia lemah untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Berdasarkan Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2019 Indonesia berada di urutan 67 dari 125 negara di dunia.

Sedangkan untuk wilayah ASEAN Indonesia menempati posisi keenam dengan skor 38,61. Singapura kembali menempati peringkat pertama dengan skor 77,27. Selanjutnya disusul oleh Malaysia (58,62), Brunei Darussalam (49,91), dan Filipina (40,94).

Agar Indonesia mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, maka tidak ada cara lain dengan terus meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.

Presiden Joko Widodo sendiri telah menyadari bahwa daya saing Indonesia masih tertinggal dibanding bangsa-bangsa lain. Maka itu di masa kepemimpinannya jumlah anggaran untuk pendidikan setiap tahun terus ditambah. Pada tahun 2017 anggaran pendidikan sebesar Rp406,1 T. Tahun 2018 (Rp431,7 T), tahun 2019 (Rp460,3 T), tahun 2020 (Rp547,8 T) dan tahun 2021 (Rp550 T). (kemenkeu.go.id)

Presiden Joko Widodo mengatakan pada periode kedua pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan menjadi fokusnya. Negara harus hadir langsung berinvestasi membangun SDM, melalui investasi inilah maka di masa depan bangsa Indonesia memiliki daya saing dalam persaingan global.

Membangun daya saing

Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) menjadi kunci untuk membangun kekuatan daya saing agar menghasilkan produk bernilai tambah dan memberikan keunggulan kompetitif.

Kesadaran akan pentingnya Iptek sebanar jauh jauh hari sudah disampaikan oleh Bung Karno. Dimana pada saat itu Presiden Sukarno dalam pidatonya pada kongres Ilmu Pengetahuan Indonesia tang pertama di Malang, tahun 1958 menyatakan bahwa “Bangsa ini hanya akan maju dan sejahtera jika pembangunannya dilandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kesadaran akan pentingnya Iptek harus terus digelorakan tidak hanya oleh pemerintah tapi semua elemen bangsa. Dengan semangat gotong royong ini maka membangun bangsa yang memiliki daya saing ini akan segera terwujud.

Pemerintah sendiri harus terus meningkatkan peranan riset dan inovasi. Ini sangat dibutuhkan jika bangsa ini ingin maju dalam sektor ekonomi dan industri. Melalui riset dan inovasi, industri nasional diharapkan mampu memacu peningkatan daya saing.

Dalam konteks Indonesia, negara ini sebenarnya sudah memiliki UU nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Pengetahuan dan Teknologi (SNIPT). Salah satu bunyi UU itu adalah mengamantakan perlu segera didirikannya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dan hal tersebut telah terwujud, pada Rabu, 5 Mei 2021, Presiden RI Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 yang mengatur tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Berdasarkan Perpres yang disahkan oleh Presiden Jokowi, BRIN akan membawahi empat lembaga penelitian nasional.

Keempat lembaga penelitian nasional tersebut antara lain Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Diharapkan dengan berdirinya BRIN tersebut akan mengungkit daya saing bangsa Indonesia dengan inovasi-inovasinya. Dan risetnya menjadi solusi dari berbagai permasalahan bangsa.

Sebagai penutup, kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari cengkraman penjajah. Tujuan utama dari merdeka bagaimana bangsa ini terhormat dan diperhitungkan oleh bangsa lain. Mencerdaskan kehidupan bangsa itulah kuncinya. Dengan bangsa ini memiliki generasi yang cerdas maka kita akan mampu bersaing dalam tataran global. Sehingga bangsa ini akan menjadi bangsa yang mulia.

*) Wartawan dan Pemerhati Sosial

SETENGAH HATI BERANTAS KORUPSI

Amir Fiqi,

Rasa keadilan di negeri ini kembali terluka setelah majelis hakim memvonis ringan terdakwa kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19, Juliari Batubara. Alasan majelis hakim meringankan hukuman bagi Eks Menteri Sosial itu terkesan mengada-ada, karena terdakwa sudah cukup menderita mendapatkan “bullying” dari masyarakat berupa cacian dan penghinaan. Padahal Juliari belum dinyatakan bersalah secara hukum.

Sikap baik penegak hukum kepada para koruptor, sebelumnya juga pernah diberikan kepada Pinangki Sirna Malasari. Meski sudah terbukti melakukan tindak pidana dan pencucian uang, jaksa yang tersandung suap kasus Djoko Tjandra ini divonis empat tahun penjara. Padahal, sebelumnya Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Dan alasannya sama, yakni kasihan karena terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya.

Jika alasan tersebut yang dipakai oleh majelis hakim, seharusnya Angelia Sondakh mendapatkan perlakuan hukum yang sama, sebab pada saat itu dia juga memiliki balita dan beban dia lebih berat sebagai single parent.

Tapi kenyataan jauh berbeda, tidak mendapat keringanan, malah hukuman Angelia Sondakh diperberat yang awalnya dihukum 4,5 tahun menjadi 10 tahun penjara.

Sanksi sosial

Kembali ke soal Juliari, penilaian majelis hakim yang menganggap bahwa reaksi publik terhadap tindakan Juliari sebagai bullying merupakan pandangan yang mengada-ada. Mengutip apa yang disampaikan Direktur Riset Setara Institute Hilali Hasan bahwa bullying

itu selalu melibatkan relasi kuasa superioritas, atau dominasi dari pelaku kepada korbannya. Dalam tindakan bullying, superioritas itu diekspresikan dalam tindakan verbal dan nonverbal yang merendahkan atau menyakiti, baik fisik maupun psikis.

Menurutnya dalam kasus Juliari, apa yang disebut hakim bahwa masyarakat melakukan bullying atas Juliari, itu jelas mengada-ada dan tidak berdasar. Cacian masyarakat kepadanya sangat wajar diungkapkan. Sebab dia telah melakukan kejahatan yang membuat masyarakat semakin menderita di tengah kesulitan pada situasi pandemi Covid-19.

Cacian masyarakat yang ditujukan kepada Juliari seharusnya dimaknai oleh majelis hakim sebagai sanksi sosial bukan sebagai bullying. Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sanksi sosial harus dilakukan oleh masyarakat. Hal ini untuk membuat jerah para koruptor sehingga malu dan kedepan tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Sanksi sosial yang lain misalnya dengan pengucilan di bidang politik yakni mengajak masyarakat agar tidak memilih eks koruptor, meski hakim tidak mencabut hak politiknya. Tak cukup sampai di situ, pengucilan terhadap eks koruptor juga harus dilakukan di bidang profesional. Misalnya jika koruptor adalah pejabat dengan latar belakang akademisi, jangan lagi diberikan kemewahan panggung akademik.

Meminjam istilah yang populer sekarang koruptor harus “ditandai mukanya” dan tidak dibiarkan mendapatkan kesempatan untuk kembali memegang jabatan.

Vonis yang ringan

Majelis hakim menghukum Eks Mensos Juliari dengan penjara selama 12 tahun. Vonis tersebut memang lebih tinggi satu tahun dari tuntutan jaksa KPK, tapi tidak sesuai dengan harapan pegiat antikorupsi yang menganggap



Juliari patut dihukum lebih berat. Jika merujuk pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang dilakukan Juliari bisa diinterpretasikan sebagai korupsi dalam keadaan krisis, yang hukumannya mesti diperberat.

Maka, vonis ringan tersebut telah mencederai perasaan publik yang telanjur berharap tinggi agar Juliari dapat dihukum seberat-beratnya. Pasalnya Ketua KPK, Firli Bahuri pada awal-awal terkuaknya kasus korupsi pengadaan bansos penanganan Covid-19 sudah menyatakan bahwa Juliari dapat dituntut dengan hukuman mati.

Vonis ringan kepada Juliari dan para koruptor lainnya menjadi cermin bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih setengah hati. Sebab, para penegak hukum masih bisa tersenyum manis kepada para koruptor dengan mengurangi masa hukuman. Jika ini terus dibiarkan maka upaya pemberantasan korupsi di Indonesia semakin jauh dari harapan.

Jika merujuk Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2020 yang dilansir oleh Transparency International sudah menjelaskan dengan jelas bahwa nasib pemberantasan korupsi yang tidak menentu dan bahkan mengalami kemunduran.

Skor CPI dan peringkat global Indonesia turun drastis, dari skor 40 pada tahun lalu menjadi hanya 37 pada

2020. Sementara peringkat global Indonesia dari 85 dunia kembali turun menjadi 102.

Data TI ini menjelaskan bahwa politik hukum pemerintah semakin menjauh dari agenda penguatan pemberantasan korupsi. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, Indonesia selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Praktis hanya tahun 2013 dan 2017 yang stagnan di skor 32 dan 37, sedangkan sisanya selalu mengalami kenaikan.

Untuk itu, merosotnya skor CPI 2020 Indonesia semestinya menjadi koreksi keras bagi kebijakan pemberantasan korupsi Pemerintah yang selama ini diambil justru memperlemah agenda pemberantasan korupsi.

Kasus Juliari dan Pinangki ini memperkuat anggapan publik bahwa upaya pemberantasan korupsi di tanah air masih setengah hati. Hukuman yang ringan ini akan membawa bangsa Indonesia menjadi surga bagi para koruptor. Ini sangat berbahaya. Koruptor semakin berani beraksi maka agenda pembangunan nasional yang akan menjadi korbannya. Jika agenda pembangunan nasional terkendala maka mimpi menjadi bangsa yang tumbuh benar-benar hanya sekadar mimpi.

*) Wartawan dan Pemerhati Sosial

JANGAN ALERGI KRITIK

Amir Fiqi

Mural atau lukisan dinding karya seniman jalanan akhir-akhir menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, karya para seniman jalanan yang bernada kritikan terhadap pemerintah itu dalam hitungan jam dihapus.

Aksi penghapusan mural tersebut ternyata tidak meredam semangat mereka untuk terus mengekspresikan keresahan mereka. Mati satu tumbuh seribu, satu mural dihapus, muncul mural-mural baru.

Seperti saat mural “Kami Lapar Tuhan” di Kebun Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat dihapus, muncul mural baru yang diduga memuat gambar Presiden Joko Widodo muncul di Jalan Kebaguran Raya, Pasar Minggu Jakarta Selatan. Hal yang sama juga terjadi di Karawang, Jawa Barat, saat mural berbunyi “Pemerintah Kami Kelaparan Not Found” dihapus, muncul mural baru dengan kalimat “Jangan Panik Ini Cuma Mural”. Dan ini tidak hanya terjadi di Jakarta dan Karawang, tapi terjadi di berbagai tempat di Tanah Air.

Penghapusan mural bernada kritikan terhadap pemerintah berujung pada munculnya “perlawanan” dari para seniman jalanan di Tanah Air. Seperti dilakukan oleh Gejayan Memanggil yang mengundang para seniman di Tanah Air untuk mengikuti ‘Lomba Mural Dibungkam’. Lomba tersebut diadakan sebagai perlawanan atas tindakan aparat kepolisian atau pemerintah daerah yang belakangan ini kerap menghapus mural bernada kritikan.

Kritik yang pedas juga dilontarkan oleh seniman visual, Anagard yang mengatakan bahwa Indonesia belum merdeka jika bersuara maupun mengkritik lewat media seni pun masih dibungkam. “Gimana mau sebut merdeka, bersuara dalam kesenian saja dibungkam. Padahal seni adalah ekspresi yang halys dalam mengekspresikan pendapat”. (detikcom).

Saluran ekspresi

Jika menengok sejarah, mural bernada kritikan bukan barang baru di negeri ini. Pada masa perjuangan

merebut kemerdekaan, mural dijadikan sarana ekspresi untuk menyampaikan suara hati rakyat yang merindukan kemerdekaan.

Maka itu, pemerintah seharusnya tidak perlu berlebihan dalam meresponnya, serta tidak perlu takut dengan munculnya mural-mural bernada kritikan. Ini hanya sebagai saluran ekspresi yang ingin mereka sampaikan atas keresahan-keresahan yang sedang mereka alami.

Selama pandemi Covid-19 para seniman jalanan ini merasakan masyarakat kesulitan dalam mencari nafkah. Sehingga mereka mengungkapkan isi hatinya bahwa mereka dalam kondisi yang sulit. Sedangkan bantuan yang diberikan pemerintah tidak merata.

Tindakan reaktif yang dilakukan pemerintah justru makin memperkuat dugaan bahwa pemerintah saat ini alergi terhadap kritik yang disampaikan oleh rakyatnya. Sebab, setiap kritik yang disampaikan oleh rakyat berakhir dengan pembukaman. Selain itu, tindakan reaktif tersebut juga akan melahirkan kemarahan susulan dari masyarakat yang lebih luas.

Tindakan reaktif hingga resresif ini justru akan merugikan pemerintah sendiri. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin luntur, terutama di kalangan anak-anak mudanya. Seharusnya di tengah krisis yang berat ini pemerintah merangkul semua elemen bangsa untuk besatu dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Menjaga demokrasi

Di tengah badai krisis Covid-19 saat ini merawat demokrasi di negeri ini harus tetap berjalan. Jangan sampai atas dalih krisis suara kritik dari masyarakat malah dibungkam.

Pembungkaman suara rakyat akan menjadikan praktik demokrasi di negeri ini berjalan tidak sehat. Demokrasi yang sehat jika rakyat berpartisipasi aktif dalam menjalankan fungsinya yakni mengawasi, dan mengevaluasi setiap kebijakan politik pemerintah yang



salah satunya terkait penanggulangan pandemi.

Krisis yang terjadi di Indonesia jangan dijadikan alasan untuk menghambat rakyat berfikir kritis. Demokrasi di negeri ini harus tetap diberikan kekuasaan dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk menyampaikan kritik. Sebab, demokrasi adalah kedaulatan secara mutlak berada di tangan rakyat, bukan terletak pada kekuasaan. Meskipun kritik itu pahit, pemerintah tidak boleh membungkam komentar, suara dan ekspresi yang diungkapkan oleh rakyat selagi kritik yang disampaikan masih sejalan dengan aturan konstitusi bukan ujaran kebencian, fitnah, pembunuhan karakter, atau menyerang hal privat pemerintah.

Maka itu, dalam situasi dan kondisi apa pun, suara kritis rakyat seperti mahasiswa, pers, penggiat anti korupsi, dan aktivis kemanusiaan tidak boleh dibungkam, disumbat, disensor, dibatasi, dan dikristalkan oleh negara. Meskipun, negara mengalami multikrisis, rakyat tetap tampil kritis dalam menghasilkan demokrasi sehat.

Dalam menghadapi berbagai ekspresi rakyat tersebut, maka pemerintah atau pemangku kebijakan tidak boleh alergi. Mestinya, pemerintah harus sudi dan sabar untuk mendengar suara hati rakyat.

Ekspresi demokrasi jangan dianggap sebagai batu penghambat bagi pemerintah dalam melahirkan loncatan-loncatan cepat, terarah dan terukur. Sebab, melalui kritik yang bersumber dari rakyat itu, pemerintah tentu bekerja lebih cepat, tepat dan terukur dalam menyelesaikan setiap krisis yang dihadapi.

Demokrasi yang sehat justru menjadi katalis yang diperlukan dalam suatu negara demokratis. Demokrasi pada dasarnya adalah kebebasan rakyat yang bertanggung jawab. Ia bersandar pada nilai-nilai

kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan.

Kebebasan berbicara (freedom of speech) adalah suatu kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas, tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan oleh kekuasaan.

Kembali pada penghapusan mural yang bernada kritikan, ini bisa membawa demokrasi di Indonesia tidak sehat. Sebab, ekspresi yang disampaikan oleh rakyatnya melalui seni pun dibungkam. Padahal seni adalah kritik yang paling halus untuk mengekspresikan dari kenyataan hidup yang dirasakan oleh rakyat. Jangan sampai tindakan reaktif hingga resesif tersebut semakin memperkuat bahwa demokrasi di negeri ini terancam.

Berdasarkan Indeks Demokrasi 2019, Indonesia masuk dalam kategori demokrasi cacat. Dalam indeks tersebut Indonesia mendapatkan skor 6,48 dan menempati peringkat 64 dari 167 negara yang disurvei. Kebebasan sipil di Indonesia dalam Indeks Demokrasi 2019 adalah yang terendah di antara indikator lainnya. Pada skala 10, nilai kebebasan sipil Indonesia mencapai 5,59. Sementara nilai budaya politik Indonesia mencapai 5,63 poin.

Demokrasi di Indonesia terancam juga telah digambarkan oleh hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research Center (SMRC) 2019, yang menyimpulkan kebebasan sipil di era Joko Widodo memburuk. Berdasarkan survei yang dilakukan Mei-Juni 2019 tersebut, 43 persen responden menyatakan takut menyampaikan pendapat. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan pada tahun 2014 yang hanya 24 persen.

Pemerintah jangan alergi terhadap kritik. Kritik yang disampaikan oleh rakyat harus dijadikan energi untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat. Jangan bungkam suara rakyat hanya untuk kepentingan kekuasaan semata.

*) Wartawan dan Pemerhati Sosial

SELAMAT DATANG PARTAI RAKYAT

Mujamin Jassin*

Pertama-tama rasanya saya ingin menyembunyikan diri, lantaran takut terkurung oleh reruntuhan ambisi politik yang kebablasan. Tak tahu mengapa tiba-tiba saja saya terangsang menyelundupkan sajian sastra – surat ringkas ini.

Apakah mungkin karena pesan angin yang membawa berita tentang negeriku yang begitu melimpah kemujurannya? Tetapi juga rapuh karena menumpuk persoalan? Memudarnya sikap keutamaan-keadaban (value) akibat banyak golongan politikus tua yang ingin memalingkan kita pemuda dari sejarah, dan berupaya membutuhkan kita pada sebuah kemutlakan pembaruan (regenerasi).

Yang pasti saya terkagum dengan kemegahan Partai Rakyat ini, istimewa karena kesadaran totalitas keterlibatan kaum muda di dalamnya sebagai punggawa yang menahkodai partai. Estafet kepemimpinan mulai I Ketut Tenang, Nugroho Prasetyo dan kini diketuai pemuda belia sang “panglima” Arwindo Novia, ruar biasa!

Saya memahami bahwa aktivitas semesta politik teramat berbeda dengan dunia interaksi sosial lainnya. Maka pertanyaan kemudian, bagaimana Partai Rakyat, nalar dan ekpresi idealisme yang di miliki pemuda sebagai ketua umum berpeluang besar menjadi patron baru berpolitik di tengah kebobrokan kualitas politik dan politisi nasional negeri ini?

Respons, baik sejarah, perkembangan tradisi politik, perdebatan gagasan politik kebaruan, kekayaan ide-ide pembangunan peradaban, hingga hal mendasar. Diagnosis yang semacam apa yang diyakini mampu menjawab, yang mendesak diperlukan dan dapat diajukan oleh Partai Rakyat? Usaha, imajinasi pergerakan, atau terobosan apa yang ditawarkan untuk merekonstruksi bangunan demokrasi dan kebangsaan kita yang hingga hari ini belum menunjukkan substansinya.

Hemat saya Indonesia memerlukan genre politik dan parpol baru untuk mereinterpretasikan secara fundamental ide-ide besar pembangunan yang di cita-citakan bersama kemerdekaan Indonesia.

Sebab apapun itu, yang paling inti dari partai politik dan politisi di anggap pangkal kehidupan berbangsa dan

bernegara ini hanyut dalam berbagai persoalan. Baik dari aspek ketidak becusan, watak buruk inkonsistensi pemimpin nasional, kegentingan ketidakadilan, ketertinggalan pembangunan, ketimpangan (gap) ekonomi dan sosial lainnya.

Kapal Indonesia di usianya 76 tahun merdeka, perkembangannya sejauh ini masih berkutat pada euphoria semu. Indonesia yang sebelumnya selama 32 tahun perpolitikannya yang monolitik bertengger di bawah tangan kekuasaan rezim otoriterian Orde Baru. Hingga pasca Orde Reformasi yang kini telah membawa kita melewati empat kali Pemilu. Politik negara masih saja gagal, belum mampu membuktikan, atau mengkonversi perjalanan sejarahnya dengan perbaikan-perbaikan, ril kemajuan, nikmat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Multi partai terkadang dipandang sinis, mubazir buat negara kelebihan muatan. Geliat kelahiran partai baru dianggap hanya menjangkit penyakit kebisingan isu-isu politik, misalnya saja isu kekinian saling gigit (kanibalisasi) antar parpol yang pro kontra soal ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Rakyat curiga, perihal PT tersebut bukan instrumen politik untuk mengkoreksi demokrasi agar semakin ideal memenuhi hak-hak konstitusional rakyat Indonesia.

Kendati begitu, saya belum baca memang preambule (politik gagasan) atau a,b,c-nya Partai Rakyat. Saya meyakini obsesinya akan menjadi nutrisi bagi Demokrasi. Partai politik sebagai institusi politik yang diakui hukum negara sebagai penunjang utama pilar demokrasi, dalam konteks itu Partai Rakyat akan diuji secara empirik, akan unjuk gigi menyantap “rekonstruksi total” (antitesis) dari cara-cara lama berpolitik? Rakyat Indonesia apakah menemukan sandaran politiknya pada partai rakyat, atau nantinya partai ini akan mengalami hal kesialan, seperti juga keadaan naas yang diamali oleh parpol-parpol lama maupun baru yang telah lebih dulu gugur?

Hanya ini surat cintaku sebagai pemuda, kutaruh hormat pada pemimpin muda yang tegak, setia pada keluhuran cita-cita kebangsaan. Semoga suratku tak menjadi wabah politik. Selamat ulang tahun partai rakyat, berkibarlah! [*]

*Oleh: Penulis adalah pemuda penikmat buku-buku puisi, novel, dan sastra.



YUSRIL AJUKAN JUDICIAL REVIEW, ELIT PARTAI DEMOKRAT KETAR-KETIR

Jurhum Lantong

Nyaris sepekan belakangan, nama politisi dan ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, kembali jadi trending topik di linimasa. Pokok pangkalnya bermula dari pengajuan judicial review Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.

Yusril mengklaim jika pengajuan itu dilakukan atas penunjukan 4 orang anggota Partai Demokrat, melalui firma hukum miliknya.

Judicial Review dimaksud meliputi pengujian formil dan materil terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan Menkumham tanggal 18 Mei 2020, dimana termohon adalah Menteri Hukum dan HAM.

Dalam risalah judicial review yang diajukan ke Mahkamah Agung itu, secara rinci dan terstruktur Yusril membangun argumen yang cukup koheren dan kokoh sesuai kecakapan pengetahuannya di bidang hukum.

Bahkan dalam keterangan awal yang sudah beredar di berbagai media, Yusril telah menegaskan jika langkah hukum ini terbilang baru dalam dinamika hukum Indonesia.

Pertama-tama, ia membangun argumen dengan menyodorkan pertanyaan fundamental ihwal pendirian sebuah partai; bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menguji AD/ART Parpol, karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah Undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik.

Nah, kalau AD/ART Parpol itu ternyata prosedur pembentukan dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan Undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya?," tanya Yusril dan Yuri melalui Siaran Pers, Kamis (23/09).

Dari cara skeptisisme itu, lalu Yusril mulai mengemukakan pandangan hukumnya; baginya ada kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Mahkamah Partai sebagai quasi peradilan internal partai, tidak berwenang menguji AD/ART. Begitu juga Pengadilan Negeri dan Tata Usaha Negara.

Karena situasi kevakuman itulah, ia lalu menyusun kembali argumen yang dinilainya cukup meyakinkan. Apalagi kemudian ia menguatkan agrumennya dengan pandangan ahli hukum lainnya, seperti Dr. Hamid Awaludin, Prof Dr Abdul Gani Abdullah dan Ahli Hukum Tata Negara dan Konstitusi Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.

Mereka, menurut Yusril sepakat jika pada hakikatnya harus ada lembaga yang berwenang menguji AD/ART untuk memastikan apakah prosedur pembentukan dan materi muatannya sesuai dengan undang-undang atau tidak?. Sebab penyusunan AD/ART tidaklah sembarangan karena dia dibentuk atas dasar perintah dan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh undang-undang," tegas Yusril.

Alasan lainnya adalah bahwa peran partai politik begitu besar dalam kehidupan berdemokrasi dan penyelenggaraan negara. Di dalam UUD 1945 disebutkan antara lain bahwa hanya parpol yang boleh ikut dalam Pemilu Legislatif (Pileg), mencalonkan Presiden dan

Wakil Presiden, kepala daerah, dsb.

Begitu parpol didirikan dan disahkan, secara otomatis tidak bisa dibubarkan, termasuk oleh Presiden. Partai politik hanya bisa dibubarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dari argument itu Yusril lalu mengajukan pertanyaan lanjutan: bisakah sebuah partai sesuka hatinya membuat AD/ART? Apakah kita harus membiarkan sebuah partai bercorak oligarkis dan monolitik, bahkan cenderung diktator, padahal partai adalah instrumen penting dalam penyelenggaraan negara dan demokrasi?

Yusril juga mengingatkan agar kita jangan melupakan jika partai-partai yang punya wakil di DPR RI itu juga mendapat bantuan keuangan yang berasal dari APBN yang berarti dibiayai dengan uang rakyat.

Karena itu Yusril berpandangan jangan ada partai yang dibentuk dan dikelola "suka-suka" oleh para pendiri atau tokoh-tokoh penting di dalamnya yang dilegitimasi oleh AD/ARTnya, namun ternyata bertentangan dengan undang-undang dan bahkan UUD 1945.

Atas dasar itu pula menurut Yusril Mahkamah Agung harus melakukan terobosan hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan undang-undang atau tidak?

"Apakah perubahan AD/ART dan pembentukan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang atau tidak? Apakah materi pengaturannya, seperti kewenangan Majelis Tinggi yang begitu besar dalam Partai Demokrat, sesuai tidak dengan asas kedaulatan anggota sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik? Apakah wewenang Mahkamah Partai dalam AD/ART yang putusannya hanya bersifat rekomendasi, bukan putusan yang final dan mengikat sesuai tidak dengan UU Partai Politik? Apakah keinginan 2/3 cabang Partai Demokrat yang meminta supaya dilaksanakan KLB baru bisa dilaksanakan jika Majelis Tinggi setuju, sesuai dengan asas kedaulatan anggota dan demokrasi yang diatur oleh UU Parpol atau tidak? Demikian seterusnya sebagaimana kami kemukakan dalam permohonan uji

formil dan materil ke Mahkamah Agung,” cecar Yusril lewat sejumlah pertanyaan tajam.

Untuk menepis jika judicial review ini terkesan personal dan tendensius mengingat Yusril sadar akan banyak menuai reaksi publik, terutama dari elit partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono, ia kemudian kembali menegaskan sikap, jika pengujian AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung ini sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat di negara Indonesia. Ia juga mempertegas tidak mencampuri masalah internal partai demokrat, melainkan fokus pada persoalan hukum yang ditangani.

“Bisa saja esok lusa akan ada anggota partai lain yang tidak puas dengan AD/ARTnya yang mengajukan uji formil dan materil ke Mahkamah Agung. Silahkan saja. Sebagai advokat, kami bekerja secara profesional sebagai salah satu unsur penegak hukum di negara ini sesuai ketentuan UU Advokat. Bahwa ada kubu-kubu tertentu di Partai Demokrat yang sedang bertikai, kami tidak mencampuri urusan itu. Urusan politik adalah urusan internal Partai Demokrat. Kami fokus kepada persoalan hukum yang dibawa kepada kami untuk ditangani,” tutupnya.

Sayangnya, dari poin-poin judicial review yang dibangun Yusril di atas, justru menurut Juru Bicara Yusril, Jurhum Lantong, sama sekali tak direspon serius terkait isi poin hukum di atas oleh elit Partai Demokrat, salah satunya, dari pernyataan Deputy Bappilu DPP Partai Demokrat yakni Kamhar Lakumani. Sebaliknya ia malah menanggapi Yusril dengan pertanyaan mengapa tak mempertanyakan AD/ART partai lain, termasuk partai Yusril, yakni Partai Bulan Bintang?

“Argumen ini mencerminkan jika Kamhar tak memahami posisi legal standing dalam posisi mengajukan gugatan atau judicial review. Memang ada yang mengajukan dari partai lain, atau dari internal PBB yang ingin melakukan hal yang sama seperti di tubuh PD? Kalau ada dan memungkinkan celah hukumnya, ya kenapa tidak?,” tukas Jubir Yusril.

Jubir Yusril melanjutkan, Kamhar malah ngelantur ke tuduhan lain, soal adanya motif terselubung dari agenda

judicial review AD/ART tersebut yang justru dibacanya bukan untuk memperkuat demokrasi, malah membuka pintu masuknya otoritas tertentu yang terafiliasi dengan kekuasaan untuk mengobok-obok dan mengintervensi kedaulatan partai politik yang menjadi institusi politik dan pelebagaan demokrasi. Argumen ini selain jauh panggang dari api jelas ngaur,’ tugas Jurhum.

Sebelum jadi aktivis partai yang terlahir dari rahim reformasi, sejatinya Kamhar, mafhum soal apa saja pilar utama dalam demokrasi?

Menurut Jurhum, mereka mestinya membaca apa saja pilar utama demokrasi, yang salah satunya adalah partai politik sebagai pilarnya. Partai meski pun didirikan sekelompok orang merupakan amanat undang-undang, jadi muatannya juga harus sesuai kaidah undang-undang yang berlaku, bukan monopoli keluarga apalagi perorangan. Pilar demokrasi ini jelas sangat penting, karena partai juga milik publik yang juga diberi subsidi uang negara. Partai juga merupakan pilar utama demokrasi sebagaimana pernah diulas oleh ilmuan politik Herbert Feith.

Nah, betapa besarnya peran partai seperti diulas Yusril di atas, hingga kewenangannya bisa mencalonkan Presiden, tapi tidak bisa dibubarkan oleh Presiden. Maka wajar ketika ada kaidah AD/ART yang dibuat tak sesuai undang-undang kemudian disoal, apalagi jika dalam pokok-pokok AD/ART ada yang menyimpang dari tujuan utama berdemokrasi, seperti kecenderungan oligarki dan monolitik. Maka hemat saya argumen yang dibangun Yusril cukup mendasar sebagai langkah uji materil, bukan justru direspon dengan cara melempar gosip politik sana sini,’ tegas Jurhum.

Justru apa yang tengah ditempuh sebagian anggota PD yang memberi mandat pada kantor advokat Yusril itu sebuah kemajuan untuk memberi pendidikan politik yang bergizi bagi rakyat. Biar publik juga mengetahui jika partai bukan dibuat berdasarkan ‘arisan keluarga’ lalu bisa seenaknya saja bikin AD/ART,” pungkas Jurhum mengakhiri keterangannya.

*) Juru Bicara Yusril Ihza Mahendra

RESHUFFLE YANG SIA-SIA

Amir Fiqi*

Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju beredar kencang setelah secara resmi Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dalam barisan partai politik pendukung pemerintah.

Hal itu sangat wajar terjadi, sebab di dunia politik tidak ada makan siang gratis. Begitupun keputusan PAN bergabung pasti akan mendapatkan kompensasi dari Presiden Jokowi – kompensasi yang sangat mungkin adalah mendapatkan kursi menteri.

Soal kompensasi, PAN sudah menjawab secara tegas, alasannya partai matahari putih ini bergabung dalam barisan koalisi adalah ingin memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam membangun Indonesia hingga 2024. Dan soal kursi menteri sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Jokowi. Tapi jika dibutuhkan PAN siap memberikan kader terbaiknya. Apakah itu benar?, kita lihat nanti.

Namun, kabar yang berkembang Presiden telah menyiapkan satu kursi menteri untuk PAN yakni Menteri Perhubungan. Dan jabatan ini akan diisi oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

Reshuffle untuk siapa?

Soal isu reshuffle tentunya menjadi hal yang sangat menegangkan bagi partai politik dan jajaran menteri yang sedang menjabat. Tegang, apakah kursi yang sekarang ditempati akan digeser atau tetap aman.

Namun berbeda dengan suasana kebatinan rakyat, isu reshuffle menjadi angin segar untuk perubahan yang lebih baik. Apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19, masyarakat sangat mengharapkan para pembantu Presiden mampu bekerja dengan nyata dalam mengatasi situasi yang sulit saat ini.

Masyarakat berharap melalui perombakan kabinet inilah Presiden akan mengganti para pembantunya yang berkinerja buruk dengan memilih pembantu baru yang diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam melayani masyarakat.

Tapi yang menjadi pertanyaan publik, reshuffle ini

sebenarnya untuk siapa? apakah benar-benar untuk memperbaiki kondisi bangsa, atau hanya sebagai kompensasi politik yang diberikan oleh Presiden.

Jika reshuffle ini untuk kepentingan rakyat, maka Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan akan mendengar suara hati masyarakat. Tapi, jika perombakan kabinet hanya untuk kompensasi politik maka hanya sekedar untuk bagi-bagi kue kekuasaan. Penulis berharap Presiden dalam memutuskan mengganti menteri mendengarkan suara hati masyarakat. Bukan suara hati Presiden Jokowi sendiri. Sebab, suara publik mencerminkan kondisi yang dihadapi saat ini, dan bebas dari kepentingan-kepentingan.

Namun, jika berkaca pada reshuffle sebelumnya, penulis memandang Presiden Jokowi dalam mengambil langkah reshuffle tidak mendengarkan suara publik, tapi lebih mendengarkan suara hati Presiden sendiri. Misalnya, Presiden Jokowi merasa nyaman dengan kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem A Makarim.

Padahal publik, dan disuarakan dengan keras oleh dua ormas terbesar di Indonesia Muhammadiyah dan NU menilai kinerja Nadiem mengecewakan. Penilaian tersebut tentunya berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan secara mendalam. Sehingga Muhammadiyah dan NU berkesimpulan bahwa Nadiem kurang layak dipertahankan sebagai menteri yang mengurus pendidikan dan kebudayaan.

Bukan mendengarkan suara publik, malah Presiden Jokowi memberikan kekuasaan yang lebih kepada Nadiem dengan menjadikannya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek).

Selain itu keputusan Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunadi Sadikin menggantikan Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan juga dianggap langkah yang kurang tepat. Sebab, secara pengalaman sosok Budi sangat diragukan karena dia adalah lulusan bidang fisika nuklir, dan selama ini rekam jajaknya sebagai bankir.

Ini keputusan yang sangat mengagetkan publik sebagai orang yang bukan ahli di bidang kesehatan malah



diberi amanat untuk mengurus kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Terlebih saat ini bangsa Indonesia sedang dihadapkan situasi kesehatan yang rumit yakni pandemi Covid-19. Padahal, jika melihat kinerja Terawan terbilang baik, dan dia telah menggagas vaksin Nusantara.

Padahal sudah jelas, jika suatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya maka tunggu kehancurannya. Jangan sampai Presiden salah memilih pembantu, terlebih yang bukan ahlinya. Ini akan mengganggu kinerja pemerintahan itu sendiri. Sehingga kedepan bukan masalah berkurang, malah akan terus bertambah. Kasihan rakyat, jika salah urus oleh menteri-menteri yang tidak cakap dalam bekerja.

Resuffle untuk perubahan

Pemerintah harus meluruskan niatnya dalam melakukan reshuffle. Jika tidak maka tujuan dari perombakan kabinet yang sesungguhnya tidak akan tercapai.

Tujuan dari reshuffle sendiri menurut hemat penulis adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah dengan mengganti para menteri yang tidak cakap dalam bekerja. Sehingga permasalahan yang sedang dihadapi akan teratasi dengan menunjuk menteri baru yang lebih cakap dan lebih ahli.

Segudang permasalahan sedang dihadapi bangsa ini.

Terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 permasalahan bangsa semakin rumit dan kompleks. Dari permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial dll.

Beratnya masalah yang sedang dihadapi bangsa ini harus menggugah hati nurani Presiden Jokowi untuk menunjuk para menteri yang benar-benar ahli dalam mengatasi masalah. Bukan menunjuk menteri yang justru menambah masalah.

Boleh bagi-bagi kue kekuasaan dan memberikan kompensasi terhadap partai politik yang turut bergabung dalam barisan koalisi - ini hal yang sangat wajar dalam politik. Tapi yang harus diperhatikan adalah tujuklah kader partai yang benar-benar ahli untuk mengisi pos kementerian, bukan hanya sekadar bagi-bagi kekuasaan saja.

Jika hanya sekadar bagi-bagi kekuasaan, maka beberapa kali reshuffle pun tidak akan menjawab permasalahan bangsa. Tapi yang ada reshuffle itu sia-sia, tanpa arti. Sebab tujuan reshuffle sejatinya untuk menjemput perubahan yang lebih baik.

Semoga pemimpin bangsa ini semakin bijak dalam bertindak- sehingga permasalahan yang kian rumit dihadapi bangsa ini segera diatasi. Rakyat butuh kehidupan yang lebih baik. Dan rakyat pun sangat rindu akan hadirnya pemimpin yang secara tulus melayani mereka.

*), Wartawan dan Pemerhati Sosial

PILPRES DAN RELAWAN

Amir Fiqi*

Para relawan mulai bermunculan mendeklarasikan diri mendukung calon presiden (Capres) pilihan mereka. Deklarasi dukungan ini bisa dikatakan terlalu dini sebab pemilihan presiden (Pilpres) masih 3 tahun lagi. Namun ini menjadi hal baik sebab proses demokrasi di Tanah Air masih berjalan dengan baik.

Relawan yang sudah mendeklarasikan dukungannya adalah relawan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan nama Ganjarist. Dan relawan pendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan nama Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES).

Kuatnya dukungan relawan kepada Anies dan Ganjar ini sejalan dengan hasil sejumlah lembaga survei yang selalu menempatkan keduanya sebagai Capres potensial untuk bertarung pada Pilpres 2024 mendatang. Bahkan, hanya kedua nama inilah menurut sejumlah hasil survei yang dianggap mampu bersaing melawan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) elektabilitas Prabowo menempati urutan tertinggi yaitu 21,9 %, Ganjar dan Anies menyusul yakni 15,8 % dan 11,1 %.

Survei Indikator Politik Indonesia masih menempatkan Prabowo pada posisi atas yakni 26,2 %. Pada peringkat kedua dan ketiga ditempati oleh Ganjar (20,8%) dan Anies (15,5).

Berdasarkan survei Institute for Democracy and Strategic Studies (Indostategic) Prabowo masih menempati posisi teratas (17,5 %). Tapi posisi kedua ditempati oleh Anies (17 %), disusul oleh Ganjar (8,1%).

Manuver relawan

Keberadaan relawan bagi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sangat dibutuhkan untuk menuju Pilpres 2024. Sebab, meski keduanya memiliki elektabilitas yang tinggi, tapi jalan mereka untuk mendapatkan tiket sebagai Capres sangat sulit untuk diraih.

Untuk Ganjar, meski dia adalah kader dari PDI

Perjuangan langkahnya menuju Pilpres sebagai Capres tidak akan mulus. Pasalnya, partai dimana dia bernaung terbaca lebih memilih Puan Maharani sebagai calon yang akan bertanding pada Pilpres nanti. Hal tersebut dapat terbaca dari masifnya baliho Puan di berbagai daerah di Tanah Air.

Sementara untuk Anies, langkahnya lebih berat. Sebab, dia bukanlah kader partai politik. Meski PKS dan NasDem mulai memberikan “perhatian” ini pun masih belum cukup untuk memenuhi syarat presidential threshold sebesar 20 persen. Jika NasDem-PKS bergabung hanya 17,26 persen. Maka masih butuh satu partai politik lagi sehingga Anies bisa mendapatkan tiket untuk bertarung pada Pilpres 2024 mendatang.

Manuver dari relawan inilah akan menjadi kekuatan bagi Anies dan Ganjar untuk menyakinkan partai politik agar menjatuhkan pilihannya untuk memberikan tiket kepada mereka. Sebab, Anies dan Ganjar tidak hanya kuat dalam hitungan survei, mereka juga memiliki kekuatan nyata dari para relawan.

Belajar dari Pilpres tahun 2014, kekuatan relawan bisa dikatakan memberikan sumbangsih kemenangan bagi pasangan Jokowi- Jusuf Kalla. Dalam hitungan koalisi partai politik pasangan Prabowo-Hatta lebih besar, yakni 51,9 % kursi DPR dan 48,92 % suara legislatif, sementara pasangan Jokowi-Jusuf Kalla 36,46 % kursi DPR dan 39,98 suara legislatif.

Jika ini murni mengandalkan kekuatan mesin partai politik, maka dalam hitungan pasangan Prabowo-Hatta lah yang menang. Tapi berkat mesin partai bekerja dengan dibantu oleh kekuatan relawan Jokowi-JK mampu memenangkan pertarungan pada Pilpres 2014.

Deklarasi dukungan bagi Anies dan Ganjar menjadi Capres 2024 menunjukkan kekuatan relawan sudah mulai bekerja. Jika kekuatan relawan tersebut terus dipupuk maka dalam tiga tahun kedepan ini akan menjadi kekuatan besar yang kerjanya bisa mengalahkan kerja dari partai politik. Sebab, para relawan ini terbentuk atas kesadaran untuk mendapatkan pemimpin yang mereka



inginkan. Sedangkan, mesin partai politik bekerja atas dasar kepentingan, tidak langsung bersentuhan dengan psikologi masyarakat.

Ganjar mulai digoda

Kurang mendapatkan tempat di PDI Perjuangan, Ganjar Pranomo mulai digoda oleh partai politik lain. Partai yang sudah mulai menggoda adalah Partai Golkar yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid.

Nurdin mengatakan bahwa Partai Golkar sangat terbuka jika Ganjar Pranowo bergabung menemani Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam kontestasi Pilpres 2024. Soal posisi apakah Ganjar sebagai Capres atau Cawapres itu soal nanti.

Bisa jadi godaan yang sama juga akan datang dari partai lain, mengingat Ganjar adalah sosok yang digadang-gadang memiliki kans besar untuk

memenangkan Pilpres 2024.

Jika Ganjar tergoda dan pindah ke partai lain, maka sungguh yang akan dirugikan adalah PDI Perjuangan. Memaksakan untuk memberikan tiket kepada Puan Maharani pada Pilpres 2024 ini bisa jadi menghantarkan PDI Perjuangan menuju kekalahan.

Sebagai penutup, kehadiran relawan tidak bisa menentukan Capres mana yang akan turun gelanggang pada pertarungan Pilpres. Sebab, syarat untuk mengusung Capres-Cawapres adalah partai politik dengan syarat mengantongi presidential threshold sebesar 20 persen.

Namun, kehadiran relawan ini akan semakin menghidupkan proses demokrasi di Indonesia. Mereka turut bekerja agar proses demokrasi di Tanah Air ini bisa terus berjalan.

*) Wartawan dan Pemerhati Sosial

HAM DAN KEADILAN

Amir Fiqi

Setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia. Hari ini dipilih karena bertepatan dengan diadopsinya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 silam.

Tema yang diangkat pada peringatan tahun ini mengenai kesetaraan. Mengutip laman Office of The High Commissioner Human Rights (OHCHR), tema ini bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan memajukan hak asasi manusia di dunia.

Menurut mereka kesetaraan memiliki kekuatan untuk memutus siklus kemiskinan dan memberikan kesempatan yang sama pada semua orang. Kesetaraan juga membantu mengatasi akar penyebab konflik dan krisis.

Berbicara soal kesetaraan, memang mudah untuk diucapkan. Tapi, dalam penerapan sangat sulit untuk dijalankan. Sehingga, muncul lah ketidakadilan dalam kehidupan.

Maka itu, hari HAM Sedunia sangat perlu untuk diperingati setiap tahun. Sehingga akan menjadi pengingat bersama bahwa masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penegakan HAM di Indonesia

Berbicara tentang HAM di Indonesia, khususnya di era kepemimpinan Presiden Jokowi, penegakan HAM masih menjadi pekerjaan berat. Bahkan, pada periode keduanya, kinerja Presiden Jokowi dalam penegakan HAM mengalami penurunan.

Berdasarkan riset yang dilakukan Setara Institute, Indeks HAM di Indonesia mengalami penurunan yakni dari 3,2 pada tahun 2019 menjadi 2,9 pada tahun 2020 dengan skala 1 sampai 7. Angka 1 menunjukkan penegakan HAM yang rendah dan angka 7 menunjukkan penegakan HAM yang tinggi.

Pemberian nilai terhadap praktik penegakan HAM

dalam indeks tersebut dilakukan dengan pengukuran terhadap 6 (enam) indikator hak sipil dan politik (hak sipol). Adapun hak sipol tersebut meliputi hak hidup, kebebasan beragama/berkeyakinan, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak turut serta dalam pemerintahan dan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Pada tulisannya ini akan fokus pada soal hak memperoleh keadilan dan hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat.

Keadilan Hukum

Keadilan dalam penegakan hukum masih menjadi permasalahan besar di Tanah Air. Praktik-praktik yang mempertontonkan ketidakadilan dalam penegegakan hukum masih bisa kita saksikan secara terang benerang.

Sehingga apa yang banyak orang katakan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas memang benar adanya. Bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki harta dan kekuasaan hukum akan bekerja dengan cepat. Sedangkan, bagi kelompok yang memiliki harta dan kekuasaan hukum bekerja terasa lambat. Yang benar dikatakan salah, dan yang salah dikatakan benar.

Kita bisa merasakan dan menyaksikan ketidakadilan dalam pemberian hukuman kepada para koruptor dengan “maling ayam”. Koruptor diberikan banyak keringanan hukuman, sedangkan para maling yang kejahatannya tidak berdampak luas bagi kehidupan bangsa hukumannya malah jauh lebih berat.

Padahal, sudah jelas bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan uang negara, tapi bisa berdampak luas pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas, kualitas bangunan menjadi rendah, kualitas pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani.

Diskriminasi hukum yang sungguh menyakitkan hati contohnya pemberian hukuman kepada empat pejabat Bea dan Cukai yang dihukum masing-masing 2 tahun penjara. Hukuman tersebut tidak sebanding dengan kejahatan yang mereka sudah perbuat yakni melakukan

korupsi sebesar Rp1,6 triliun pada impor tekstil.

Contoh lain, hukuman ringan yang didapat oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo yang hanya divonis 5 tahun penjara atas kasus suap izin ekspor benih lobster. Vonis tersebut terlalu ringan jika melihat kejahatan yang sudah dia lakukan yakni menerima suap mencapai Rp25,7 miliar.

Dan masih banyak contoh-contoh lain yang memperlihatkan bahwa keadilan hukum tidak berlaku bagi para koruptor. Sehingga koruptor di negeri ini tumbuh subur. Satu tertangkap, muncul koruptor-koruptor baru.

Diskriminasi hukum tersebut sangat menyakiti hati- dan praktik praktik penegakan hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan seperti ini tidak akan memberikan efek jera bagi para koruptor. Mereka akan selalu mencari cela untuk merampok uang negara. Sebab, jika tertangkap toh mereka mendapatkan perlakuan istimewa.

Maka itu, yang harus dilakukan oleh pemerintah bagaimana agar kesetaraan dalam penegakan hukum yang berkeadilan benar-benar ditegakan. Jika tidak, maka penegakan HAM dalam soal hak mendapatkan keadilan akan menjadi angin surga bagi rakyat kecil.

Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat

Memang hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dilindungi oleh undang-undang. Misalnya dalam pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Dan dalam pasal 28 F UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Tapi dalam penerapannya kerap tidak sejalan, kadang kala kebebasan menyatakan pendapat dibatasi. Dan adanya “pembungkaman” jika pendapat ini dinilai mengganggu kekuasaan.

Praktek ini sangat terasa, alhasil berdasarkan laporan tahunan The Economist Intelligence Unit bahwa indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan.

Pada laporan tersebut menempatkan indeks demokrasi Indonesia pada peringkat ke-64 dunia,

dengan skor 6,3 posisi Indonesia tertinggal dengan negara-negara tetangga yakni Malaysia, Timor Leste dan Filipina. Dan capaian ini merupakan yang terendah selama 14 tahun terakhir Indonesia.

Kemunduran demokrasi ini dipicu oleh tekanan terhadap kebebasan sipil, yang ditandai dengan maraknya kekerasan penangkapan terhadap aktivis dan masyarakat adat. Intimidasi juga menyasar mahasiswa dan akademikus yang menggelar diskusi ilmiah. Suara kritis yang berseberangan dengan pemerintah kerap diserang di ranah digital.

Menyempitnya ruang kebebasan sipil itu tidak lepas dari kebijakan pembangunanisme, tidak hanya mengedepankan kekuasaan yang mematikan proses deliberatif dan partisipasi publik pendekatan ini juga ditopang oleh alat represi negara, akibatnya sengketa dan kekerasan kerap terjadi dalam proyek infrastruktur, memandang sumber agraria dan alam sebagai aset pembangunan, proses pembangunan digeber demi keuntungan pebisnis walau harus menggusur penduduk dan merusak alam.

Berjuang untuk HAM

Berjuang dalam menegakan HAM sejatinya sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia didirikan, salah satunya adalah mengharapakan warganya hidup sejahtera.

Menegakan HAM berarti menciptakan kesetaraan-lemah-kuat, kaya-miskin akan mendapatkan perlakuan yang sama oleh pemerintah. Jika kesetaraan ini dibangun maka bangsa ini akan bergerak cepat untuk memutus siklus kemiskinan dan memberikan kesempatan yang sama pada semua orang.

Dengan adanya kesetaraan ini menjadi jalan untuk mengatasi akar penyebab konflik dan krisis. Sebab konflik dan krisis yang terjadi karena adanya perlakuan yang istimewa diberikan pemerintah kepada kelompok-kelompok tertentu. Adanya krisis, misalnya krisis ekonomi karena adanya ketimpangan yang sangat lebar antara si kaya dan si miskin. Jika semua akses terbuka lebar oleh semua maka akan hadir keadilan ekonomi.

Selamat Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia. Semoga dengan peringatan ini menjadi momentum kita bersama, khususnya bagi pemerintah untuk benar-benar menegakan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wartawan dan Pemerhati Sosial



MENIMBANG PRESIDENTIAL THRESHOLD 20%

Amir Fiqi

Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 % selalu menjadi sorotan jelang pelaksanaan pemilu atau Pilpres. Dorongan agar ambang batas tersebut dihilangkan terus dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, setiap dimohonkan, MK memutuskan menolak. Meski terus ditolak para pejuang ambang batas 0 % terus berupaya agar MK mengabulkan permohonan mereka.

Jelang Pilpres 2024, presidential threshold 0 % kembali gencar disuarakan, tidak hanya oleh para partai politik atau pegiat demokrasi, kali ini oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri dengan alasan bahwa presidential threshold menjadi salah satu faktor pendorong hasrat korupsi para pejabat politik.

Berdasarkan kajian KPK penyebab korupsi kepala daerah karena biaya politik tinggi. Modal besar yang telah mereka keluarkan akan mendorong misi “balik modal”.

Jika para calon tidak memiliki modal yang cukup maka akan ada donatur yang membantu. Dan saat calon

tersebut menang maka ada upaya balas budi. Dan balas budi tersebut bisa berbentuk meminta kemudahan perizinan terhadap bisnis yang telah dan akan dilakukan atau meminta kemudahan untuk ikut serta dalam tender proyek pemerintahan dalam hal pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, atas alasan tersebut, KPK telah menetapkan 33 pimpinan kementerian dan lembaga, 22 gubernur, 141 kepala daerah, 309 anggota legislatif dan 345 pihak swasta sebagai tersangka korupsi.

Persempit ruang kompetisi

Apa yang diungkapkan oleh Ketua KPK sebenarnya sudah diketahui oleh publik, bahwa ambang batas menjadi salah satu faktor pendorong para pejabat politik melakukan korupsi.

Namun, tidak hanya soal korupsi, ambang batas atau presidential threshold dalam konteks demokrasi langsung akan mempersempit ruang kompetisi. Pilkada atau Pilpres secara langsung seharusnya diikuti oleh banyak calon, tapi dalam kenyataannya diikuti oleh sedikit calon, sehingga masyarakat tidak memiliki

banyak pilihan.

Syarat presidential threshold 20 % ini menjadikan kontestasi Pilkada dan Pilpres hanya akan dinikmati oleh partai-partai besar, dan yang memiliki modal besar. Sebab, mereka memiliki kekuatan untuk mengatur dalam pembentukan koalisi.

Partai-partai kecil yang tidak memiliki kekuatan dan modal besar hanya bisa turut meramaikan jalannya pesta demokrasi. Mereka hanya menjadi pelengkap bagi partai besar untuk memenuhi syarat pencalonan.

Padahal, bisa jadi dalam partai kecil tersebut memiliki kader terbaik yang layak untuk turut berkompetisi. Namun, karena terhalang oleh syarat mereka harus turut bergabung dalam koalisi besar yang bisa jadi tidak sejalan dengan pandangan politik mereka.

Sempitnya ruang kompetisi tidak baik dalam iklim demokrasi di Tanah Air. Sebab, demokrasi hanya ditentukan oleh segelintir elit partai politik.

Hal tersebut telah dirasakan, bagaimana kerasnya Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 yang hanya diikuti oleh dua pasang calon. Gesekan keras terjadi di tengah masyarakat.

Bangsa ini terasa terpecah menjadi dua kekuatan besar yang berhadapan. Dan demokrasi berjalan tidak hangat, tapi penuh kebencian antara anak bangsa, hal tersebut tercermin dengan adanya penyebut cebong dan kampret.

Sungguh, sangat disayangkan demokrasi yang seharusnya menjadi ajang memilih putra terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin malah diwarnai dengan kebencian. Dan hal ini terus berlanjut, meski Pilpres telah usai, dan idola mereka juga telah bergabung dalam barisan pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf..

Penulis berharap apa yang telah terjadi pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 tidak kembali terjadi pada Pilpres 2024 nanti. Demokrasi kembali berjalan dengan hangat dan bersahabat, tidak ada lagi penyebutan Cebong dan Kampret.

Maka dari itu, agar tidak kembali terjadi, salah satu caranya adalah dengan membuka ruang kompetisi yang seluas-luasnya, yaitu Pilpres tidak lagi hanya diikuti oleh dua pasang, tapi harus lebih. Sehingga bangsa ini tidak lagi terbelah menjadi dua kekuatan besar.

Penulis memiliki keyakinan, jika Pilpres diikuti oleh banyak calon, "konflik" yang terjadi tidak akan setajam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Masyarakat akan memiliki banyak pilihan, sehingga mereka akan lebih

fokus bagaimana memperjuangkan pilihannya menjadi pemenang, dari pada menyerang dengan membabi buta pendukung calon yang lain.

Banyaknya calon yang muncul sejatinya memberikan kesempatan yang luas bagi putra-putra terbaik bangsa untuk memimpin negeri. Karena, putra terbaik bangsa tidak hanya berada dari kader partai politik besar saja, tapi juga ada di partai-partai politik kecil. Bahkan bisa jadi berasal dari non partai.

Putra terbaik bangsa dari non partai bisa jadi memiliki kemampuan jauh lebih baik untuk memimpin bangsa. Kuncinya adalah bagaimana partai-partai politik memberikan kesempatan seluas-luasnya. Jika merasa tidak memiliki kader yang dianggap cakap untuk dicalonkan sebagai Capres, jangan malu dan ragu untuk menarik putra terbaik bangsa meski tidak berasal dari non partai. Jalan yang bisa dilakukan misalnya dengan cara konvensi untuk mencari calon presiden.

Ambang batas 0 %

Menurut hemat penulis, membuka ruang kompetisi yang luas bukan berarti ambang batas harus 0 %. Tetap harus ada ambang batas, ini sebagai penghargaan kepada partai politik yang telah berjuang pada Pemilu.

Tapi, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% masih terlalu tinggi, sehingga akan menghambat partai-partai kecil lainnya untuk mengajukan calon presiden. Maka itu, ambang batas harus dikurangi, misalnya 10 % atau 5 %, sehingga ruang kompetisi ini masih bisa terbuka luas.

Menurut perhitungan penulis jika ambang batas diturunkan misalnya 10 %, maka pemilihan presiden akan berjalan lebih dinamis dan hangat. Karena akan muncul banyak calon pasangan presiden-wakil presiden. Hitungan penulis akan muncul 4 pasangan calon.

Dengan banyaknya calon inilah masyarakat akan memiliki banyak pilihan. Dan tentunya akan meningkatkan kualitas demokrasi di Tanah Air.

Namun, jika ambang batas 0% diterapkan maka akan mempersulit jalannya pemerintahan itu sendiri. Seandainya partai gurem mengusung calon presiden dan memenangkan Pilpres maka ini akan repot, karena mereka tidak memiliki kekuatan di parlemen. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat bisa jadi akan selalu mendapatkan perlawanan dari kekuatan parlemen.

Wartawan dan Pemerhati Sosial

PROFESI ADVOKAT

Wina Armada Sukardi

Advokat di Indonesia salah satu profesi yang paling tidak dipercaya oleh stake holdersnya. Selalu dicurigai dan dimarginalkan.

Kita mulai di pengadilan. Sebelum acara di pengadilan dimulai, hakim bakal menanyakan dan memeriksa mana Berita Acara Sumpah (BAS), kartu advokat dan kartu organisasi advokat. Sekarang untuk advokat dapat beracara di pengadilan harus memiliki BAS atau pengangkatan sebagai advokat sebelum UU Advokat berlaku, kalau sudah jadi advokat sebelum UU Advokat lahir. Semuanya harus diperlihatkan aslinya. Gak boleh foto copynya.

Setelah ada aslinya diperlihatkan, barulah boleh diserahkan fotocopynya.

Kenapa advokat diminta menunjukan asli keabsahannya sebagai advokat, sedangkan jaksa dan hakim sebagai sesama penegak hukum tidak? Karena advokat tidak dipercaya. Takut si advokat berbohong, sebenarnya dia belum berhak praktek beracara di pengadilan, tapi mengaku sudah jadi advokat. Kalau cuma foto copynya saja, dapat saja dipalsukan oleh advokatnya. Stigma advokat profesi tukang kibil (suka berbohong) membuat semua identitas dan kelengkapan surat sebagai advokat harus ditunjukkan aslinya. Tak ada usaha bikin praktis, misal cukup mempergunakan barkot atau kode no BAS dan sebagainya. Konstruksi berpikirnya, “jangan sampai ketipu oleh advokat.”

Sedangkan jaksa yang ikut sidang yang sama, diasumsikan sudah dipastikan benar, gak mungkin bohong. Jadi gak perlu ditanya mana surat tugasnya, apakah surat tugasnya benar atau tidak, ada kesalahan administrasinya atau tidak, sudah tidak perlu dan tidak penting ditanya. Jaksa sudah terjamin pasti benar, tidak seperti advokat yang perlu dicurigai dari awal.

Apalagi hakimnya. Siapa pula yang mau bertanya mana surat ketetapan dari ketua PN yang menunjuk majelis

hakim yang mengadili suatu perkara. Kalau kemudian hakimnya diganti, mana pula bukti surat keterangan pergantiannya. Ah, hakim kan, itu yang mulia, gak perlu disangsikan lagi, malah gak boleh sampai dicek segala kemuliaannya (Kalau ada hakim yang terima suap, cuma dianggap segelintir, dan itu pun lantaran pengaruh buruk setan). Selebihnya hakim pasti orang baik. Jadi gak perlu keabsahan surat tugasnya dipersoalkan. Lain dengan advokat, dipandang sering bohong, jadi harus bener-bener dicros cek. Stigma terhadap advokat begitu.

Advokat juga profesi yang sudah biasa “dizholimi” di pengadilan. Diagendakan dan disuruh sidang pukul 10 pagi, sidangnya baru mulai jam 16.00 atau bahkan setelah magrib, advokat gak punya hak marah atau protes. Sudah dipandang lumrah tugas advokat menanti tanpa kepastian. Urusan kerugian waktu dan materil, itu sudah dianggap menjadi derita advokat. Kan advokat strata penegak hukum terendah, jadi boleh diperlakukan semaunya. Alasannya macam-macam. Hakimnya banyak perkara lain yang masih harus diperiksa. Jaksanya belum datang dan sebagainya. Bahkan barusan saja terjadi, setelah sidang ditunda dua minggu dan ditunda lagi tiga minggu, pada harinya, si hakim bilang keputusannya sedang dibuat, sementara si hakim ketua sidang sudah di ruang sidang. Entah siapa yang buat keputusannya. Advokat gak boleh protes. Gak boleh tanya-tanya kenapa begitu. Pokoknya advokat di pengadilan kasta terbawah. Jadi, kalau menerima perlakuan tak adil, ya selama ini dinilai wajar-wajar saja.

Soal keputusan juga suka-suka hakim. Sidang boleh panjang dengan menghadirkan ahli, berbagai bukti dan kesimpulan bahkan sidang berlangsung sampai setahun, eh pas keputusan cukup dianggap tidak dapat diterima (NO) karena kurang pihak (biar pihak yang kurang itu sudah dihukum pidana) atau salah objek karena tulisan tidak tepat dan sebagainya. Kenapa gak



dari awal saja diputusin waktu eksepsi, sehingga gak usah sampai begitu panjang, itu sepenuhnya otoritas mutlak hakim, gak peduli advokat sudah minta klien kekuar duit banyak untuk Ahli, bukti dan sebagainya. Apalagi cuma waktu advokat yang terbuang. Semua bukan tanggung jawab moral hakim, tapi “derita elo” wahai advokat.

Demikian jug kalau hakim setelah menguraikan berbagai hal dan sampai kesimpulan, eh, ternyata putusanny gak sesuai dengan uraiannya. Sudahlah advokat harus mahfum saja. Kalau gak setuju silakan naik banding.

Menurut UU Advokat, para advokat berhak mendampingi klien dimana dan pada tingkat apapun, tapi di KPK advokat sama sekali tidak boleh mendampingi klain waktu diperiksa. Alasannya, korupsi itu kejahatan luar biasa. Lho, apa urusannya kejahatan luar biasa dengan menghilangkan hak advokat yang diberikan UU untuk mendampingi klain? Gak penting alasan apa atau apa hubungannya, pokoknya SOP di KPK ditetapkan gak boleh. Selesai. Soalnya kan advokat suka kasih saran yang mempersulit penyidikan. Soal kewajiban advokat membela klainnya, hari gini cuma dipandang utopia saja. Walhasil advokat juga sah kalau dicuragai bakal memberikan celah-celah hukum yang dapat menjadi

penolong tersangka. Advokat itu seakan moster di sisi penjahat. Jadi gak boleh mendampingi klain di KPK. Gak ada urusan SOP dapat mengalahkan UU melanggar hukum atau tidak. Malah, konon kabarnya, Kejaksaan juga bakal menerapkan aturan yang sama dengan KPK. Kalau di KPK boleh advokat tidak dapat mendampingi klain, kenapa kejaksaan gak boleh? Soalnya advokatnya gak perlu perlu ditanya, apalagi diminta pendapatnya, lebih lagi persetujuannya. Advokat aparat penegak hukum kasta terbawah, gak perlu diperhatikan keberadaannya. Boleh diabaikan.

Advokat menurut UU Advokat, punya hak imunitas, khususnya waktu membela klainnya. Tapi dalam prakteknya, hak imunitas ini boro-boro dihormati, diakui oleh sesama aparat penegak hukum juga tidak. Memang kalau hak imunitas yang diberikan oleh UU disingkirkan, para advokat mau apa? Bisa apa?

Terkait ini tak tik dan strategi membela klain, dianggap omong kosong saja. Upaya semacam itu banyak dimaknai advokat “menghalang-halangi” atau “menghambat” penegakkan hukum. Jadi kalau advokat punya tak tik dan strategi membela klain, langsung dituding advokat melakukan kejahatan menghambat atau menghalangi penegakan hukum.

Pekerjaan advokat yang mungkin mendapat “dukungan” dari sesama aparat penegak hukum, paling jadi “markus” alias makelar kasus. Menghubungi polisi, jalsa dan atau hakim dengan klain, dan mengatur berapa biaya yang ditentukan. Itu pun masih dengan satu kecurigaan, biaya-biaya itu sudah di markup oleh advokat. Bukankah stigmanya mana ada advokat yang jujur. Itu capnya.

Aneh bin ajaibnya, para advokat pun relatif tidak ada yang “protes,” konon lagi “berontak” pada keadaan seperti ini Para advokat lebih suka mengurus dan menambah jumlah anggota organisasinya. Memang sesama organisasi advokat sedang dibiarkan saling cakar. Saat ini semakin banyak saja organisasi advokat. Mereka membuat semakin mudah menjadi advokat. Setidaknya saat ada 40 organisasi advokat, dan akan semakin banyak lagi. Makanya lantaran sibuk mempersoalkan urusan internal organisasi, advokat sulit membela sesama advokat yang sedang dikriminalkan.

Advokat, oh advokat.*

(Advokat dan wartawan)

PENDIDIKAN KARAKTER SOLUSI DARI PERMASALAHAN BANGSA

Panji Trio Narta*

Seiring perkembangan zaman, problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia kian menumpuk dari hari ke hari, mulai dari problem dunia pendidikan yang dituduh tidak mencerdaskan, dunia politik tidak karuan arahnya dan sarat dengan praktek korupsi, agama yang mengalami kekacauan bagi pemeluknya, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata, kekayaan alam yang hanya dinikmati oleh segelintir orang; sosial dan budaya masyarakat yang mudah di hasut oleh konflik SARA, dan lain sebagainya.

Bila terjadi pembiaran terhadap problem tersebut maka yang terjadi kemudian adalah munculnya jutaan problem baru yang menambah daftar panjang penderitaan warga negara di negeri ini. Kekerasan, penindasan, ketidakadilan, dan berbagai istilah miring lainnya akan menjadi identitas yang melekat bagi bangsa Indonesia di kemudian hari.

Menyikapi problem di atas, dibutuhkan partisipasi dari seluruh komponen bangsa untuk mencari solusi terbaik tidak terkecuali dunia pendidikan. Dunia pendidikan pada dasarnya merupakan komponen penting bila tidak ingin mengatakan komponen utama yang menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dunia pendidikan adalah tempat untuk menempa dan mencetak manusia yang berkarakter. Hanya saja, dunia pendidikan perlu melakukan upaya mengenai peristiwa yang menyeluruh terhadap segala komponen penting di dalamnya. Sebab, akhir-akhir ini dunia pendidikan dituduh tidak mencerdaskan secara positif tetapi justru mencerdaskan secara negatif.

Secara umum, IQ mereka sangat tinggi namun secara akhlak tidak ada sama sekali. Sistem pendidikan sekarang ini lebih mengutamakan pada pengembangan otak kiri tetapi kurang memperhatikan pengembangan otak kanan (rasa, empati), sehingga membentuk generasi yang berintelektualitas tinggi tetapi memiliki karakter yang kurang baik. Makanya sudah dibuktikan dengan banyaknya lulusan perguruan tinggi yang terjatuh kasus

korupsi dan kasus kejahatan lainnya.

Meskipun bahasa politik yang biasa digunakan adalah “oknum” tetapi faktanya oknum tersebut sudah banyak. Pada dasarnya ialah lembaga pendidikan seharusnya berbenah diri. Boleh jadi dunia pendidikan memang gagal untuk melahirkan generasi yang berkarakter. Generasi yang lahir justru generasi yang bermental krupuk yang mudah goyah dengan lembaran rupiah, generasi yang siap “membela yang bayar” ; generasi yang rela mengorbankan orang lain untuk kepentingan pribadi atau golongan, generasi yang lemah secara agama dan akhlak, generasi yang tidak mampu bersaing di tengah derasnya persaingan atau “generasi penonton yang pencemburu” yakni orang-orang yang hanya mampu iri dan mengkritik kesuksesan orang lain tanpa mau berusaha meraih kesuksesan itu.

Pendidikan tinggi Islam, baik dalam konteks nasional Indonesia maupun sebagai bagian dari dunia Islam, kini tengah menghadapi tantangan yang lebih berat. Agenda besar yang dihadapi bangsa Indonesia kini adalah bagaimana menciptakan negara yang aman, adil, dan makmur dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, yang didukung oleh warga negara yang berpengetahuan, beriman, dan bertakwa. Dengan begitu, maka pendidikan tinggi Islam dituntut untuk berperan serta mewujudkan tatanan Indonesia baru dimaksud dengan merumuskan langkah-langkah pengembangannya.

Hingga saat ini masih ditengarai bahwa sistem pendidikan Islam belum mampu menghadapi perubahan terhadap globalisasi kebudayaan. Oleh sebab itu, pola pengajaran maintenance learning yang selama ini dipandang terlalu bersifat adaptif dan pasif harus segera ditinggalkan. Dengan begitu, maka lembaga pendidikan Islam setiap saat dituntut untuk selalu melakukan pembaruan pemikiran pendidikan dalam rangka mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi. [**]

*) Penulis merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah

Malam (UMM)



PEDULI PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS

Penyandang disabilitas (persons with disabilities) (Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi, 2017) adalah mereka yang mengalami gangguan, kesulitan atau hambatan dalam melaksanakan aktivitas/fungsi tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif tertentu untuk dapat belajar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Ragam penyandang disabilitas yakni mereka yang mengalami hambatan pada fungsi penglihatan (tunanetra), hambatan pada fungsi pendengaran dan bicara (tunarungu), hambatan pada fungsi fisik-motorik (tunadaksa), gangguan spektrum autisme, dan lain-lain.

Individu disabilitas membutuhkan cara, alat dan kondisi lingkungan tertentu supaya mereka dapat menjalani kegiatan belajar dan aktivitas lainnya secara mudah dan aman.

Dalam mengakses informasi, tunanetra perlu difasilitasi untuk menggunakan peralatan yang menekankan kepada fungsi auditori (pendengaran) dan

tactile (perabaan). Tunarungu membutuhkan media visual supaya dapat mengakses informasi secara mudah dan efektif.

Tunadaksa membutuhkan modifikasi alat dan lingkungan fisik supaya mereka dapat melakukan aktivitas dan mobilitas secara mudah dan aman. Autis membutuhkan pendekatan khusus agar dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif.

Demikian juga dengan tipe disabilitas lainnya. Mereka masing-masing membutuhkan modifikasi yang berbeda.

Membangun ekosistem pendidikan yang inklusif bagi penyandang disabilitas adalah sebuah proses panjang yang di dalamnya membutuhkan perjuangan dan kesungguhan dalam mewujudkannya.

Hal yang menjadi modal utama untuk membangun ekosistem pendidikan yang inklusif yaitu persoalan cara pandang, sikap, perilaku, serta kultur dari masyarakat. Para penyandang disabilitas membutuhkan cara dan alat yang khusus supaya dapat belajar secara efektif demi mengembangkan potensi dan cita-citanya.



URGENSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PEMBENTUKAN AKHLAK GENERASI MILENIAL

Abdurrahman*

Urgensi pendidikan agama Islam dalam pembentukan akhlak generasi milenial sangatlah dibutuhkan, karena pendidikan agama merupakan dasar bagi seseorang dalam melakukan kebaikan, serta menjadi tumpuan dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.

Maka itu, generasi milenial harus terus dibekali pendidikan agama Islam sebagai landasan hidup yang baik untuk masa depannya agar tidak terbawa arus modernisasi dan globalisasi yang cenderung terbuka dalam hal-hal yang secara naluri dan keagamaan dibatasi. Sehingga pentingnya pendidikan agama Islam sebagai pembatas agar seseorang dapat mencegah diri dari melakukan keburukan dalam kehidupannya.

Manfaat pembentukan akhlak pada generasi milenial saat ini supaya kelak lebih peduli terhadap pendidikan agamanya serta dapat mengamalkan ajaran agamanya dan tidak terbawa oleh zaman yang serba canggih dalam teknologi, bahkan dapat memanfaatkan teknologi sebaik mungkin untuk menggali dan mempelajari nilai-nilai agama yang dianutnya. Sehingga harapannya secara perlahan tetapi pasti akan memperbaiki akhlaknya di kemudian hari atau di masa yang akan datang.

Pendidikan agama Islam merupakan pondasi dasar bagi terbentuknya generasi yang kuat dengan nilai-nilai spiritual, termasuk bagi generasi milenial. Di dalam pendidikan agama Islam seseorang akan diajarkan banyak hal khususnya terkait akhlak, moral atau etika

dalam kepribadiannya. Fenomena sebagian generasi milenial saat ini banyak yang lebih senang belajar agama melalui teknologi sekarang seperti internet yang di dalamnya terdapat media sosial yang mudah diakses dimanapun dan kapanpun, contohnya Youtube, Google, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya.

Sebagian generasi milenial saat ini banyak yang lebih asik bermain dengan teknologi dalam genggamannya seperti handphone dari pada bercengkrama atau bertemu tatap muka dengan orang lain, bahkan disaat sedang berkumpul pun sebagian generasi milenial terlihat lebih nyaman dengan handphone nya dibandingkan berbicara dengan seseorang di hadapannya. Hal ini tentu salah satu tanda-tanda terjadinya degradasi moral yang terus menurun sebagian generasi milenial sebagai akibat terlalu dekatnya sebagian generasi ini dengan teknologi.

Termasuk saat generasi milenial ini berada dalam kelas dan berhadapan dengan gurunya, banyak dari mereka yang lebih fokus pada handphonenya dibandingkan memperhatikan penjelasan dari gurunya, tak terkecuali bila mereka berhadapan dengan orang tuanya di rumah, sebagian generasi milenial banyak yang terlena untuk memainkan telephone gengamannya saat orang tua berbicara tanpa mempedulikan apa yang disampaikan oleh orang tua kepadanya.

Hal demikian tentu memprihatinkan bila terus menerus dibiarkan, karena akan menjadikan generasi milenial yang apatis dan kurang peduli dengan lingkungan sekitar serta dapat menjadikan seseorang yang kurang memiliki rasa hormat terhadap orang lain termasuk kepada guru dan orang tuanya. Fenomena ini terjadi dimungkinkan karena kurangnya pendidikan agama Islam pada generasi milenial tertentu sehingga menjadikannya lemah dan tidak peka terhadap sesuatu yang terjadi disekitarnya. Bahkan memungkinkan terjadi ketidak berdayaan saat orang lain membutuhkan pertolongannya karena kurangnya akhlak yang baik pada dirinya.

Sehingga mereka hanya menyaksikan semua keadaan nyata dihadapannya dengan rasa tidak peduli. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tanda degradasi moral generasi milenial. Semua permasalahan dan kemungkinan kejadian tersebut diduga karena kurangnya pendidikan agama Islam sehingga dapat mempengaruhi rendahnya akhlak seseorang dalam hal ini sebagian generasi milenial yang memang sedang masa pertumbuhan saat ini dengan penuh rasa

penasaran dan sangat membutuhkan bimbingan dan arahan dari para pendidik zaman ini.

Pendidikan keagamaan pada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Menurut Marimba (1962:27) bahwa: "Pendidikan agama adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menuju ukuran Islam".

Sedangkan menurut Zuhairini dkk. (1983:27) bahwa: "Pendidikan agama adalah usaha secara sistematis dalam membentuk anak didik agar supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam".

Dari dua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan agama lebih berarti kepada sebuah usaha dalam bimbingan kerohanian, mengisi jiwa agar menjadi pribadi yang lebih baik, oleh sebab itu pendidikan agama sangat diperlukan sejak dini, karena pendidikan agama maka setidaknya seseorang akan memiliki kepribadian yang lebih luhur dan mulia dibandingkan yang tidak mengikuti pendidikan agama. maka dapat dikatakan bahwa pendidikan agama diperlukan dalam pembentukan akhlak, karena tujuan pendidikan agama untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia.

Sehingga begitu pentingnya pendidikan agama bagi generasi milenial dalam membentuk akhlak dan kepribadian yang baik serta mulia. Agar generasi milenial tidak mudah terpengaruh hal negatif yang ditimbulkan oleh kecanggihan teknologi. dapat disimpulkan bahwa urgensi pendidikan agama dalam pembentukan akhlak generasi milenial sangat dibutuhkan, karena pendidikan agama merupakan dasar bagi seseorang melakukan kebajikan, serta menjadi pijakan dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.

Oleh sebab itu generasi milenial harus terus dibekali pendidikan agama sebagai landasan hidup yang baik untuk masa depannya agar tidak terbawa arus modernisasi dan globalisasi yang cenderung permisif dalam hal-hal yang secara naluri dan keagamaan dibatasi. Sehingga pentingnya pendidikan agama sebagai pembatas agar seseorang dapat mencegah diri dari melakukan keburukan dalam kehidupannya. [**]

*) Penulis Merupakan Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI TUJUAN HIDUP

Fauzan Al Ziaulhaq*

Dalam Islam kehidupan ini semuanya telah diatur dengan sangat sempurna dan indah, dari yang terbesar hingga yang terkecil sekalipun. Dari cara berkata yang baik dan benar, adab buang air kecil dan air besar, sapa-menyapa kepada sesama, bahkan adab meludah pun Islam telah mengaturnya.

Panduan utama umat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang penciptaan manusia serta tujuan diciptakannya manusia. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat:13 “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang beraneka ragam, adalah bertujuan agar mereka saling mengenal satu sama lain. Dengan perbedaan ini lah hidup ini semakin indah dan dengan perbedaan ini juga kita bisa belajar saling menghargai, itulah sebabnya kita diharuskan dalam agama untuk bertoleransi.

Dalam ayat lain Allah berfirman “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka

beribadah kepada-Ku.” (Q.S. Adz-Dzariyat : 56).

Pada ayat sebelumnya telah dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain. Namun, tujuan utama manusia diciptakan ialah untuk beribadah kepada Allah. Semua ibadah yang harus kita laksanakan telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadits.

Dalam hal ibadah ini seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mempermainkannya, karena semuanya sudah memiliki ketentuan, dan barang siapa yang mempermainkannya akan mendapatkan dosa, bahkan jika sudah kelewatan bisa termasuk kedalam golongan orang yang kufur kepada Allah.

Maka itu, dalam beragama kita butuh pendidikan agar tidak termasuk orang yang sesat dalam menjalankan ibadah. Mulai dari berkenalan dengan orang lain, adab sapa-menyapa, adab bertamu, bertoleransi dan lainnya, itu semua membutuhkan pengetahuan yang bisa didapatkan dalam sebuah pendidikan.

Dalam Islam pendidikan memiliki kedudukan yang tinggi. Dari kecil kita harus sudah mulai berpendidikan. Yang harus ditanamkan dalam diri umat muslim sejak kecil hingga sampai nyawanya dipenghujung nafas ialah pendidikan Islam. Pendidikan Islam inilah yang membuat umat muslim sukses melaksanakan tugas utamanya diciptakan, yakni beribadah kepada Allah dan dari pendidikan Islam ini umat muslim mengetahui apa saja perbuatan-



perbuatan dan tindakan-tindakan yang dilarang bahkan diharamkan dalam ajaran agama Islam.

Banyak cara agar bisa mendapatkan pendidikan Islam tersebut. Yang paling pertama berperan dalam mengajarkan pendidikan Islam ini adalah orang tua. Sejak kecil kita telah dikenalkan oleh orang tua kepada sang pencipta, Allah yang Maha Besar. Kita juga diajarkan gambaran-gambaran dasar beribadah kepada Allah, seperti gerakan sholat, berpuasa walau setengah hari, mengaji dan lain sebagainya, semua itu kita dapatkan di rumah. Selebihnya pendidikan Islam akan kita dapatkan di luar rumah, yaitu di sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas lalu diperkuliahan.

Tidak hanya dalam pembelajaran formal, pendidikan Islam juga bisa didapatkan dalam pembelajaran non formal, mengikuti kajian-kajian contohnya, atau melihat ceramah-ceramah singkat di YouTube atau dengan cara lainnya.

Dalam memilih pembelajaran formal, ada baiknya agar memilih sekolah-sekolah Islam, seperti pesantren dan sejenisnya, agar pendidikan Islam yang didapatkan bisa maksimal. Karena dalam ajaran agama Islam kita harus benar-benar memahami syariat Islam itu sendiri, tidak boleh setengah-setengah atau hanya sebagian saja.

Harapannya, umat muslim mengetahui betapa pentingnya pendidikan Islam ini bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan di dunia dan di akhirat. Karena dengan pendidikan Islam inilah umat muslim dapat bertoleransi satu sama lain dengan baik, dengan pendidikan Islam inilah umat muslim bisa beribadah dengan baik dan benar. Dan berbekal pendidikan Islam inilah umat Islam melaksanakan tugas utama manusia diciptakan atau dengan kata lain pendidikan Islam inilah tujuan utama manusia diciptakan. [**]

*) Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)



MERDEKA BELAJAR DI TENGAH PANDEMI

Nabil Syuja Faozan

Tahun 2020 yang baru saja kita lewati, merupakan tahun yang berat bagi bangsa Indonesia bahkan seluruh bangsa di dunia. Adanya pandemi Covid-19 memberikan banyak cobaan dan tantangan di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang Pendidikan.

Salah satu tujuan Indonesia merdeka, sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam kondisi apapun harus tetap dilakukan. Negara harus hadir menyediakan sarana dan prasana yang memadai melalui program dan kebijakan untuk mencerdaskan bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai leading sector dalam bidang pendidikan harus terus menerus melakukan inovasi dan transformasi sebagai ikhtiar menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Penyusunan program yang dilakukan pemerintah, khususnya Kemendikbud mulai dari penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) hingga program transformasi dana pemerintah untuk perguruan tinggi menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menanggulangi masalah Pendidikan di tengah pandemi Covid-19, yang belum diketahui kapan akan berakhir. Sekalipun proses vaksinasi sudah dimulai dengan skala prioritas tenaga Kesehatan, sehingga menimbulkan optimisme baru terhadap pencegahan virus korona.

Enam Episode

Siaran Pers Kemendikbud Nomor : 002/sipres/A6/I/2021 menjelaskan ada enam episode usaha pemerintah dalam menanggulangi masalah pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Pertama Kemendikbud fokus terhadap empat kebijakan program kerja yaitu Penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), pengganti Ujian Nasional (UN), penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan mengatur kembali Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Kedua, kampus merdeka. Fokus terhadap perguruan tinggi diantaranya adalah mempermudah membuka program studi baru, mempermudah sistem akreditasi perguruan tinggi, mempermudah perguruan tinggi untuk menjadi PTN berbadan hukum dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Merdeka Belajar episode Kampus Merdeka memberikan keuntungan untuk berbagai perguruan tinggi swasta maupun negeri, yang baru didirikan dalam melakukan akreditasi dan membuka program studi baru. Tak hanya itu, kebebasan hak belajar tiga semester di luar program studi yang diberikan kepada mahasiswa menjadi modal dalam pembentukan SDM yang unggul dan kompeten di bidangnya.

Ketiga, penyesuaian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu penyaluran dana BOS langsung ke sekolah, penggunaannya lebih fleksibel untuk sekolah, nilai satuan meningkat, dan pelaporan dana BOS lebih transparan dan akuntabel. Harapannya adalah tidak ada lagi kepala sekolah yang menalangi dana operasional sekolahnya dan fleksibilitas penggunaan dana tersebut karena sekolah yang mengerti apa kebutuhan murid-muridnya.

Keempat, Program Organisasi Penggerak (POP) dengan tujuan untuk memberdayakan organisasi penggerak dalam membangun sekolah-sekolah

penggerak. Harapannya POP menjadi elemen penting terciptanya Sekolah Penggerak, tempat menuangkan seluruh konsep Merdeka Belajar. Dalam melaksanakan POP, seluruh elemen masyarakat harus saling bekerjasama agar fleksibilitas penggunaan dana POP dapat tersalurkan sebagaimana mestinya. Dukungan pemerintah yang membuat program ini juga menjadi poin penting dalam terlaksananya pembangunan sekolah penggerak.

Kelima, gurupenggerak. Arah program gurupenggerak berfokus pada pedagogi, serta berpusat pada murid dan pengembangan holistik, pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui on-the-job coaching. Melalui program ini diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang murid secara holistik sehingga menjadi Pelajar Pancasila, menjadi pelatih atau mentor bagi guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan.

Keenam, transformasi dana pemerintah untuk perguruan tinggi. Fokusnya adalah perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri harus mampu bersaing di tingkat dunia dan mencakup delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi transformasi landasan Pendidikan tinggi. Sehingga perguruan tinggi akan memiliki kualitas yang baik, sejajar dengan perguruan tinggi luar negeri.

Melalui program dan kebijakan enam episode yang dibangun dan dicapai oleh Kemendikbud tersebut, akan diperoleh gambaran secara utuh dan transparan atas upaya hadirnya negara dalam memerdekakan belajar pada saat masih terjadinya pandemi Covid-19, khususnya di bidang Pendidikan. Walaupun dalam pelaksanaannya masih belum sempurna.

Setidaknya program yang diupayakan pemerintah memberikan jawaban dan kepuasan tersendiri bagi seluruh elemen masyarakat yang merasa khawatir terhadap masalah Pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Karena itu, gotong royong yang menjadi jiwa dan karakter bangsa, dari seluruh elemen masyarakat menjadi penting dan strategis, untuk bersama-sama mencerdaskan bangsa. Seraya berdoa agar wabah Covid-19 ini segera berlalu, sehingga proses merdeka belajar dapat berjalan normal kembali. Semoga. [**]

*) Penulis adalah Mahasiswa FKK Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

MENEGUHKAN MERDEKA BELAJAR, MENUJU PENDIDIKAN BERKUALITAS

Benni Setiawan

Esensi belajar itu merdeka. Artinya, seseorang bebas belajar kapan saja dan di mana saja. Itulah falsafah pendidikan ala Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara, “Jadikan semua orang guru dan semua tempat sekolah”.

Esensi merdeka belajar ini ditangkap oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kemendikbud dalam rilisnya menyebut bahwa salah satu program prioritas tahun 2021 adalah Merdeka Belajar.

Pada 3 November 2020, Kemendikbud meluncurkan Merdeka Belajar Episode Keenam: Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka mendukung visi Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, salah satunya melalui transformasi pendidikan tinggi agar mampu mencetak lebih banyak lagi talenta-talenta yang mampu bersaing di tingkat dunia. Mendikbud mengatakan Merdeka Belajar Episode Keenam lahir dengan fokus pada pembangunan SDM unggul di jenjang pendidikan tinggi. “Perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta harus bergerak lebih cepat agar dapat bersaing di tingkat dunia,” kata Mas Menteri. Mas Menteri pun menegaskan bahwa

tujuan Merdeka Belajar adalah pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan Berkualitas

Pendidikan berkualitas perlu dibangun atas kesadaran bahwa proses ini perlu dukungan semua pihak. Artinya, Kemendikbud sebagai institusi negara tidak bisa merampungkan cita-cita mulia itu sendiri. Perlu sinergi dengan kekuatan lain, dalam hal ini organisasi sosial masyarakat.

Muhammadiyah dapat diajak oleh Kemendikbud dalam menyukseskan program Merdeka Belajar. Mengapa Muhammadiyah? Pasalnya, organisasi ini memiliki jejaring kerja mulai dari ranting hingga pusat. Sekolah dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) tersebar di seluruh wilayah tanah air. PTM dapat menjadi pilot project dalam menyukseskan Merdeka Belajar.

PTM relatif siap dalam sumber daya dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta lainnya. Oleh karena itu, menggandeng PTM dalam menyukseskan Merdeka Belajar menjadi sebuah keniscayaan.

Selain itu, program mulia ini pun perlu dikawal dalam proses praktik di tingkat bawah. Artinya, Kemendikbud perlu juga membuat rambu-rambu bagaimana nanti proses perkuliahan dan hal-hal teknis yang perlu beres



sebelum program ini dimulai. Hal itu dikarenakan, seringkali persoalan teknis yang tidak selesai, hanya akan merontokkan program kerja yang esensial.

Selesaikan Hal Teknis

Misalnya, dalam hal pembiayaan. Permendikbud No 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Persoalan dari mengambil kuliah di PT lain atau Dunia Usaha itu perlu selesai dalam proses bagaimana pembayaran atau urusan teknis keuangan. Sekali ini ini hal teknis, namun jika tidak rampungkan meninggalkan catatan tidak baik dalam program Merdeka Belajar. Oleh karena itu panduan teknis tentang Merdeka Belajar terkait dengan “tetek bengek” (baca: hal-hal teknis yang

ribet) ini perlu segera disusun.

Lebih lanjut, program Merdeka Belajar perlu terus disosialisasikan agar semua pihak menjadi paham esensi pendidikan. Pendidikan memberikan ruang dialog kritis kepada siapa saja dalam proses penemuan dan pengembangan ilmu. Merdeka Belajar membuka ruang itu agar semua ilmu dapat bertemu dan berdialog satu sama lain. Pertemuan arus utama ilmu inilah yang akan menguatkan kebangsaan dan kenegaraan. Mahasiswa sebagai pembelajar akan semakin memahami bahwa sebuah ilmu tidak dapat berdiri sendiri. Ia sangat terkait dengan kajian ilmu lainnya, sehingga belajar dari program studi lain guna menguatkan perspektif keilmuan menjadi hal utama.

Merdeka Belajar menawarkan sebuah pendekatan holistik dalam menyiapkan anak bangsa merdeka lahir batin. Merdeka Belajar pun telah lama disuarakan oleh para pendiri bangsa (founding fathers and mothers). Sebagai generasi terkini, saatnya mewujudkan dan mengokohkan cita-cita itu demi terwujudnya kehidupan adil, makmur, dan sejahtera. [**]

*) Penulis adalah Dosen Universitas Negeri Yogyakarta, Peneliti Maarif Institute, Penulis Buku Keterasingan Pendidikan Nasional (2019).

HUMANISME PENDIDIKAN DAN PENDIDIK

Suten Sumarten*

Kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengisyaratkan bahwa pendidikan itu menyesuaikan karakter siswa. Supaya minat belajar meningkat dan semangat para pendidik juga tidak kendor.

Program Merdeka Belajar salah satu yang diusung Kemendikbud Ristek dianggap ide dan gagasan brilliant. Program tersebut, telah berjalan selama dua tahun. Bahkan, proses Merdeka Belajar dapat menelisik kembali spesifikasi individu yang bisa melahirkan siswa-siswa berprestasi.

Merdeka Belajar telah membawa berbagai perubahan di dunia pendidikan. Para guru saat ini telah memahami cara memberikan pembelajaran yang efektif. Ada perubahan mindset guru-guru di berbagai sekolah, ada visi ada tujuan.

Di saat mindset connect, maka teknik mengajar dan menyusun pembelajaran dapat diseimbangkan sehingga outputnya berkualitas. Esensi Merdeka Belajar yang dimaksud bukan seperti itu. Memberikan keleluasaan bagi siswa untuk memilih pelajaran sesuai minat mereka.

Cara mengajar guru yang feodal selama ini, harus ditinggalkan sama sekali. Sekarang, model pembelajaran

yang sifatnya sosio kultural dapat diperdalam pada saat jam belajar mengajar.

Hal ini menjadi sebuah kemajuan bagi guru di Indonesia. Artinya Merdeka Belajar cocok diterapkan. Guru-guru Indonesia pada saat ini sedang bergerak sehingga sangat mudah terjadi transformasi dalam berfikir.

Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim, katakan bahwa dituntut kreativitas guru dalam proses Merdeka Belajar. Kemerdekaan dalam proses belajar menjadi target. Dalam Merdeka Belajar, guru-guru dan kepala sekolah punya kebebasan untuk merancang proses pembelajaran dengan cara yang paling cocok untuk para murid.

Kondisi wilayah, kemampuan sekolah, serta daya belajar siswa memiliki perbedaan yang tidak bisa disamakan satu sama lain. Apalagi jika berkaitan dengan teknologi. Semua murid itu berbeda. Di sekolah yang berbeda maka akan berbeda. Di sekolah yang ada di pegunungan, pesisir, kota, desa atau kampung itu akan berbeda-beda proses pembelajaran yang kondusif.

Siswa dapat menikmati proses pembelajaran dengan bebas tanpa hambatan dan tekanan psikologis. Harapannya, siswa bisa lebih mandiri untuk belajar dan mendapat pemahaman. Merdeka belajar juga penting



membangun suasana belajar yang menyenangkan antara pendidik dan siswa, di mana siswa diberi hak untuk belajar.

Sementara itu, terkait dengan pengaruh teknologi dimasa pembelajaran daring, guru-guru harus melatih dirinya sendiri sehingga teknologi bukan hanya untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sebagai cara implementasikan hal ini, guru di sekolah merancang metode pembelajaran berbasis proyek untuk memacu kreativitas siswa.

Tetapi, bisa untuk berbagai macam kegiatan, diantaranya: Pertama, Bisa untuk melakukan online university untuk meningkatkan kemampuan.

Kedua, menggunakan aplikasi untuk mengakses atau evaluasi level kompetensi murid agar bisa dipetakan mana murid yang ketinggalan dan mana yang lebih maju.

Ketiga, tempat untuk kolaborasi dan berbagi dengan guru-guru lain. Keempat, bisa menurunkan beban administrasi sekolah, sehingga guru bisa fokus terhadap perkembangan belajar murid

Jadi peran teknologi itu jauh lebih variatif karena pertama kalinya teknologi digunakan untuk sekolah secara. Juga terdapat manfaat lain dari teknologi yang selama ini dipakai seperti google class room.

Guru tak hanya bisa menggunakan untuk pembelajaran jarak jauh tapi bisa juga digunakan untuk off learning seperti komunikasi dengan orang tua, mengatur jadwal kelas, dan membuat grup-grup kecil untuk berkomunikasi dengan murid.

Singkatnya, pendidikan baru dikatakan berhasil tatkala individu itu bisa terlibat aktif dalam pembelajaran dan mendapat banyak pengalaman untuk bekal hidupnya. Sebagai pelajar, menurut sudut pandang filsafat ini, guru harus luwes dan fleksibel karena dipandang sebagai makhluk yang dinamis dan kreatif sehingga Merdeka Belajar dapat diraih.

Semua guru dan sekolah harus pertimbangkan fungsi pendidikan yaitu untuk memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada individu sehingga potensi-potensinya dapat berkembang dengan baik. Kemerdekaan belajar harus dihubungkan dengan pemahaman dan mempelajari, bukan sekedar belajar “apa” nya, tetapi juga “bagaimana”. Learning how to learn, dengan begitu dapat mencapai kemampuan untuk belajar dengan “merdeka”.

*) Pemerhati Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD



PTM DAN SEMANGAT BANGKIT DARI PANDEMI

Diah Purwitasari*

Sudah satu setengah tahun Indonesia bergelut dengan pandemi Covid-19. Selama itu pula para siswa dan mahasiswa terpaksa tidak pergi ke sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran jarak jauh akhirnya menjadi solusi agar siswa tetap bisa mendapatkan pendidikan dan juga terhindar dari penularan virus Covid-19.

Banyak hal yang telah dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek untuk memastikan semua anak Indonesia tetap bisa belajar di tengah pandemi. Berbagai program dilaksanakan untuk membantu siswa, tenaga pendidik, dan satuan pendidikan.

Bantuan yang telah disalurkan selama pandemi ini antara lain bantuan subsidi kuota internet, bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT), bantuan subsidi upah untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS serta penanganan Covid-19 pada Rumah Sakit Pendidikan (RSP) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Seiring dengan tren penurunan angka kasus positif Covid-19 di Indonesia, pemerintah berencana untuk membuka kembali sekolah – sekolah. Pembukaan sekolah ini harus dilaksanakan untuk menghindari dampak negatif jika pembelajaran jarak jauh dilaksanakan terlalu lama.

Pembelajaran jarak jauh yang terlalu lama dapat

mengakibatkan learning loss. Learning loss adalah istilah yang mengacu pada hilangnya pengetahuan dan ketrampilan baik secara umum atau spesifik atau terjadinya kemunduran proses akademik karena suatu kondisi tertentu.

Tiga resiko learning loss yang dapat terjadi antara lain peserta didik tidak memperoleh pembelajaran yang optimal, peserta didik mengalami kemunduran akademis dan non akademis dan pemulihan ini semua dapat memakan waktu hingga 9 tahun.

Sekolah – sekolah yang mulai dibuka akan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Syarat utama digelarnya Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) antara lain tenaga pendidik sudah divaksinasi Covid-19, peserta didik yang sudah berusia diatas 12 tahun juga diwajibkan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 dan pembelajaran tatap muka dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 %.

Dalam siaran pers Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Nomor : 242/ sipres/ A6 /VI /2021, Mendikbudristek menyatakan bahwa PTM terbatas bukan sekolah seperti biasa. Menteri menyampaikan, seperti yang dicontohkan oleh Presiden bahwa sekolah yang sudah atau dalam proses melakukan PTM terbatas

dengan durasi belajar dan jumlah murid yang berbeda tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan dan di bawah batas maksimal yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa Pandemi Covid-19.

Diketahui bahwa sekitar 30 % satuan pendidikan telah melakukan PTM terbatas sesuai situasi dan kondisinya masing – masing, dan kemungkinan akan terus bertambah seiring dengan menurunnya angka kasus Covid-19 di Indonesia.

Kemendikbudristek dalam siaran persnya Nomor : 535/ sipres/ A6/ IX/ 2021 menanggapi empat miskonsepsi isu kluster Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang beredar di masyarakat sekarang ini.

Miskonsepsi pertama adalah mengenai terjadinya kluster akibat PTM terbatas. “Angka 2,8% satuan pendidikan itu bukanlah data kluster Covid-19, tetapi data satuan pendidikan yang melaporkan adanya warga sekolah yang pernah tertular covid-19. Sehingga lebih dari 97% satuan pendidikan tidak memiliki warga sekolah yang pernah tertular covid-19”, disampaikan oleh Dirjen PAUD Dikdasmen di Jakarta, Jumat (24/9).

Miskonsepsi kedua , dijelaskan Dirjen PAUD Dikdasmen, bahwa belum tentu juga penularan Covid-19 terjadi di satuan pendidikan. Data tersebut didapatkan dari laporan 46.500 satuan pendidikan yang mengisi survey dari Kemendikbudristek. Satuan pendidikan tersebut ada yang sudah melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas dan ada juga yang belum.

Miskonsepsi ketiga, Ditjen PAUD Dikdasmen menyampaikan, bahwa angka 2,8 % satuan pendidikan yang diberitakan itu bukanlah laporan akumulasi dari kurun waktu satu bulan terakhir, tetapi 14 bulan terakhir sejak tahun lalu yaitu bulan Juli Tahun 2020.

Miskonsepsi keempat adalah isu yang beredar mengenai 15.000 siswa dan 7.000 guru positif Covid-19 berasal dari laporan yang disampaikan oleh 46.500 satuan pendidikan yang belum diverifikasi, sehingga masih ditemukan kesalahan.

Misalnya kesalahan input data yang dilakukan satuan pendidikan seperti laporan jumlah guru dan siswa yang positif Covid-19 lebih besar daripada jumlah total guru dan siswa pada satuan pendidikan tersebut.

Lebih lanjut dikarenakan keterbatasan akurasi data laporan dari satuan pendidikan, Kemendikbudristek sedang mengembangkan sistem pelaporan yang

memudahkan verifikasi data. Kemendikbudristek dan Kemenkes sedang melakukan uji coba sistem pendataan baru dengan aplikasi Peduli Lindungi.

Kemendikbudristek juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pemantauan dinamika sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Anak – anak juga tetap bisa belajar dari rumah apabila orang tua belum yakin dan belum memberikan izin untuk mengikuti PTM terbatas. Tidak ada proses menghukum dan diskriminasi bagi anak – anak yang belajar dari rumah.

Kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas bukannya tidak menghadapi tantangan. Guru harus mempersiapkan mental dan niat yang kuat untuk membuat materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu proses pertemuan yang singkat di kelas membuat guru harus lebih kreatif dalam menyampaikan materi di dalam kelas.

Penerapan disiplin protokol kesehatan di sekolah juga merupakan tantangan tersendiri. Kasus positif Covid-19 yang menurun dari hari ke hari bisa berakibat kendornya protokol kesehatan. Pengawasan semua pihak diperlukan agar sekolah tidak menjadi kluster baru dalam penularan virus.

Dilaksanakannya pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah membawa harapan dan semangat bagi para siswa. Setelah kurang lebih satu setengah tahun belajar di rumah, akhirnya siswa dapat kembali bertemu dengan guru dan teman – temannya. Interaksi sosial yang selama ini dirindukan akhirnya kembali terjalin.

Para orang tua juga menyambut gembira PTM terbatas ini. Orang tua berharap dengan kembali belajar di sekolah, anak – anak bisa belajar dengan lebih optimal. Selama pembelajaran jarak jauh dilakukan, seringkali para siswa mengalami kebosanan dan kurang fokus dalam belajar. Walau masih ada kekhawatiran, para orang tua optimis semua akan dilalui dengan baik.

Pada akhirnya kerjasama yang efektif antara pendidik, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, komite sekolah dan juga orang tua siswa sangat diperlukan untuk kesuksesan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Semua pihak diharapkan dapat bahu membahu bergandengan tangan untuk bangkit kembali melewati pandemi ini.

*) Praktisi Pendidikan, orang tua murid, dan alumni Pascasarjana UHAMKA Jakarta

JALAN TERJAL ANIES-GANJAR

Amir Fiqi*

Wacana kontestasi Pilpres 2024 mulai memanas. Sejumlah nama mulai digadang-gadang untuk bertarung pada kontestasi tersebut. Ada nama Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Puan Maharani, Airlangga Hartarto dan sejumlah nama populer lainnya baik dari kalangan politikus partai politik, menteri, pengusaha, dan kepala daerah. Dari sejumlah nama tersebut tidak semuanya memiliki modal electoral yang memadai.

Namun, jika melihat hasil survei dari sejumlah lembaga, secara elektabilitas hanya tiga nama yang memiliki modal cukup kuat untuk bertarung pada Pilpres 2024. Ketiga nama tersebut yaitu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) menyebutkan bahwa elektabilitas Prabowo menempati posisi tertinggi yakni 21,9 %, kemudian disusul Ganjar dan Anies yakni 15,8 % dan 11,1 %. Hasil tidak jauh beda juga disebutkan oleh Survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra menempati posisi tertinggi 26,2 %, kemudian disusul Ganjar (20,8%) dan Anies Baswedan (15,5 %).

Prabowo masih menempati posisi tertinggi berdasarkan survei Institute for Democracy and Strategic Studies (Indostategic) yakni (17,5 %). Tapi posisi kedua ditempati oleh Anies (17 %), disusul oleh Ganjar (8,1%), dan Ridwan Kamil (7%).

Namun, dari ketiga nama ini, hanya Prabowo yang jalannya akan mulus untuk mendapatkan tiket Capres. Sebab, Partai Gerindra sudah mengantongi 12,57 % syarat dari presidential threshold / ambang batas sebesar 20 % . Partai Gerindra hanya butuh satu partai politik untuk melenggang pada kontestasi Pilpres. Misal membangun koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sudah cukup, sebab PKB memiliki suara hasil Pileg 2019 sebesar 9,69 %.

Kekuatan Prabowo juga akan bertambah kuat jika PDI Perjuangan benar-benar membangun koalisi dengan mengusung Puan Maharani mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024 mendatang. Sebab, wacana Prabowo-Puan liar dibicarakan publik. Dan kerap disuarakan oleh internal PDIP sendiri.

Lantas bagaimana nasib Anies dan Ganjar?. Apakah hanya sebatas disebut-sebut dalam survei sebagai calon presiden potensial, atau benar-benar turut bertarung pada Pilpres 2024?. Kita tunggu jawabannya, jalan menuju Pilpres masih tiga tahun lagi.

Langkah panjang Anies

Langkah Anies untuk bertarung pada kontestasi Pilpres 2024 masih panjang. Tidak cukup hanya berbakal dari tingginya elektabilitas di sejumlah lembaga survei, tapi dia harus bekerja keras untuk merebut hati partai politik sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pada Pilpres 2024.

Ini sangat penting harus dituntaskan oleh Anies, sebab dia bukanlah kader dari partai politik manapun. Jika ini tidak lulus dia jalankan maka mimpinya untuk maju Pilpres mustahil akan terwujud.

Namun, jika melihat dinamika politik akhir-akhir ada dua partai politik yang terlihat menunjukkan gelagatnya meminang Anies sebagai bakal calon presiden, yakni Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tapi ini juga masih kurang, sebab suara PKS dan NasDem belum memenuhi syarat untuk presidential threshold.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) suara Partai NasDem pada Pileg 2019 sebanyak 9,05 %, dan PKS sebanyak 8,21 %. Maka masih butuh satu partai politik untuk memuluskan langkah Anies bertarung pada Pilpres 2024. Dan kemungkinan bisa ditarik untuk mengusung Anies adalah Partai Amanat Nasional (PAN).

Tidak hanya soal partai politik, ujian Anies menuju Pilpres 2024 mendapatkan tantangan yang berat, serangan pribadi dan jabatan yang kini dia emban sudah mulai gencar dilancarkan oleh lawan politiknya.

Misalnya interpelasi banjir di DPRD, isu Formula E, serangan agresivitas verbal dengan label pembohong yang disampaikan politisi PSI, Giring Ganesha, hingga isu hukum seputar pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019.

Kemungkinan besar serangan-serangan sejenisnya terus dilancarkan hingga masa akhir jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2022. Jika dia kembali maju pada Pilgub serangan akan semakin kuat untuk memutuskan jalan Anies.

Seandainya Anies gagal atau tidak maju kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta tugas Anies untuk menjaga elektabilitasnya akan semakin berat. Sebab, dia tidak lagi memiliki panggung yang gemerlap. Tidak menjatuhnya Anies maka akan sulit baginya untuk tetap mendapatkan perhatian positif dari masyarakat Indonesia.

Maka sesungguhnya tugas relawan yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden memiliki tugas berat. Yakni memenangkan kembali Anies pada Pilgub DKI Jakarta pada 2022. Dan jika Anies tidak memiliki jabatan publik maka bagaimana para relawan bekerja agar Anies tetap mendapatkan perhatian positif khalayak, sehingga elektabilitasnya tetap terjaga dan bisa terus meningkat.

Nasib Ganjar?

Sebagai kader PDI Perjuangan, langkah Gubernur Jateng ini untuk maju pada Pilpres 2024 belum tentu mulus. Sebab di internal PDIP sendiri kurang menyambut baik dirinya. Bahkan elit partai moncong putih itu juga kerap menyerang Ganjar secara verbal.

Jika membaca politik PDIP saat ini terlihat lebih antusias untuk memasang Ketua DPR RI Puan Maharani pada kontestasi Pilpres mendatang. Hal tersebut bisa terbaca dengan masifnya penyebaran baliho Puan Maharani di seluruh wilayah Tanah Air.

Baliho politik ini bisa jadi bagian langkah PDIP untuk memperkenalkan Puan ke khalayak. Dengan harapan tingkat popularitas dan elektabilitas Puan terus meningkat.

Masa jabatan Ganjar sebagai Gubernur Jateng akan berakhir tahun 2023, masih kurang satu tahun menuju Pilpres. Inilah adalah masa-masa krusial bagi Ganjar untuk bisa tetap mendapatkan perhatian khalayak. Sebab, Ganjar tidak lagi memiliki panggung politik untuk mendongkrak atau menjaga elektabilitas agar

terus bersinar seperti saat ini.

Bersinarnya elektabilitas Ganjar saat ini tidak bisa dipisahkan dari posisi dia sekarang ini. Kerja nyatanya untuk masyarakat Jawa Tengah telah berhasil menarik perhatian positif khalayak. Sehingga dukungan untuknya maju pada Pilpres 2024 terus mengalir deras dari para relawan.

Anies-Ganjar bersatu

Menurut hemat penulis Anies-Ganjar memiliki masalah agak mirip. Meski sebagai calon presiden potensial dalam Pilpres 2024 tapi belum mendapatkan dukungan partai politik yang nyata. Anies bukan dari kader partai, sementara Ganjar dari kader partai tapi tidak mendapatkan sambutan positif dari partai dimana dia berlabuh.

Jika kedua nama ini bersatu bisa menjadi kekuatan besar untuk memenangkan Pilpres 2024. Dengan kekuatan relawan yang solid bisa menghantarkan mereka menjadi penguasa di negeri ini.

Kesolidan relawan Anies-Ganjar sudah terbukti. Dari jauh-jauh hari mereka bekerja untuk menghantar Anies-Ganjar sebagai presiden. Dan akhir-akhir ini para relawan telah menunjukkan kekuatannya dengan deklarasi-deklarasi. Inilah sebagai bukti kedua sosok ini mendapatkan perhatian positif yang sangat kuat dari masyarakat.

Maka, bisa jadi kesempatan untuk mengawinkan Anies-Ganjar dimanfaatkan oleh partai-partai lain yang perolehan suara legislatifnya di bawah 10 persen. Seperti PPP, PAN, PKS, PKS dan NasDem. Jika mereka bersatu dalam satu barisan koalisi maka Anies-Ganjar bisa menjadi kekuatan yang bisa menggalkan mimpi Prabowo menjadi Presiden RI.

Jika ini benar-benar terjadi maka siapa yang akan menjadi Capres dan Cawapres. Itu tergantung dari kesepakatan para partai politik pengusung. Bisa jadi Anies Capres nya, atau sebaliknya.

Penulis sangat berharap Pilpres 2024 tidak hanya diikuti oleh dua pasang, minimal tiga pasang. Cukup Pilpres 2014 dan 2019 menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Sungguh jika kembali terjadi rivalitasnya akan panas, dan masyarakat bisa terbelah. Semoga Pilpres 2024 berjalan lancar dan menghadirkan kontestasi yang mencerminkan demokrasi yang unggul.

**) Wartawan dan Pemerhati Sosial*

PRESTASI MAS MENTERI

Ayundy Anditaningrum*

Perkembangan pendidikan menjadi sorotan utama di masa pandemi Covid-19. Pemerintah melalui Kemendikbudristek telah semaksimal mungkin mencari alternatif solusi untuk masa depan pendidikan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan-kebijakannya untuk merancang sistem pendidikan yang berkualitas. Merdeka Belajar menjadi prioritas kebijakan yang ditempuh dan diyakini sebagai upaya bangkit dari situasi pandemi. Tercatat kurun waktu Desember 2019 sampai dengan Juli dan Oktober 2021, setidaknya ada beberapa keberhasilan kebijakan tersebut yang sangat dirasakan oleh masyarakat.

Pertama, penerapan sistem PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) melalui pemanfaatan teknologi dan program TV Kependidikan. TVRI yang merupakan jaringan televisi pertama di Indonesia menjadi pilihan Pemerintah dengan menyediakan tayangan pendidikan mulai pagi sampai siang hari sesuai jenjang dari tingkat TK sampai dengan SMA. Disusul dengan penerapan kurikulum darurat melalui penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Keputusan ini tercantum di dalam Kemendikbud Republik Indonesia No. 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus.

Melalui kurikulum darurat ini, sekolah bisa lebih mudah menyesuaikan dengan keadaan satuan pendidikan, kompetensi peserta didik dalam pembelajaran sesuai standar yang berlaku yang disesuaikan. Kedua, pemberian Bantuan Kuota Internet Gratis. Pemerintah telah mengucurkan dana Rp7,2 triliun untuk subsidi kuota internet selama empat bulan. Secara umum, bantuan kuota ini diatur dalam peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 14 tahun 2020 tentang petunjuk teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020, terbagi atas kuota umum dan kuota belajar.

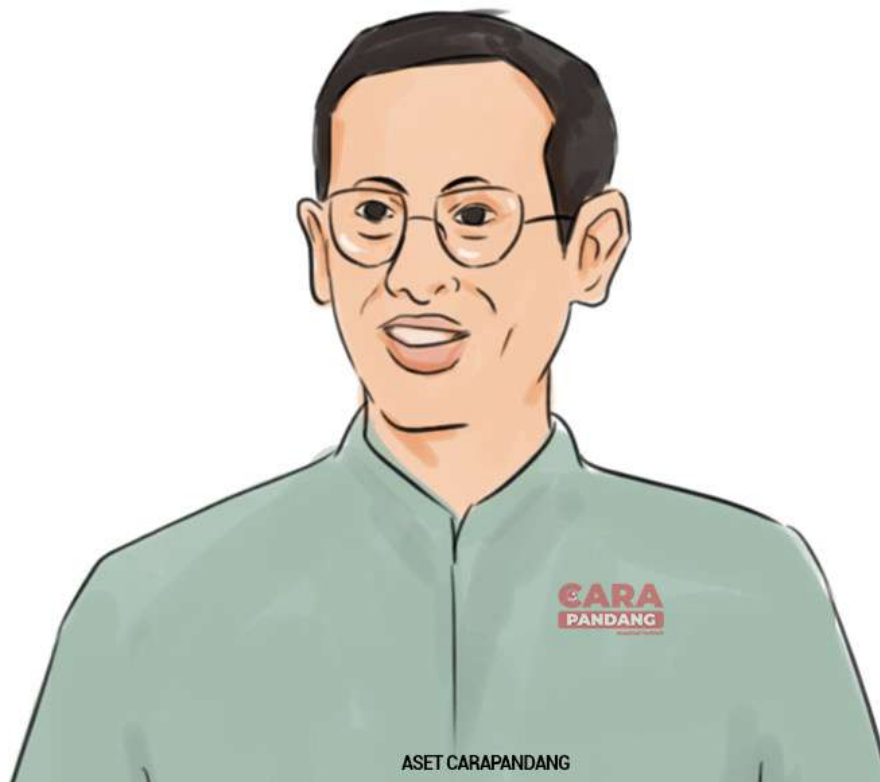
Kuota umum digunakan untuk ases seluruh laman dan aplikasi, sedangkan kuota belajar hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran, dengan daftar yang tercantum pada <http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id>.

Secara resmi pemerintah berdasarkan siaran pers Kemendikbud nomor 277/Sipres/A6/IX/2020, telah menyalurkan bantuan kuota internet bagi 27,3 juta pendidik dan peserta didik di bulan September 2020. Bantuan kuota internet cukup dirasakan oleh sekolah yang sudah memiliki akses internet dan orangtua bisa lebih ringan dalam melaksanakan pembelajaran daring.

Ketiga, simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang ketat dengan protokoler kesehatan. Kebijakan ini diharapkan sebagai langkah positif untuk mensiasati efek psikologis anak yang terlalu lama pembelajaran daring.

Mereka secara fisik amat terdampak terutama untuk kesehatan mata dan pengaruh smart phone yang bisa membahayakan bagi anak-anak. Melalui siaran persnya Kemendikbud No 368/sipres/A6/XI/2020 dijelaskan bahwa faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka antara lain tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, akses terhadap sumber belajar/kemudahan belajar dari rumah, dan kondisi psikososial peserta didik.

Keempat, bantuan dana BOS, KIP, dan Pendidikan Guru Penggerak Sertifikasi dan Rekrutmen Pegawai Dengan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dana BOS tahun 2021 diberikan dengan nilai bervariasi sesuai karakteristik daerah masing-masing, penggunaan dana BOS tetap fleksibel, termasuk dapat digunakan untuk keperluan persiapan PTM terbatas,



serta pelaporan penggunaan dana BOS dilakukan secara daring dan menjadi syarat penyaluran untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

Kemendikbudristek juga menghadirkan KIP Kuliah dengan pemberian uang kuliah sebesar Rp2,4 juta per mahasiswa dan ditingkatkan dengan KIP Kuliah Merdeka dengan membagi batas maksimal uang kuliah berdasarkan akreditasi program studi.

Pendidikan Guru Penggerak sebagai program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 9 bulan dan diharapkan mampu menguatkan dan melembagakan aktivitas guru-guru.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 173.329 guru honorer lulus ujian seleksi tahap pertama dan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK). Seleksi ini merupakan bukti komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan mengangkat derajat guru sebagai profesi mulia dan terhormat.

Kelima, kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) dan kewajiban vaksin untuk seluruh tenaga pendidik dan peserta didik. PTMT adalah solusi alternatif yang ditempuh oleh Kemendikbud menanggapi aspirasi masyarakat dan orang tua siswa yang mengeluh terkait PJJ yang membuat anak semakin menurun kualitas pendidikannya.

Syaratnya protokoler kesehatan yang ketat wajib dilakukan, pemenuhan fasilitas penunjang seperti sarana dan prasarana yang memadai seperti tempat cuci tangan, termogun, masker, obat-obatan sebagai pertolongan pertama sebagai antisipasi dan kesiapsiagaan.

Program-program tersebut dilakukan sebagai langkah nyata mewujudkan cita-cita bangsa untuk memiliki SDM unggul yang berdaya saing global. Hal ini memberikan pernyataan bahwa keseriusan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Nadiem Makarim penuh pertimbangan dan berhasil memberikan dampak yang dirasakan masyarakat.

*) Guru SMP Muhammadiyah PK Al Kautsar Kartasura

TANTANGAN MAS MENTERI

Arif Yudistira*

Nadiem makarim boleh sedikit menghela nafas sejenak. Pasalnya di masa pandemi, ia masih masuk jajaran menteri yang dinilai nomor satu di mata publik. Tidak mudah menghadapi pandemi, terlebih di sektor pendidikan. Ibarat maju kena mundur pun kena. Kemendikbud-ristek pada akhirnya mampu melewati masa-masa pandemi dengan kebijakan yang solutif dan brilian. Nadiem dengan program merdeka belajarnya telah diakui mampu menerobos masalah pendidikan pada masa pandemi.

Ada empat aspek yang layak dicatat mengenai keberhasilan kebijakan Kemendikbud-ristek dalam menangani soal pandemi di dunia pendidikan. Pertama, Nadiem cukup jitu merespon persoalan pendidikan anak-anak kita. Ia mencanangkan Program PJJ [Pembelajaran Jarak Jauh] untuk mengantisipasi jatuhnya korban virus corona lebih banyak.

Kedua, Program Kebijakan Bos yang menyesuaikan saat pandemi dengan tidak mengabaikan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan ini membuat pengelola sekolah tidak lagi kebingungan untuk menerapkan anggaran pendidikan untuk keperluan PJJ dan menunjang pembelajaran yang selama ini cukup tertinggal.

Ketiga, kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong lebih jauh lagi kampus berinovasi dalam menciptakan terobosan dan program yang membekali mahasiswa menjadi entrepreneur sekaligus terintegrasi dalam mengembangkan penelitian di kampusnya.

Pada pertemuan Dies Natalies ITS, Nadiem juga membuka seluas-luasnya agar setiap rektor kreatif dan inovatif dengan penemuan di kampusnya yang akan didukung oleh Kemendikbud-ristek.

Keempat, Nadiem juga menerapkan kebijakan Asesmen Nasional sebagai pengganti Ujian Nasional. Nadiem juga menetapkan kebijakan dalam bidang kebudayaan yang mendorong para pegiat kebudayaan

tetap berkreasi dan bisa menggerakkan kembali geliat kebudayaan yang sempat terhenti karena pandemi.

Aksi Nyata

Nadiem Makarim memang cenderung banyak diam dan berfikir ketimbang menanggapi kritikan publik secara langsung. Ia sejak diangkat jadi menteri memang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menghapus keraguan publik terhadap kinerjanya.

Sikap Mas Menteri ini dapat dipandang dari dua sisi dalam komunikasi massa. Sikapnya dipandang positif karena lebih hati-hati ketimbang ceplas-ceplos dalam mengomentari publik. Kedua ini bisa jadi boomerang buat Nadiem yang cenderung lambat menyikapi apa yang harus segera diambil tindakan dalam berbagai kebijakan yang menuntut penanganan cepat.

Mas Menteri memang dikenal sebagai sosok yang mau mendengar dan menerima kritikan publik. Ia lebih suka terhadap kerja-kerja nyata ketimbang banyak menimbulkan kegaduhan di mata publik. Dalam epos Mahabarata, kita mengenali Prabu Yudistira yang lekat dengan sikap bijaksana dan cenderung hati-hati dalam setiap tindakannya. Nadiem mungkin lebih kerap tampil sebagai Yudistira dalam memimpin kebijakan dalam dunia pendidikan.

Tantangan

Nadiem sebagai panglima dalam menangani masalah pendidikan masih menghadapi berbagai kendala yang tidak mudah untuk mengatasi ketertinggalan dalam masalah pendidikan di Tanah Air. Dari sisi sarana dan prasarana pendidikan, Indonesia masih memiliki banyak kekurangan dalam pemerataan sarana dan prasarana. Meski infrastruktur sedang digenjut oleh pemerintahan Jokowi, namun publik masih melihat banyak daerah belum memiliki sarana dan prasarana sebagus di Jawa.

Kedua, kualitas pendidikan masih menjadi tantangan



tersendiri. Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam literasi digital . Masih banyak anak-anak kita belum sepenuhnya memahami masalah di dunia digital sehingga mereka mampu mengantisipasi dan mencegah terjadinya kejahatan dan pengaruh negatif teknologi. Kekerasan seksual dan juga kejahatan pada dunia cyber masih menjadi masalah yang kerap timbul karena kekurangan edukasi yang masif dalam dunia literasi digital.

Ketiga, maraknya kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi membuat Mas Menteri harus bekerja lebih masif lagi untuk menindak tegas oknum dosen yang melakukan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Peraturan Kemendikbud-ristek tidak boleh berhenti hanya di aturan semata tanpa penindakan tegas dari pemangku kebijakan di lingkup perguruan tinggi.

Keempat, sebelum pandemi kualitas guru menjadi salah satu soal yang masih belum diselesaikan secara maksimal. Nadiem memang sudah sedikit mengurangi beban administrasi guru. Guru saat ini memerlukan lebih banyak diklat dan pelatihan yang tidak hanya menunjang bagi program merdeka belajar, tetapi juga

memungkinkan mereka meningkatkan kemampuan dan skill akademik yang berguna untuk tantangan pendidikan masa depan. Teknologi adalah penting, namun guru yang menjadi motor penggerak pendidikan harus lebih mahir menghadapi zaman yang kian berat tantangannya.

Sebagai penutup, Nadiem masih memiliki banyak pekerjaan rumah di masa pandemi ini. Banyak orangtua dan anak mengalami masalah psikologis cukup serius selama belajar daring. Disamping itu, banyak anak-anak kita semakin terkikis budi pekerti dan juga nasionalismenya. Selama pandemi, pendidikan budi pekerti cenderung berkurang drastis. Anak-anak lebih lekat dan dekat dengan smart phone dan gawainya.

Pendidikan nasionalisme juga cenderung bernasib menyedihkan selama pandemi ini. Semakin banyak anak didik kita lupa lagu-lagu nasional, lupa kekayaan daerahnya masing-masing, hingga kehilangan jati diri dan identitas kulturalnya. Inilah tantangan Mas Menteri Nadiem Makarim.

*) Peminat Dunia Pendidikan dan Anak , Pengasuh SD MBS
Yogya

KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR SEBAGAI PENDUKUNG KEMANDIRIAN SISWA TINGKAT DASAR

Nurlia Dian Paramita*

Sebagai upaya untuk terus menggelorakan kemandirian siswa utamanya dalam wujud kebijakan Merdeka Belajar, pemerintah terus mengoptimalkan sejumlah program prioritas yang dilakukan sebagai strategi mempercepat transformasi pendidikan serta pengarusutamaan pemajuan kebudayaan yang mendukung kebijakan tersebut.

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amien konsisten untuk terus memberikan pendidikan berkualitas yang mendekatkan pada kebutuhan anak didik. Hal ini juga didukung dengan upaya untuk bangkit dari situasi pandemi Covid-19 yang sudah menyertai republik ini selama hampir mendekati 2,5 tahun.

Kemdikbud-Ristek meneruskan bantuan penanganan pandemi yang telah digulirkan sejak awal wabah Covid-19 seperti bantuan kuota data internet dari jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi diringankan beban ekonominya dan ditunjang pembelajarannya baik yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, maupun yang masih belajar jarak jauh.

Hal ini pun juga didukung dengan kebijakan dana BOS tahun 2021 yang merupakan bentuk gebrakan program. Untuk melakukan implementasi kebijakan ini dilakukan dengan penggunaan dana BOS tetap fleksibel digunakan terutama sebagai penggunaan dalam PTM terbatas juga penggunaan kebutuhan alokasi data bagi pembelajaran jarak jauh.

Sistem pelaporan penggunaan dana BOS juga dapat dilakukan secara daring. Dalam kajian yang dilakukan Satrianingrum (2020) mengatakan bahwa pembelajaran daring menjadi salah satu upaya yang mendukung pembelajaran yang sesuai dengan prokes namun hal ini juga mempunyai kendala terkait kurang memadainya prasarana, kurang maksimalnya penyampaian materi, gaya belajar yang cenderung visual serta kurang

leluasnya guru dalam mengontrol kegiatan siswa. Kebijakan Kemdikbud yang akhirnya membuka aktivitas PTM terbatas tentu menjadi kabar gembira yang terus akan dilaksanakan tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan secara ketat.\

Kebijakan Dana BOS dan Upaya Memudahkan Siswa Tingkat Dasar Dalam Belajar

Kemdikbud sangat berhati-hati dalam menerapkan PTM terbatas yang sudah diinisiasi semenjak bulan Agustus 2021 secara bertahap dengan menyesuaikan wilayah zonasi dan area PPKM berbasis level sesuai angka kasus yang menyeruak. Di sisi lain kebijakan dana BOS digunakan sebagai salah satu bentuk untuk menunjang pelaksanaan PTM terbatas tersebut.

Target pelaporannya pun meski secara daring bisa dilakukan namun data terkait penyaluran bantuan juga menjadi mekanisme signifikan agar akuntabilitas terus dapat dikelola secara transparan.

Di tahun kedua ini pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin, melalui Kemdikbud-Ristek mendobrak dengan penyempurnaan program-program yang telah baik terlaksana, lebih berkeadilan dan dapat diakses oleh masyarakat.

Mulai tahun 2021 ini nilai satuan operasional berbeda antardaerah, karena dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota. Hal ini juga tertuang dalam surat edaran direktur jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen Nomor 10460/C/PR.03.01/2021 disebutkan besaran alokasi BOS Kinerja untuk sekolah penggerak.

Ini menandakan bahwa ada komitmen dalam memenuhi kebutuhan anggaran yang disesuaikan dengan pandemi. Artinya penggunaan dana BOS tetap diperkenankan meski mengalami penurunan. BOS afirmasi diperuntukkan bagi sekolah yang dapat



menjalankan fungsinya dengan baik serta memenuhi kriteria.

Hal ini juga didukung dengan permendikbud no 6 tahun 2021 tentang penggunaan dana BOS regular. Sehingga ada beberapa macam yang ditawarkan selain model BOS afirmasi. Hal ini sangat mendukung dalam pembiayaan dalam rangka pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Dalam studi yang dilakukan Prayoga (2021) efektifitas penggunaan dana BOS ini juga didukung dalam pelaporan yang tertib dan mencerminkan transparansi dalam implementasi pemakaiannya.

Kebijakan kuota data yang memudahkan siswa belajar

Merdeka belajar sebagai sebuah grand desain nasional pendidikan Indonesia, sejauh ini mampu beradaptasi dengan masa pandemi Covid 19. Genap 2 tahun pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amien telah mampu memformulasikan gaya baru siswa belajar dengan pendekatan daring. Pemerintah menjamin pemberian kuota data sebagai bentuk komitmen agar anak didik terus melanjutkan belajar dengan jaminan koneksi yang mumpuni. Terlepas belum semua daerah mampu menikmati, namun sebagaimana besar tetap dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh.

Pemerintah mampu dalam memberikan bantuan terkait kuota data bagi jatah belajar siswa khususnya di tingkat dasar. Selain itu Kemdikbud menyediakan platform belajar daring gratis Bernama “Rumah Belajar” dan sebuah platform untuk berbagi antar guru yang Bernama “Program Guru Berbagi”. “Rumah Belajar” yang menyediakan bahan mengajar dan fitur komunikasi. Untuk mempermudah penyampaian tersebut Kemdikbud juga menjalin kerjasama dengan TVRI, stasiun televisi negara untuk menyampaikan program Belajar di Rumah yang berlangsung selama beberapa bulan.

Data yang dihimpun oleh CIPS (2021) juga menyebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta misalnya juga mendorong sarana pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan “Si Pintar by Simak” yang merupakan sistem informasi sekolah terintegrasi DKI Jakarta, dimana modul-modul pembelajaran daring dapat diakses oleh para siswa dan guru. Dengan metode ini akhirnya Indonesia menemukan pola baru pembelajaran yang mengedepankan aspek kognisi menyeluruh guna mendekatkan pada pengembangan karakter siswa yang dapat berkonfigurasi dengan zaman.

*) Aktivistis Nasyyiatul Aisyiyah

SENSE OF BELONGING SEBAGAI KULTUR SEKOLAH; SEBUAH REFLEKSI HARI GURU NASIONAL

Sahra*

Sekolah merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Belajar dan mengajar tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan transfer ilmu pengetahuan dari guru ke siswa. Berbagai kegiatan seperti bagaimana membiasakan seluruh warga sekolah disiplin dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di sekolah, saling menghormati, membiasakan hidup bersih dan sehat serta memiliki semangat berkompetisi secara fair dan sejenisnya merupakan kebiasaan yang harus ditumbuhkan di lingkungan sekolah sehari-hari.

Zamroni (2003:149) mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma, ritual, mitos yang dibentuk dalam perjalanan panjang sekolah disebut kultur sekolah. Kultur sekolah dipegang bersama oleh kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan siswa sebagai dasar mereka dalam memahami dan memecahkan berbagai persoalan yang muncul di sekolah. Sekolah menjadi wadah utama dalam transmisi kultural antar generasi.

Penelitian di Amerika Serikat membuktikan bahwa kultur sekolah berpengaruh terhadap peningkatan prestasi dan motivasi siswa untuk berprestasi, sikap dan motivasi guru serta produktivitas dan kepuasan kerja guru. Untuk menciptakan kultur sekolah yang positif dibutuhkan adanya kesadaran dan motivasi terutama dari diri masing-masing warga sekolah.

Guru sebagai ujung tombak di lapangan harus mampu memberikan motivasi dan inspirasi bagi siswa khususnya. Kebiasaan guru yang datang tepat waktu dan melaksanakan tugas mengajar dengan baik, sikap dan cara berbicara saat berkomunikasi dengan siswa dan unsur sekolah lainnya, disiplin dalam melaksanakan tugas merupakan kebiasaan, nilai dan teladan yang harus senantiasa dijaga dalam kehidupan sekolah. Agar kebiasaan-kebiasaan positif tersebut terpelihara dan mendarah daging dalam diri seluruh warga sekolah yang selanjutnya diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, dibutuhkan adanya “sense of belonging” atau rasa

memiliki terhadap sekolah.

Sense of belonging sebagai kultur sekolah

Sense of belonging atau rasa memiliki terhadap sesuatu akan membuat seseorang merasa bangga akan apa yang dimilikinya, mencintai dan akan senantiasa menjaganya. Demikian pula rasa memiliki yang tinggi terhadap sekolah diharapkan dapat mendorong tiap warga sekolah untuk melakukan yang terbaik demi kemajuan dan keharuman nama sekolah. Siswa akan patuh dan taat terhadap berbagai peraturan yang ada di sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh dan menunjukkan prestasi demi membawa nama baik sekolah.

Guru akan mengajar dengan “hati” bukan semata-mata dalam rangka melaksanakan tugas rutin yang bersifat mekanik. Mengembangkan potensi, bakat dan minat siswa menjadi hal terpenting dalam melaksanakan tugasnya. Guru akan senantiasa meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik profesional. Demikian pula warga sekolah lainnya akan memberikan pelayanan yang terbaik demi kelancaran kegiatan persekolahan.

Rasa memiliki yang tinggi terhadap sekolah diharapkan mampu menjadi penggerak dan pengarah sikap mental seluruh stakeholder sekolah menuju cita-cita bersama yang dituangkan dalam program-program sekolah. Oleh karena itu penanaman rasa memiliki terhadap sekolah seyogyanya senantiasa ditumbuhkembangkan pada diri seluruh warga sekolah termasuk stakeholder lainnya yang berkepentingan terhadap sekolah dan menjadi bagian kultur sekolah dari generasi ke generasi.

Upaya-upaya untuk memelihara sense of belonging

Salah satu hal yang dapat dilakukan sekolah untuk menjaga dan melestarikan sense of belonging di kalangan warga sekolah adalah adanya pemberian perhatian dan penghargaan bagi warga sekolah yang berprestasi.



Tentu saja sekolah harus merancang program dan wadah bagi ajang adu prestasi bagi siswa, guru maupun tenaga kependidikan lainnya. Adanya ‘reward’ bagi yang berprestasi dan ‘punishment’ bagi yang melanggar tentu sangat penting dan harus dirumuskan secara jelas sejak awal dengan melibatkan seluruh warga sekolah termasuk orang tua siswa melalui komite sekolah.

Program unggulan bagi siswa yang berprestasi dapat diwujudkan dengan mengadakan kelas unggulan yang perekrutannya berdasarkan prestasi yang dimiliki siswa. Di samping memberikan perlakuan khusus dalam pembelajaran, sekolah juga dapat memberikan penghargaan lainnya seperti bea siswa yaitu bebas uang sekolah atau tabungan pendidikan sesuai aturan dan kriteria yang sudah ditetapkan bersama.

Program pengiriman siswa ke berbagai event baik akademis maupun non-akademis yang perekrutannya dilakukan secara terbuka dan fair juga dapat meningkatkan semangat berkompetisi dan berprestasi yang sehat di antara siswa. Memfasilitasi siswa berprestasi yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih

tinggi untuk dapat ikut seleksi melalui jalur prestasi juga merupakan program yang dapat memotivasi siswa untuk berkompetisi dan berprestasi.

Di sisi lain, “punishment” bagi yang melanggar tentu yang bersifat konstruktif dan edukatif karena tidak jarang hukuman untuk memberikan aspek jera pada siswa justru sebaliknya membuat siswa semakin memberontak dan susah diatur.

Menumbuhkan semangat berkompetisi dan berprestasi di antara guru juga sangat penting. Prestasi seorang guru adalah ketika yang bersangkutan dapat meningkatkan mutu proses dan hasil belajar siswa. Kemampuan guru dalam menyusun rancangan pembelajaran yang didahului dengan melakukan analisis terhadap kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, situasi dan kondisi sekolah serta lingkungan, melaksanakan pembelajaran dan melakukan penilaian sangat penting.

Guru harus mampu melaksanakan pembelajaran dengan metode dan media yang bervariasi dan sesuai dengan karakteristik siswa, materi, serta tujuan yang

akan dicapai. Tentu saja kualitas guru dan kualitas pendidikan guru sangat berpengaruh terhadap kemampuannya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta melakukan penilaian yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur.

Sekolah perlu merancang program peningkatan kompetensi guru dalam rangka memotivasi mereka untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri seperti pemberian pelatihan, workshop atau mengirimkan guru ke berbagai seminar yang berkaitan dengan pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Uji kompetensi guru secara berkala dapat dirancang dan dilaksanakan oleh sekolah dengan pendampingan lembaga penjaminan mutu dalam rangka memacu semangat guru agar senantiasa meningkatkan kompetensinya dan untuk memperoleh pengakuan sebagai guru profesional.

Pemberian penghargaan kepada guru-guru yang telah membawa harum nama sekolah baik atas prestasinya dalam berbagai kompetisi, membimbing siswa, menjadi teladan bagi sesama teman sejawat dan siswa, maupun dalam kompetisi lainnya juga harus dirancang sebagai reward dalam rangka menumbuhkan semangat berkompetisi yang sehat diantara guru. Begitu pula penghargaan bagi karyawan yang memiliki dedikasi, loyalitas dan prestasi yang bagus harus diprogramkan oleh sekolah.

Pola kerja guru dan karyawan yang menunjukkan keteraturan, kedisiplinan, saling menghormati, saling asah, asih dan asuh serta hubungan yang harmonis merupakan kebiasaan yang dapat menumbuhkan rasa nyaman dan damai bagi warga sekolah. Rasa saling memiliki dan membutuhkan semakin terasa. Rasa bangga sebagai warga sekolah muncul secara alami dari kebiasaan dan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan di sekolah. Hal ini menjadi teladan bagi siswa selama berada di sekolah.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka memelihara rasa memiliki terhadap sekolah oleh semua warga sekolah adalah adanya pemahaman akan tujuan sekolah. Alangkah janggal bila sekolah berharap setiap warganya memiliki “sense of belonging” namun tidak memberikan pemahaman tentang apa yang menjadi arah dan tujuan sekolah.

Perumusan tujuan sekolah beserta program-program sekolah dalam rangka merealisasikannya hendaknya juga melibatkan warga sekolah. Hal ini merupakan wujud penghargaan sekolah kepada warganya. Berbagai masukan, ide serta kritik oleh warga sekolah menunjukkan kepedulian warga sekolah akan kemajuan sekolah di masa yang akan datang.

Pelibatan orang tua siswa dalam merumuskan tujuan sekolah serta program-program unggulan sekolah merupakan penghargaan yang diberikan sekolah terhadap mitra kerjanya. Pola hubungan kerja yang harmonis, saling peduli, saling membutuhkan dan mencerminkan kebersamaan ini dapat meningkatkan rasa saling memiliki dan membutuhkan terhadap sekolah.

Pola kepemimpinan Kepala Sekolah pun sangat penting dalam menentukan kultur sekolah. Kepala Sekolah yang senantiasa membuka komunikasi dialogis dengan warga sekolah dalam menentukan kebijakan sekolah, tidak otoriter dalam membuat keputusan yang menyangkut urusan sekolah, bersikap adil, bijaksana, terbuka terhadap berbagai masukan, saran, dan kritik akan membuat warga sekolah merasa “dimanusiakan”, merasa dihargai, dan betah di sekolah. Hal ini juga dapat menjadi model bagi para guru dan karyawan tentang nilai-nilai demokratis, kekeluargaan dan saling menghargai sebagai satu keluarga.

Sense of belonging sebagai warga sekolah dan bangga akan pola hubungan yang sehat di sekolah merupakan atmosfer positif yang dapat meningkatkan motivasi siswa, dan kepuasan dan etos kerja guru dan karyawan.

Kultur sekolah yang sehat tidak dapat dibentuk secara instant namun membutuhkan proses yang panjang dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh warga sekolah termasuk orang tua siswa. Begitu pula rasa sense of belonging terhadap sekolah tidak dapat dipaksakan ada dan dimiliki oleh tiap warga sekolah. Iklim yang mendukung timbulnya rasa memiliki terhadap sekolah harus senantiasa ditingkatkan dan dikaji sesuai dengan dinamika yang ada. Sosialisasi berbagai program sekolah dan kultur yang diharapkan harus menjangkau seluruh warga sekolah dan orang tua siswa.

*) Guru SMP Negeri 1 Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB)

ANIES, ANAK GURU YANG MENGUBAH GURU

Sismono La Ode, M.A.*

Lima tahun silam, sepucuk surat menggemparkan sejagat raya guru di penjuru negeri. Pesan yang ia tulis jelas bahwa sepanjang bertugas di Kemdikbud dan berkeliling ke penjuru Indonesia, ia selalu menemukan Mutiara berkilau di sudut-sudut tersulit Republik. Dinding kelas bisa reyot, tapi semangat guru, siswa dan orangtua tegak kokoh.

Sepucuk surat itu ditulis seorang diri di atas meja kerjanya, tepat setelah dicukupkan tugasnya sebagai Mendikbud. Lalu lalang orang di ruang itu, tidak membuyarkan fokusnya mengirim pesan bagi guru-guru, pahlawan penuh jasa. Tak ada raut penyesalan, tekadnya hanya satu dan ditulis diakhir surat itu, berupa ajakan kepada seluruh insan pendidikan untuk meneruskan ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa ini.

Banyak yang mengira bahwa hari itu adalah akhir segala bagi Anies Baswedan. Namun tidak untuk kami yang paham sosok yang dilahirkan dari pasangan guru ini.

Memang tidak semua orang tahu, kalau pria kelahiran Kuningan, 7 Mei 1969 adalah anak dari pasangan guru. Ayahnya bernama Awad Rasyid Baswedan, yang semasa hidupnya mengajar di kampus Universitas Islam Indonesia (UII) dan ibunya adalah Aliyah Al Ganis mengajar di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), kampus pencetak guru, hingga akhirnya menjadi profesor/guru besar.

Sebelum memilih menjadi guru, Rasyid pernah ditawari menjadi pegawai bulog dengan gaji yang lebih tinggi, namun rejeki itu justru dia berikan pada sobatnya. Rasyid memilih mengajar di UII. Aliyah sendiri sejak



awal memang sudah mantap memilih profesi pendidik. Sebelum mengajar di UNY, ia lebih dulu mengajar di IKIP Bandung (kini Universitas Pendidikan Indonesia, UPI). Panggilan hati menjadi pendidik sudah begitu kuat dalam diri mereka. Mereka yakin profesi guru adalah jalan mereka untuk mengabdikan diri pada bangsa.

Tak heran, selepas mengajar baik Rasyid ataupun Aliyah, tetap membuka pintu rumahnya bagi murid-muridnya. Dari rumah yang sederhana itulah murid-muridnya justru menemukan hakikat guru dalam diri kedua orangtua Anies. Kebijakan, kesabaran, keramahan, kelembutan, kedisiplinan, kenyamanan, motivasi, dan keteladanan dalam diri mereka telah menginspirasi dan menggerakkan murid-muridnya untuk bangkit dan menjadi orang berguna bagi agama, diri sendiri, keluarga, orang lain, bangsa dan negeri. Catatan-catatan inspirasi dari murid-murid kedua orangtua Anies dirangkum dalam Buku “Anak Guru: Potret Anies Baswedan Memetik Pelajaran Hidup dari Kedua Orangtuanya yang Pendidik” (2021).

Anies Baswedan memiliki tiga saudara kandung. Mereka adalah Ridwan Baswedan (alm), Eva Haiva

Baswedan (almh), dan Abdillah Baswedan. Mereka tumbuh dan besar di Yogyakarta, di sebuah rumah sederhana gang Grompol, Sleman. Pada 11 Mei 1996, Anies Baswedan menikah dengan Fery Farhati Ganis. Kini pasangan ini dikarunia empat buah hati, diantaranya Mutiara Annisa, Mikail Azizi, Kaisar Hakam, dan Ismail Hakim.

Sejak kecil Anies dan saudara-saudaranya sudah terbiasa dengan dunia guru. Mereka tidak sekadar akrab dengan aktivitas mengajar orang tuanya, namun mereka menyaksikan sendiri bagaimana nilai-nilai digugul dan ditiru diterapkan kedua orangtuanya pada murid-muridnya, orang-orang dekatnya, dan anak-anaknya. Anies dan saudaranya pun telah terbiasa membaur dengan murid-murid orang tuanya. Tidak ada jarak bagi mereka.

Keluarga Rasyid Baswedan memiliki kebiasaan mendidik anak-anaknya di meja makan. Jika waktu makan tiba, berkumpullah mereka. Diawali doa lalu mengunyah makan sambil berkisah. Pak Rasyid tidak lupa mengisahkan kisah-kisah menarik ataupun pengalaman pada anak-anaknya. Pun Ibu Aliyah. Jika anak-anaknya bertanya, pastilah dijawab dengan baik, tertata, dan inspiratif. Sesekali anak-anaknya diminta bercerita. Apa saja. Pak Rasyid dan Ibu Aliyah berusaha menjadi pendengar yang baik. Keluarga Rasyid benar-benar menjadikan makan bersama sebagai ruang keluarga yang penuh kasih sayang dan demokratis.

Bahkan keluarga Rasyid juga membebaskan anak-anaknya untuk bermain sebagaimana anak kecil lainnya. Mulai bermain kelereng, bermain boi, hingga bermain air di selokan mataram utara fakultas kehutanan UGM. Keduanya hanya berpesan hati-hati, silakan bermain, jangan pilih-pilih teman, dan ingat waktu ibadah. Jika azan telah memanggil tidak ada alasan untuk tidak mensegerakan shalat.

Meskipun mereka adalah Pendidik, mereka tidak terlalu mewajibkan anak-anak memiliki nilai yang bagus, tapi anak-anak dengan kesadaran sendiri didorong untuk belajar dan Alhamdulillah, mereka terbukti memiliki nilai yang baik di sekolah. *

Adalah Anies Rasyid Baswedan. Ia meniti jalan dan karirnya seperti kedua orang tua dan kakeknya A.R. Baswedan. Ia mencapai momen penting saat berusia 38 tahun, dengan ditetapkan menjadi Rektor Universitas Paramadina pada 15 Mei 2007. Ia membuat terobosan

penting di sana. Mata kuliah Anti Korupsi menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa.

Anies Baswedan juga menggagas Gerakan Indonesia Mengajar. Dari buku Jejak Para Pemimpin (2014) yang disusun Hanta Yuda AR dan tim, dituliskan bahwa Anies Baswedan telah menggoreskan catatan penting dalam menumbuhkan semangat kesukarelawanan, utamanya di ranah pendidikan nasional. Indonesia Mengajar tak berambisi hadir sebagai solusi yang menyelesaikan seluruh persoalan pendidikan di Indonesia. Namun begitu, Indonesia Mengajar meyakini bahwa kehadiran putra-putri terbaik Indonesia sebagai guru akan ikut mendorong peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.

Sejak tahun 2011, Anies Baswedan juga menginisiasi program Indonesia Menyala, gerakan buku dan perpustakaan yang menjadi bagian dari program Indonesia Mengajar. “Anak-anak desa yang menyala akal dan budinya karena membaca buku yang baik bersama para Pengajar Muda, bagaikan ribuan dan jutaan lampu yang menyalakan Indonesia,” kata Anies Baswedan.

Kelas Inspirasi yang diluncurkan pada 2013 menjadi gebrakan Anies Baswedan. Ide awalnya adalah melibatkan para profesional atau pekerja dalam aktivitas mengajar di sekolah dasar untuk memberikan inspirasi kepada para peserta didik.

“Di kelas itu Anda akan menyaksikan mata berbinar, senyum lebar, dan wajah ceria anak-anak itu. Mereka adalah wajah masa depan bangsa ini. Di ruang kelas itu Anda mulai mencicipi suasana Indonesia di masa depan. Potret masa depan Indonesia ada di ruang-ruang kelas,” papar Anies Baswedan.

Sumbangsih dan terobosan yang digerakkan Anies Baswedan melalui serangkaian gerakan yang mencerahkan membuat ia dipercaya untuk mengemban amanah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI sejak 27 Oktober 2014.

Selama berkiprah sebagai Mendikbud, Anies Baswedan membangkitkan konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara untuk membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan, menginisiasi gerakan memuliakan guru, mendorong minat baca, serta meningkatkan ikatan emosional antara orang tua, siswa, juga sekolah, merancang platform informasi potret Pendidikan daerah melalui Neraca Pendidikan Daerah (NPD), Belajar Bersama Maestro (BBM), dan masih banyak lagi terobosan yang dijalankan demi mendorong

pendidikan nasional menjadi lebih baik.

Soal kebijakan terkait guru, Anies Baswedan juga melakukan terobosan penting yang membuka peta jalan kompetensi dan kesejahteraan guru, mulai dari Ujian Kompetensi Guru (UKG), program Guru Pembelajar, program Guru Garis Depan (GGD), hingga program Guru Keahlian Ganda. Terobosan ini mampu menghadirkan solusi penting atas masalah-masalah guru yang belum tuntas saat itu.

Kini Anies Baswedan diamanahkan menjadi gubernur DKI Jakarta. Gagasan mengubah guru tetap ia lakukan. Gubernur Ibukota ini mencetuskan konsep sekolah kolaborasi, sebagai bagian dari citra Jakarta Kota Kolaborasi. Sekolah Kolaborasi merupakan wadah bagi harmonisasi sekolah negeri dan swasta dalam mewujudkan pendidikan tuntas dan berkualitas, sekaligus mengecilkan jarak antara kualitas sekolah negeri dan swasta, termasuk halnya jarak kualitas guru-gurunya melalui kolaborasi dengan beberapa unsur yang disebut kolaborator.

Bagi Anies Baswedan, guru adalah ujung tombak dalam pembangunan pendidikan. Guru memiliki segala daya untuk mengatur dan mendesain model pembelajaran, namun guru tidak bisa jalan sendiri. Para Guru membutuhkan para kolaborator yang terkadang memiliki gagasan dan inovasi lebih. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru di Jakarta menjadi suatu keharusan melalui kolaborasi dengan beberapa pihak.

Para kolaborator diajak bersama-sama menelorkan ide terkait desain sistem pengembangan profesionalise guru melalui cakupan program, mekanisme pelatihan, dan penyedia pelatihan. Sementara para guru di Jakarta, juga diberi kebebasan untuk memiliki program dan pelatihan mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Para Kolaborator telah siap mendampingi mereka melalui UPT P2KPTK2 (Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Kejuruan) yang tersebar di lima wilayah di DKI Jakarta.

Soal kesejahteraan guru di Jakarta, jangan ditanya, setiap bulannya Guru PNS memperoleh TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) berdasarkan golongan berkisar antara 6-9 Juta. Sementara itu guru-guru-guru dibawah kementerian Agama memperoleh Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) bagi Guru

dan Tenaga Pendidikan PNS sebesar Rp. 1 juta setiap bulan; Honorarium Bagi GTK Non PNS pada Madrasah Negeri sebesar Rp. 3.900.000 setiap bulan; Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) Bagi Guru Non PNS pada Madrasah Swasta sebesar Rp. 550.000 setiap bulan; dan Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) Bagi Tenaga Kependidikan Non PNS pada Madrasah Swasta sebesar Rp. 550.000.

Sementara itu, guru-guru yang bernaung di Himpaudi memperoleh bantuan dana pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 500.000. Begitu pula guru-guru swasta memperoleh bantuan Rp. 500.000 setiap bulannya dan disalurkan melalui organisasi PGRI DKI Jakarta.

Bagi Anies, pemberian tunjangan kesejahteraan guru swasta ataupun guru di kementerian agama didasarkan bahwa mereka adalah guru-guru yang mendidik generasi Jakarta. Oleh karenanya pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mensejahterahkan mereka sesuai dengan kemampuan.

Memang mengubah guru bukanlah jalan singkat, butuh proses dan kemauan besar. Terlebih Indonesia sebagai ladang tumbuh semainya guru-guru hebat dan inspiratif, memiliki kedekatan sejarah dengan guru. Para pendiri bangsa, seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, Agus Salim, KH Hasyim Asyari, KH Ahmad Dahlan, Jenderal Soedirman, Ki Hadjar Dewantara, Roehana Koedoes, Maria Walanda Maramis, adalah guru juga. Mereka tidak sekadar menjadi guru yang mendidik rakyat Indonesia, namun juga guru yang mengajar di kelas-kelas.

Anies menyadari bahwa tokoh-tokoh pendiri bangsa yang ia kagumi adalah guru. Ia sendiri tumbuh dari pasangan yang memilih jalan guru. Dan para guru telah mengukir sejarah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka sudah sepantasnya sosok guru dimuliakan dan diteladani. Itulah mengapa saat dipinjamkan amanah untuk memimpin (termasuk menjadi Gubernur DKI Jakarta), tidak ada alasan untuk tidak memuliakan guru. Bagi Anies Baswedan: guru adalah pewaris nilai yang sudah menghibahkan dirinya untuk bangsa Indonesia. Selamat Hari Guru 2021. Guru Berdaulat, Bermartabat, dan Sejahtera! Tabik!

*) Penulis Buku Anak Guru: Potret Anies Baswedan Memetik Pelajaran Hidup dari Kedua Orangtuanya yang Pendidik

GURU, SANG PENENTU MASA DEPAN

Amir Fiqi*

Guru memiliki peran sangat penting dalam menentukan masa depan sebuah bangsa. Maju atau mundurnya masa depan sebuah bangsa ditentukan kualitas guru pada saat ini.

Belajar dari sejarah bangsa Jepang, saat kota Hiroshima dan Nagasaki hancur lebur dibom oleh Amerika Serikat dan sekutu pada penghujung Perang Dunia II tahun 1945, yang pertama kali ditanyakan oleh Kaisar Hirohito bukanlah kehancuran kedua kota tersebut, atau berapa jumlah tentara atau jenderal yang tersisa. Tapi yang dia tanyakan adalah berapa jumlah guru yang tersisa.

Menurutnya kehancuran Jepang karena mereka tidak belajar. Tentara dan jenderal boleh jadi kuat dalam senjata dan strategi perang, tapi tidak memiliki pengetahuan mengenai bom yang telah dijatuhkan Amerika. Kaisar berfikir Jepang tidak akan bisa mengejar Amerika jika tidak belajar.

Selanjutnya Kaisar bergerak cepat mengumpulkan guru yang tersisa di seluruh pelosok Jepang. Dan dia berhasil mengumpulkan sekitar 45.000 guru yang tersisa. Pada saat itu seluruh rakyat Jepang bertumpu kepada guru bukan pada kekuatan pasukan. Dan kehadiran guru pada saat itu menjadi hal krusial bagi seluruh lapisan masyarakat Jepang.

Alhasil, Jepang kembali bangkit dari keterpurukan. Dan seperti diketahui, Jepang hingga saat ini menjadi negara yang diperhitungkan karena kemajuan ilmu dan teknologinya. Dan menjadi negara maju di kawasan Asia, dan dunia.

Pendidikan menjadi kunci

Apa yang terjadi jika pada saat itu Kaisar Hirohito lebih berfikir bagaimana membalas kekalahan atas Amerika Serikat dan sekutu dengan membangun kembali kekuatan militer Jepang dengan menggerakkan

jumlah tentara dan jenderal yang tersisa. Bisa dipastikan Jepang semakin hancur lebur dan tak tersisa.

Karena Kaisar Hirohito lebih memikirkan nasib masa depan bangsa Jepang, maka yang pertama dia inginkan adalah bagaimana membangun pendidikan bagi warganya. Sebab, dia faham betul bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun peradaban sebuah bangsa. Dengan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terdidik, sebuah bangsa akan cepat kembali bangkit.

Pascakekalahan tersebut, Kaisar betul-betul menggantungkan masa depan Jepang kepada para guru. Para guru diberikan perhatian yang cukup besar untuk mencerdaskan masyarakat Jepang. Tidak hanya itu, pemerintah Jepang mengubah total kebijakan pendidikan sebelumnya. Sebab mereka telah menyadari penyebab kekalahan Jepang dari Amerika Serikat karena pendidikan Jepang telah gagal, sehingga kualitas SDM Jepang lebih buruk dibanding dengan SDM Amerika Serikat.

Tepat 1 bulan setelah pengumuman kekalahannya yakni pada tanggal 15 September 1945, pemerintah Jepang melalui Menteri Pendidikan mengeluarkan 'Pedoman Kebijakan untuk Pembangunan Jepang Baru' yang berisi 11 pedoman kerja, yaitu: 1) Pendidikan bertujuan memperluas wawasan dan pengetahuan, meningkatkan kemampuan berpikir secara ilmiah, membina semangat cinta damai dan meningkatkan moralitas rakyat, 2) Menghapus semua mata pelajaran yang terkait dengan militer, semua pengajaran dan penelitian harus difokuskan untuk tujuan damai. 3) Merevisi buku paket agar isinya sesuai dengan kebijakan pendidikan baru,

Selanjutnya, 4) Kementerian pendidikan menyelenggarakan program pendidikan ulang (re-edukasi) untuk para guru, agar memahami kebijakan

pendidikan yang baru, 5) Memberi kesempatan pembelajaran khusus untuk para murid yang telah dikerahkan ke medan perang atau ke pabrik sehingga putus sekolah.

Selanjut, 6) Pendidikan ilmiah yang bertujuan melatih kemampuan berpikir secara ilmiah dan bukan hanya demi mengejar kepentingan sesaat, 7) Untuk membina rakyat yang bermoralitas tinggi dan berwawasan luas, perlu ditingkatkan pendidikan luar sekolah untuk orang dewasa dan pekerja, melalui fasilitas umum seperti perpustakaan umum dan museum, serta memanfaatkan media seperti pameran lukisan, pertunjukan teater, penerbitan buku-buku ilmu pengetahuan populer dan sebagainya.

8) Akan memfasilitasi pembentukan karang taruna tingkat lokal, sebagai wadah komunikasi dan pembinaan solidaritas sosial, 9) Akan upayakan kerja sama antar agama untuk membina persahabatan dan perdamaian dunia. 10) Akan memfasilitasi acara pertandingan olah raga untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, serta membina semangat fair play serta persahabatan sesama anak bangsa dan antara rakyat Jepang dengan warga negara lain dan 11) Akan melakukan restrukturisasi kementerian pendidikan untuk membentuk direktorat olah raga dan direktorat pendidikan ilmiah. (lmsspada.kemdikbud.go.id)

Berkat keseriusan Jepang dalam memajukan dunia pendidikan, dalam waktu singkat negara yang dijuluki Negeri Matahari Terbit ini bangkit. Keunggulan SDM yang dimiliki Jepang lah yang menjadi penentu. SDM unggul akan menghantarkan sebuah bangsa menjadi lebih kuat dan tangguh.

Bagaimana Indonesia?

Di usianya yang ke- 76, bangsa Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan pendidikan yang terbilang rumit. Mengapa bisa terjadi? bisa jadi sejak awal bangsa ini merdeka, pendidikan tidak menjadi masalah yang paling penting untuk diperhatikan, sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak menjawab persoalan-persoalan fundamental dari pendidikan itu sendiri. Sehingga segudang permasalahan pendidikan terus ditemukan. Tidak hanya masalah infrastruktur atau fasilitas pendukung kegiatan pendidikan, permasalahan guru pun hingga saat ini tidak kunjung tuntas. Dari soal kesejahteraannya hingga jumlah guru yang tersedia dari Sabang sampai Marauke.

Bicara soal kesejahteraan, khususnya para guru yang statusnya masih honorer. Mereka harus berjuang mati-matian untuk bisa bertahan hidup. Sebab gaji yang mereka dapat masih jauh dari kata sejahtera. Bagaimana mereka bisa fokus untuk mendidik, atau meningkatkan kualitas mereka dalam mengajar, untuk mencukupi kebutuhannya saja masih kurang.

Ada guru yang harus mencari tambahan dengan bekerja di tempat lain agar keluarga mereka mendapat kehidupan yang layak. Pekerjaan tambahan ini menguras energi, sehingga mereka kurang maksimal dalam mengajar. Akibatnya proses belajar berjalan seadanya.

Selain itu, berbicara soal infrastruktur atau fasilitas pendidikan juga belum merata. Pendidikan yang berkualitas hanya bisa dinikmati di kota-kota besar, sedangkan di daerah-daerah pelosok atau daerah 3T masih memprihatinkan. Padahal dalam amanat UUD 45 sudah jelas bahwa seluruh anak bangsa harus dicerdaskan. Proses mencerdaskan anak bangsa harus didukung dengan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh pelosok negeri.

Penentu masa depan

Dibalik keterbatasan, masih banyak guru-guru di Indonesia yang bergerak dengan hati. Mereka mengabdikan diri dengan setulus hati mencerdaskan anak didiknya.

Bukan materi yang mereka cari. Baginya, bisa mengajar dan melihat anak-anak didiknya tersenyum rasa letih pun sudah terbayar. Mereka menyadari dengan membekali anak-anak dengan ilmu pengetahuan menjadi modal untuk mengukir masa depan mereka.

Penulis meyakini guru-guru seperti inilah yang tulus dalam mengajar. Sehingga apa yang diajarkan tidak hanya materi-materi yang ada dalam kurikulum, tapi jauh lebih penting menanamkan nilai-nilai kehidupan, dan memberikan motivasi kepada peserta didiknya.

Guru seperti inilah yang akan menjadi inspirasi bagi para peserta didiknya. Dengan inspirasi inilah mereka akan termotivasi untuk terus belajar.

Guru yang bergerak dengan hatilah yang akan bisa menentukan masa depan bangsa. Karena mereka bisa mencetak generasi bangsa yang unggul dan tangguh. Selamat Hari Guru Nasional 2021.

*) Wartawan dan Pemerhati Sosial

BERGERAK DENGAN HATI MENUJU PENDIDIKAN BERKEMAJUAN



Hendra Apriyadi*

Ketika situasi mulai membaik dengan berbagai upaya untuk menghadapi penyebaran virus Covid-19, dunia pendidikan kembali melakukan pembelajaran tatap muka. Tetap menjaga proses yang ketat. Semangat belajar dan berkarya nyata.

Sejalan dengan itu, maka tema Hari Guru Nasional 2021 adalah "Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan."

Makna dari tema Hari Guru Nasional 2021 yang berupa "Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan" itu adalah untuk menjadi acuan para pendidik dalam mengarahkan murid-murid menjadi generasi unggul dan berkembang yang memahami perkembangan zaman.

Bergerak dengan hati berarti membawa murid-murid mengetahui lebih banyak ilmu pengetahuan dengan empati yang tinggi agar mereka bisa menyerap ilmu pengetahuan dengan baik. Arti kata pulihkan pendidikan jelas bertepatan dengan keadaan sebelumnya di mana banyak murid mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan jarak jauh, dan kini setelah situasi sudah menjadi lebih baik, sekolah dapat memfasilitasi murid-murid untuk mendapatkan pendidikan sebagai bekal

kehidupan.

Kabar menggembirakan para guru yaitu peningkatan kesejahteraan dan kapasitas guru melalui rekrutmen ASN PPPK, Pendidikan Guru Penggerak.

Transfromasi memiliki makna dasar sebagai perubahan perlahan yang berkelanjutan sedemikian sehingga keadaan di masa depan akan lebih baik dari keadaan di masa sekarang .

Menghadapi era digital saat ini literasi digital perlu di terapkan dalam pembelajaran khususnya dalam hal membaca dan menulis menciptakan inovatif dan kreatifitas.

Bergerak terus berinovasi

Inovasi pendidikan akan terus menjadi pembahasan yang tidak akan ada habisnya bagi praktisi pendidikan atau orang-orang yang berada dalam dunia pendidikan, karena inovasi merupakan suatu tindakan pembaharuan yang akan terus dilaksanakan selama proses pendidikan masih berlangsung.

Sekolah merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang mana sekolah akan terus melakukan inovasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Sudah saatnya kita mengubah paradigma proses pembelajaran di dalam kelas menjadi suatu proses yang penuh dengan pengalaman, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkolaborasi dengan gurunya, dengan temannya untuk membangun dan mengorganisasi pengetahuan, melibatkan diri dalam penelitian, belajar menulis membuat produk untuk mengasah keterampilan yang dimiliki oleh para siswa dan menganalisis serta mampu mengkomunikasikan apa yang mereka alami sebagai suatu pemikiran baru sebagai wujud pengalaman sesuai dengan usia mereka.

Majukan pendidikan di Indonesia , saatnya bergerak bersama dan saling berkolaborasi saling melengkapi dan niatkan ikhlas dalam mendidik.

*) Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)
Muhammadiyah Tegal



HARI GURU; BERGERAK DAN BERJUANG BERSAMA

Nabil Syuja Faozan*

Hari guru kali sedikit berbeda, perayaannya dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Banyak sekolah yang tidak merayakan karena khawatir dapat menjadi cluster baru dalam penyebaran virus Covid-19. Akan tetapi, banyak juga sekolah yang merayakannya di sekolah dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Perayaan hari guru merupakan apresiasi dari pemerintah terhadap jasa guru dalam mencerdaskan bangsa. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994, Pemerintah menetapkan tanggal 25 November selain sebagai HUT PGRI juga sebagai Hari Guru Nasional. Untuk memperingati momentum yang berharga ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi telah memberikan berbagai apresiasi terhadap dedikasi guru. Salah satu bentuk penghargaan tersebut adalah dengan diselenggarakannya upacara bendera memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2021.

Pandemi Covid-19 mengajarkan banyak hal kepada kita. Mendidik dan mengasuh anak perlu kesabaran dan konsistensi. Nilai dan perilaku guru dalam mendidik anak patut dicontoh oleh orang tua, perjuangan mereka dalam mendidik dan mengasuh sang buah hati tidak terbalaskan nilainya. Tak hanya itu, nilai keikhlasan dan ketulusan yang diberikan oleh guru harus menjadi penyemangat bangsa dalam menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang hebat dan mampu bersaing dalam hal kebaikan.

Dalam membangun bangsa, guru merupakan komponen fundamental dan sangat strategis. Guru juga menjadi pendamping dalam perkembangan dan keberhasilan anak didik dibidangnya. Guru bukanlah orang hebat, tetapi semua orang hebat berasal dari guru. Pada masa pandemi Covid-19, guru dituntut menjadi pengajar yang serba bisa. Guru dituntut untuk mampu memberikan kontribusi terbaiknya dalam membimbing anak muridnya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan demikian, guru merupakan salah satu faktor yang strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan yang meletakkan dasar serta turut mempersiapkan pengembangan potensi peserta didik untuk masa depan bangsa.

Peran guru dalam mendidik dan mempersiapkan masa depan bangsa tidaklah bisa dianggap remeh. Bibirnya selalu tersenyum ramah kepada setiap peserta didiknya, hatinya selalu tulus dalam mencintai pekerjaan dan menyayangi siswa-siswinya, pikirannya selalu mengetahui dan memikirkan bagaimana cara mendidik siswa-siswinya, serta kakinya selalu melangkah berjalan bersama siswa dalam menjelajahi hal baru di luar kelas.

Tentunya, dalam membangun masa depan bangsa guru tidak bisa bergerak sendirian. Perlu adanya dukungan dan kontribusi nyata dari masyarakat dalam membantu guru untuk menjadikan masa depan bangsa lebih cerah.

Lantas, apakah peran masyarakat dalam membantu menyukseskan guru membangun masa depan bangsa? Pertama, memfasilitasi baik secara moril maupun

materil. Kita sebagai orang tua, bisa menunjukkan rasa bangga, percaya diri, dan rasa semangat kepada anak-anak kita agar Ketika dididik oleh guru tidak ada rasa ketakutan dan kekhawatiran. Kemudian, memberikan dukungan secara materil adalah dengan membayar biaya pendidikan yang telah ditentukan sekolah juga memberikan bekal yang cukup dalam menopang kebutuhan sekolah sang anak.

Kedua, menjadi pendamping selama pendidikan dilakukan dari rumah. Orang tua harus mampu beradaptasi dengan model pembelajaran jarak jauh (online). Sang anak membutuhkan dukungan dari orang tua selama Pendidikan dilakukan secara daring. Anak tidak bisa belajar dengan maksimal apabila dukungan dari orang tua tidaklah maksimal.

Ketiga, bekerjasama bersama dengan tenaga pendidik dalam memantau dan memonitori perkembangan sang anak. Dalam melakukan perencanaan dan kerja nyata, tidak bisa jika dilakukan tanpa adanya pemantauan dan monitoring. Hal-hal yang dikhawatirkan terjadi kepada sang anak dapat dicegah dengan memonitoring dan mengingatkan anak agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diharapkan. Tak hanya itu, monitoring juga dilakukan dalam membantu sang anak dalam menggapai prestasi dan cita-citanya. Orang tua berperan mengingatkan dan memberikan arahan yang sesuai agar apa yang dicita-citakan dapat tergapai.

Dengan demikian, kita dapat membantu guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan posisi kita masing-masing. Momentum hari guru kali ini, kita jadikan sebagai pelatuk untuk bergerak dan berjuang bersama dalam membangun masa depan bangsa yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Wallahu'alam

*) Mahasiswa FKK Universitas Muhammadiyah Jakarta

SELAMAT HARI DISABILITAS INTERNASIONAL

Amir Fiqi8

Setiap tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional (HDI). Tujuan diperingatinya HDI setiap tahun adalah untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

Tema yang diusung pada HDI 2021 adalah “Kepemimpinan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Menuju Tatanan Dunia yang Inklusif, Aksesibel dan Berkelanjutan Pasca Covid-19”.

Dilansir dari laman kemensos.go.id dipilihnya tema tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas dan memberikan sokongan untuk meningkatkan kemandirian dan kesamaan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

Tujuan tersebut harus terus digaungkan di tengah masyarakat, sebab masih banyak masyarakat yang memandang sebelah mata kehadiran mereka. Keterbatasan yang dimiliki membuat penyandang disabilitas dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan hanya perlu mendapatkan belas kasihan. Sehingga hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan, mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan hingga hak kemudahan untuk mengakses fasilitas umum.

Seharusnya mereka mendapatkan tempat yang sama. Sebab, secara tegas dalam UUD 1945 telah menjamin hak mereka.

Misalnya dalam pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan yang khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Selain itu pemerintah juga telah meratifikasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities,

pada 2011 lalu yang tertuang dalam UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas). Indonesia merupakan negara ke-107 yang meratifikasi konvensi tersebut.

Secara tegas pemerintah juga memberikan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yakni tertuang dalam Undang-undang No.8 Tahun 2016.

Dalam UU tersebut mengamanatkan kepada perusahaan swasta untuk mempekerjakan 1 persen penyandang disabilitas dari total pekerjaan, sedangkan untuk perusahaan BUMN sebanyak 2 persen. Undang-undang tersebut merupakan jawaban bahwa pasar kerja harus menjadi inklusif. Karena mereka juga wajib mendapatkan hak pekerjaan.

Memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkerja berarti telah membuat mereka menjadi manusia yang mandiri. Ini akan menjadi jawaban, bahwa mereka juga bisa bekerja dan tidak perlu untuk dikasihani. Yang paling penting bagi mereka adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk bisa bekerja.

Mereka juga bisa

Penyandang disabilitas tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebab, jika mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan hak-haknya mereka juga bisa.

Deretan prestasi berhasil diukir oleh anak-anak disabilitas Indonesia, tidak hanya di ajang nasional, tapi hingga Internasional.

Sebagai contoh, siswi dari SLB Negeri Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sri Susilawati berhasil mengharumkan nama Indonesia pada ajang kompetisi rias internasional Cidesco Make Up and Body Art Competition 2021 dengan meraih penghargaan sebagai Best of Unique Design.

Prestasi ini yang telah diraih oleh Sri Susilawati



Siswi dari SLB Negeri Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat

sebenarnya sangat luar biasa. Sebab, pada kompetisi rias internasional tersebut tidak hanya diikuti oleh siswa-siswa berkebutuhan khusus tapi juga diikuti oleh kalangan profesional dan bukan dari kelompok disabilitas. Ini membuktikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang sama. Dan jika kemampuan mereka terus diasah, mereka bisa jadi jauh lebih baik.

Contoh lain, Ade Irawan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bermain piano. Keterbatasannya dalam melihat (tunanetra) tidak menyurutkan semangat untuk berprestasi. Maestro asal Indonesia ini sejak usia tahun berlatih piano. Dan ia pun aktif unjuk bakat di Jazz Links Jam Session di Chicago Cultural Center, sejak masih duduk di bangku sekolah dasar.

Mulai 2006-2007, ia melanjutkan kiprah kariernya sebagai pianis di ajang Chicago Jazz Festival dan Chicago Winter Jazz Festival. Penampilannya yang luar biasa memukau ini, membuat berbagai musisi kelas dunia ingin berkolaborasi dengannya.

Tentunya tidak hanya Sri dan Ade, masih banyak anak-anak disabilitas Tanah Air yang telah mampu mengharumkan nama Indonesia dengan keahlian yang mereka miliki dari berbagai bidang.

Maka itu, jangan pandang mereka sebelah mata, dia

adalah anak-anak istimewa yang harus diberikan akses yang luas untuk bisa mengejar cita-cita yang mereka inginkan. Mereka jangan dikasihani, tapi dukung lah mereka untuk mendapatkan hak-haknya.

Pada peringatan HDI 2021 harus menjadi momentum bersama untuk memberikan ruang yang sama bagi mereka. Mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan pendidikan, mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan.

Bagi orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, jangan malu atau berkecil hati.

Sayangilah mereka, dengan memberikan pendidikan yang layak bagi mereka.

Pemerintah telah memberikan akses yang luas melalui sekolah luar biasa (SLB) dan sekolah Inklusif. Dengan memberikan pendidikan yang layak bagi mereka, berarti kita telah berbuat adil.

Pendidikan vokasi yang diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus ini juga memberikan peluang bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan keahlian yang mereka miliki akan menjadikan mereka sebagai pribadi yang mandiri. Sehingga kehadirannya tidak lagi menjadi beban bagi yang lain, tapi mereka bisa jadi menjadi pribadi yang bisa menebar manfaat bagi lingkungan sekitar.

Sayangi lah mereka, mereka juga manusia yang harus disayangi. Dengan kasih sayang yang mereka dapatkan akan membuat mereka lebih semangat dalam menjalani kehidupannya. Sehingga spirit untuk mengukir prestasi akan terus bergelora di hati mereka.

Sederat prestasi yang telah diukir para penyandang disabilitas bukan hadir dengan sendirinya. Tapi ini berkat bimbingan dan motivasi dari orang tua mereka. Inilah yang membuat mereka terus bersemangat dalam menjalani kehidupannya.

Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional 2021. Berikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mereka dalam mengukir prestasi.

*) Wartawan dan Pemerhati Sosial



VARIAN BARU VIRUS COVID-19

Nur Afriyani*

Baru-baru ini Inggris dan Afrika Selatan dihebohkan dengan kemunculan varian atau mutasi virus corona jenis baru. Varian ini terdeteksi pertama kali pada September 2020, dan pada pertengahan November kasus ini kembali melonjak hingga menjadi dua pertiga kasus pada pertengahan Desember.

Dikutip dari The National News, Ahad (20/12) ada beberapa hal yang telah diketahui dari virus jenis baru ini. Berdasarkan informasi, strain varian baru itu dinamakan VUI-202012/01, dan diketahui memiliki 23 perubahan genetik. Salah satunya, terkait dengan

protein lonjakan yang digunakan virus corona saat ini untuk menempelkan dirinya ke reseptor pada sel manusia.

Peringatan WHO

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mendesak anggotanya di Eropa untuk meningkatkan tindakan melawan varian baru virus corona SARS-CoV-2 yang beredar di Inggris. Di luar Inggris, varian baru virus telah dilaporkan pada sembilan kasus di Denmark, serta masing-masing satu kasus di Belanda dan Australia. "Di seluruh Eropa, di mana penularannya intens dan meluas,

negara-negara perlu menggandakan pendekatan pengendalian dan pencegahan mereka," ujar juru bicara WHO (20/12/2020).

Anggota WHO di seluruh dunia diminta merunut virus SARS-CoV-2 dan berbagi data urutan internasional, khususnya bagi negara yang melaporkan adanya mutasi virus yang sama. WHO mencatat, strain baru dari virus corona ini kemungkinan dapat menyebar lebih mudah di antara orang-orang dan memengaruhi tes diagnostik. "Informasi awal bahwa varian tersebut dapat memengaruhi kinerja beberapa tes diagnostik," tulis WHO.

Bagaimana agar tidak menyebar di Indonesia? Epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo mengungkapkan, mencegah varian baru virus SARS-CoV-2 masuk ke sebuah wilayah, termasuk Indonesia, dapat dilakukan dengan melarang orang masuk ke Indonesia. "Sementara mutlak melarang masuknya siapa pun, baik orang asing maupun warga Indonesia sendiri yang baru pulang dari bepergian, dari wilayah yang diduga sebagai asal virus varian baru tersebut ke wilayah Indonesia," ujar Windhu.

Selain itu, orang yang bukan berasal dari daerah asal virus varian baru juga dilarang memasuki Tanah Air. "Kecuali yang mempunyai kepentingan sangat urgent bisa masuk dengan dikarantina di lokasi khusus minimum 14 hari sebelum menuju tujuan," lanjutnya.

Sementara untuk mengetahui seseorang terinfeksi strain baru virus, diperlukan penelitian khusus. Virus harus yang ditemukan di tubuh seseorang diisolasi dan diperiksa di laboratorium khusus untuk riset. "Tidak mudah dan tidak rutin dilakukan. Mutasi virus selalu perlu dimonitor oleh lembaga lembaga riset. Ada di Unair, UI, UGM, Lembaga Eijkman. Unair selalu melakukan riset itu untuk virus-virus yang terutama ditemukan di Jawa Timur/Surabaya," kata Windhu.

Muncul berbagai pertanyaan bagaimana pengobatan atau vaksinasi ke depannya. Terlebih, ketika evolusi virus adalah alasan utama mengapa vaksin yang seharusnya

disiapkan melawan wabah itu, menjadi tidak begitu efektif. Vaksin untuk virus corona baru sering ditujukan untuk merangsang respons kekebalan terhadap protein lonjakan. Tetapi para ahli memperkirakan harus ada beberapa perubahan pada protein lonjakan untuk membuat vaksin tidak efektif.

Saat ini, yang menjadi tanda tanya besarnya adalah mengapa virus itu bisa memunculkan jenis baru, di saat jenis sebelumnya belum hilang. Dijelaskan lebih lanjut, semua organisme hidup termasuk virus (meski antara hidup dan tidak) memang berevolusi. Ketika mereplikasi genetiknya sendiri, kesalahan memang kerap terjadi, dan perubahan itu bisa menyebar ke generasi-generasi selanjutnya.

Perlu diingat, beberapa perubahan genetik itu memang tidak penting, namun kadang kala bisa menyebabkan perubahan pada protein yang dikodekan materi genetik dan membuat organisme (termasuk virus) bisa bertahan, menyebar atau bereproduksi. Sampai saat ini belum ada bukti akurat bahwa varian baru ini akan mempengaruhi efektivitas vaksin. Dan penularannya yang lebih cepat memicu kekhawatiran penanganan di rumah sakit.

Makin banyak kasus maka makin banyak pula resiko kematian jika rumah sakit kewalahan. Kabar baiknya, vaksin COVID-19 yang saat ini dikembangkan mampu melatih sistem imun untuk menyerang bagian beberapa virus. Karena itu, vaksin diyakini tetap akan bekerja pada mutasi virus yang ditemukan. Masyarakat boleh waspada dengan adanya mutasi virus baru ini, namun tidak perlu disikapi dengan kekhawatiran berlebihan. Kita semua tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M (dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak atau menghindari kerumunan). Tetap waspada dan salam sehat . [**]

*) Penulis adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

INOVASI BISNIS DI TENGAH PANDEMI

: Tri Nur Fadilah*

Pandemi sudah menjadi salah satu ciri di tahun 2020 ini. Bagaimana tidak, pandemi ini dimulai sejak awal tahun 2020 dan sampai sekarang, awal tahun 2021 masih menjadi topik hangat di tengah masyarakat.

Pandemi bukan berarti berleha-leha di rumah, banyak sekali kreativitas yang dapat dilakukan, contohnya berjualan online. Semenjak pandemi, pekerjaan banyak dilakukan di rumah. Hal ini membuat banyak orang memutar otaknya untuk menghasilkan uang lewat berjualan online.

Salah satunya seperti Nafisah seorang mahasiswa yang sedang menekuni bisnis online shop, ia menuturkan bahwa media online bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan uang di tengah pandemi.

“Di zaman teknologi yang canggih ini saya ingin memanfaatkan media online untuk mencari uang saku agar tidak membebani orangtua,” tuturnya.

Memang benar, banyak sekali manfaat dari berjualan online selain mendapat upah, bisa meningkatkan jiwa berbisnis seseorang. Apalagi di tengah pandemi yang serba sulit ini, media online menjadi alat bantu yang sangat penting.

Tidak heran jika pasar online saat ini sangatlah membludak. Bagaimana tidak, seseorang bisa berjualan jarak jauh tanpa harus bertemu lebih dahulu dengan konsumen. Hal tersebut yang membuat banyak orang berlomba-lomba berjualan online di tengah pandemi ini, selain modalnya yang sedikit pasar yang ditawarkan sangatlah luas. Dalam berbisnis online seorang penjual harus mengembangkan produk agar bertahan lama di dunia bisnis online ini.

Di tengah pandemi konsistensi dalam berjualan harus ada inovasi, inilah tugas penjual untuk memberikan inovasi. Karena membludaknya penjual online, penjual harus bisa membuat sisi menarik jualannya agar

konsumen dapat terpicu, seperti yang dilakukan oleh Nafisah.

Dia menuturkan “Saya mencoba untuk membaguskan packaging untuk menarik konsumen, serta memasukkan jualan di market place memudahkan konsumen mendapat gratis ongkir.”

Inilah inovasi Nafisah dalam berjualan online di tengah pandemi. Nafisah meyakini pemberian packaging yang estetik dapat menarik daya konsumen untuk membeli barangnya.

Memberikan inovasi pada produk jualan adalah salah satu cara untuk bertahan dalam dunia bisnis online. Banyak tips yang bisa dilakukan untuk mempertahankan bisnis online di tengah pandemi seperti yang dikatakan Putri seorang Mahasiswa yang juga terjun ke dunia bisnis online. “Tips yang saya gunakan biasanya saya selalu memperbarui stok secara bertahap, lalu menjaga komunikasi terbuka dengan pelanggan dan tidak lupa saya selalu menerapkan pikiran yang positif,” ungkap Putri.

Di tengah pandemi strategi dan inovasi dalam berjualan sangat dibutuhkan untuk menguasai pasar apalagi, pasar yang tak nampak seperti pasar online. Strategi yang dapat dilakukan yaitu gunakan media sosial untuk meneliti kebutuhan pasar, foto lah produk semenarik mungkin, perbanyak promosi di media sosial, respon cepat kepada konsumen, strategi tersebut dapat dijadikan acuan untuk memulai berbisnis online.

Oleh karena itu, di tengah pandemi yang penuh kesulitan ini banyak rakyat menekuni bisnis online tersebut, bagi mereka inilah cara paling jitu untuk mempertahankan keadaan ekonominya. Dengan memanfaatkan bisnis online penjual maupun pembeli sama-sama saling menguntungkan. [**]

*) Penulis adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Malang

MENGAWAL PROGRAM VAKSINASI TANPA KORUPSI

Program vaksinasi nasional telah diluncurkan pada tanggal 13 Januari 2021. Targetnya sebanyak 182 juta orang atau sekitar 70 persen penduduk telah disuntik vaksin COVID-19 hingga Maret 2022 untuk menciptakan kekebalan komunal.

Tahap pertama dimulai Januari hingga April 2021 dengan menyuntikan sebanyak 1,3 juta vaksin untuk petugas kesehatan, 17,4 juta orang petugas pelayanan publik, dan 21,5 juta orang warga lanjut usia di atas 60 tahun. Khusus untuk lansia, masih menunggu uji keamanan.

Tahap kedua, April 2021 sampai Maret 2022, vaksin akan diberikan kepada masyarakat di daerah rentan penularan tinggi 63,9 juta orang dan masyarakat lainnya 77,4 juta orang. Nantinya, para penerima vaksin akan disuntik dua kali.

Untuk memenuhi vaksin tersebut, Pemerintah telah melakukan sejumlah kerja sama dengan perusahaan farmasi dunia.

Pemerintah diketahui sudah mengonfirmasi pemesanan 329,5 juta dosis vaksin COVID-19 dari berbagai produsen.

Pertama, dari perusahaan farmasi Tiongkok Sinovac sebanyak 125,5 juta dosis; kedua, dari pabrikan vaksin Amerika Serikat-Kanada Novavax sebanyak 50 juta dosis.

Ketiga, dari kerja sama multilateral WHO dan Aliansi Vaksin Dunia (Covax-GAVI) sebanyak 50 juta dosis; keempat, dari pabrikan Inggris AstraZeneca sebanyak 50 juta dosis; dan kelima perusahaan farmasi gabungan Jerman dan Amerika Serikat Pfizer BioNTech sebanyak 50 juta.

Saat ini 3.000.000 vaksin COVID-19 dari Sinovac telah tersedia.

Mengawal Pengadaan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa anggaran untuk vaksin sekitar Rp60 triliun.

Anggaran yang relatif sangat besar dengan kondisi yang tidak biasa, mengingat tidak banyak produsen farmasi yang membuat vaksin tersebut sehingga menjadi rebutan di banyak negara pada masa pandemi.

Menurut Menkes, kapasitas produksi vaksin sendiri diperkirakan 6 miliar dosis, sementara kebutuhan dunia atas vaksin mencapai 9 miliar dosis.

Akibatnya, mekanisme harga dan pengadaan tidak melalui lazimnya mekanisme pasar biasa. Di sisi lain, perlu gerak cepat untuk dapat memenuhi kebutuhan di Indonesia.

Tidak heran bila dalam pengadaan vaksin dilakukan beberapa kerja sama, tidak hanya terhadap satu produsen. Begitu pula, mekanisme pengadaannya berlainan menurut kerja sama tersebut.

Kementerian Kesehatan sejak awal telah mendiskusikan dengan KPK terkait dengan beberapa risiko, yakni vaksin ini pembeliannya sifatnya khusus, perusahaan penyedia tidak banyak di dunia, akibatnya tender, bidding, dan open document susah dilakukan. Negosiasi harga pun susah dilakukan karena sifatnya terbatas di seluruh dunia.

Untuk pengadaan vaksin COVID-19, dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu pembelian langsung ke produsen, antara lain ke Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax, serta secara multilateral WHO dan Aliansi Vaksin Dunia (Covax-GAVI).

Mekanisme bilateral, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi, pihaknya beli melalui Bio Farma, sedangkan multilateral itu gratis karena kerja sama internasional, padahal barangnya sama.

"Di daftar GAVI ada vaksin Novavax dan AstraZeneca, jadi kenapa kita juga beli multilateral? Karena barangnya tidak cukup untuk memvaksin 182 juta orang Indonesia," ungkap Budi.

Bentuk pengadaan yang tidak biasa tersebut membutuhkan penanganan yang juga tidak biasa dalam pengawasan.

Untuk itu, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri

Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dua pimpinan KPK (Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar), Deputy Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, serta sejumlah pejabat terkait lain, seperti Irjen Kemenkes Murti Utami dan Dirut Bio Farma Honesti Basyir menggelar pertemuan pada hari Jumat (8/1) membahas hal tersebut.

Hasilnya dibentuk tim bersama untuk mengawasi pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19.

Tim bersama tersebut dibentuk oleh KPK bersama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP), Kejaksaan Agung, dan kepolisian serta pemangku kepentingan lainnya.

Tim tersebut penting agar pengadaan yang dilaksanakan dapat diawasi dan memastikan tidak terjadi kebocoran anggaran.

Pengawasan Distribusi

Di sisi lain, potensi kebocoran juga dapat berasal dari sisi distribusi, mengingat 182 juta orang yang akan divaksin hingga Maret 2022.

Untuk itu, guna memastikan bahwa setiap orang mendapatkan vaksin tidak lebih dari dua kali, data yang mumpuni sangat penting, mengingat vaksin saat ini sumber daya yang terbatas.

Dengan penduduk 270 juta jiwa, sementara 182 juta jiwa yang akan divaksin, potensi kebocoran dan diperjualbelikan di pasar gelap sangat tinggi. Apalagi, Pemerintah telah memastikan bahwa vaksin diberikan gratis.

Data terbaru yang terus diperbarui, data nomor induk kependudukan (NIK) yang mumpuni akan mengurangi resiko kebocoran.

Data terbaru akan dapat meningkatkan penanganan bagi penduduk yang kemungkinan meninggal sebelum vaksinasi sehingga vaksin tetap dapat dipergunakan dan tidak disalahgunakan.

Kepastian NIK yang mumpuni akan mengurangi salah sasaran maupun penyalahgunaan vaksin.

Guna mendukung data yang mumpuni, Pemerintah memastikan penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data COVID-19. Dua BUMN ditunjuk untuk itu, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Bio Farma.

Sistem ini dinyatakan akan menghasilkan data dalam bentuk by name by address (satu nama dan alamat) yang



berasal dari berbagai sumber untuk menghindari data ganda.

Data tersebut untuk memetakan dan mendistribusikan vaksin berdasarkan kebutuhan per kabupaten/kota.

Untuk itu, Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diteken pada hari Selasa (12/1).

Menteri Komunikasi dan Informatika Jhony G. Plate menyatakan bahwa SKB ini sebagai landasan hukum untuk menjamin dan memastikan perlindungan data pribadi penerima vaksinasi serta mendukung pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa pihaknya akan mengandeng Kementerian Dalam Negeri guna membuka fitur pengaduan terkait dengan vaksin seperti program sebelumnya, yaitu "Jaga Bansos" untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial.

Pengawasan distribusi guna memastikan vaksin tidak disalahgunakan dan diterima bagi mereka yang berhak sesuai dengan spesifikasi dan tanpa dikurangi penting dilakukan, mengingat program ini menyentuh mayoritas masyarakat Indonesia, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di daerah.

Pengalaman korupsi bansos COVID-19 menjadi pelajaran berharga untuk tidak diulang kembali.

Pada masa pandemi dengan kondisi yang serba tidak biasa, perlu memastikan bantuan yang diberikan tidak lagi dikorupsi. (ANT)

MERDEKA BELAJAR DI TENGAH PANDEMI

Nabil Syuja Faozan*

Tahun 2020 yang baru saja kita lewati, merupakan tahun yang berat bagi bangsa Indonesia bahkan seluruh bangsa di dunia. Adanya pandemi Covid-19 memberikan banyak cobaan dan tantangan di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang Pendidikan.

Salah satu tujuan Indonesia merdeka, sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam kondisi apapun harus tetap dilakukan. Negara harus hadir menyediakan sarana dan prasarana yang memadai melalui program dan kebijakan untuk mencerdaskan bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai leading sector dalam bidang pendidikan harus terus menerus melakukan inovasi dan transformasi sebagai ikhtiar menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Penyusunan program yang dilakukan pemerintah, khususnya Kemendikbud mulai dari penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) hingga program transformasi dana pemerintah untuk perguruan tinggi menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menanggulangi masalah Pendidikan di tengah pandemi Covid-19, yang belum diketahui kapan akan berakhir. Sekalipun proses vaksinasi sudah dimulai dengan skala prioritas tenaga Kesehatan, sehingga menimbulkan optimisme baru terhadap pencegahan virus korona.

Enam Episode

Siaran Pers Kemendikbud Nomor : 002/sipres/A6/I/2021 menjelaskan ada enam episode usaha pemerintah dalam menanggulangi masalah pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Pertama Kemendikbud fokus terhadap empat kebijakan program kerja yaitu

Penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), pengganti Ujian Nasional (UN), penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan mengatur kembali Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Kedua, kampus merdeka. Fokus terhadap perguruan tinggi diantaranya adalah mempermudah membuka program studi baru, mempermudah sistem akreditasi perguruan tinggi, mempermudah perguruan tinggi untuk menjadi PTN berbadan hukum dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Merdeka Belajar episode Kampus Merdeka memberikan keuntungan untuk berbagai perguruan tinggi swasta maupun negeri, yang baru didirikan dalam melakukan akreditasi dan membuka program studi baru. Tak hanya itu, kebebasan hak belajar tiga semester di luar program studi yang diberikan kepada mahasiswa menjadi modal dalam pembentukan SDM yang unggul dan kompeten di bidangnya.

Ketiga, penyesuaian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu penyaluran dana BOS langsung ke sekolah, penggunaannya lebih fleksibel untuk sekolah, nilai satuan meningkat, dan pelaporan dana BOS lebih transparan dan akuntabel. Harapannya adalah tidak ada lagi kepala sekolah yang menalangi dana operasional sekolahnya dan fleksibilitas penggunaan dana tersebut karena sekolah yang mengerti apa kebutuhan murid-muridnya.

Keempat, Program Organisasi Penggerak (POP) dengan tujuan untuk memberdayakan organisasi penggerak dalam membangun sekolah-sekolah penggerak. Harapannya POP menjadi elemen penting terciptanya Sekolah Penggerak, tempat menuangkan seluruh konsep Merdeka Belajar. Dalam melaksanakan POP, seluruh elemen masyarakat harus saling bekerjasama agar fleksibilitas penggunaan dana POP



dapat tersalurkan sebagaimana mestinya. Dukungan pemerintah yang membuat program ini juga menjadi poin penting dalam terlaksananya pembangunan sekolah penggerak.

Kelima, gurupenggerak. Arah program gurupenggerak berfokus pada pedagogi, serta berpusat pada murid dan pengembangan holistik, pelatihan yang menekankan pada kepemimpinan instruksional melalui on-the-job coaching. Melalui program ini diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang murid secara holistik sehingga menjadi Pelajar Pancasila, menjadi pelatih atau mentor bagi guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan.

Keenam, transformasi dana pemerintah untuk perguruan tinggi. Fokusnya adalah perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri harus mampu bersaing di tingkat dunia dan mencakup delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi transformasi landasan Pendidikan tinggi. Sehingga perguruan tinggi akan memiliki kualitas yang baik, sejajar dengan perguruan

tinggi luar negeri.

Melalui program dan kebijakan enam episode yang dibangun dan dicapai oleh Kemendikbud tersebut, akan diperoleh gambaran secara utuh dan transparan atas upaya hadirnya negara dalam memerdekakan belajar pada saat masih terjadinya pandemi Covid-19, khususnya di bidang Pendidikan. Walaupun dalam pelaksanaannya masih belum sempurna.

Setidaknya program yang diupayakan pemerintah memberikan jawaban dan kepuasan tersendiri bagi seluruh elemen masyarakat yang merasa khawatir terhadap masalah Pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Karena itu, gotong royong yang menjadi jiwa dan karakter bangsa, dari seluruh elemen masyarakat menjadi penting dan strategis, untuk bersama-sama mencerdaskan bangsa. Seraya berdoa agar wabah Covid-19 ini segera berlalu, sehingga proses merdeka belajar dapat berjalan normal kembali. Semoga. [**]

*) Penulis adalah Mahasiswa FKK Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

TANTANGAN KURIKULUM KAMPUS MERDEKA DI ERA INDUSTRI 4.0

Rohmat Suprpto*

Seiring dengan diluncurkannya program Merdeka Belajar dengan tajuk Kampus Merdeka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pada awal tahun 2020, dipayungi dengan Permendikbud No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, nyata telah banyak mempengaruhi kebijakan pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swata (PTS).

Kebijakan Merdeka Belajar di Kampus Merdeka (MBKM) mengusung empat paket kebijakan substantial di perguruan tinggi. Empat paket inilah yang disebut Mas Menteri sebagai “pelepas belunggu” agar perguruan tinggi lincah bergerak mengikuti perkembangan jaman yang terus berubah.

“Ini tahap awal untuk melepaskan belunggu agar lebih mudah bergerak. Kita masih belum menyentuh aspek kualitas. Akan ada beberapa matriks yang akan digunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai targetnya” Ujar Mas Menteri saat peluncuran di kantornya.

Empat Paket MBKM

Empat paket MBKM tersebut adalah, pertama sistem akreditasi perguruan tinggi. Pada era MBKM ini, akreditasi perguruan tinggi akan lebih disederhanakan. Prodi maupun perguruan tinggi dapat secara sukarela mengajukan akreditasi. Lima tahunan program akreditasi yang selama ini dijalankan oleh BAN-PT akan tetap dilanjutkan dengan penyempurnaan. Sedangkan perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi dari badan akreditasi dunia secara otomatis akan mendapatkan peringkat A oleh Kemdikbud.

Kedua, Pembukaan Prodi Baru. Kemendikbud di era Kampus Merdeka ini memberikan akses yang lebih mudah bagi perguruan tinggi untuk membuka prodi baru yakni bagi perguruan tinggi yang akreditasinya A atau B. Nadiem mengatakan bahwa, kampus akan diberikan hak otonom guna pembukaan prodi baru yakni bagi yang telah

melakukan kerjasama dengan organisasi atau universitas yang masuk pada QS top 100 world universities. Dalam penetapan kebijakan ini ada pengecualian pada program pendidikan dan juga bidang kesehatan.

Paket kebijakan yang ketiga adalah kemudahan Perguruan tinggi Satker menjadi PTN-BH. PTN satker adalah sebuah perguruan tinggi negeri dengan status sebagai satuan kerja dimana di dalamnya terdapat layanan umum yang tersedia. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengubah PTN satker menjadi PTN BH (perguruan tinggi negeri dengan kekuatan badan hukum).

Kebijakan Mas Menteri yang ketiga ini memudahkan semua PTN untuk berubah ke PTN ber BH dengan demikian PTN akan dapat berkompetisi di panggung dunia. Menteri Nadiem menegaskan bahwa dengan perubahan ini PTN akan mudah melakukan kerjasama dengan dunia industri. Perubahan juga sebagai konsekwensi memudahkan PTN melakukan otonomi dan keleluasaan dalam pengaturan keuangan dengan cepat sesuai dengan yang paling dibutuhkan.

Sedangkan paket kebijakan keempat adalah adanya hak mahasiswa untuk belajar di luar prodinya selama dua atau tiga semester.

Point utama yang sekarang ini sedang terus diperbincangkan dalam rangka implementasi adalah point keempat dimana mahasiswa harus diberi kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, atau pembelajaran pada prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Mas Menteri Nadiem berharap bahwa dengan diluncurkannya program ini dapat mendorong mahasiswa menguasai beragam kompetensi dan mendekatkan mahasiswa pada capaian-capaian praktik

dunia kerja secara langsung guna mempersiapkan lulusan perguruan tinggi yang siap terjun di dunia kerja.

Harapan Mas Menteri ini bukan tanpa alasan. Hal ini tidak lain guna merespon tantangan era industri 4.0 yang mensyaratkan pemenuhan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia unggul, yang tidak hanya menguasai teori-teori akademik semata, melainkan juga harus memiliki kompetensi praktik yang kolaboratif dengan dunia industri mutakhir.

MBKM di Era Industri 4.0

Istilah Era Industri 4.0 sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Sebagaimana dikutip dari Encyclopedia Britannica (2015), revolusi industri ini menandai serangkaian pergolakan sosial, politik, budaya dan ekonomi dan ini akan berlangsung selama abad ke-21. Jika pada revolusi industri ke tiga lebih pada penyiapan dan ketersediaan secara luas teknologi digital, maka di era 4.0 sebagian besar didorong oleh konvergensi inovasi digital, biologis dan fisik.

Sedangkan menurut Herman dikutip oleh Wikipedia menyebutkan bahwa era industri 4.0 menghasilkan “pabrik cerdas”. Pabrik cerdas ini berisi moduler, sistem siber-fisik, mengawasi proses fisik dan semua berbasis virtual. Yuwono (ubaya.ac.id : 2020) menyebutkan bahwa revolusi industri 4.0 adalah kolaborasi cerdas antara teknologi cyber dan otomatisasi.

Indonesia pada sisi ini telah merespon secara cepat dan siap untuk menerapkannya, terbukti dengan diluncurkannya program “Making Indonesia 4.0” oleh Presiden Joko Widodo pada awal April 2018. Hal ini menandakan Era Industri 4.0 harus disambut dengan disemua lini, baik pada kebijakan ekonomi, kesehatan dan juga pendidikan.

Implementasi era industri 4.0 sejatinya makin tidak dapat ditawar kehadirannya. Pandemi covid-19 yang saat ini masih berlangsung, memaksa semua elemen termasuk dunia pendidikan beralih ke dunia virtual. Kuliah online, Pendidikan jarak jauh, praktik online adalah bukti dan tanda era industri 4.0 telah menjadi bagian dari kehidupan di masa pandemi ini dan akan terus berlangsung bahkan pascapandemi. Jika perguruan tinggi tidak segera berbenah, mempersiapkan SDM mahasiswa yang siap menghadapi era industri 4.0 maka lambat tapi pasti perguruan tinggi tersebut akan ditinggalkan oleh calon mahasiswanya.

Maka dalam konteks itulah, kebijakan Mas Menteri

yang meluncurkan MBKM harus direspon secara positif dan konstruktif guna menyiapkan SDM unggul di era serba industri ini. Kendala pasti ada dalam setiap usaha. Apalagi kebijakan ini tentu dirasa amat berat bagi perguruan tinggi yang tergolong relative masih belum “siuman”.

Kendala utama implementasi MBKM sebagaimana yang dirasakan oleh beberapa prodi utamanya perguruan tinggi swasta sebagai pelaksana pilot project di tahun ini adalah mekanisme kerjasama prodi dengan mitra baik perguruan tinggi lain atau dunia industri.

Bagi PTS besar hal ini tentu tidak menjadi persoalan besar, akan tetapi bagi PTS kecil kewajiban ini tentu memunculkan kendala yang tidak ringan. Muncul beberapa pertanyaan di kalangan PTS kecil yaitu pertama bagaimana strategi dan cara PTS melaksanakan MoU dengan perusahaan besar? Kedua apakah PTN dan PTS besar mau bekerjasama dengan PTS kecil? Atau PTN dan PTS yang telah terakreditasi A dengan “ihlas” kerjasama dengan PTS yang akreditasinya B atau C? Kondisi ini juga penulis rasakan sebagai salah satu tim implementasi MBKM prodi dimana melakukan MoU dengan Lembaga atau instansi luar membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra guna meyakinkan mitra prodi kita layak untuk diterima sebagai mitra MBKM.

Persoalan ini hendaknya menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk segera menyusun regulasi yang jelas berdasarkan beberapa pertimbangan kondisi perguruan tinggi yang tidak sama kualitas dan kuantitasnya. PTS kecil dengan keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia dan pendanaan yang serba terbatas dan apalagi PTS dengan kendala alam dan geografis terpencil tentu akan mendapatkan kendala dan tantangan yang cukup berat jika harus berkolaborasi dan bermitra dengan PTN atau PTS besar. Tanpa adanya tata aturan yang jelas dan kesepahaman visi antara Kemendikbud dengan kementerian lainnya, kebijakan Mas Menteri ini dirasa hanya bagus secara aturan tetapi akan memunculkan kendala pada tataran implementatif di lapangan. Semoga kendala teknis ini segera dapat dicari solusi konstruktif guna merealisasikan penyiapan SDM unggul di era kampus merdeka. Semoga. [**]

*) Penulis adalah Dosen dan Tim Pengembang Kurikulum MBKM Program Studi Pendidikan Matematika Unimus, Kepala Lembaga Studi Islam dan Kemuhammadiyah Unimus 2012-2016 dan 2016-2020, Wakil Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PW Muhammadiyah Jawa Tengah



PENDIDIKAN KARAKTER DI MASA PANDEMI COVID-19

Meti Rulima*

Dunia yang tengah menghadapi fenomena besar, yakni mewabahnya Covid-19. Kita merasakan adanya perubahan dalam tatanan negara, terutama dalam sektor ekonomi dan pendidikan. Pendidikan tidak hanya berupa pelajaran umum, namun juga tentang adab dan etika kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jika sekolah dilakukan dari rumah saja dengan menerapkan sistem physical distancing, apakah pembelajaran akan tetap dapat terlaksana dengan baik?

Berkaitan dengan penekanan Mendikbud bahwa

pembelajaran dalam jaringan (daring) atau jarak jauh dilaksanakan agar setiap siswa tidak terbebani akan tuntutan pendidikan. Dianjurkan juga bagi daerah yang sudah menerapkan sistem tersebut untuk memastikan guru dan muridnya menjalankan sistem belajar dan mengajar hanya dari rumah saja dalam rangka menjaga keamanan bagi para siswa dan guru-gurunya tersebut.

Pekerjaan rumah dan kegiatan sekolah lainnya disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masing-masing pelajar dan pengajar. Tidak semua pelajar maupun pengajar mempunyai akses dan fasilitas yang

memadai dalam kegiatan belajar mengajar. Bisa saja dengan jaringan yang lemah, kesenjangan ekonomi sehingga tidak terfasilitasi dengan baik ketika belajar, maupun pemahaman para pelajar dalam menangkap materi yang disampaikan sang guru.

Pendidikan sekolah memang penting dalam pembangunan karakter para pelajar, namun tetaplah peran orangtua di rumah tak kalah pentingnya dalam andil tersebut serta adanya kemauan dari siswa untuk membenahinya menjadi lebih baik. Kebanyakan manusia berpendapat bahwa tabiat dan watak manusia tidak mungkin bisa dirubah. Namun tidak ada kalimat yang tidak mungkin jika kita mau berusaha selagi bisa.

Pada tulisan ini penulis menekankan bahwa ada satu bagian pendidikan yang belum tentu terjamah oleh jangkauan teknologi, yakni pendidikan karakter pelajar.

Ki Hajar Dewantara mengajarkan salah satu ajarannya yang terintegrasi dalam tujuan kurikulum 2013, setidaknya kita mendapat dua poin. Pertama yaitu seluruh anggota keluarga yang lebih dewasa harus dapat mengajarkan sikap yang baik dan pantas akan spiritual, kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, dan beragam keterampilan. Yang kedua yaitu setiap rumah menjadi bagi seluruh anggota keluarga, khususnya anak-anak dalam mendapatkan jiwa spiritual, kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan untuk penunjang hidup di masa mendatang.

Karakter dan kepribadian adalah sifat dari dalam yang pastinya akar dalam mempengaruhi pikiran, sikap, dan kebiasaan kita sebagai manusia. Pendidikan karakter juga merupakan pendidikan yang paling awal kita peroleh sebelum mendapatkan pendidikan dari luar rumah seperti sekolah.

Para orang tua beranggapan bahwa kehadiran guru di sekolah sangat membantu dalam segi pembentukan dan pembangunan karakter anak-anak. Namun hasilnya juga tidak maksimal apabila tidak diimbangi dengan pendidikan karakter yang berasal dari rumahnya masing-masing. Harus adanya kerjasama yang erat

antara guru dan para wali siswa guna memaksimalkan pendidikan karakter dan watak para pelajar.

Disaat-saat yang genting seperti ini, masih saja banyak kita temui kasus-kasus permasalahan di masyarakat seperti perjudian, narkoba, minuman keras, club-club malam, seks bebas di kalangan muda, serta kerumunan-kerumunan yang tidak seharusnya.

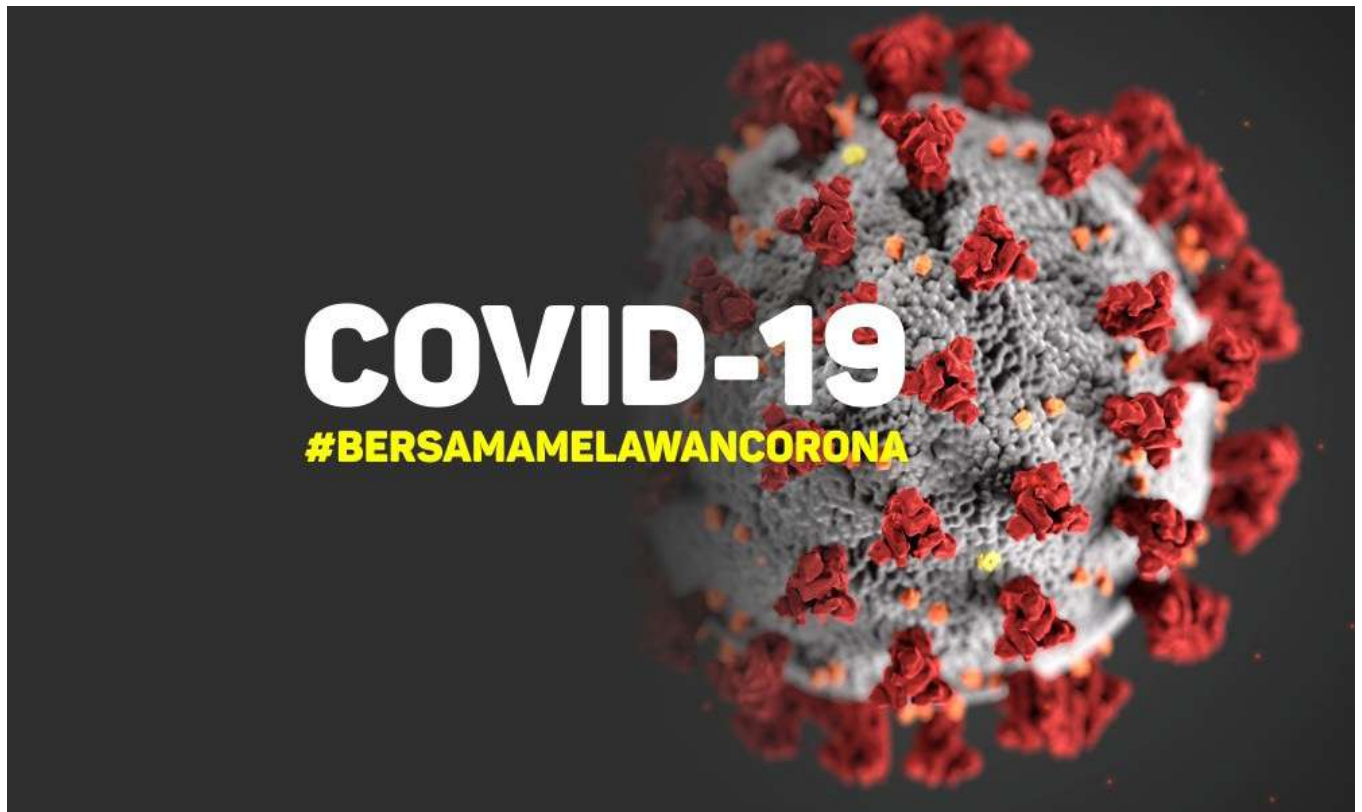
Sudah pasti hal-hal ini menjadi sesuatu yang meresahkan bagi kehidupan bermasyarakat. Penyebab dari fenomena buruk ini juga karena didasari oleh pembawaan dari karakter masing-masing dari orang-orang tersebut. Apabila rusak karakternya, maka rusak pula tatanan hidup nya.

Usaha yang bisa kita lakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut harus kita ingat bahwasanya kita wajib membekali diri akan pembentukan karakter yang baik secara dini dalam ruang lingkup keluarga atau mengingatkan orang-orang terdekat kita seperti kerabat, tetangga, dan masyarakat di sekitar akan pentingnya membangun karakter diri yang baik, selalu mengingat Tuhan, dan memperbanyak aktivitas yang positif.

Di masa pandemi ini, penting sekali pendidikan karakter dalam membekali dan sebagai tameng diri dari perbuatan-perbuatan tercela serta perilaku yang tidak pantas. Banyak lah berbuat sesuatu yang berguna bagi orang-orang di sekitar mu meski keadaan tidaklah sama seperti sebelum wabah ini datang dan terjadi di sekeliling kita.

Walau tidak dapat bertatap muka secara langsung, etika dalam kegiatan belajar mengajar tetap menjadi bagian yang tak dapat terpisahkan. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berinteraksi dengan orang lain, haruslah mengutamakan etika yang baik. Jika kita bereaksi baik, maka hasil yang kita dapatkan akan baik pula. [**]

*) Penulis saat ini tinggal di Berau, Kalimantan Timur dan Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)



POLEMIK VAKSIN PRODUKSI ALA INDONESIA

Hari-hari ini publik disuguhi wacana seputar vaksin produksi dalam negeri yang menghangatkan banyak kalangan, tidak saja di dunia kesehatan, melainkan juga yang non-kesehatan.

Bicara soal vaksin buatan dalam negeri, meski belum resmi bisa dipakai untuk program vaksinasi anti-COVID-19, maka rujukannya adalah ada dua.

Pertama, adalah Vaksin Merah Putih. Penelitian Vaksin Merah Putih dilakukan oleh enam lembaga di dalam negeri. Mereka adalah Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan empat universitas, yakni UI, UGM, ITB, dan Unair.

Sementara, untuk uji klinisnya, produksi dan pendistribusian diserahkan kepada perusahaan BUMN PT Bio Farma.

Terkait Vaksin Merah Putih ini, Kepala Biologi Molekuler Eijkman Profr Amin Subandrio di Jakarta, Sabtu (17/4) memberi pernyataan bahwa tahapan uji klinis fase 1 baru akan dimulai menjelang akhir 2021 atau kuartal 4, dan saat ini sedang dalam tahap uji praklinis.

Kedua, adalah Vaksin Nusantara. Vaksin ini, pengagasnya adalah tim peneliti dari PT Rama Emerald Multi Sukses (Rama Pharma) bersama AIVITA Biomedical asal Amerika Serikat (AS) dan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip), Semarang.

Hal menarik dari Vaksin Nusantara ini, tentu saja adanya nama mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di dalamnya. Vaksin itu disebut sudah memasuki serangkaian tahap uji klinis fase dua.

Tatkala mendampingi kunjungan kerja anggota

Komisi IX DPR di RSUP dr Kariadi Semarang, Selasa (16/2), Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa Vaksin Nusantara bersifat personal dan efektif untuk segala usia, mulai dari anak-anak hingga di atas 60 tahun, termasuk bisa digunakan untuk semua penyakit penyerta (komorbid).

Keinginan untuk bisa memiliki dan memproduksi vaksin di dalam negeri, sebenarnya juga menjadi komitmen dari Presiden Joko Widodo.

Guna mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia, pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 3 September 2020 telah membentuk Tim Pengembangan Vaksin COVID-19.

Tim inilah yang bertugas mengembangkan Vaksin COVID-19 produksi dalam negeri yang diberi nama Vaksin Merah Putih. Vaksin produksi sendiri itu, tujuannya untuk menciptakan kemandirian pemenuhan kebutuhan vaksin COVID-19 ke depan.

Saling respons

Sejauh ini, untuk Vaksin Merah Putih, perkembangannya bisa disebut on the track, karena proses uji pra-klinis dan menuju uji klinis fase 1 sedang dan terus berlangsung.

Justru, Vaksin Nusantara yang kini memantik polemik, setelah adanya pernyataan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang intinya masih ada proses yang mesti dilengkapi dan diperbaiki serta disempurnakan oleh tim peneliti dan penemunya.

Kepala BPOM Penny Lukito dalam pernyataan-pernyataan media yang dilansir media massa pada Rabu (14/4) 2021, di antaranya menyatakan komponen utama pembuatan Vaksin Nusantara diimpor dari AS, di antaranya antigen, GMCSF, medium pembuatan sel dan alat-alat untuk persiapan pembuatannya.

Ada juga narasi tim peneliti Vaksin Nusantara tidak melakukan uji praklinis terlebih dahulu pada hewan sebelum kepada manusia dan beberapa lainnya.

Namun, dari pihak Terawan, memberikan respons balik. Ia bahkan menegaskan Vaksin Nusantara sangat aman digunakan untuk vaksinasi anti-COVID-19 itu.

Melalui kanal YouTube DPR RI, Rabu (10/3) saat Rapat Kerja bersama Komisi IX, ia menegaskan Vaksin Nusantara -- berbasis sel dendritik -- yang digagasnya itu aman digunakan, bahkan untuk warga yang memiliki penyakit penyerta.

Sementara, berdasarkan informasi yang dihimpun,

Vaksin Merah Putih dikembangkan menggunakan isolat virus COVID-19 yang bertransmisi di Indonesia, dengan platform sub-unit protein rekombinan.

Tanggapan lain dari Terawan atas pernyataan BPOM, uji klinis pada hewan terhadap Vaksin Nusantara sudah dilakukan di AS, yakni di AIVITA Biomedical. Bahkan, hasil uji klinik mengenai vaksin itu aman dan efikasinya oleh pihak ketiga di AS sudah dikerjakan.

Jalan tengah

Polemik soal Vaksin Nusantara itu, bila diurai akan kian panjang, terlebih kini sudah masuk dalam area yang melibatkan kalangan non-kesehatan.

Pada Sabtu (17/4) ini, muncul suasana seperti dukung-mendukung di antara dua kelompok yang memihak ke BPOM ataupun ke kubu Terawan, sehingga justru memantik persoalan baru.

Tentu suasana semacam itu sangat jauh dari harapan bahwa Indonesia bisa memberi "iuran" besar -- dengan melahirkan vaksin anti-COVID-19 -- bagi dunia, jika polemik justru menjadi kontraproduktif.

Polemik yang kontraproduktif semacam itu justru akan menguras energi yang tidak perlu. Alih-alih bisa mengerucut pada terjadinya kesepahaman bagaimana secara bersama gotong royong untuk bergandengan tangan guna tujuan Indonesia bisa memproduksi vaksin secara mandiri, sehingga ke depan tidak tergantung pada negara lain, bila tidak ada jembatan mengakhiri ketidakproduktifan itu, maka situasinya akan kian runyam.

Ahli kesehatan dr Andreas Harry Lilisantoso, SpS (K) yang juga anggota "International Advance Research" Asosiasi Alzheimer Internasional (AAICAD) dan pegiat sukarelawan COVID-19 memberi saran dilakukannya publikasi ilmiah terbuka, baik nasional dan bahkan internasional atas penelitian vaksin di Indonesia.

Kini, mau tidak mau, dibutuhkan sebuah jalan tengah, sekurangnya dibuka ruang dialog antara parapihak terkait, seperti dari tim Terawan, BPOM, Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan siapa saja yang dinilai punya kapasitas dan kompetensi dalam bidang tersebut.

Salah satunya, adalah dibukanya akses bagi parapihak untuk ikut mengkaji dengan saksama dan terbuka atas penelitian yang sudah dilakukan tim pihak Terawan, yang pada gilirannya bisa mendapatkan hasil yang objektif.

SUKA-DUKA BELAJAR SECARA "ONLINE" SAAT PANDEMI

Setahun lebih pandemi COVID-19 membayangkan kehidupan manusia di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia, khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Akibatnya, hingga saat ini segala sesuatu banyak dilakukan secara digital salah satunya adalah proses belajar mengajar yang kini diterapkan secara daring (online).

Bagi daerah yang memiliki jaringan internet bagus, tentu bukan suatu masalah atau hambatan, hal itu juga berlaku bagi mereka yang telah terbiasa dengan kecanggihan teknologi saat ini.

Lalu bagaimana dengan mereka yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital kemudian dituntut agar selalu beradaptasi setiap hari?

Proses pembelajaran yang dilakukan secara daring di semua satuan pendidikan merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah anak-anak generasi bangsa sehingga tetap aman dari penyebaran COVID-19.

Siswa yang biasanya mengikuti pembelajaran secara formal di sekolah, berhadapan langsung dengan guru, papan tulis menjadi media pembelajaran, kini semua itu terangkum dalam sebuah alat teknologi yang canggih yaitu gawai.

Sebelum adanya pandemi COVID-19, para siswa dilarang untuk membawa telepon pintar di sekolah, sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar, namun kini semua berubah. Para siswa kini justru wajib menggunakan gawai.

Saat ini semua siswa harus bisa menyesuaikan dengan metode pembelajaran baru di tengah pandemi COVID-19.

Selain itu, tentu proses belajar mengajar yang dilakukan di rumah masing-masing juga dinilai kurang efektif salah satunya ketika ada siswa yang tidak memahai atas materi yang disampaikan oleh guru,

maka akan kesulitan bertanya apalagi ketika jaringan terganggu atau "kresek-kresek".

Suka-duka

Marissa Safira Dinanti, salah satu siswi Kelas XI SMAN 1 Kota Baubau, Sultra mengaku selama belajar di rumah, ada senang dan susah. Namun, ia ingin sekali belajar secara langsung atau tatap muka.

"Iya tentu sangat rindu, karena selama belajar daring dari rumah interaksi kita dengan guru sangat kurang. Kita hanya bisa berinteraksi melalui pesan-pesan di 'handphone' seperti di Whatsapp, Google Classroom, tanpa kita bertemu dan bertatap muka secara langsung," katanya.

Dia mengaku rindu dengan teman sekolahnya, apalagi ketika belajar di kelas ada diskusi. Ia bisa berkomunikasi secara langsung untuk bertukar pikiran.

Ia juga merindukan suasana ketika jam istirahat pergi ke kantin lalu bersenda gurau bersama teman-temannya. Bahkan, ia juga merindukan ekspresi sosok guru yang marah namun mengandung maksud untuk mendidik anak-anak ke arah yang lebih baik.

Selama melakukan pembelajaran dari rumah, ia memiliki kisah tersendiri, baik senang maupun susah. Dari sisi senangnya, Marissa bersyukur belajar di rumah karena bisa terhindar dari penularan COVID-19 walaupun tetap menerapkan protokol kesehatan.

Namun, susah, berupa ruang gerak bersama teman-temannya yang terbatas, seperti ketika praktik harus membuat video mandiri di rumah dengan fasilitas yang terbatas.

Apalagi, ketika dirinya sedang belajar daring tiba-tiba listrik mati dan jaringan internet tidak stabil. Tentu hal itu menjadi penghalang dalam proses belajar mengajar, sedangkan materi pembelajaran hanya dikirimkan melalui video.



Ia berharap dan berdoa pandemi COVID-19 segera berakhir agar proses belajar mengajar dapat kembali dilakukan secara tatap muka.

Senada dengan yang dirasakan Marrisa, maka Berliana Shabita Mahzun, siswi Kelas X SMA 4 Kendari bercerita bahwa selama belajar daring di rumah juga memiliki sisi positif dan negatif.

Dari sisi negatifnya, ia merasa sangat bosan ketika belajar dari rumah karena hanya memerhatikan layar kaca gawai bahkan dirinya menjadi kesal karena hanya menjadi pendengar saja.

"Pastinya bosan banget, pada saat belajar yang kami perhatikan cuma layar kaca atau mungkin malah hanya jadi pendengar saja selama proses belajar mengajar berlangsung," katanya.

Ia sangat kesal karena tidak ada interaksi langsung dengan warga sekolah, terutama teman-temannya yang bakal jadi kenangan jika lulus nanti, bilamana proses belajar mengajar terus dilakukan secara daring.

Termasuk baju sekolah yang ia beli, menurutnya, hanya menjadi kawan lemari sampai saat ini.

Berliana yang baru duduk di bangku kelas X mengaku sangat menginginkan mengenakan seragam sekolah yang ia beli, yang menunjukkan bahwa benar-benar telah tamat dari tingkat SMP.

Ia juga mengaku belum bertemu langsung dengan teman-teman kelas termasuk guru-gurunya karena semenjak menjadi siswa di sekolah itu sudah dilakukan pembelajaran secara daring akibat pandemi.

"Dan paling di sisi negatif adalah pembelajaran yang diberikan oleh tenaga pendidik, yakni guru tidak efektif dan optimal, beberapa alasannya seperti jaringan guru maupun murid yang terganggu sehingga beberapa guru hanya memberikan video pembelajaran dari Youtube," katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat siswa merasa lebih susah lagi karena jika ada hal yang tidak dipahami dan ketika menanyakan hal tersebut kepada pengajar dari Youtube harus menunggu lama agar terjawab

"Serta yang lebih tidak kalah pentingnya adalah hampir 20 jam setiap harinya 'gadget' selalu berada di depan mata tanpa lepas sedikitpun, dan hal itu memiliki

dampak buruk dalam hal kesehatan mata," katanya.

Namun dari sisi positif, menurut dia, pembelajaran daring juga menghemat ekonomi karena Kemendikbud juga sudah memberi kuota gratis internet untuk belajar sehingga uang jajannya dapat ia tabung.

Kemudian lebih teratur dalam mengatur waktu seperti jadwal akademik, organisasi, termasuk waktu bersama keluarga, dan waktu luang tentu lebih banyak sehingga ada banyak kreatifitas dan ide juga waktu untuk diri sendiri.

Ia sangat menginginkan mengikuti proses belajar mengajar tatap muka, karena selain dari sisi akademik, ada beberapa hal yang memotivasi ke sekolah seperti mempelajari sifat teman-temannya, memberikan kejutan kepada teman termasuk saat ulang tahun yang bekerjasama dengan guru, dihukum bersama hingga menonton siswa laki-laki dalam lomba sepak bola mini (futsal).

Ke depannya, ia berharap dari segi pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka sehingga para siswa dapat berkreasi, berinovasi, dan berkontribusi besar serta berprestasi sesuai minat dan bakat mereka masing-masing.

Peran guru

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara Asrun Lio mengatakan guru harus inovatif dalam mengajar siswanya di tengah pandemi.

"Guru harus bisa memilih metode dan teknik pembelajaran yang tepat dalam situasi pandemi COVID-19 ini," katanya.

Ia menekankan guru bisa berinovasi dengan menciptakan metode pembelajaran yang nyaman dan tidak menekan para siswa, tetapi materi yang disampaikan bisa dipahami para siswa.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 bisa menjadi momentum meningkatkan standar mutu pelayanan satuan pendidikan sebagai upaya menciptakan generasi bangsa yang unggul.

Guru atau tenaga kependidikan di daerah tersebut juga harus bisa beradaptasi dengan kondisi pembelajaran di tengah pandemi dengan memanfaatkan teknologi digital.

Saat ini, guru ditekankan tidak lagi mengandalkan proses belajar secara tradisional dan konvensional, tetapi proses belajar harus sesuai dengan kondisi.

"Dan kalau sudah memungkinkan kita belajar tatap muka tentu akan berbeda lagi teknik pembelajarannya," katanya.

Proses belajar mengajar dipastikan tidak efektif oleh situasi ini sehingga perlu dilakukan evaluasi evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh para pengawas sekolah, dan juga daerah-daerah yang melakukan evaluasi secara online dan melaporkan ke dinas maupun langsung di pusat.

Berdasarkan evaluasi itu, jika pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka maka akan berdampak secara psikologis terhadap perkembangan anak-anak peserta didik.

"Memang teknologi sudah canggih tetapi peran dari guru itu masih belum bisa tergantikan, masih belum ada acara kita bagaimana menggantikan posisi guru ini, karena guru itu bukan hanya memberikan materi pelajaran tetapi secara psikis bersentuhan langsung dengan anak didik dan lingkungan belajar," kata Asrun.

Meskipun demikian, ia menyampaikan pembelajaran secara daring dilakukan oleh pemerintah guna melindungi para generasi bangsa dari pandemi COVID-19, karena keselamatan dan kesehatan anak itu adalah yang paling utama.

Tentu, jika semua guru telah menjalani vaksinasi COVID-19, maka proses pembelajaran akan dilakukan pada awal ajaran baru pada Juli 2021 mendatang.

Pada gilirannya, dengan kondisi kesehatan yang baik, maka pembelajaran tatap muka, secara bertahap bisa dilakukan, dan duka dalam proses pendidikan bisa diminimalisasi, dan yang terwujud adalah suka, yang diingankan peserta didik.

SESAT PIKIR PENERAPAN PPKM

Mahmuddin Muslim*

Penambahan kasus Covid-19 yang kembali melambung di Indonesia, membuat pemerintah harus segera menerbitkan pelbagai kebijakan guna menekan laju warga yang terpapar. Tentu saja, upaya pemerintah ini patut kita dukung untuk kemaslahatan kita sebagai bangsa. Namun, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, terutama untuk daerah yang tinggi tingkat penularannya, seringkali implementasinya di lapangan “berasa” aneh.

Lihat saja, banyak drama-drama yang membuat kita miris. Acapkali masyarakat mesti “berdebat” dan berbenturan dengan petugas di jalanan. Kejadian-kejadian ini memang bisa diperdebatkan. Misalnya, soal perilaku petugas yang tegas agar masyarakat disiplin. Namun bisa juga petugas pelaksana tidak memahami secara utuh tujuan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat itu secara utuh.

Pandemi Covid-19 sudah lebih setahun menerpa negeri ini. Penerapan protokol kesehatan pun menjadi budaya baru dalam interaksi sosial di masyarakat kita. Karena memang virus ini hanya bisa dikendalikan dengan cara memutus rantai penularannya. Sebagaimana virus lainnya, Covid juga tidak ada obatnya., hanya imunitas tubuh yang bisa membuat kita bertahan, sampai virus menemui batas hidupnya.

PPKM merupakan upaya memutus rantai penularan Covid-19 agar tidak massif, sehingga yang terpapar bisa dirawat oleh rumah sakit dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang mencukupi. Pelayanan kesehatan tidak overload, sehingga tingkat kesembuhan pasien bisa meningkat, dan aktivitas sosial maupun ekonomi bisa kembali berjalan normal.

Memutus rantai penularan, kata kuncinya ada pada testing yang massif. Seseorang yang terpapar Covid-19, bisa diketahui secara pasti setelah melalui serangkaian tes yang umum kita kenal dengan swab antigen dan PCR. Mungkin bagi sebagian masyarakat, melakukan Swab antigen dan PCR bisa dilakukan secara mandiri dengan

mendatangi klinik atau rumah sakit yang menyediakan layanan swab antigen dan Swab PCR (Polymerase Chain Reaction).

Tentu, dengan biaya yang beragam, tetapi hampir semua orang mengeluhkan betapa mahal biaya testing tersebut. Anehnya lagi, klinik dan rumah sakit bisa memberikan harga yang berbeda sesuai waktu terbitnya hasil testing tersebut. Jika ingin hasil cepat, ya.. biaya harganya juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang membutuhkan waktu lama. Padahal pengambilan sampel dalam PCR itu dibawa ke laboratorium dan diperiksa disana.

Seandainya kita bayar mahal, sampel kita akan diperiksa duluan. Langsung masuk laboratorium melewati sampel yang berbiaya murah. Ekspres, kira-kira begitu. Aneh bukan? Terus bagaimana dengan warga yang tidak mampu membayar biaya PCR? Bayangkan biaya PCR paling murah Rp900.000/orang. Jika satu keluarga terdapat 5 orang, tentu itu biaya yang sangat mahal dan pasti tidak terjangkau oleh mereka.

Untuk menyambung hidup saja, masih banyak warga kita yang bisa bertahan hidup sebulan dengan biaya hidup Rp1 juta. Masyarakat yang tidak mampu ini juga sangat rentan terpapar, karena aktivitas sehari-hari banyak berinteraksi dengan banyak orang. Jika demikian, pemutusan rantai penularan akan gagal, karena gagalnya kita dalam melakukan testing secara massif.

Mestinya pemerintah “memaksa” semua klinik/rumah sakit dan laboratorium untuk memberikan harga murah. Caranya ya pemerintah mengambil alih semua biaya operasional laboratorium tersebut agar memberikan layanan pada masyarakat. Dana operasionalisasi semua laboratorium bisa diambil dari penanganan Covid-19. Termasuk dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa dialihkan sementara untuk biaya testing ini. Sehingga pemerintah bisa melakukan testing secara massif pada masyarakat secara gratis.

Tak perlu panik, jika data warga terpapar akan



meningkat tinggi, selama pemerintah telah menyiapkan segala sesuatunya untuk menangani Covid-19 ini. Berbagi pengetahuan pada masyarakat melalui aneka saluran komunikasi akan membantu meringankan kerja-kerja pemerintah. Jika testingnya berjalan massif, maka program-program lain seperti vaksinasi juga bisa berjalan maksimal sehingga herd immunity bisa tercapai.

Jika herd immunity bisa tercapai, maka aktivitas warga bisa berjalan kembali. Sehingga aktivitas ekonomi bisa hidup, dan pemerintah bisa kembali memperoleh pajak dari masyarakat untuk menjalankan program-program pembangunan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Saat ini percuma saja pemerintah memberikan stimulus pada dunia usaha, karena aktivitas ekonomi tidak berjalan. Bantuan pemerintah pada UMKM sangatlah baik, namun tidak akan bermanfaat secara maksimal, karena usaha UMKM tidak berjalan normal karena masih ada pembatasan disana sini.

Demikian pula dunia usaha lainnya. Rata-rata mereka

hanya bertahan saja, sembari mengurangi karyawan atau melakukan penghematan yang lain. Pemerintah jangan berharap dengan dana pemulihan ekonomi nasional akan bisa memperoleh penerimaan negara dari pajak. Bagaimana dunia usaha mau bayar pajak, jika untuk bertahan saja mereka sudah kelabakan.

Sebaiknya pemerintah fokus saja memutus rantai penularan secara massif melalui testing yang massif dan gratis serta melakukan vaksinasi lebih gencar lagi. Jika tidak, maka penularan Covid-19 akan terus seperti roller coaster di tengah kondisi negara lain yang masyarakatnya sudah bebas beraktivitas tanpa pembatasan-pembatasan.

Terbaru, masyarakat Eropa sudah tidak memakai masker lagi, mereka bebas nonton piala Eropa di stadion tanpa pembatasan. Karena mereka mampu melakukan testing dan vaksinasi secara massif. Kita yakin, pemerintah juga mampu melakukan sebagaimana negara-negara Eropa. Semoga...

*) Penulis merupakan Ketua Pimpinan Pusat Baitul Muslimin Indonesia (PP Bamusi)



PPKM DARURAT BUKAN PENJARA KOTA

Mahmuddin Muslim*

Sejak diumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM Darurat tanggal 3 Juli yang lalu, petugas pelaksana di lapangan seperti belum memahami secara utuh implementasi kebijakan PPKM tersebut. Lihat saja, di banyak tempat terjadi adu urat leher antara warga dengan petugas.

Terbaru misalnya, seorang anggota Paspampres pun diperlakukan sangat “sangat” oleh petugas yang berjaga melakukan penyekatan yang lebih mirip screening atau sterilisasi jalanan dan aktivitas warga. Tak heran, sampai-sampai Komandan Paspampres mengomentari ketidak fahaman petugas di lapangan tentang implementasi aturan PPKM. Selain itu, penerbitan kebijakan PPKM juga agak berasa “aneh” jika menilik aturan yang tertuang di dalam PPKM tersebut.

Kita tentu mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam memutus rantai penularan Covid-19 melalui

PPKM Darurat. Karena kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah agar penularan virus ini bisa dikendalikan. Maklumi saja, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang terbatas, kemampuan testing dan tracing yang masih rendah, maka PPKM bisa diharapkan memperlambat penyebaran virus ini. Namun, jika melihat implementasi kebijakan PPKM ini terasa ada salah pemahaman dalam penerapannya.

Penerapan protokol kesehatan mengharuskan kita untuk secara ketat memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, cuci tangan dan membatasi mobilisasi jika memang tidak ada keperluan yang mendesak atau darurat. Kebijakan PPKM harusnya cukup dilaksanakan dengan penutupan perkantoran non esensial dan kritikal saja.

Pemerintah harus tegas saja pada pengelola perkantoran untuk mewajibkan WFH selama PPKM. Jika ada perusahaan/kantor yang nakal, maka cabut

saja izinnnya dan bisa dipidana juga. Jika perkantoran sudah tutup maka tak perlu lagi penyekatan jalanan. Toh jika pemerintah serius mengawasi perkantoran melaksanakan WFH, untuk apalagi karyawan atau pegawai ke kantornya yang membuat mereka harus bersitegang urat leher dengan aparat di jalanan.

Tentu ini juga meringankan tugas para aparat di lapangan. Artinya ketegasan pemerintah dalam menerapkan kewajiban melakukan WFH menjadi kata kunci dan otomatis orang atau kendaraan akan berkurang dengan sendirinya di jalanan.

Kebijakan PPKM juga mewajibkan pusat perbelanjaan tutup dan restoran atau tempat makan di tidak boleh melayani makan di tempat. Sayangnya, pelaksanaannya kebablasan. Tempat makan malah di batasi jam bukanya. Padahal banyak masyarakat terbantu dengan bukanya pedagang makanan, misalnya orang malas belanja ke pasar untuk kebutuhan pokok bisa memanfaatkan pedagang makanan untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga. Tentu pembelian nya take away atau melalui pesan online.

Bahkan, banyak masyarakat yang terpapar Covid-19 melakukan isolasi mandiri sangat terbantu dengan pedagang makanan, pesan online atau take away memudahkan para pejuang isolasi mandiri memenuhi kebutuhan asupan makanan yang bergizi. Aneh rasanya, warung makan malah di “paksa” buka dan tutup sesuai waktu yang ditentukan. Padahal kan cukup berlakukan secara tegas saja tidak boleh makan di tempat, hanya melayani bungkus atau take away.

Para pedagang makanan juga tetap bisa memperoleh keuntungan, para ojek online juga mendapat manfaat dan tentu konsumen tetap bisa memperoleh makanan sesuai selera mereka. Bayangkan saja, kita menghindari berbelanja di pasar agar tidak terjadi kerumunan, namun warung makan juga “dipaksa” tutup, dari mana lagi kita bisa memperoleh makanan?. Apa pemerintah bisa memberikan makanan gratis untuk seluruh masyarakat yang berdiam di rumah?. Jika terlalu banyak, atau apakah bisa pemerintah menjamin makanan para pejuang isolasi mandiri di rumah?.

Jangankan menjamin ketersediaan makanan untuk para pejuang isolasi mandiri di rumah, data berapa banyak sekarang warga yang melakukan isolasi mandiri saja, saya ragu pemerintah punya data yang valid.

Lihat saja, banyak para pejuang isolasi mandiri yang tidak memperoleh obat-obatan yang mestinya dilayani

dengan baik oleh pemerintah. Bahkan untuk membeli obat-obat-obatan yang dibutuhkan dengan biaya sendiri pun, pemerintah masih belum bisa melakukan kontrol pada ketersediaan obat-obatan tersebut yang menjadi langka dan harganya langsung membumbung tinggi.

Kita sadari, mengatasi pandemi ini perlu kerjasama semua pihak, persatuan semua kekuatan bangsa. Namun jangan kita mengatasi sesuatu secara sporadis tanpa kajian yang komprehensif. Jika warga dilarang beraktivitas maka kewajiban negara untuk memenuhi semua kebutuhan pokok warga negara. Jika APBN kita belum memiliki kemampuan tersebut, minimal pemerintah berusaha memenuhi kewajiban konstitusionalnya fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Jika belum sanggup memenuhinya maka kecerdasan dalam menerapkan kebijakan PPKM harus ditinjau ulang.

Masyarakat yang hidup dari sektor informal harus dipikirkan bagaimana mereka tetap memiliki penghasilan untuk kehidupan yang layak, bukannya dikejar-kejar, dibentak bahkan sampai mereka harus berhadapan dengan water canon karena mereka masih beraktivitas. Jika ini dipertontonkan secara terus menerus, akan mengusik rasa keadilan warga negara.

Sudah tidak bisa memberi solusi apapun untuk kehidupan mereka, kok malah tampil dengan wajah “gahar” mengusir, membentak dan adu urat leher antara negara dengan rakyat. Pembatasan kegiatan warga sangat baik untuk memutus rantai penularan, tapi perlu diingat, pembatasan bukan berarti negara berperilaku seperti menjadikan ini penjara kota. Jangan karena kegagalan pemerintah melakukan testing dan tracing dan vaksinasi yang masih jauh dari target herd immunity, semua kesalahan dibebankan pada rakyat. Bahwa masih banyak masyarakat kita tidak disiplin ya itu jadi tanggung jawab kita bersama melakukan transfer knowledge pada mereka.

Menjadi penting juga mengingatkan pemerintah agar bertanggung jawab juga pada hajat hidup orang banyak, minimal selama penerapan PPKM, syukur-syukur bisa melaksanakan kewajiban konstitusional pemerintah memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan tuntunan nilai agama dan budaya bangsa Indonesia.

*) Pelaku Isolasi Mandiri

"BEYOND HELP": PANDEMI COVID-19 DI TANAH AIR

Ilham Bintang*

Kita kini sudah merasakan pengalaman sama dan merata. Setiap pagi buka Grup Whats Apps (WA) -- komunitas apapun--hanya berita duka yang dominan. Tentang tokoh publik, kawan, tetangga, sahabat, bahkan keluarga terdekat yang wafat. Sekurangnya, pemberitahuan terpapar virus Covid-19 sekeluarga, atau satu rumah. Dan, tidak bisa ditampung di rumah sakit, dan tidak bisa mendapatkan obat-obatan. Vaksin saja pun harus bayar kepada BUMN, kalau ingin cepat.

Pengeras suara di komplek sudah sebulan aktif mengumumkan berita duka. Tiap waktu. Semua itu telah terkonfirmasi dalam update data harian Satgas Covid-19 yang diumumkan ke publik.

Dua hari berturut-turut, Senin - Selasa (12-13 Juli) ini saja, data penyebaran virus Covid-19 di Tanah Air menembus angka 40 ribu kasus positif dengan kematian yang juga tinggi. Hari Selasa (13/7) malah sebanyak 47.899 jiwa yang terpapar. Mengantarkan Indonesia dua hari ini menempati posisi tertinggi di dunia. Lihat juga grafis beberapa lembaga dan instansi, yang memperlihatkan kenaikan itu seperti peluru kendali yang melesat di sisi paling kanan grafik.

Itulah tampaknya dampak paling nyata dari penyebaran virus Covid-19 dari berbagai varian baru seperti yang dikemukakan parah ahli. Juga yang "diterisikkan" oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Peringatan itu jelas pesannya agar pemerintah pusat mengendalikannya tidak dengan dengan cara-cara biasa.

Begitu saja pun (rekor tertinggi dunia) bukanlah angka real di Tanah Air. Dari 100 % testing yang menghasilkan jumlah positif itu, 50 % nya testing di DKI. Sisa hasil testing diperoleh dari 33 provinsi yang jumlah penduduknya sekitar 250 juta jiwa.

Mudah- mudahan angka itu bisa ditekan oleh PPKM Darurat yang datanya baru akan kita lihat 17 Juli. Memang benar data-data dua minggu terakhir di Indonesia termasuk yang memecahkan rekor dunia, adalah perolehan sebelum PPKM Darurat yang dimulai 3 Juli lalu.

Kelemahan PPKM Darurat

Penetapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diberlakukan di Jawa - Bali, 3-20 Juli masih mengandung banyak kelemahan. Kita tahu perekonomian Indonesia secara nasional lebih banyak digerakkan oleh sektor informal. Pelaku sektor ini banyak yang berkegiatan sehari -hari hanya untuk merebut hidupnya hanya untuk hari itu saja. Pelaku ini tanpa kantor, lebih banyak bergerak di jalanan.

Miris mengikuti laporan pers yang memperlihatkan, selama PPKM Darurat sektor inilah yang sering secara frontal berhadapan dengan aparat keamanan di berbagai kota. Dari penampakan beberapa video di lokasi kejadian, pedagang kaki lima itulah yang paling menderita, lapak dan gardu atau kiosnya diabrak- abrik petugas tanpa ampun. Sehari-hari golongan pekerja sektor informal ini juga yang mendominasi antrean dan kerumunan di berbagai ruas jalan masuk kota -kota besar. Petugas mencegat mereka yang kebanyakan tidak bisa menunjukkan surat keterangan kerja dari kantor.

Sekedar mengingatkan, definisi pekerja informal menurut Badan Pusat Statistik (BPS) meliputi: (1) berusaha sendiri, (2) berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, (3) pekerja bebas di pertanian, (4) pekerja bebas di non pertanian, dan (5) pekerja keluarga/tak dibayar. BPS mencatat tahun 2020 jumlah golongan pekerja informal itu mencapai 74,04 (56,50 persen) dari jumlah angkatan kerja 137,91 juta.



Sewajarnya pemerintah memberikan perhatian dengan membiayai kebutuhan pokok masyarakat golongan pekerja sektor informal itu selama masa PPKM Darurat. Sesuai dengan amanah Pasal 55 ayat 1 UU No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Bunyi Ayat 1 Pasal 55 itu: "Selama masa karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat".

Dalam banyak aturan yang diterbitkan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi, hampir kita tidak temukan UU no 6/2018 menjadi dasar pertimbangan. Padahal, itulah UU terbaru mengenai kekarantinaan yang ditandatangani Presiden Jokowi. Malah, Ketua BNPB / Satgas Covid 19, Jendral Doni Monardo pernah mengusulkan merevisi Pasal 55 UU itu dengan alasan sulit diaplikasikan. (CNN Indonesia, 18/12/20).

Padahal, pemerintah mau pakai nama atau merek apapun untuk pengendalian pandemi, PSBB, PPKM Mikro, PPKM Pengentalan, dan terbaru PPKM Darurat, tetap substansinya pada pembatasan kegiatan

masyarakat. Itu memang menjadi hak pemerintah sesuai pasal 14 Ayat 1 : " Dalam keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia, Pemerintah Pusat dapat menetapkan Karantina Wilayah di Pintu Masuk".

Dan, oleh sebab itu menjadi kewajiban pemerintah pula untuk mengaplikasikan Pasal 1 Ayat 1 UU yang sama. Apalagi, Presiden Jokowi sendiri merasa iba terhadap kesulitan masyarakat untuk mencari nafkah di masa PPKM Darurat, seperti dikutip Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Selasa (13/7). Kebetulan yang mengomandoi PPKM Darurat Jawa -Bali adalah Luhut Binsar Panjaitan juga. Ayo! Tunggu apalagi. Jangan dibalik lagi. Lantaran Presiden iba pada kehidupan rakyat kecil, lalu buru-buru melonggarkan lagi PPKM yang sudah ketat. Itu jelas akan semakin membawa Indonesia menjadi negara "beyond help" dalam penanganan Covid19. Yang dalam terjemahan orang Betawi :Kagak ketulungan!.

*) Penulis merupakan salah satu deklarator Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)

MENITI PERPANJANGAN PPKM LEVEL 4

Pemerintah pusat akhirnya memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) setelah melihat data perkembangan penyebaran virus Corona.

Pengumuman perpanjangan PPKM disampaikan Presiden Joko Widodo dalam siaran langsung pada Senin (3/8) malam. Pengumuman itu sekaligus menjawab teka-teki di masyarakat mengenai kelangsungan PPKM yang sudah berlangsung berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan.

Apalagi secara khusus, pemerintah telah melaksanakan PPKM darurat pada 3-20 Agustus 2021. Hasilnya, perkembangan kasus harian dinilai masih tinggi dan fluktuatif.

Meski masih tinggi dan fluktuatif, angka harian yang diumumkan kadang turun jauh, tetapi kadang cukup tinggi. Pertambahan dan penurunan angkanya seperti "ngegas" dan "ngerem".

Namun dalam lima hari terakhir, tren angkanya menurun. Pada Rabu (28/7) kasus baru di angka 47.791, Kamis (29/7) sebanyak 43.479, Jumat (30/7) turun menjadi 41.168, Sabtu (31/7) 37.284, Ahad (1/8) menjadi 30.738 dan Senin (2/8) turun lagi menjadi 22.404.

Dengan adanya tambahan tersebut, jumlah warga Indonesia yang terserang virus Corona (COVID-19) sejak pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020 telah mencapai 3.462.800 orang. Sebanyak 2.842.345 di antaranya sembuh, 97.291 meninggal dunia dan pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah-rumah sakit maupun isolasi mandiri (isoman) sebanyak 523.164.

Jumlah penderita terbanyak berasal dari DKI Jakarta (818.764 orang) disusul Jawa Barat (614.137 orang) dan Jawa Tengah (389.339 orang). Sedangkan tambahan kasus pada Senin paling banyak berasal dari Jawa Tengah (3.218 kasus), Jawa Timur (2.489 kasus) dan Jawa Barat (2.341 kasus).

Perbaikan

Dengan mempertimbangkan beberapa indikator

kasus pada pekan ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan PPKM level 4 pada 3-9 Agustus 2021, di beberapa kabupaten kota tertentu.

"Dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai dengan kondisi masing-masing daerah," kata Presiden Jokowi dalam pernyataan melalui kanal Sekretariat Presiden pada Senin malam.

Sebelumnya pemerintah menerapkan PPKM darurat pada 3-20 Juli. Selanjutnya diberlakukan PPKM level 1-4 pada 26 Juli-2 Agustus 2021.

PPKM level 4 yang diberlakukan sejak 26 Juli sampai 2 Agustus 2021 dinilai telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya, baik konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan persentase keterisian tempat tidur (BOR/Bed Occupancy Ratio)

Presiden Jokowi pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan pelaksanaan PPKM.

Pilihan masyarakat dan pemerintah adalah sama, yaitu apakah menghadapi ancaman keselamatan jiwa akibat COVID-19 dan menghadapi ancaman ekonomi kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka kebijakan "gas" dan "rem" harus dilakukan secara dinamis sesuai dengan perkembangan COVID-19 pada hari-hari terakhir. Dalam situasi apapun, kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan (prokes) adalah kunci bagi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat.

COVID-19 adalah tantangan yang harus di atasi bersama. "Melalui usaha dan kerja keras serta pengorbanan dalam menjalani berbagai pembatasan kegiatan ini, Insya Allah kita segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini," ungkap Presiden.

Mulai terkendali

Kalau melihat tren penurunan angka kasus harian dalam lima hari terakhir, upaya pengendalian makin



terlihat hasilnya. Hal itu menumbuhkan semangat dan optimisme bahwa akan keberhasilan pada upaya selanjutnya.

Turunnya kasus harian COVID-19 juga terlihat dari data-data perkembangan pengendalian di Provinsi DKI Jakarta. Dalam beberapa hari terakhir, DKI Jakarta tidak menduduki peringkat pertama, padahal sering menjadu "jawara".

Angka BOR juga turun. BOR di 140 rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 di Jakarta terus turun menjadi 56 persen pada 1 Agustus 2021. Yang terpakai hanya 6.367 tempat tidur atau 56 persen.

Tingkat keterisian tempat tidur di ruang perawatan intensif (ICU) juga terus turun hingga menjadi 1.295 atau 79 persen.

Pencapaian ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, berkat kerja sama semua pihak terutama disiplin dan tanggung jawab masyarakat yang semakin baik.

Sedangkan jumlah tes usap berbasis "Polymerase Chain Reaction" (PCR) selama sepekan terakhir mencapai 148.351 tes atau 15 kali dari syarat Badan Kesehatan Dunia (WHO) minimal 10.645 tes dalam satu pekan. Kontribusi tes PCR di DKI terhadap nasional itu 29,8 persen.

Kasus aktif di DKI Jakarta baik yang dirawat maupun menjalani isolasi menurun 1.966 kasus menjadi 15.884 kasus. Kasus positif bertambah mencapai 2.701 kasus namun ada tren penurunan.

Sedangkan jumlah pasien sembuh bertambah 4.593

kasus sehingga menjadi 789.261 kasus. Untuk kasus meninggal bertambah 74 orang sehingga menjadi 12.209 orang.

Dengan data-data tersebut, tingkat kematian di DKI Jakarta 1,5 persen dan kesembuhan 96,6 persen.

Vaksinasi

Dengan adanya tren penurunan kasus positif serta makin banyak ruang-ruang perawatan di rumah sakit. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempertimbangkan membuka kembali kegiatan masyarakat secara bertahap.

Pertimbangan itu juga setelah melihat realisasi vaksinasi dosis pertama vaksinasi di Ibu Kota yang sudah mencapai lebih 7,5 juta pada 31 Juli 2021.

Unit-unit yang ingin dibuka salah satu syaratnya adalah karyawan harus sudah divaksin COVID-19. Beberapa kegiatan masyarakat, misalnya, untuk transportasi publik sudah dilonggarkan.

Begitu juga pasar-pasar tradisional, warung makan dan lapak-lapak kuliner telah diizinkan dibuka lagi. Syaratnya, pembeli dan pedagang-nya harus sudah divaksin.

Mencermati realisasi vaksinasi lebih dari 7,5 juta di DKI Jakarta, menjadi pertimbangan untuk memungkinkan dilakukan pembukaan aktivitas publik dalam skala lebih luas dalam secara bertahap.

Hal itu sesuai pula dengan usulan dari masyarakat untuk memastikan kegiatan ekonomi berlanjut. Tentunya dengan disiplin menerapkan prokes.

SELAMAT TINGGAL ZONA MERAH

Rumah sakit yang penuh pasien pernah menjadi pemandangan sehari-hari di DKI Jakarta beberapa pekan lalu.

Bukan hanya di dalam ruang perawatan, tetapi selasar dan teras juga penuh orang sakit. Tak sedikit pula yang harus dirawat di tenda-tenda darurat.

Itu terjadi pada Juni hingga akhir Juli lalu. Ketika itu, 140 rumah sakit rujukan pasien korban infeksi virus corona (COVID-19) penuh.

Saat itu, rumah sakit rujukan benar-benar kewalahan menghadapi banyaknya pasien COVID-19. Di luar rumah sakit, lengkingan ambulans membahana siang dan malam menjemput pasien, mengantar ke rumah sakit lain atau mengantar ke peristirahatan terakhir.

Kelelahan pada sopir ambulans pengantar jenazah telah diantisipasi dengan penyiapan truk berkapasitas delapan peti jenazah. Namun itu baru simulasi untuk antisipasi jika keadaan memburuk.

Ternyata benar itu baru simulasi dan tidak pernah dilakukan. Alasannya karena kematian menurun seiring dengan turunnya kasus baru.

Penurunan kasus baru telah secara konsisten terjadi di Ibu Kota dalam beberapa pekan terakhir. Kini tempat perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan pun jauh berkurang.

Begitu juga tempat-tempat isolasi terpusat dan mandiri makin sedikit yang terisi. Mereka adalah orang-orang yang berdasarkan hasil tes terinfeksi COVID-19 kategori orang tanpa gejala (OTG). Kalaupun ada gejala, masih tergolong ringan.

Gelombang kedua

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui kondisi 140 rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta sempat kolaps akibat gelombang kedua COVID-19 sepanjang Juli 2021.

Di awal gelombang dua itulah, kenang Anies, semua

berkejaran dengan penambahan kasus baru.

Hal ini terindikasi dari jumlah yang harus dirawat melebihi batas dibandingkan dengan kapasitas perawatan. Padahal saat itu daya tampung rumah sakit telah ditambah dari semula hanya enam ribu menjadi 11 ribu tempat tidur dengan memanfaatkan sejumlah ruangan rumah sakit yang masih kosong.

Saat itu, meski kapasitas telah ditambah, jumlah pasien yang datang tetap jauh lebih banyak dari fasilitas kesehatan yang tersedia. Pada gelombang kedua, kasus harian di Jakarta sempat menyentuh 14.000 kasus per hari.

Kemudian kasus harian itu stagnan di angka sekitar 12.000 sehari. Sedangkan jumlah kasus aktif di puncak gelombang COVID-19 pada 16 Juli 2021 mencapai 113.000 kasus.

Ini pentingnya menahan kasus baru dan kasus aktif karena kapasitas kesehatan bukan tidak ada batas, jelas ada batasnya. Bila batas itu terlewati, maka kapasitas kesehatan kolaps yang menandakan jumlah yang harus dirawat lebih banyak dari jumlah tempat tidur dan kamar untuk perawatan.

Walau berada di posisi sulit, namun lonjakan kasus COVID-19 gelombang kedua di Jakarta berhasil diredam lewat berbagai kebijakan.

Salah satunya adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang kemudian menjadi PPKM Level 4 setelah adanya penurunan kasus di Jakarta.

Kini beban kapasitas fasilitas kesehatan sudah turun. Keterisian tempat tidur di seluruh rumah sakit rujukan di Jakarta hanya 33 persen saja, sedangkan keterisian tempat tidur di ruang perawatan intensif (ICU) 59 persen.

Karena banyaknya ruang rumah sakit (RS) yang sudah kosong, maka sebagian fasilitas kesehatan itu kini dialihkan untuk pasien non COVID-19.

Penurunan beban rumah sakit sekarang berimbas



COVID-19

#BERSAMAMELAWANCORONA

langsung pada turunnya tingkat kematian akibat COVID-19 karena banyak pasien yang mendapatkan perawatan yang lebih maksimal.

Saat ini jumlah jenazah yang dimakamkan dengan prosedur tetap (protap) COVID-19 berkisar 40-50 orang. Angka ini sudah merosot drastis jika dibandingkan dengan kondisi pada lonjakan gelombang kedua.

Saat itu jumlah pemakaman dengan protap COVID-19 mencapai 400 sehari. Pemakaman

menggunakan tata cara khusus ini dilakukan pada pasien yang telah dinyatakan positif COVID-19 dan kepada pasien meninggal dunia sebelum hasil tes "polymerase chain reaction" (PCR) dikeluarkan.

Sejak pertengahan Juni 2021, angka pemakaman dengan protap COVID-19 naik pesat hingga puncaknya di tanggal 10 Juli 2021. Saat itu, 400 jenazah dimakamkan dengan protokol COVID-19 setiap harinya.

Sedangkan kematian terkonfirmasi COVID-19 yang sudah keluar hasil tesnya sempat mencapai angka 200-

an setiap hari.

Turun

Kerja keras berbagai pihak telah mampu menurunkan laju kasus baru harian secara tajam. Turunnya kasus baru dipengaruhi laju penularan.

Pertambahan kasus baru harian tertinggi terjadi pada 12 Juli 2021 mencapai 14 ribu kasus baru. Tepat sebulan kemudian, pertambahan kasus harian turun secara signifikan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta per Jumat (13/8) tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy ratio/BOR) di rumah sakit rujukan COVID-19 kembali turun. Kini keterisiannya sebesar 33 persen dan keterisian ruang ICU mencapai 59 persen.

Dari total 10.028 tempat tempat tidur isolasi yang disediakan, sekitar 3.000 terisi dan tempat tidur ICU telah terpakai 917 dari total 1.562.

Sementara itu, jumlah kasus aktif yakni yang dirawat

dan diisolasi di Jakarta menurun sebanyak 428 kasus sehingga jumlahnya menjadi 9.453 orang.

Bila dibandingkan pada 16 Juli 2021, jumlah kasus aktif saat itu mencapai 113.137 kasus sehingga menjadi puncak kasus aktif. Sedangkan pertambahan jumlah kasus konfirmasi positif mencapai 1.210 kasus sehingga secara total di Jakarta mencapai 837.897 kasus.

Persentase kasus positif COVID-19 di Ibu Kota menurun menjadi 8,1 persen dengan jumlah orang yang dites usap berbasis PCR selama sepekan terakhir mencapai 116.330 orang. Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan ambang batas idealnya di bawah lima persen.

Adapun jumlah orang yang dites PCR melebihi target sesuai WHO mencapai minimum 10.645 per minggu. Pemprov DKI tampaknya masih mengejar sampai di bawah ambang batas ideal lima persen.

Tes

Apabila dibandingkan dengan kondisi sepekan lalu, yakni pada Sabtu (7/8), persentase kasus positif di DKI mencapai 10,2 persen dengan jumlah orang yang dites PCR selama sepekan mencapai 129.008 orang.

Bila dibandingkan dengan jumlah orang yang dites PCR selama dua pekan itu, terjadi penurunan dari 129.008 orang menjadi 116.330 orang. Saat ini kasus COVID-19 di Jakarta sudah mulai turun sehingga kebutuhan tes juga ikut turun.

Meski jumlah tes turun, namun jumlah tes di Jakarta masih tergolong tinggi, yakni 11 orang per 1.000 penduduk per minggu atau 11 kali lipat dari standar WHO, yakni satu orang di tes per 1.000 penduduk.

Sedangkan jumlah orang yang dites PCR per hari pada Sabtu (14/8) mencapai 18.151 orang atau melebihi jumlah minimum per hari sebanyak 1.500 orang atau per minggu 10.600 orang.

Persentase kasus positif COVID-19 adalah proporsi jumlah orang yang dideteksi positif dibandingkan jumlah orang yang dites. Tingkat positif yang tinggi menjadi indikasi keparahan laju pandemi COVID-19 di suatu wilayah.

Kondisi saat ini jauh berbeda dibandingkan kondisi ketika gelombang kedua kasus COVID-19 dengan

persentase kasus positif mencapai 48 persen. Itu merupakan persentase yang ekstrem.

Zona merah

Dengan turunnya indikator penyebaran dan penularan COVID-19, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, Jakarta sudah keluar dari zona merah setelah sejak satu setengah bulan lalu angka kasus COVID-19 tinggi.

Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang berada di zona merah hanya ada tujuh, kemudian zona oranye ada 349 RT dan 24.011 RT sudah hijau. Jadi, Ibu Kota mulai masuk zona hijau.

Berdasarkan data dari corona.jakarta.go.id, jumlah RT yang masuk dalam kategori zona rawan ada sebanyak 6.006 RT dengan zona merah penularan virus corona (COVID-19) di wilayah DKI Jakarta hanya tinggal tujuh RT.

Data ini untuk periode 10-16 Agustus. Jumlah sebanyak tujuh RT tersebut turun dibanding pada periode sebelumnya, 38 RT.

Suatu wilayah masuk dalam zona merah jika terdapat lebih dari lima rumah dengan konfirmasi kasus positif dalam tujuh hari terakhir.

Untuk zona merah pada periode 10-16 Agustus 2021, ada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Di Jakarta Timur ada empat RT zona merah, yakni RT 006 RW 003 Kelurahan Cibubur. RT 002 RW 001 Kelurahan Kramat Jati, RT 011 RW 005 dan RT 007 RW 003 Kelurahan Susukan.

Di Jakarta Selatan yang masuk dalam kategori zona merah, yakni RT 006 RW 006 dan RT 004 RW 005 Kelurahan Ciganjur serta RT 009 RW 007 Kelurahan Srengseng Sawah.

Mudah-mudahan, kata Riza, semua bisa bersama-sama meningkatkan terus kondisi baik ini.

Kalau kondisi landai ini bisa terus bertahan dalam beberapa pekan mendatang, maka zona hijau bukan lagi terasa jauh.

Kini Ibu Kota bisa diistilahkan sudah sayonara dengan zona merah. Itu sangat bermakna di tengah suasana HUT Ke-76 Kemerdekaan RI.

TETAP WASPADA COVID-19 SAAT PELONGGARAN PPKM

Bambang Soesatyo*

Ketika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai dilonggarkan di tengah pandemi, pelanggaran itu sudah menjadi ajakan kepada semua elemen masyarakat untuk hidup berdampingan dengan Virus Corona (SARS-CoV-2). Namun, ajakan itu juga sekaligus menjadi peringatan bagi semua orang untuk tetap waspada COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes).

Pelonggaran PPKM juga menjadi ajakan untuk mulai melakukan pemulihan bertahap bagi semua aspek kehidupan. Namun, tetap harus diingat bahwa upaya pemulihan bertahap itu dilakukan di tengah pandemi COVID-19 yang belum berkesudahan. Apalagi, para pakar sudah memperkirakan bahwa COVID-19 berpotensi menjadi endemi, atau penyakit yang muncul dan menjadi karakteristik di wilayah tertentu. Karena itu, kewaspadaan untuk melindungi diri dan melindungi segenap anggota keluarga tetap harus menjadi prioritas setiap orang, utamanya saat beraktivitas di ruang publik.

Inisiatif pemerintah melonggarkan PPKM cukup beralasan karena beberapa indikator tentang pandemi COVID-19 di dalam negeri saat ini menunjukkan kecenderungan positif. Katakanlah bahwa periode pandemi paling suram --puncak penularan COVID-19 pada gelombang kedua Juni-Juli 2021 -- sudah dilalui. Selain itu, dengan tetap berupaya meminimalisasi risiko terkecil sekalipun, harus dimunculkan keberanian untuk memulai pemulihan bertahap pada semua aspek kehidupan, setelah hampir dua tahun diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat.

Namun, tetap saja sangat penting untuk membangun kesadaran bersama bahwa pelanggaran PPKM itu mengandung risiko, dan karenanya harus disikapi dengan cerdas dan bijaksana oleh setiap orang. Sebab, jika pelanggaran PPKM itu tidak didukung dan diperkuat oleh konsistensi kepatuhan pada protokol kesehatan,

yang terjadi kemudian adalah bermunculannya kluster-kluster baru dari semua area kegiatan masyarakat, seperti tempat kerja atau kantor, sekolah, pusat belanja hingga rumah ibadah.

Kepatuhan pada prokes saat pelanggaran PPKM bukan saja penting dan strategis, tetapi dia menjadi kata kunci untuk mencegah dan menghindar dari gelombang ketiga penularan COVID-19 di dalam negeri. Artinya, walaupun PPKM dilonggarkan, tidak boleh ada toleransi sedikit pun terhadap pelanggaran prokes. Sekali saja pelanggaran prokes ditoleransi, pelanggaran itu menjadi potensi masalah yang bisa berakibat sangat fatal.

Maka, ihwal kepatuhan pada prokes saat pelanggaran PPKM hendaknya menjadi perhatian dan digarisbawahi oleh semua pemerintah daerah (kabupaten/kota), semua manajemen atau pengelola tempat kerja, pengurus sekolah dan kampus, manajemen operator angkutan umum, manajemen pusat belanja hingga pengurus rumah ibadah.

Ingat bahwa semua elemen masyarakat sudah merasakan langsung pengalaman nyata yang begitu menyakitkan, dan fakta-fakta horor yang mengemuka saat terjadi puncak penularan COVID-19 gelombang kedua pada periode Juni-Juli 2021. Ada kisah pasien yang nyawanya tak tertolong karena keterbatasan jumlah dokter dan tenaga kesehatan (Nakes). Kisah tentang rumah sakit yang dipadati pasien sehingga tidak semua pasien bisa mendapatkan perawatan segera, dan kisah tentang minim dan langkanya obat-obatan. Juga kisah tentang banyaknya rumah sakit yang kehabisan oksigen, hingga pemandangan tumpukan jenazah di sejumlah rumah sakit akibat lonjakan jumlah pasien meninggal.

Bersyukur bahwa puncak penularan gelombang kedua itu sudah dilalui bersama. Semua elemen masyarakat pasti tidak ingin pengalaman menyakitkan pada gelombang kedua itu terulang. Karena itu, harus tumbuh tekad bersama untuk mencegah dan menghindar dari

kemungkinan gelombang ketiga penularan COVID-19 di dalam negeri. Maka, kendati PPKM mulai dilonggarkan, patut disadari bahwa di sepanjang uji coba pelonggaran PPKM itu, semua orang hidup berdampingan dengan virus corona. Jadi, siapa pun tidak boleh ceroboh dan gegabah karena COVID-19 masih menghadirkan ancaman nyata.

Ketika mengumumkan perpanjangan PPKM pada Senin (23/8), Presiden Joko Widodo mengemukakan kebijakan pemerintah tentang perubahan atau pelonggaran PPKM selama periode 24 - 30 Agustus 2021. PPKM pada sejumlah daerah diturunkan dari level 4 ke level 3. Daerah yang tercakup dalam kebijakan pelonggaran PPKM itu meliputi Jabodetabek, Bandung Raya dan Surabaya Raya. Pijakan dari pelonggaran itu tentu saja pada perkembangan data penambahan jumlah pasien rata-rata per hari dan jumlah pasien sembuh yang juga cenderung meningkat.

Pulau Jawa, yang sempat berstatus episentrum COVID-19, mulai melandai. Wilayah level 4 di Jawa yang sebelumnya meliputi 67 kabupaten/kota turun menjadi 51 kabupaten/kota. Sedangkan wilayah level 3 naik dari 59 kabupaten/kota menjadi 67 kabupaten/kota, dan wilayah level 2 naik dari dua kabupaten/kota menjadi 10 kabupaten/kota.

Sejumlah kabupaten/kota di luar Jawa-Bali juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Maka, tambahan kasus baru COVID-19 per harinya pun sudah turun, menyentuh level belasan ribu kasus. Per Kamis (26/8) misalnya, tambahan kasus baru tercatat 16.899. Konsekuensinya, tekanan atau panik pada sektor layanan jasa kesehatan publik sudah jauh berkurang.

Sudah menjadi pemahaman bersama bahwa turun-naiknya tambahan jumlah kasus baru COVID-19 lebih ditentukan oleh perilaku masyarakat dalam menyikapi pandemi sekarang ini. Maka, seberapa besar dampak pelonggaran PPKM menjadi tantangan bagi seluruh



elemen masyarakat. Namun, peran semua pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota pun amatlah strategis dalam kapasitas mereka sebagai regulator.

Selama pelonggaran PPKM itu, pulau Jawa lagi-lagi layak mendapat perhatian ekstra agar kecenderungan positif yang sudah terwujud sekarang tetap terjaga. Perhatian ekstra perlu karena pulau Jawa padat penduduk, dihuni lebih dari 150 juta jiwa. Pelonggaran PPKM akan mendorong masyarakat meningkatkan aktivitas dan mobilitas. Faktor ini hendaknya menjadi perhatian semua Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa.

Jika pemerintah kabupaten/kota tegas dan konsisten menegakkan prokes, dampak atau ekses pelonggaran PPKM tidak akan menimbulkan masalah serius. Ajak masyarakat bekerja sama mencegah dan menghindari dari gelombang tiga penularan COVID-19. Jangan bosan dan lelah untuk mengajak masyarakat mematuhi prokes, dan jangan pula ragu menindak mereka yang melanggar prokes.

Uji coba pelonggaran PPKM menyasar industri berorientasi ekspor, pusat belanja atau mal, restoran hingga rumah ibadah. Pemprov DKI Jakarta pun sudah mengizinkan sekolah tatap muka terbatas mulai Senin, 30 Agustus 2021. Berdasarkan area uji coba pelonggaran PPKM itu, mestinya tidak sulit-sulit amat bagi setiap pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota menjalin koordinasi penegakan prokes dengan semua pihak yang menjalani pelonggaran PPKM itu. [*]

*) Ketua MPR RI/Mahasiswa Program Doktorat Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Universitas Terbuka. (Tulisan ini pernah tayang di situs Antara)

PRODUKTIF SELAMA PTM TERBATAS

Nabigh Shorim Faozan*

Saya adalah seorang siswa yang bersekolah di salah satu boarding school di daerah Bogor. Sekolah saya adalah salah satu sekolah yang telah menjalankan kegiatan Pertemuan Tatap Muka Terbatas (PTMT) sejak awal pandemi. Walaupun kegiatan ini sangat berisiko terjadinya penyebaran virus Covid-19, namun alhamdulillah berjalan lancar.

Pertemuan tatap muka sangat efektif dibanding kegiatan pembelajaran secara online. Karena saya yang langsung merasakan dampak tersebut.

Alasan sekolah saya mengikuti PTM terbatas adalah karena kegiatan belajar yang dilakukan secara online kurang efektif untuk meningkatkan pemahaman keilmuan dan kreatifitas siswa. Disamping itu PTM terbatas membuat komunikasi antara siswa dan guru menjadi lebih baik. Sebab, siswa dan guru bisa bertemu secara langsung, sehingga menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Jadi saya lebih memilih PTM terbatas karena lebih baik dari pada kegiatan belajar secara daring.

Tips sehat selama PTMT

Sebagai seorang siswa yang tinggal di boarding school alias pondok pesantren, sudah sepatutnya saya menjalani program yang bisa membuat tubuh saya sehat dan terhindar dari wabah virus Covid-19. Berikut adalah beberapa tips yang saya jalankan agar tubuh saya sehat dan terhindar dari paparan Covid-19.

Pertama, Menjaga kebersihan area sekolah. Saat mengikuti PTM terbatas, diwajibkan bagi siswa senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekolah

untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Terutama di daerah yang sering menjadi tempat penting seperti toilet, asrama, kamar tidur, ruang kelas, masjid, dan lain-lain. Sehingga selalu terjaga kebersihannya.

Kedua, Memiliki alat-alat pribadi. Saat pandemi seperti saat ini, kita harus mengantisipasi terjadinya penyebaran Covid-19 dengan memiliki alat-alat yang bersifat personal yang digunakan hanya oleh diri sendiri. Seperti peralatan ibadah, sekolah, mandi, makan, piring, gelas dan lain-lain.

Hal ini sangatlah penting, karena benda-benda yang ada disekitar kita, apalagi milik orang lain, bisa saja mengandung virus hasil dari paparan polusi udara, sentuhan tangan orang lain, dan sebagainya.

Ketiga, Tetap menjalankan pola hidup sehat. Hal ini juga tidak kalah penting sebab bisa saja kita terkena paparan virus Covid-19 bukan karena lingkungan melainkan faktor dari dalam tubuh kita sendiri, seperti pola makan dan pola tidur yang tidak teratur, kurangnya kesadaran atas kebersihan diri, dan lain-lain. Karena itu kita harus menjaga pola hidup sehat dengan cara ; 1). Istirahat yang cukup, 2). Memperhatikan asupan makanan, 3). Minum air putih, 4). Rajin berolahraga, 5). Membiasakan hidup dan sehat.

Dengan menjalankan hal-hal tersebut akhirnya saya merasakan dampak positif dari kegiatan PTM terbatas. Dampak positif yang saya rasakan adalah : Pertama, Meningkatnya semangat belajar. Hal ini karena, sebagai salah satu siswa yang telah merasakan kegiatan PTMT, saya merasa semangat belajar saya meningkat karena. Saya bisa belajar bersama teman-teman di sekolah



dengan gembira.

Kedua, Lebih mudah memahami pelajaran dengan baik. Hal ini karena dapat bertemu langsung dengan guru di sekolah. Sedangkan waktu saat pembelajaran secara online saya merasa sulit memahami pelajaran, gampang mengantuk dan kurang fokus. Dengan PTMT sekarang saya bisa lebih efektif belajar dan lebih paham pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah maupun di pesantren.

Ketiga, lebih mudah berinteraksi terhadap sesama. Hal ini menimbulkan rasa kebersamaan dan solidaritas yang baik bagi setiap siswa yang telah melakukan PTMT. Sebab siswa bisa berinteraksi secara langsung dengan teman maupun guru.

Melalui PTMT, sebagai seorang siswa ada banyak hal-hal produktif yang bisa dilakukan yaitu : pertama, membuat karya-karya ilmiah, seperti menulis novel, cerpen, opini, prakarya dan lain-lain. Hal ini sangat berguna untuk mengembangkan kreativitas siswa, sebab mendukung siswa untuk berfikir lebih maju dan efisien.

Kedua, Mengembangkan bakat dan hobi. Hal ini

sangatlah berarti dan penting, bagi seluruh siswa karena pada masa pandemi seperti saat ini, mengembangkan bakat dan hobi akan membuat siswa lebih bisa memperluas potensi dalam diri siswa, seperti olahraga, qori/qoriah, pidato, musik, dan lain-lain.

Ketiga, Melakukan donasi kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti yang kita tahu bahwa sektor ekonomi banyak mengalami kemunduran akibat pandemi sehingga jumlah orang miskin bertambah. Dengan berdonasi kepada orang-orang yang membutuhkan, akan membuat jiwa seorang siswa lebih memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Hal ini akan berpengaruh baik kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan.

Saya berharap dengan penuh rasa hormat, kegiatan PTM terbatas tetap dilaksanakan dengan penuh kegembiraan dan optimisme. Sehingga akan meningkatkan semangat belajar, menambah imunitas tubuh dan prestasi yang lebih maksimal. Wallahua'lam.

*) Siswa Kelas XI IPA Muhammadiyah Boarding School Ki Bagus Hadikusumo Bogor

OMICRON DATANG, JANGAN CEMAS TAPI SELALU WASPADA

Sebagian pendukung klub Liga Inggris mungkin kecewa karena tak bisa menyaksikan tim mereka bertanding pekan ini akibat jadwal dimundurkan setelah pemain lintas klub dijangkiti COVID-19 yang sepertinya dari varian baru Omicron.

Bukan karena semua anggota skuad dalam klub-klub itu terpapar COVID-19, tapi mereka ada dalam klaster yang beberapa di antaranya terpapar virus penyebab penyakit COVID-19 yang amat menular tersebut sehingga harus menjalani isolasi yang tak bisa ditawarkan di Inggris.

Apa yang terjadi di Liga Inggris adalah satu dari sekian dampak langsung Omicron terhadap banyak aspek kehidupan di mana-mana, termasuk Inggris yang tak ingin mengulangi malapetaka awal pandemi ketika puluhan ribu nyawa manusia direnggut COVID-19.

Omicron memang membuat cemas di mana-mana, apalagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan bahwa varian ini menyebar dalam tingkat yang tak pernah terlihat sebelum ini.

Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut paling sedikit 77 negara sudah terserang varian ini dan mungkin lebih banyak lagi karena banyak negara yang belum mendeteksi varian ini. Indonesia baru menemukannya 16 Desember lalu.

Omicron disebut-sebut 25 sampai 50 persen lebih menular ketimbang varian Delta, sedangkan Delta sendiri 50 persen lebih menular daripada varian Alfa yang ini pun 50 persen lebih menular dibandingkan virus awal SARS-CoV-2.

Bahkan Omicron bisa menginfeksi orang yang sudah divaksinasi dan mereka yang sebelumnya pernah terjangkit COVID-19.

Para pakar menyebutkan Omicron memperlihatkan

30 mutasi pada bagian protein lonjakan yang menutupi bagian luar virus ini yang menjadi target utama vaksin serta pengobatan seperti terapi antibodi monoklonal di mana protein yang dibuat laboratorium untuk meniru sistem kekebalan tubuh dipakai guna melawan antigen berbahaya.

Lalu, apakah varian baru ini lebih mematikan dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya? Bukti-bukti menunjukkan hal sebaliknya.

Analisis besar pertama yang dirilis Desember ini memperlihatkan bahwa dari kasus-kasus pertama varian ini yang terjadi di Afrika Selatan, varian ini terlihat tak mematikan seperti varian Delta. Gejalanya pun ringan saja.

Jumlah yang dirawat di rumah sakit di Afrika Selatan pun hanya 29 persen dari jumlah pasien yang dirawat akibat varian Delta.

Petunjuk akhir pandemi?

Meskipun demikian, para ahli menyatakan terlalu dini menyimpulkan varian ini tidak ganas karena sebagian besar kasus di Afrika Selatan terjadi pada kalangan muda usia. Lain ceritanya seandainya varian ini menyerang kelompok rentan seperti manula dan mereka yang komorbid.

Data Afrika Selatan itu sendiri sejalan dengan temuan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) di Amerika Serikat yang memastikan kebanyakan kasus pertama Omicron di negeri ini juga menunjukkan gejala ringan.

Karena belum jelas benar, para ilmuwan sampai detik ini terus bekerja keras mengetahui daya tular, tingkat keparahan dan kemampuan varian ini dalam menghindari vaksin.

Tapi konsensus sementara dari berbagai laporan awal

menyebutkan gejalanya ringan dan ini membersihkan harapan bahwa Omicron tidak mematikan seperti varian-varian sebelumnya.

Namun sejumlah pakar seperti spesialis penyakit menular Muge Evik dari Universitas St Andrews di Inggris, menilai asumsi itu terlalu dini karena ditarik dari data yang belum lengkap, apalagi kebanyakan yang tertular di Afrika Selatan adalah kaum muda yang lebih tahan dari COVID-19 ketimbang manula atau kalangan komorbid.

Muge Evik justru mengkhawatirkan skenario ketika varian ini menulari kelompok rentan yang merupakan kelompok yang paling banyak terenggut nyawanya oleh COVID-19.

“Saya kira pertanyaan seputar tingkat keparahan akan menjadi salah satu bagian terakhir yang baru bisa kita uraikan,” kata Muge Evik dalam jurnal Nature. “Ini pula yang terjadi pada Delta.”

Tetap saja, data yang terlihat di Afrika Selatan dan sejumlah negara seperti Inggris dan AS, menunjukkan konsistensi bahwa varian ini tak begitu berbahaya meski memang jauh lebih menular.

Sementara itu sejumlah produsen vaksin COVID-19 mengklaim bahwa vaksin mereka efektif melawan Omicron.

Rangkaian informasi yang dianggap prematur oleh sebagian kalangan tersebut membuat sejumlah pihak beranggapan bahwa varian yang tidak lagi mematikan adalah petunjuk mengenai kemungkinan segera berakhirnya pandemi.

Salah satu di antaranya adalah koran bisnis terkemuka Wall Street Journal yang menyebut ‘mutasi memang terdengar mengerikan, tetapi mutasi bisa membuat patogen menjadi kurang begitu berbahaya.’

Jadikan gaya hidup

Banyak yang berharap Omicron menjadi petunjuk untuk kian dekatnya babak akhir pandemi COVID-19 yang sudah hampir dua tahun melanda dunia.

Tetapi kebanyakan pandemi memang baru musnah dua setengah tahun atau tiga setengah tahun setelah mengharu biru dunia. Sejak pandemi flu Spanyol 1918 sampai pandemi flu babi 2009, patogen-patogen

melewati kurun masa seperti itu.

Virus penyebab pandemi biasanya akan terus bermutasi untuk kemudian menjadi endemik yang lebih mudah dikelola dan tak lagi mengganggu kehidupan sehari-hari. Ini pula yang terjadi pada strain influenza yang menyebabkan pandemi flu 1918.

Para virolog berharap SARS-CoV-2 pun akan seperti flu Spanyol, sambil menunjuk kecenderungan berkurangnya tingkat keberbahayaan virus corona yang bisa terjadi karena vaksin, obat-obatan yang lebih mudah didapatkan, kekebalan tubuh mereka yang pernah tertular, dan tentunya protokol kesehatan.

Technical Head COVID WHO Maria Van Kerkhove sendiri menyebut 2022 sebagai tahun di mana pandemi COVID-19 pupus secara global.

Sedangkan penelitian yang dibuat McKinsey menyatakan COVID segera diumumkan sebagai non pandemi tahun depan. Alasannya, tahun depan tingkat vaksinasi global akan membesar dan obat anti-COVID sudah tersebar luas sehingga mudah didapatkan.

Namun demikian, sedia payung sebelum hujan dengan setia kepada protokol kesehatan adalah tetap yang terbaik.

Negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Vietnam, Korea Selatan dan Jepang bisa menekan kasus COVID-19 serendah-rendahnya di antaranya karena setia kepada protokol kesehatan yang bahkan sudah menjadi gaya hidup jauh sebelum pandemi melanda.

Dalam beberapa hal, masyarakat Indonesia juga sudah akrab dengan sebagian unsur protokol kesehatan karena sudah menjadi bagian kearifan lokal dan bahkan dianjurkan semua keyakinan yang memang memuliakan hidup sehat.

Di antara yang bisa disebut adalah kebiasaan lama mencuci tangan sebelum makan dan menutup mulut saat bersin. Ini ternyata bukan semata etiket, tapi juga bentuk tanggung jawab kepada orang lain agar tak kecipratan percikan bersin.

Kebiasaan baik yang terbukti merupakan pencegahan efektif dalam menangkal COVID-19 itu mesti berlanjut, bahkan menjadi gaya hidup agar orang peduli dan waspada penyakit tanpa khawatir beraktivitas walau pandemi mengintai.

Bisa Transaksi Apa Aja, Dimana Aja, Kapan Aja

**Top Up
Uang Elektronik**



**Beli
Paket Data
& Pulsa**



**Beli Voucher
& Bayar Listrik**



**Bayar
Kartu Kredit**



Transfer



Bayar Tagihan

Download Sekarang di :

